

DOKUMEN METADATA STATISTIK DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2021



BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, guna mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN), data yang disajikan perlu memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Data yang dihasilkan harus memenuhi Standar Data; Data yang dihasilkan harus memiliki Metadata; Data yang dihasilkan harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan Data yang dihasilkan harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Guna memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah pemenuhan metadata atas elemen-elemen data yang terdapat dalam Aplikasi Dataku sebagai Portal Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu, kami menyusun dokumen Metadata Statistik Daerah, yaitu informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Saran dan kritik membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyusunan buku ini, kami ucapkan terimakasih. Kami berharap buku metadata ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak yang membutuhkan dan mendukung penyediaan data yang lebih baik sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Yogyakarta, 2 Agustus 2021
Kepala

TAURINA NUGRAHANI, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19670517 200604 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
1.01 PENDIDIKAN	4
1.02 KESEHATAN	42
1.03 PEKERJAAN UMUM	65
1.04 PERUMAHAN	82
1.05 PENATAAN RUANG	85
1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN	93
1.07 PERHUBUNGAN	95
1.08 LINGKUNGAN HIDUP	112
1.09 PERTANAHAN	129
1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	133
1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	135
1.13 SOSIAL	147
1.14 KETENAGAKERJAAN	156
1.15 KOPERASI DAN UKM	171
1.16 PENANAMAN MODAL	185
1.17 KEBUDAYAAN	193
1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	201
1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	203
1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	207
a. INSPEKTORAT	208
b. BPKA	210
c. Badan Kepegawaian Daerah	226
d. Biro Hukum	241
e. Biro Organisasi	242
f. Satuan Polisi	251
g. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	252

h.	Sekretariat DPRD	252
i.	BPBD	257
1.21	KETAHANAN PANGAN	275
1.22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	285
1.23	STATISTIK	290
1.24	KEARSIPAN	294
1.25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	297
1.26	PERPUSTAKAAN	301
2.01	PERTANIAN	306
2.02	KEHUTANAN	337
2.03	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	343
2.04	PARIWISATA	353
2.05	KELAUTAN DAN PERIKANAN	367
2.06	PERDAGANGAN	385
2.07	INDUSTRI	404
2.08	KETRANSMIGRASIAN	408
3.01	KEISTIMEWAAN	410
9.01	DATA VERTIKAL KANWIL KEMENAG	412
9.03	DATA VERTIKAL BADAN PUSAT STATISTIK	433
9.04	DATA VERTIKAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL	458
9.06	DATA VERTIKAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	469
9.09	DATA VERTIKAL BANK INDONESIA	478
9.11	DATA VERTIKAL OJK DIY	489
9.14	DATA VERTIKAL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH	494
9.16	PERKEBUNAN	526



1.01 PENDIDIKAN

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Rasio Guru Dengan Murid	Persentase antara jumlah guru di sekolah dengan jumlah murid pada suatu jenjang sekolah yang bersangkutan di Wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
1.1	Rasio Jumlah Guru per Murid Pendidikan Dasar per Kelas Rata-Rata	Persentase antara jumlah guru dengan jumlah murid pada tingkat pendidikan dasar per kelas rata-rata di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
1.2	Rasio Guru per Murid Pendidikan Menengah per Kelas Rata-Rata	Persentase antara jumlah guru dengan jumlah murid pada tingkat pendidikan menengah per kelas rata-rata di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
1.3	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SD	Persentase antara Jumlah murid dengan Jumlah guru jenjang sekolah dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
1.4	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMP	Persentase antara jumlah murid dengan jumlah guru jenjang Sekolah Menengah Pertama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
1.5	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMA	Persentase antara jumlah murid dengan jumlah guru jenjang Sekolah Menengah Atas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
1.6	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMK	Persentase antara jumlah murid dengan jumlah guru jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
2.1	APS Usia 7 - 12 Tahun	Proporsi dari penduduk kelompok usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah terhadap penduduk berusia 7-12 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
2.2	APS Usia 13 - 15 Tahun	Proporsi dari penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah terhadap penduduk berusia 13-15 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
2.3	APS Usia 16 - 18 Tahun	Proporsi dari penduduk kelompok usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah terhadap penduduk berusia 16-18 tahun di wilayah DIY	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pada tahun berkenaan.			
2.4	APS di Bawah Usia 7 Tahun	Proporsi dari penduduk kelompok usia di bawah 7 tahun yang sedang bersekolah terhadap penduduk berusia di bawah 7 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3	Jumlah Perguruan Tinggi Agama (PTA)	Perguruan tinggi agama adalah perguruan tinggi agama negeri dan perguruan tinggi agama swasta yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama dan/atau fakultas/jurusan/program studi agama pada perguruan tinggi umum.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.1	Jumlah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN)	Jumlah perguruan tinggi agama islam negeri yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.1.1	Jumlah PTAIN Layak	Jumlah perguruan tinggi agama islam negeri yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.1.2	Jumlah PTAIN Tidak Layak	Jumlah perguruan tinggi agama islam negeri yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.2	Jumlah Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS)	Jumlah perguruan tinggi agama islam yang diselenggarakan oleh badan swasta, yayasan, dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.2.1	Jumlah PTAIS Layak	Jumlah perguruan tinggi agama islam yang diselenggarakan oleh badan swasta, yayasan, dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum dan memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.2.2	Jumlah PTAIS Tidak Layak	Jumlah perguruan tinggi agama islam yang diselenggarakan oleh badan swasta, yayasan, dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum dan belum memenuhi standar	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
3,3	Jumlah Perguruan Tinggi Agama Kristen Protestan (PTAKP)	Jumlah perguruan tinggi agama Kristen Protestan yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.1	Jumlah Perguruan Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (PTAKPN)	Jumlah perguruan tinggi agama kristen protestan negeri yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.1.1	Jumlah PTAKPN Layak	Jumlah perguruan tinggi agama kristen protestan negeri yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama dan memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.1.2	Jumlah PTAKPN Tidak Layak	Jumlah perguruan tinggi agama kristen protestan negeri yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama dan belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.2	Jumlah Perguruan Tinggi Agama Kristen Protestan Swasta (PTAKPS)	Jumlah perguruan tinggi agama kristen protestan yang diselenggarakan oleh badan swasta, yayasan, dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.2.1	Jumlah PTAKPS Layak	Jumlah perguruan tinggi kristen protestan yang diselenggarakan oleh badan swasta, yayasan, dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum dan memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.2.2	Jumlah PTAKPS Tidak Layak	Jumlah perguruan tinggi agama kristen protestan yang diselenggarakan oleh badan swasta, yayasan, dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum dan memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.3	Jumlah Perguruan Tinggi Agama Katolik (PTAK)	Jumlah perguruan tinggi agama katolik yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama di	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
3.3.3.1	Jumlah Perguruan Tinggi Agama Katolik Negeri (PTAKN)	Jumlah perguruan tinggi agama katolik negeri yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.3.1.1	Jumlah PTAKN Layak	Jumlah perguruan tinggi agama katolik negeri yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama dan memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.3.1.2	Jumlah PTAKN Tidak Layak	Jumlah perguruan tinggi agama katolik negeri yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama dan belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.3.2	Jumlah Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta (PTAKS)	Jumlah perguruan tinggi agama katolik yang diselenggarakan oleh badan swasta, yayasan, dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.3.2.1	Jumlah PTAKS Layak	Jumlah perguruan tinggi katolik yang diselenggarakan oleh badan swasta, yayasan, dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum dan memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.3.2.2	Jumlah PTAKS Tidak Layak	Jumlah perguruan tinggi agama katolik yang diselenggarakan oleh badan swasta, yayasan, dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum dan memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.4	Jumlah Perguruan Tinggi Agama Hindu (PTAH)	Jumlah perguruan tinggi agama hindu yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.4.1	Jumlah Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri (PTAHN)	Jumlah perguruan tinggi agama hindu negeri yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
3.3.4.1.1	Jumlah PTAHN Layak	Jumlah perguruan tinggi agama hindu negeri yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama dan memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.4.1.2	Jumlah PTAHN Tidak Layak	Jumlah perguruan tinggi agama hindu negeri yang pengelolaannya dibawah Kementerian Agama dan belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.4.2	Jumlah Perguruan Tinggi Agama Hindu Swasta (PTAHS)	Jumlah perguruan tinggi agama hindu yang diselenggarakan oleh badan swasta, yayasan, dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.4.2.1	Jumlah PTAHS Layak	Jumlah perguruan tinggi hindu yang diselenggarakan oleh badan swasta, yayasan, dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum dan memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.4.2.2	Jumlah PTAHS Tidak Layak	Jumlah perguruan tinggi agama hindu yang diselenggarakan oleh badan swasta, yayasan, dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum dan memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.5	Jumlah Perguruan Tinggi Agama Budha (PTAB)	Jumlah perguruan tinggi agama budha yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.5.1	Jumlah Perguruan Tinggi Agama Budha Negeri (PTABN)	Jumlah perguruan tinggi agama Budha Negeri yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.5.1.1	Jumlah PTABN Layak	Jumlah perguruan tinggi agama budha negeri yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama dan memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
3.3.5.1.2	Jumlah PTABN Tidak Layak	Jumlah perguruan tinggi agama budha negeri yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama dan belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.5.2	Jumlah Perguruan Tinggi Agama Budha Swasta (PTABS)	Jumlah perguruan tinggi agama budha yang diselenggarakan oleh badan swasta, yayasan, dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.5.2.1	Jumlah PTABS Layak	Jumlah perguruan tinggi budha yang diselenggarakan oleh badan swasta, yayasan, dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum dan memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
3.3.5.2.2	Jumlah PTABS Tidak Layak	Jumlah perguruan tinggi agama budha yang diselenggarakan oleh badan swasta, yayasan, dan/atau lembaga keagamaan yang berbentuk badan hukum dan memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
4	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
4.1	APK Jenjang SD/MI/Sederajat	Perbandingan antara jumlah murid SD/MI/ sederajat dengan Jumlah penduduk usia 7-12 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
4.2	APK Jenjang SMP/MTs/Sederajat	Perbandingan antara jumlah murid SMP/MTs/ sederajat dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
4.3	APK Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C	Perbandingan antara jumlah murid SMA/SMK/MA/ sederajat dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
5	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari			Dinas Pendidikan,

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.			Pemuda, dan Olahraga
5.1	APM Jenjang SD/MI/Paket A	Perbandingan antara jumlah murid SD/MI/paket A usia 7-12 tahun dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
5.2	APM Jenjang SMP/MTs/Paket B	Perbandingan antara jumlah murid SMP/MTs/Paket B usia 13-15 tahun dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
5.3	APM Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C	Perbandingan antara jumlah murid SMA/SMK/MA/paket C usia 16-18 tahun dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6	Jumlah Sekolah	Jumlah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1	Jumlah Sekolah	Jumlah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.1	Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK)	Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/ sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.1.1	Jumlah TK Negeri	Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/ sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/ instansi pemerintah lain di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.1.1.1	Jumlah TK Negeri Layak	Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/ Sederajat yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/ instansi pemerintah lain yang memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.1.1.2	Jumlah TK Negeri Tidak Layak	Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD/ sederajat yang didirikan	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Olahraga
6.1.1.2	Jumlah TK Swasta	Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.1.2.1	Jumlah TK Swasta Layak	Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.1.2.2	Jumlah TK Swasta Tidak Layak	Jumlah tempat pendidikan pra sekolah sebelum SD yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.2	Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB)	Jumlah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.2.1	Jumlah SLB Negeri (SLBN)	Jumlah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.2.1.1	Jumlah SLBN Layak	Jumlah lembaga pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan luar biasa di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.2.1.2	Jumlah SLBN Tidak Layak	Jumlah lembaga pendidikan	Tahunan	Unit	Dinas



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi Pemerintah lain namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan luar biasa di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.2.2	Jumlah SLB Swasta (SLBS)	Jumlah tempat pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.2.2.1	Jumlah SLBS Layak	Jumlah tempat pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.2.2.2	Jumlah SLBS Tidak Layak	Jumlah tempat pendidikan formal yang melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan pra sekolah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.3	Jumlah Sekolah Dasar (SD)	Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan dasar 6 tahun sebagai landasan untuk mempersiapkan siswanya yang dapat ataupun tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, untuk menjadi warga negara yang baik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.3.1	Jumlah SD Negeri (SDN)	Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan,



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		program pendidikan dasar 6 tahun sebagai landasan untuk mempersiapkan siswanya yang dapat ataupun tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, untuk menjadi warga negara yang baik yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi Pemerintah lain di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Pemuda, dan Olahraga
6.1.3.1.1	Jumlah SDN Layak	Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan dasar 6 tahun sebagai landasan untuk mempersiapkan siswanya menjadi warga negara yang baik yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.3.1.2	Jumlah SDN Tidak Layak	Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan dasar 6 tahun sebagai landasan untuk mempersiapkan siswanya menjadi warga negara yang baik yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.3.2	Jumlah SD Swasta	Jumlah lembaga pendidikan Swasta yang menyelenggarakan program pendidikan dasar 6 tahun sebagai landasan untuk mempersiapkan siswanya menjadi warga negara yang baik yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.3.2.1	Jumlah SD Swasta Layak	Jumlah lembaga pendidikan Swasta yang menyelenggarakan program pendidikan dasar 6 tahun sebagai landasan untuk mempersiapkan siswanya menjadi warga negara yang baik yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
6.1.3.2.2	Jumlah SD Swasta Tidak Layak	Jumlah lembaga pendidikan swasta yang menyelenggarakan program pendidikan dasar 6 tahun sebagai landasan untuk mempersiapkan siswanya menjadi warga negara yang baik yang diselenggarakan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.4	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan jenjang pendidikan pertama pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.4.1	Jumlah SMP Negeri (SMPN)	Jumlah lembaga negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan pertama pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat) yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.4.1.1	Jumlah SMPN Layak	Jumlah lembaga negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan pertama pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat) yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.4.1.2	Jumlah SMPN Tidak Layak	Jumlah lembaga Negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan pertama pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat) yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		lembaga/instansi pemerintah lain namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
6.1.4.2	Jumlah SMP Swasta	Jumlah lembaga swasta yang menyelenggarakan jenjang pendidikan pertama pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat) yang didirikan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.4.2.1	Jumlah SMP Swasta Layak	Jumlah lembaga swasta yang menyelenggarakan jenjang pendidikan pertama pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat) yang didirikan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.4.2.2	Jumlah SMP Swasta Tidak Layak	Jumlah lembaga swasta yang menyelenggarakan jenjang pendidikan pertama pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar (atau sederajat) yang didirikan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah pertama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.5	Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan jenjang pendidikan atas pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah Jenjang pertama (atau sederajat) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.5.1	Jumlah SMA Negeri (SMAN)	Jumlah lembaga Negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan atas pada pendidikan formal di	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah jenjang pertama (atau sederajat) yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
6.1.5.1.1	Jumlah SMAN Layak	Jumlah lembaga negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan atas pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah jenjang pertama (atau sederajat) yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain serta memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.5.1.2	Jumlah SMAN Tidak Layak	Jumlah lembaga Negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan atas pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah jenjang pertama (atau sederajat) yang didirikan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga/instansi pemerintah lain namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.5.2	Jumlah SMA Swasta	Jumlah lembaga negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan atas pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah jenjang pertama (atau sederajat) yang didirikan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.5.2.1	Jumlah SMA Swasta Layak	Jumlah lembaga negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan atas pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah jenjang pertama (atau sederajat) yang didirikan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum serta memenuhi standar	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
6.1.5.2.2	Jumlah SMA Swasta Tidak Layak	Jumlah lembaga negeri yang menyelenggarakan jenjang pendidikan atas pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah jenjang pertama (atau sederajat) yang didirikan oleh badan swasta atau yayasan dan/atau lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.6	Jumlah Perguruan Tinggi (PT)	Jumlah lembaga pendidikan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan formal jenjang paling tinggi setelah jenjang SMA/SMK di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.6.1	Jumlah PT Negeri (PTN)	Jumlah lembaga pendidikan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan formal jenjang paling tinggi setelah jenjang SMA/SMK yang diselenggarakan atau dikelola oleh pemerintah, berada dibawah koordinasi Kemendikbud di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.6.1.1	Jumlah PTN Layak	Jumlah lembaga pendidikan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan formal jenjang paling tinggi setelah jenjang SMA/SMK yang diselenggarakan atau dikelola oleh pemerintah, berada dibawah koordinasi Kemendikbud yang sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.6.1.2	Jumlah PTN Tidak Layak	Jumlah lembaga pendidikan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan formal jenjang paling tinggi setelah jenjang SMA/SMK yang diselenggarakan atau dikelola oleh pemerintah, berada dibawah koordinasi Kemendikbud namun belum sesuai dengan standar	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
6.1.6.2	Jumlah PT Swasta (PTS)	Jumlah lembaga pendidikan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan formal jenjang paling tinggi setelah jenjang SMA/SMK yang diselenggarakan atau dikelola oleh lembaga swasta, yayasan atau lembaga lain yang berbadan hukum serta di bawah koordinasi dengan KOPERTIS wilayah V di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.6.2.1	Jumlah PTS Layak	Jumlah lembaga pendidikan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan formal jenjang paling tinggi setelah jenjang SMA/SMK yang diselenggarakan atau dikelola oleh lembaga swasta, yayasan atau lembaga lain yang berbadan hukum serta di bawah koordinasi dengan KOPERTIS wilayah V dan sudah memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.6.2.2	Jumlah PTS Tidak Layak	Jumlah lembaga pendidikan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan formal jenjang paling tinggi setelah jenjang SMA/SMK yang diselenggarakan atau dikelola oleh lembaga swasta, yayasan atau lembaga lain yang berbadan hukum serta di bawah koordinasi dengan KOPERTIS wilayah V namun belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.7	Jumlah Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK)	Jumlah satuan pendidikan di luar sekolah atau pendidikan nonformal yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat lebih mengembangkan diri dan profesi hingga mengasah keterampilan yang terdaftar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.1.8	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Jumlah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		sebagai lanjutan dari SMP/MTs/ sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
6.1.9	Akademi atau Program Diploma	Jumlah jenjang pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi yang terdiri satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu yang difokuskan pada pembentukan keterampilan atau keahlian terapan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6,2	Jumlah Sekolah yang Terakreditasi	Jumlah sekolah yang memenuhi kelayakan program dan satuan pendidikan formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6,3	Persentase SD/MI Terakreditasi Minimal B	Perbandingan jumlah SD/MI dengan akreditasi minimal B dengan jumlah SD/MI secara keseluruhan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6,4	Persentase SMP/MTs Terakreditasi Minimal B	Perbandingan jumlah SMP/MTs dengan akreditasi minimal B dengan jumlah SMP/MTs secara keseluruhan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
6.5	Persentase SMA/MA Terakreditasi Minimal B	perbandingan jumlah SMA/MA dengan akreditasi minimal B dengan jumlah SMA/MA secara keseluruhan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
7	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah ruangan dalam bangunan sekolah, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
7.1	Jumlah Ruang Kelas TK	Jumlah ruangan dalam bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
7.2	Jumlah Ruang Kelas SD	Jumlah ruangan dalam bangunan sekolah SD atau yang sederajat yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
7.3	Jumlah Ruang Kelas SMP	Jumlah ruangan dalam	Tahunan	Buah	Dinas



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		bangunan sekolah SMP atau yang sederajat yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
7.4	Jumlah Ruang Kelas SMA	Jumlah ruangan dalam bangunan sekolah SMA atau yang sederajat yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
7.5	Jumlah Ruang Kelas SMK	Jumlah ruangan dalam bangunan sekolah SMK atau yang sederajat yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
8	Rata-Rata Lama Belajar Siswa per Kelompok Usia	Jumlah tahun belajar Kelompok usia yang diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang hingga tamat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
8.1	15 Tahun Ke Atas	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
9	Angka Putus Sekolah (APTS) per Jenjang Pendidikan	Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun terhadap kelompok umur yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok umur dimaksud.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
9.1	APTS SD/MI	Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, terhadap kelompok umur tersebut yang pernah/sedang bersekolah	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pada kelompok umur dimaksud di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
9.1.1	APTS SD/MI	Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, terhadap kelompok umur tersebut yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok umur dimaksud di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
9.1.2	Jumlah Anak Putus Sekolah SD/MI	Jumlah anak menurut kelompok usia 7-12 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/MI. di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
9.2	APTS SMP/MTS	Proporsi anak menurut kelompok usia 13-15 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTS terhadap kelompok umur tersebut yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok umur dimaksud di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
9.2.1	APTS SMP/MTS	Proporsi anak menurut kelompok usia 13-15 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTS terhadap kelompok umur tersebut yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok umur dimaksud di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
9.2.2	Jumlah Anak Putus Sekolah SMP/MTS	Jumlah anak menurut kelompok usia 13-15 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTS. di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
9.3	APTS SMA/SMK/MA	Proporsi anak menurut kelompok usia 16-18 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA terhadap kelompok umur tersebut yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok umur dimaksud di wilayah DIY	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pada tahun berkenaan.			
9.3.2	Jumlah Anak Putus sekolah SMA/SMK/MA	Jumlah Jumlah anak menurut kelompok usia 16-18 tahun yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10	Jumlah Peserta Didik	jumlah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1	Jumlah Siswa/Mahasiswa	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.1	Jumlah Siswa Taman Kanak-Kanak (TK)	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.1.1	Jumlah Siswa TK Negeri	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.1.2	Jumlah Siswa TK Swasta	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.2	Jumlah Siswa Sekolah Luar Biasa (SLB)	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SLB di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.2.1	Jumlah Siswa SLB Negeri	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SLB Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.2.2	Jumlah Siswa SLB Swasta	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SLB Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.3	Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD)	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.3.1	Jumlah Siswa SD Negeri	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SD Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.3.2	Jumlah Siswa SD Swasta	Jumlah peserta didik yang	Tahunan	Orang	Dinas



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		terdaftar pada jenjang pendidikan SD Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.4	Jumlah Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SMP di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.4.1	Jumlah Siswa SMP Negeri	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SMP Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.4.2	Jumlah Siswa SMP Swasta	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SMP Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.5	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SMA di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.5.1	Jumlah Siswa SMA Negeri	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SMA Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.5.2	Jumlah Siswa SMA Swasta	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SMA Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.6	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SMK di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.6.1	Jumlah Siswa SMK Negeri	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SMK Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.6.2	Jumlah Siswa SMK Swasta	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan SMK Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.7	Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi (PT)	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi ataupun sekolah tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.7.1	Jumlah Mahasiswa PT Negeri (PTN)	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan tinggi negeri yaitu perguruan tinggi negeri ataupun sekolah tinggi negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
10.1.7.2	Jumlah Mahasiswa PT Swasta (PTS)	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada jenjang pendidikan tinggi swasta yaitu perguruan tinggi swasta	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		ataupun sekolah tinggi swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
10.1.8	Jumlah Siswa Lembaga Pendidikan Ketrampilan	Jumlah peserta didik yang terdaftar pada LPK di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
11	Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan	Banyaknya penduduk yang menamatkan pendidikan per jenjang pendidikan tertentu dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
11.1	Angka Kelulusan SD/MI	Angka yang menggambarkan jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
11.1.1	Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI	Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SD/MI sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
11.1.2	Jumlah Peserta Didik Kelas Terakhir SD/MI	Jumlah anak yang duduk di kelas 6 pada jenjang pendidikan SD/MI sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
11.1.3	Persentase Kelulusan Ujian Nasional	Perbandingan jumlah siswa SD/MI sederajat yang lulus ujian nasional dengan jumlah total peserta ujian nasional tingkat SD/MI sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
11.2	Angka Kelulusan SMP/MTS	Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/MTS sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
11.2.1	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs	Jumlah anak yang duduk di kelas 3 pada jenjang pendidikan SMP/MTS sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	angka	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
11.2.2	Jumlah Peserta Didik Kelas Terakhir SMP/MTs	Perbandingan jumlah siswa SMP/MTS sederajat yang lulus ujian nasional dengan jumlah total peserta ujian nasional tingkat SMP/MTS sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
11.2.3	Persentase Kelulusan Ujian Nasional	Perbandingan jumlah siswa SMP/MTS sederajat yang lulus ujian nasional dengan jumlah total peserta ujian nasional	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		tingkat SMP/MTS sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
11.3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	Jumlah anak yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA sederajat sesuai kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
11.3.1	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah anak yang duduk di kelas 3 pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
11.3.2	Jumlah Peserta Didik Kelas Terakhir SMA/SMK/MA	Perbandingan jumlah siswa SMA/SMK/MA sederajat yang lulus ujian nasional dengan jumlah total peserta ujian nasional tingkat SMA/SMK/MA sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
11.3.3	Persentase Kelulusan Ujian Nasional	Perbandingan jumlah siswa SMA/SMK/MA sederajat yang lulus ujian nasional dengan jumlah total peserta ujian nasional tingkat SMA/SMK/MA sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12	Jumlah Guru, Dosen, dan Kepala Sekolah	Jumlah tenaga pengajar (Guru, Dosen dan Kepala Sekolah) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.1	Jumlah Guru Taman Kanak-Kanak (TK)	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.1.1	Jumlah Guru TK Negeri	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.1.2	Jumlah Guru TK Swasta	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.2	Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB)	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.2.1	Jumlah Guru SLB Negeri	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.2.2	Jumlah Guru SLB Swasta	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.3	Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD)	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
12.3.1	Jumlah Guru SDN Negeri	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.3.2	Jumlah Guru SDN Swasta	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SD/MI Sederajat Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.3.3	Rasio Kebutuhan Guru SD	Perbandingan antara jumlah guru pada jenjang SD/MI/ sederajat yang dibutuhkan dengan jumlah guru yang tersedia pada jenjang SD/MI/ sederajat yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.3.4	Rasio Kualifikasi Guru SD	Perbandingan antara jumlah guru pada jenjang SD/MI/ sederajat yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan jumlah guru yang tersedia pada jenjang SD/MI/ sederajat yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.4	Jumlah Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP)	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/ sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.4.1	Jumlah Guru SMP Negeri	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/ sederajat Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.4.2	Jumlah Guru SMP Swasta	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMP/MTS/ sederajat Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.4.3	Rasio Pemenuhan Jumlah Guru SMP yang Diperlukan	Perbandingan antara jumlah guru pada jenjang SMP/MTS/ sederajat yang dibutuhkan dengan jumlah guru yang tersedia pada jenjang SMP/MTS/ sederajat yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.4.4	Rasio Kualifikasi Guru SMP yang Sesuai Kompetensi yang Ditetapkan Secara Nasional	Perbandingan antara jumlah guru pada jenjang SMP/MTS/ sederajat yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan jumlah guru yang tersedia pada jenjang SMP/MTS/ sederajat yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.5	Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMA/MA/ sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.5.1	Jumlah Guru SMA Negeri	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMA/MA/ sederajat negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.5.2	Jumlah Guru SMA Swasta	Jumlah tenaga pengajar pada	Tahunan	Orang	Dinas



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		jenjang SMA/MA Sederajat swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.5.3	Rasio Pemenuhan Jumlah Guru SMA yang Diperlukan	Perbandingan antara jumlah guru pada jenjang SMA/MA/ sederajat yang dibutuhkan dengan jumlah guru yang tersedia pada jenjang SMA/MA/ sederajat yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.5.4	Kualifikasi Guru SMA yang Sesuai Kompetensi yang Ditetapkan Secara Nasional	Perbandingan antara jumlah guru pada jenjang SMA/MA Sederajat yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan jumlah guru yang tersedia pada jenjang SMA/MA Sederajat yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.6	Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMK Kejuruan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.6.1	Jumlah Guru SMK Negeri	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMK Kejuruan Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.6.2	Jumlah Guru SMK Swasta	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang SMK Kejuruan Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.6.3	Rasio Pemenuhan Jumlah Guru SMK yang Diperlukan	Perbandingan antara jumlah guru pada jenjang SMK Kejuruan yang dibutuhkan dengan jumlah guru yang tersedia pada jenjang SMK Kejuruan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.6.4	Kualifikasi Guru SMK yang Sesuai Kompetensi yang Ditetapkan Secara Nasional	Perbandingan antara jumlah guru pada jenjang SMK Kejuruan yang telah tersertifikasi (kualifikasi) dengan jumlah guru yang tersedia pada jenjang SMK Kejuruan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.7	Jumlah Dosen Perguruan Tinggi (PT)	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Perguruan Tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.7.1	Jumlah Dosen PT Negeri	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.7.2	Jumlah Dosen PT Swasta	Jumlah tenaga pengajar pada jenjang Perguruan Tinggi Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
12.8	Jumlah Pendidik LPK	Jumlah tenaga pengajar pada Lembaga Pendidikan Kejuruan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
12.9	Jumlah Guru Tesertifikasi	Jumlah guru yang memiliki kualitas kompetensi dari Kementerian Pendidikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
13	Angka Buta Huruf/Harapan Lama Sekolah	Angka Buta Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
13.1	Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
14	Jumlah Siswa/Mahasiswa Perguruan Agama	Jumlah peserta didik yang tercatat pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang menempuh pendidikan di bidang agama pada perguruan agama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
14.1	Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (IAIN/STAIN/UNIV)	Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Agama Islam ataupun Sekolah Tinggi Agama Islam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
14.1.1	Jumlah Mahasiswa PTAIN	Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri ataupun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
14.1.2	Jumlah Mahasiswa PTAIS	Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta ataupun Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
14.2	Jumlah Mahasiswa PTAKP	Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Agama Kristen Protestan ataupun Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
14.2.1	Jumlah Mahasiswa PTAKPN	Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri ataupun Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
14.2.2	Jumlah Mahasiswa PTAKP Swasta	Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Agama Kristen Protestan Swasta ataupun Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
14.3	Jumlah Mahasiswa PTAK	Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Agama Katolik ataupun Sekolah Tinggi Agama Katolik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
14.3.1	Jumlah Mahasiswa PTAKN	Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Agama Katolik Negeri ataupun Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
14.3.2	Jumlah Mahasiswa PTAKS	Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta ataupun Sekolah Tinggi Agama Katolik Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
14.4	Jumlah Mahasiswa PTAH	Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Agama Hindu ataupun Sekolah Tinggi Agama Hindu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
14.4.1	Jumlah Mahasiswa PTAHN	Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri ataupun Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
14.4.2	Jumlah Mahasiswa PTAHS	Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Agama Hindu Swasta ataupun Sekolah Tinggi Agama Hindu Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
14.5	Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Budha (PTAB)	Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Agama Budha ataupun Sekolah Tinggi Agama Budha di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
14.5.1	Jumlah Mahasiswa PTAB Negeri	Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Agama Budha Negeri ataupun Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri di wilayah DIY pada	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		tahun berkenaan.			
14.5.2	Jumlah Mahasiswa PTAB Swasta	Jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yaitu Perguruan Tinggi Agama Budha Swasta ataupun Sekolah Tinggi Agama Budha Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
15	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perbandingan penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dengan jumlah total penduduk di usia tersebut di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
15.1	Tidak Tamat SD	Jumlah penduduk usia 12 tahun ke atas yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
15.2	SD	Jumlah penduduk usia 12 tahun ke atas yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
15.3	SMP	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
15.4	SMA	Jumlah penduduk usia 18 tahun ke atas yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
15.5	PT	Jumlah penduduk usia 21 tahun ke atas yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
16	Angka Melanjutkan	Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran sekarang terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
16.1	Angka Melanjutkan Jenjang SD/MI ke SMP/MTs	Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SD/MI pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sekarang terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		jenjang SD/MI pada tahun ajaran lalu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
16.1.1	Jumlah Siswa Baru Tingkat I pada Jenjang SMP/MTs	Jumlah siswa yang duduk di kelas pertama jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran baru di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
16.1.2	Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI Tahun Ajaran Sebelumnya	Jumlah total lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
16.2	Angka Melanjutkan Jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sekarang terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran lalu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
16.2.1	Jumlah Siswa Baru Tingkat I pada Jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah siswa yang duduk di kelas pertama jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran baru di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
16.2.2	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs Tahun Ajaran Sebelumnya	Jumlah total lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
16.3	Angka Melanjutkan Jenjang SMA/SMK/MA ke Perguruan Tinggi	Persentase siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran lalu dan duduk sebagai mahasiswa baru di Perguruan Tinggi (Universitas, Akademi, Sekolah Tinggi) pada tahun ajaran sekarang terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran lalu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
16.3.1	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA/SMK/MA Tahun Ajaran Sebelumnya	Jumlah total lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA tahun ajaran sebelumnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
17	Jumlah Siswa Miskin	Jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
17.1	Jenjang SD/MI/Sederajat	Jumlah siswa SD/MI/ sederajat, yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		sesuai dengan kriteria di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
17.2	Jenjang SMP/MTs/Sederajat	Jumlah siswa SMP/MTs/ sederajat, yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
17.3	Jenjang SMA/SMK/MA Sederajat	Jumlah Siswa siswa SMA/SMK/MA sederajat yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya, orang tua miskin atau rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
18	Kualifikasi Guru	Kualifikasi Guru adalah tingkat pendidikan minimal atau tingkat kompetensi minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
19	Jumlah Sekolah yang Memiliki Fasilitas/Laboratorium Komputer dan Internet	Jumlah sekolah yang memiliki fasilitas/laboratorium komputer dan internet sebagai infrastruktur pendukung di dalam lingkungan sekolah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
20	Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Usia yang Bersekolah	Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia yang bersekolah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
20.1	4-6 Tahun (PAUD)	Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia 4-6 yang bersekolah bersekolah pada jenjang PAUD /TK di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
20.2	7-12 Tahun (SD/MI/Sederajat)	Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia 7-12 yang bersekolah bersekolah pada jenjang SD/MI/ sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
20.3	13-15 Tahun (SMP/MTs/Sederajat)	Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia 13-15 yang bersekolah bersekolah pada jenjang SMP/MTs/ sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
20.4	16 - 18 Tahun	Jumlah penduduk	Tahunan	Orang	Dinas



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	(SMA/SMK/MA/Sederajat)	berdasarkan kelompok usia 16–18 yang bersekolah bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
21	Kelengkapan Pemilikan Buku Pelajaran oleh Siswa	Kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa pada jenjang pendidikan tertentu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
21.1	SD/MI/Sederajat	Persentase kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SD/MI yang memiliki buku paket pelajaran dengan jumlah total siswa SD/MI/ sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
21.2	SMP/MTs/Sederajat	Persentase kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SMP/MTs yang memiliki buku paket pelajaran dengan jumlah total siswa SMP/MTs/ sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
21.3	SMA/MA	Persentase kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SMA/MA yang memiliki buku paket pelajaran dengan jumlah total siswa SMA/MA /sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
21.4	SMK	Persentase kelengkapan pemilikan buku pelajaran oleh siswa SMK yang memiliki buku paket pelajaran dengan jumlah total siswa SMK di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
22	Persentase Jumlah siswa dengan Nilai Memuaskan terhadap Uji Sampel Mutu Pendidikan Standar Nasional	Persentase jumlah siswa dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional pada jenjang pendidikan tertentu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
22.1	SD/MI/Sederajat	Persentase jumlah siswa SD/MI dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional dengan jumlah total siswa SD/MI di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
22.2	SMP/MTs/Sederajat	Persentase jumlah siswa SMP/MTs dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional dengan jumlah total siswa SMP/MTs di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
22.3	SMA/MA	Persentase Jumlah siswa SMA/MA dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional dengan jumlah total siswa SMA/MA di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
22.4	SMK	Persentase Jumlah siswa SMK dengan nilai memuaskan terhadap uji sampel mutu pendidikan standar nasional dengan jumlah total siswa SMK di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
23	Kepemilikan Sekolah terhadap Tenaga Kependidikan Non Guru	Jumlah tenaga kependidikan non guru yang di miliki sekolah di jenjang pendidikan tertentu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
23.1	SMP/MTs/Sederajat	Persentase jumlah tenaga kependidikan non guru yang dimiliki sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat terhadap jumlah total tenaga kependidikan di jenjang tersebut di wilayah DIY.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
23.2	SMA/MA	Persentase jumlah tenaga kependidikan non guru yang dimiliki sekolah di jenjang pendidikan SMA/MA Sederajat terhadap jumlah total tenaga kependidikan di jenjang tersebut di wilayah DIY.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
23.3	SMK	Persentase jumlah tenaga kependidikan non guru yang dimiliki sekolah di jenjang pendidikan SMK terhadap jumlah total tenaga kependidikan di jenjang tersebut di wilayah DIY.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
24	Jumlah Lulusan yang Diterima di Dunia Kerja Sesuai dengan Keahliannya	Jumlah lulusan dari sekolah yang diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.		Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
24.1	Jumlah Lulusan SMK yang Diterima di Dunia Kerja	Jumlah lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan yang diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
25	Kesetaraan SD (Program Paket A)	Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur nonformal setara dengan SD/MI.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
25.1	Peserta Paket A	Jumlah peserta ujian kesetaraan yang dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SD sederajat untuk mendapatkan bukti lulus atau ijazah kesetaraan tingkat SD di	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
25.2	Kepemilikan Modul Program Paket A oleh Peserta Didik	Persentase kepemilikan modul program paket A oleh peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
25.3	Jumlah Kelulusan Peserta Didik yang Mengikuti Ujian Kesetaraan	Jumlah kelulusan peserta didik Program Paket A yang mengikuti ujian kesetaraan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
25.4	Rasio Pemenuhan Jumlah Tutor Program Paket A yang Diperlukan	Persentase pemenuhan jumlah tutor Program Paket A yang diperlukan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
25.5	Kualifikasi Tutor Program Paket A yang Sesuai Standar Kompetensi yang Ditetapkan Secara Nasional	Persentase tutor program paket A yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
25.6	Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang Memiliki Sarana dan Prasarana Minimal Sesuai Standar	Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standart di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
25.7	Jumlah Peserta yang Memiliki Sarana Belajar	Jumlah peserta program Paket A yang memiliki sarana belajar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
26	Kesetaraan SMP (Program Paket B)	Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur nonformal setara dengan SMP/MTs.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
26.1	Peserta Paket B	Jumlah Peserta paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMP/MTS di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
26.2	Kepemilikan Modul Program Paket B oleh Peserta Didik	Persentase Kepemilikan modul program paket B oleh peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
26.3	Jumlah Kelulusan Peserta Didik yang Mengikuti Ujian Kesetaraan	Jumlah kelulusan peserta didik Program Paket B yang mengikuti ujian kesetaraan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
26.4	Rasio Pemenuhan Jumlah Tutor Program Paket B yang Diperlukan	Rasio pemenuhan jumlah tutor Program Paket B yang diperlukan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
26.5	Kualifikasi Tutor Program Paket B yang Sesuai Standar Kompetensi yang Ditetapkan Secara Nasional	Persentase tutor program paket B yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
26.6	Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang Memiliki Sarana dan Prasarana Minimal Sesuai Standar	Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar di wilayah DIY pada tahun	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			
26.7	Jumlah Peserta yang Memiliki Sarana Belajar	Jumlah peserta program Paket B yang memiliki sarana belajar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
27	Kesetaraan SMA (Program Paket C)	Program Pendidikan Kesetaraan (Paket) yang memiliki 2 Jurusan program yaitu IPA dan IPS, keduanya adalah program pendidikan non formal yang setara dengan SMA.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
27.1	Peserta Paket C	Jumlah peserta Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah SMA/MA/SMKN di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
27.2	Kepemilikan Modul Program Paket C oleh Peserta Didik	Persentase kepemilikan modul program paket C oleh peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
27.3	Jumlah Kelulusan Peserta Didik yang Mengikuti Ujian Kesetaraan	Jumlah kelulusan peserta didik program paket C yang mengikuti ujian kesetaraan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
27.4	Rasio Pemenuhan Jumlah tutor Program Paket C yang Diperlukan	Rasio pemenuhan jumlah tutor program Paket C yang diperlukan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
27.5	Kualifikasi Tutor Program Paket C yang Sesuai Standar Kompetensi yang Ditetapkan Secara Nasional	Persentase tutor program Paket C yang sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
27.6	Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang Memiliki Sarana dan Prasarana Minimal Sesuai Standar	Jumlah pusat kegiatan belajar masyarakat yang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai standar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
27.7	Jumlah Peserta yang Memiliki Sarana Belajar	Jumlah peserta program paket C yang memiliki sarana belajar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
28	Pendidikan Keterampilan dan Bermata Pencapaian	Pendidikan Keterampilan adalah bimbingan yang diberikan kepada anak agar memiliki kemampuan dalam hal membuat atau menciptakan sesuatu untuk melakukan kegiatan atau hal yang baik dan cermat terhadap sumber-sumber yang ada dilingkungannya menjadi barang-barang kerajinan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
28.1	Jumlah Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi	Jumlah lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang telah melalui proses assesmen yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menjamin	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		bahwa lembaga tersebut menyelenggarakan program menerapkan standar yang ditentukan oleh Kemenaker secara konsisten dan berkelanjutan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
28.2	Kepemilikan Ijin Operasional dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah	Persentase lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang memiliki kepemilikan ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
28.3	Rasio Pemenuhan Jumlah Tenaga Pendidik, Instruktur, atau Penguji Praktek dari Kursus-Kursus/Pelatihan	Persentase pemenuhan jumlah tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek dari kursus-kursus/pelatihan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
28.4	Kualifikasi Tenaga Pendidik, Instruktur, atau Penguji Praktek Kursus-Kursus/Pelatihan/Kelompok Belajar	Persentase tenaga pendidik, instruktur, atau penguji praktek kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar yang memiliki kualifikasi sesuai kompetensi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
28.5	Jumlah Kursus-Kursus/Pelatihan/Kelompok Belajar Usaha/Magang yang Memiliki Sarana dan Prasarana	Jumlah kursus-kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang memiliki sarana dan prasarana minimal di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
29	Pendidikan Taman Kanak-Kanak	Pendidikan Taman Kanak-kanak adalah jenjang pendidikan anak usia dini (usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
29.1	Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun yang Mengikuti Program TK/RA	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terdaftar mengikuti program pendidikan TK/RA di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
29.2	Guru yang Layak Mendidik TK/RA dengan Kualifikasi Sesuai Standar Kompetensi yang Ditetapkan Secara Nasional	Persentase guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
29.3	TK/RA yang Memiliki Sarana dan Prasarana Belajar/Bermain	Persentase TK/RA yang memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain yang layak dan sesuai dengan standar di bandingkan dengan jumlah seluruh TA/RA di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
30	Pendidikan di Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, atau yang Sederajat	Kelompok Bermain adalah merupakan satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia di bawah lima tahun.			
30.1	Jumlah Anak 0-4 Tahun yang Mengikuti Kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, atau Sederajat	Jumlah anak 0-4 tahun yang mengikuti kegiatan Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, atau sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
30.2	Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun yang Belum Terlayani pada Program PAUD Jalur Formal Mengikuti Program PAU	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur formal mengikuti program PAUD di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
31	Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan Luar Biasa adalah praktik mendidik siswa dengan cara yang mengatasi perbedaan dan kebutuhan khusus seorang individu, terutama bagi orang berkebutuhan khusus.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
31.1	Jumlah Sekolah Luar Biasa yang Menyelenggarakan Pendidikan Jenjang SD	Jumlah sekolah yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan layanan dasar yang bisa membantu mendapatkan akses pendidikan pada jenjang SD di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
31.2	Jumlah Sekolah Luar Biasa yang Menyelenggarakan Pendidikan Jenjang SMP	jumlah Sekolah yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan layanan dasar yang bisa membantu mendapatkan akses pendidikan pada jenjang SMP di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
31.3	Jumlah Sekolah Luar Biasa yang Menyelenggarakan Pendidikan Jenjang SMA	jumlah sekolah yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan layanan dasar yang bisa membantu mendapatkan akses pendidikan pada jenjang SMA di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Sekolah	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32	Data Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga dalam beberapa bidang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.1	Persentase Sekolah yang Mengimplementasikan Pendidikan Berkarakter dan Sinergis dengan Kebutuhan Pembangunan	Persentase sekolah yang mengimplementasikan pendidikan berkarakter dan sinergis dengan Kebutuhan pembangunan dibandingkan dengan jumlah seluruh sekolah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.2	Prestasi Cabang Olahraga	Data capaian prestasi cabang	Tahunan	Peringkat	Dinas



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		olahraga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.3	Peningkatan Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda	Jumlah peningkatan sentra pemberdayaan pemuda dibandingkan dengan tahun sebelumnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Sentra	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.4	Persentase Penguatan Organisasi Pemuda dalam Pembinaan/Pemberdayaan Pemuda	Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.5	Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.6	Jumlah Peningkatan Kelompok Pemuda yang Mengembangkan Kewirausahaan	Jumlah penambahan kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaan dibandingkan data tahun sebelumnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.7	Pemenuhan SNP SD/MI	Persentase pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD/MI di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.8	Pemenuhan SNP SMP/MTs	Persentase pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP/MTs di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.9	Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Menengah	Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.10	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.11	Persentase Kinerja Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Dasar	Persentase peningkatan kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.12	Peningkatan Fasilitas Layanan Pemuda dan Olahraga	Persentase peningkatan fasilitas layanan pemuda dan olahraga meliputi sarana, informasi, edukasi, dan apresiasi dengan fokus konten efisiensi pengelolaan sumber daya (energi, air, dan material) dan pelaksanaan pengelolaan sampah di bandingkan tahun yang lalu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.13	Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	Pertambahan jumlah orang yang terlibat pada organisasi kepemudaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya di wilayah DIY pada tahun	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			
32.14	Ketercapaian Wajib Belajar 12 Tahun	Data ketercapaian wajib belajar 12 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.15	Pemuda yang Mendapatkan Layanan Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mendapatkan layanan kepemudaan meliputi penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, serta infrastruktur, dan kemitraan pemuda di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.16	Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Pembelajaran Berbasis Budaya	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.17	Persentase Sekolah Menengah dan Khusus yang Memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.18	Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	Jumlah penambahan anggota pemuda kader aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
32.19	Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju	Persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju dibanding dengan jumlah seluruh sekolah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



1.02 KESEHATAN



No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Sarana Kesehatan	Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi balai pengobatan, puskesmas, rumah sakit, praktek dokter, bidan praktek, apotek, laboratorium dan sarana kesehatan lainnya.			Dinas Kesehatan
1.1	Jumlah Posyandu	Banyaknya Unit Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.2	Jumlah Polindes	Banyaknya Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang didirikan oleh masyarakat atas dasar musyawarah, sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa, untuk memberikan pelayanan KIA-KB serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan bidan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.3	Jumlah Puskesmas	Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.3.1	Jumlah Puskesmas Induk	Banyaknya puskesmas yang cakupan layanannya ada di tingkat kecamatan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.3.2	Jumlah Puskesmas Pembantu	Banyaknya jaringan pelayanan puskesmas yang membantu memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas induk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.3.3	Jumlah Puskesmas Keliling	Banyaknya puskesmas bersifat mobile yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh pelayanan puskesmas induk atau puskesmas pembantu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.3.4	Jumlah Poliklinik	Banyaknya unit pelayanan masyarakat yang bergerak pada bidang kesehatan yang menawarkan fasilitas perawatan kesehatan yang di	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		khususkan untuk perawatan pasien rawat jalan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
1.4	Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Banyaknya institusi pelayanan kesehatan yang berupa rumah sakit dan dimiliki oleh pemerintah daerah kab./kota di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Dinas Kesehatan
1.4.1	Jumlah RSUD Tipe A	Banyaknya Rumah Sakit Umum Daerah bertipe A yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan tertinggi (Rumah Sakit Pusat) yang disebut juga rujukan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat tiga, serta memberikan pelayanan yang lebih lengkap mulai dari yang umum, subspesialis hingga kedokteran spesialis yang dimiliki pemerintah daerah kab./kota di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.4.2	Jumlah RSUD Tipe B	Banyaknya Rumah Sakit Umum Daerah bertipe B yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi setiap rumah sakit di kab./kota tersebut serta memberikan layanan medis spesialis luas dan subspesialis terbatas wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.4.3	Jumlah RSUD Tipe C	Banyaknya Rumah Sakit Umum Daerah bertipe C atau faskes tingkat dua yang memberikan pelayanan hanya kedokteran subspesialis, namun sifatnya juga terbatas, misalnya saja pelayanan penyakit dalam, bedah, kesehatan anak, bidan, dan kandungan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.4.4	Jumlah RSUD Tipe D	Banyaknya Rumah sakit Umum Daerah bertipe D yang hanya sebagai rumah sakit sementara atau transisi. Biasanya, jika pasien yang awalnya melakukan pemeriksaan di puskesmas kemudian dirujuk ke rumah sakit tipe D di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.5	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta	Banyaknya Rumah Sakit Umum yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar, spesialis, hingga sub spesialis yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.5.1	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe A	Banyaknya Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas dan telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan rujukan tertinggi (<i>top referral hospital</i>) atau disebut juga Rumah Sakit Umum Pusat atau	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		RSUP yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
1.5.2	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe B	Banyaknya Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis terbatas sebagai (<i>provincial hospital</i>) yang menampung pelayanan rujukan dari rumah sakit kab./kota yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.5.3	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe C	Banyaknya Rumah Sakit Umum yang mampu memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. Terdapat empat macam pelayanan spesialis yang disediakan yakni, pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan kebidanan dan kandungan yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.5.4	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe D	Banyaknya Rumah Sakit Umum yang bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok. Kemampuan rumah sakit tipe D hanyalah memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Rumah Sakit Umum tipe D juga menampung pelayanan yang berasal dari rujukan puskesmas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.5.5	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta yang Belum Ada Penetapan Kelas	Banyaknya Rumah Sakit Umum yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok yang belum ada penetapan kelas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.6	Jumlah Rumah Sakit (RS) Khusus	Banyaknya Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, atau jenis penyakit di wilayah DIY pada tahun berkenaan,	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.6.1	Jumlah RS Khusus Ibu dan Anak	Banyaknya Rumah Sakit yang memberikan pelayanan khusus untuk kesehatan ibu dan anak di wilayah DIY pada tahun berkenaan,	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.6.2	Jumlah RS Khusus Mata	Banyaknya Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit mata di wilayah DIY	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pada tahun berkenaan.			
1.6.3	Jumlah RS Khusus Otak	Banyaknya Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada Organ Otak di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.6.4	Jumlah RS Khusus Gigi dan Mulut	Banyaknya Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit/kesehatan gigi dan mulut di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.6.5	Jumlah RS Khusus Kanker	Banyaknya Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit Kanker di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.6.6	Jumlah RS Khusus Jantung dan Pembuluh Darah	Banyaknya Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit Jantung dan Pembuluh Darah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.6.7	Jumlah RS Khusus Jiwa	Banyaknya Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit Kejiwaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan..	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.6.8	Jumlah RS Khusus Infeksi	Banyaknya Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit Infeksi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.6.9	Jumlah RS Khusus Paru	Banyaknya Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama padakasu/penyakit Paru Paru di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.6.10	Jumlah RS Khusus THT	Banyaknya Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.6.11	Jumlah RS Khusus Bedah	Banyaknya Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit yang memerlukan tindakan Bedah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.6.12	Jumlah RS Khusus Ketergantungan Obat	Banyaknya Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama terhadap Ketergantungan Obat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.6.13	Jumlah RS Khusus Ginjal	Banyaknya Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada kasus/penyakit Ginjal di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.6.14	Jumlah RS Bersalin	Banyaknya Rumah sakit yang khusus melayani pemeriksaan ibu hamil, ibu yang akan melahirkan dan kesehatan anak di bawah usia lima tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.6.15	Jumlah RS Kusta	Banyaknya Rumah Sakit yang memberikan pelayanan medis pada penderita Penyakit Kusta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.7	Jumlah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)	Banyaknya Rumah Sakit di bawah naungan Kementerian Kesehatan RI	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
1.8	Jumlah Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan	Banyaknya Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.9	Klinik/Praktek Dokter	Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisasi, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan, dan dipimpin oleh seorang tenaga medis di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
1.10	Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa	Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama level kecamatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
2	Jumlah Sarana Industri dan Industri Farmasi				Dinas Kesehatan
2.1	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional	Banyaknya usaha kecil yang bergerak dibidang obat tradisional serta membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
2.2	Jumlah Instalasi Farmasi	Banyaknya unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di sebuah Rumah Sakit di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
2.3	Jumlah PBF (Pedagang Besar Farmasi)	Banyaknya perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Dinas Kesehatan
2.4	Jumlah Perusahaan Produk Alat Kesehatan	Banyaknya perusahaan yang memproduksi produk alat kesehatan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Dinas Kesehatan
2.5	Jumlah Perusahaan Penyalur Alat Kesehatan	Banyaknya perusahaan yang menjual dan mendistribusikan alat kesehatan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
2.5.1	Jumlah perusahaan cabang Penyalur Alat Kesehatan	Banyaknya perusahaan cabang yang menjual dan mendistribusikan alat kesehatan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
2.6	Apotek	Banyaknya tempat dilakukannya	Tahunan	Unit	Dinas

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1027/MENKES/SK/IX/2004) di wilayah DIY pada tahun berkenaan,			Kesehatan
2.7	Toko Obat	Banyaknya sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di wilayah DIY pada tahun berkenaan,	Tahunan	Unit	Dinas Kesehatan
3	Kesehatan Masyarakat				Dinas Kesehatan
3.1	Jumlah Penderita Gangguan Jiwa	Banyaknya orang yang mempunyai masalah kesehatan yang memengaruhi bagaimana seseorang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain secara signifikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
3.2	Jumlah Penderita Gizi Buruk	Banyaknya orang yang memiliki kondisi serius yang terjadi ketika asupan makanan seseorang tidak sesuai dengan jumlah nutrisi yang dibutuhkan. Nutrisi yang didapat bisa terlalu sedikit atau terlalu banyak di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Balita	Dinas Kesehatan
3.3	Jumlah Anak Balita (1-5 Tahun)	Banyaknya anak yang sudah ulang pertama dan belum berulang tahun ke-5 di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Balita	Dinas Kesehatan
3.4	Jumlah Balita Penderita Gizi Kurang	Banyaknya balita yang memiliki kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital (dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Balita	Dinas Kesehatan
3.5	Jumlah Bayi 0-11 Bulan	Banyaknya bayi yang belum berulang tahun pertama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Bayi	Dinas Kesehatan
3.6	Jumlah Bayi 0-28 Hari (Neonatus)	Banyaknya bayi baru lahir yang berusia sampai dengan 28 hari di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Bayi	Dinas Kesehatan
3.7	Jumlah Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori (KEK)	Banyaknya ibu hamil yang memiliki keadaan dimana mengalami KEK (Kekurangan Energi Kalori) malnutrisi yang disebabkan kekurangan satu atau lebih zat gizi makanan yang berlangsung menahun (kronik) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu hamil secara relatif atau absolut di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
3.8	Persentase Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan medis terhadap jumlah total balita gizi buruk yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
3.9	Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4	Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4) merupakan bentuk pelayanan selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal satu kali kontak pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Kali	Dinas Kesehatan
3.10	Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Persentase ibu hamil yang sudah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pelayanan yang dianjurkan terhadap total jumlah ibu hamil di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
3.11	Jumlah Pelayanan Pemantauan Pertumbuhan Anak Balita	Banyaknya anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan total minimal 8 kali pelayanan pemantauan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
3.12	Jumlah Pelayanan kepada Ibu Nifas	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan sesuai standar pada kunjungan nifas pertama di periode 6 jam sampai dengan 2 hari pasca persalinan, pada kunjungan nifas ke 2 di periode 3 hari sampai 7 hari pasca persalinan, pada kunjungan nifas ke 3 di periode 8 hari sampai dengan 28 hari pasca persalinan, dan terakhir pada kunjungan nifas ke 4 di periode 29 sampai 42 hari pasca persalinan pada wilayah DIY.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
3.13	Jumlah Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	Banyaknya neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang mendapatkan penanganan medis di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
3.14	Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	Banyaknya siswa SD/setingkat yang diperiksa kesehatan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah minimal pemeriksaan status gizi (TB,BB), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan dan tajam pendengaran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
3.15	Persentase Penurunan atau Kenaikan Angka Gizi Buruk	Selisih persentase gizi buruk tahun sekarang dengan tahun sebelumnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
3.16	Persentase Anak Berusia 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap	Persentase bayi usia 12-23 bulan yang telah mendapatkan 1 dosis imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 3 dosis imunisasi IPV, dan 1 dosis imunisasi MR di antara 100 anak usia 12-23 bulan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
3.17	Prevalensi Ketidacukupan Gizi (Underweight) pada Anak	Proporsi dari kasus (ketidacukupan gizi (underweight) pada anak) kegagalan bayi untuk mencapai berat badan ideal, yang kemudian juga bisa	Tahunan	%	Dinas Kesehatan



No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, sesuai usianya disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat-zat gizi yang dibutuhkan sesuai usianya) dalam jangka waktu tertentu terhadap keseluruhan populasi anak di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
3.18	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Balita	Proporsi dari kasus stunting (kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan standar anak seusianya) dalam waktu tertentu terhadap keseluruhan populasi anak di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
3.19	Prevalensi Malnutrisi/Wasting (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak pada Usia < 5 Tahun Berdasarkan Tipe	Proporsi anak pada usia kurang dari 5 tahun yang mengalami BB/TB atau BB/PB rendah karena malnutrisi/wasting (bentuk kekurangan gizi yang sangat serius karena sangat meningkatkan risiko kematian dan kesakitan) di antara balita yang diukur BB/TB atau BB/PB di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
3.20	Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil	Proporsi antara kejadian anemia (Anemia yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah atau sel darah merah yang tidak berfungsi di dalam tubuh) pada ibu hamil terhadap jumlah total ibu hamil di DIY.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
3.21	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif	Persentase bayi usia dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (ASI Eksklusif adalah Air Susu Ibu yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan (0–5 bulan 29 hari), tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain kecuali obat, vitamin dan mineral) per 100 bayi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
3.22	Jumlah Kematian Ibu pada Saat Hamil, Melahirkan, dan Nifas	Banyaknya kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Dinas Kesehatan
3.23	Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa	Proporsi penderita HIV dengan hasil pemeriksaan HIV (Human Immunodeficiency Virus) menggunakan 3 reagen rapid test dengan hasil positif terhadap jumlah populasi dewasa di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
3.24	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 Penduduk	Jumlah kasus penyakit oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis (ITB) yang telah dibuktikan secara	Tahunan	Kasus	Dinas Kesehatan

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		bakteriologis (mikroskopis, kultur, atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
3.25	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Jumlah kab./kota yang telah mencapai eliminasi penyakit malaria (zero kasus) di DIY.	Tahunan	Kab./Kota	Dinas Kesehatan
3.26	Banyaknya Jumlah Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Kusta	Jumlah kab./kota yang telah mencapai eliminasi penyakit kusta (zero kasus) di DIY.	Tahunan	Kab./Kota	Dinas Kesehatan
3.27	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Filariasis	Jumlah kab./kota yang telah mencapai eliminasi penyakit filariasis (zero kasus) di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kab./Kota	Dinas Kesehatan
4	Tenaga Kesehatan	Tenaga kesehatan adalah orang-orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan setelah menempuh pendidikan dan pelatihan formal dalam disiplin ilmu tertentu.			
4.1	Dokter Umum	Banyaknya tenaga medis dokter yang diperkenankan untuk melakukan praktis medis tanpa harus spesifik memiliki spesialisasi tertentu dan telah menempuh program pendidikan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktek/STRnya terdaftar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
4.2	Dokter Spesialis	Banyaknya dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu dan telah menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang praktek/STR nya terdaftar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
4.3	Dokter Gigi	Banyaknya profesi dokter gigi (lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan) yang praktek/STRnya terdaftar di wilayah Kab./Kota pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
4.4	Rasio Dokter/Penduduk	Persentase dokter tiap 1.000 penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
4.5	Perawat	Banyaknya seseorang profesional paramedic yang telah menempuh pendidikan formal keperawatan dan mempunyai kemampuan, tanggung jawab, dan kewenangan	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan



No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		melaksanakan pelayanan/asuhan keperawatan pada berbagai jenjang pelayanan keperawatan dan terdaftar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
4.6	Bidan	Banyaknya seorang profesional paramedis yang telah menempuh pendidikan formal kebidanan dan berdomisili/tinggal/praktik/terdaftar di desa/kelurahan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
4.7	Ahli Penyehatan Lingkungan	Banyaknya profesi ahli teknik penyehtan dan lingkungan yang terdaftar dalam ATPI (Asosiasi Tenaga Penyehtan Lingkungan Indonesia) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
4.8	Kefarmasian	Banyaknya profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat dan distribusi obat yang terdaftar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
4.9	Ahli Kesehatan Masyarakat	Banyaknya Profesi ahli dalam bidang ilmu yang mempelajari pencegahan dan pengobatan penyakit pada individu, menjaga dan mempromosikan kesehatan sosial dengan mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan dan metode pencegahan penyakit, kesehatan dalam suatu kawasan, maupun kesehatan di lingkungan kerja yang terdaftar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
4.10	Ahli Gizi	Banyaknya tenaga kesehatan berprofesi khusus, yaitu orang yang mengabdikan diri dalam bidang gizi serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui suatu pendidikan khusus di bidang gizi dan terdaftar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
4.11	Analisis Laboratorium	Banyaknya profesi kesehatan di bidang analisis laboratorium (bekerja di dalam laboratorium untuk memeriksa meneliti bahan-bahan pemeriksaan yang bisa berupa darah, urin, tinja, dahak, kerokan kulit, dan macam-macam cairan tubuh pasien) yang terdaftar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
4.12	Ahli Rontgen	Banyaknya tenaga kesehatan berprofesi mengoperasikan peralatan medis yang berkaitan dengan radiasi seperti rontgen, CT Scan, MRI, dan sebagainya (teknisi radiologi medis) yang terdaftar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
4.15	Bidan Praktek Mandiri	Banyaknya seorang profesional paramedis yang telah menempuh	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pendidikan formal kebidanan dan membuka praktik mandiri layanan ibu dan anak serta terdaftar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
5	Cakupan Komplikasi Kebidanan				
5.1	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Presentase banyaknya ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan tiap 100 sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
5.2	Jumlah Ibu yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan	Banyaknya ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
5.3	Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	Banyaknya seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja (di wilayah DIY) dalam kurun waktu yang sama (pada tahun berkenaan).	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
5.4	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	Banyaknya ibu dengan komplikasi kebidanan, meliputi perdarahan, infeksi, eklampsia, partus macet (persalinan kasip), abortus, dan ruptura uteri (robekan rahim) yang mendapat penanganan terhadap jumlah total tiap 100 ibu dengan komplikasi kebidanan di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
5.5	Jumlah Komplikasi Kebidanan yang Mendapat Penanganan	Banyaknya ibu dengan komplikasi kebidanan, meliputi perdarahan, infeksi, eklampsia, partus macet (persalinan kasip), abortus, dan ruptura uteri (robekan rahim), yang mendapat penanganan medis di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
6	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization				Dinas Kesehatan
6.1	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	Desa/kelurahan UCI (Universal Child Immunization) adalah suatu desa/kelurahan di mana minimal 80% dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	Dinas Kesehatan
7	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit				Dinas Kesehatan
7.1	TBC BTA	Banyaknya pasien TBC BTA (Bakteri Tahan Asam) positif (apabila sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak menunjukkan hasil BTA positif dan pemeriksaan radiologik menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif) di wilayah DIY pada	Tahunan		Dinas Kesehatan

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		tahun berkenaan.			
7.1.1	Jumlah Penderita Baru TBC BTA yang Ditemukan dan Diobati	Banyaknya pasien baru TBC BTA (Bakteri Tahan Asam) positif (apabila sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak menunjukkan hasil BTA positif dan pemeriksaan radiologik menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif) yang ditemukan dan diobati selama satu tahun tiap 100 perkiraan pasien baru TBC BTA positif di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
7.1.2	Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA	Banyaknya pasien baru TBC BTA (Bakteri Tahan Asam) positif (apabila sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak menunjukkan hasil BTA positif dan pemeriksaan radiologik menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
7.2	DBD	Banyaknya kasus penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk pembawa virus dengue (aedes) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Dinas Kesehatan
7.2.1	Jumlah Penderita Baru DBD yang Ditemukan dan Diobati	Banyaknya penderita baru DBD (penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk pembawa virus dengue atau aedes) yang ditemukan dan diobati di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
7.3	Acute Flacid Paraly	Banyaknya kasus Acute Flacid Paraly pada anak yang berusia kurang dari 15 tahun (kejadian dengan kelumpuhan yang sifatnya flaccid (layuh), terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh ruda paksa) yang ditemukan dan diobati di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	kasus	Dinas Kesehatan
7.3.1	Jumlah Penderita Baru Acute Flacid Paraly yang Ditemukan dan Diobati	Banyaknya penderita baru Acute Flacid Paraly (kejadian dengan kelumpuhan yang sifatnya flaccid (layuh), terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh ruda paksa) yang ditemukan dan diobati di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
8	Cakupan Kunjungan Bayi				Dinas Kesehatan
8.1	Cakupan Kunjungan Bayi	Persentase bayi yang baru lahir (berusia sampai 28 hari) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah DIY pada tahun berkenaan tiap 100 bayi lahir di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
8.2	Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan	Banyaknya kunjungan kepada bayi yang baru lahir (berusia sampai 28	Tahunan	Kali	Dinas Kesehatan

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Kesehatan Sesuai Standar	hari) untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
8.3	Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup di Satu Wilayah Kerja Kurun Waktu yang Sama	Banyaknya seluruh bayi yang terlahir dalam keadaan hidup di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
9	Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemi	Banyaknya desa/kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemi yang ditangani oleh kabupaten/kota pada kurun waktu tertentu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	Dinas Kesehatan
10	Jumlah Desa Siaga Aktif	Banyaknya desa siaga yang aktif (desa yang mempunyai pos kesehatan desa (poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana, dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan, dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	Dinas Kesehatan
11	Jumlah Kasus Wabah/Endemi pada Manusia				Dinas Kesehatan
11.1	Demam Berdarah (DHF)	Banyaknya kasus wabah/endemik akibat penyakit yang disebabkan virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk pembawa virus dengue (aedes aegypti dan aedes albopictus) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Dinas Kesehatan
11.2	Hepatitis	Banyaknya kasus wabah/endemik peradangan pada hati atau liver (bisa disebabkan oleh infeksi virus, bisa juga disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain, seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Dinas Kesehatan
11.3	Malaria	Banyaknya kasus wabah/endemik penyakit malaria (penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia dan hewan lain yang disebabkan oleh protozoa parasit (sekelompok mikroorganisme bersel tunggal) dalam tipe plasmodium) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Dinas Kesehatan
11.4	Tuberkulosis	Banyaknya kasus wabah/endemik penyakit paru-paru akibat kuman mycobacterium tuberculosis yang menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan	Tahunan	Kasus	Dinas Kesehatan

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		terkadang mengeluarkan darah di dukung dengan pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang diagnosis lain (rontgen, CTScan, Mantoux, BTA, atau IGRA) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
11.5	AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)	Banyaknya kasus wabah/endemik penyakit AIDS yang merupakan tahapan akhir dari penyakit infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang merupakan sindrom atau kumpulan dari gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah di wilayah DIY.	Tahunan	Kasus	Dinas Kesehatan
11.6	HIV (Human Immunodeficiency Virus)	Banyaknya kasus wabah/endemik penyakit HIV (Human Immunodeficiency Virus, penyakit yang disebabkan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Dinas Kesehatan
11.7	Campak	Banyaknya kasus wabah/endemik penyakit campak (infeksi virus rubeola yang menimbulkan gejala berupa munculnya ruam kemerahan di seluruh tubuh) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Dinas Kesehatan
11.8	Tetanus	Banyaknya kasus wabah/endemik penyakit tetanus (suatu penyakit yang disebabkan oleh racun dari bakteri Clostridium tetani dan dapat menimbulkan kondisi serius seperti kejang otot dan kaku akibat racun yang merusak jalur persarafan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Dinas Kesehatan
11.9	Diare	Banyaknya kasus wabah/endemik penyakit diare (Penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar, dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasite.) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Dinas Kesehatan
12	Pertumbuhan Penduduk				Dinas Kesehatan
12.1	Jumlah Kelahiran Hidup	Banyaknya bayi yang lahir dalam keadaan hidup menunjukkan tanda-tanda kehidupan misalnya menangis, bernafas, jantung berdenyut, atau gerakan otot) tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
12.2	Jumlah Kematian Ibu	Banyaknya kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan



No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
12.2.1	Kabupaten Kulon Progo	Banyaknya kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri di Kab. Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
12.2.2	Kabupaten Bantul	Banyaknya kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri di Kab. Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
12.2.3	Kabupaten Gunungkidul	Banyaknya kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri di Kab. Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
12.2.4	Kabupaten Sleman	Banyaknya kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri di Kab. Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
12.2.5	Kota Yogyakarta	Banyaknya kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri di Kota Yogyakarta.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
12.3	Jumlah Kematian Bayi	Banyaknya kematian kematian bayi (0-11 bulan) atau di bawah satu tahun per 1000 kelahiran. Di wilayah DIY pada tahun berkenaan	Tahunan	Bayi	Dinas Kesehatan
12.3.1	Kabupaten Kulon Progo	Banyaknya kematian kematian bayi	Tahunan	Bayi	Dinas

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		(0-11 bulan) atau di bawah satu tahun per 1000 kelahiran di Kab. Kulon Progo pada tahun berkenaan.			Kesehatan
12.3.2	Kabupaten Bantul	Banyaknya kematian kematian bayi (0-11 bulan) atau di bawah satu tahun per 1000 kelahiran di Kab. Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Bayi	Dinas Kesehatan
12.3.3	Kabupaten Gunungkidul	Banyaknya kematian kematian bayi (0-11 bulan) atau di bawah satu tahun per 1000 kelahiran di Kab. Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Bayi	Dinas Kesehatan
12.3.4	Kabupaten Sleman	Banyaknya kematian kematian bayi (0-11 bulan) atau di bawah satu tahun per 1000 kelahiran di Kab. Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Bayi	Dinas Kesehatan
12.3.5	Kota Yogyakarta	Banyaknya kematian kematian bayi (0-11 bulan) atau di bawah satu tahun per 1000 kelahiran di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Bayi	Dinas Kesehatan
13	Jumlah Kasus Penyakit berdasar Surveilans Terpadu Puskesmas (STP)				Dinas Kesehatan
13.1	Diare Berdarah (Disentri)	Jumlah kasus penyakit disentri (infeksi usus yang menyebabkan penyakit diare berdarah dan disebabkan oleh adanya infeksi bakteri atau parasite shigella/disentri basiler atau entamoeba histolytica/disentri amub)) berdasarkan hasil Survei Terpadu Puskesmas (STP) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
13.2	Tifus	Jumlah kasus penyakit tifus, tipus, atau demam tifoid (penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri salmonella typhii) berdasarkan hasil Survei Terpadu Puskesmas (STP) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
13.3	TB BTA (+)	Banyaknya pasien TBC BTA (Bakteri Tahan Asam) positif (apabila sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak menunjukkan hasil BTA positif dan pemeriksaan radiologik menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif) berdasarkan hasil Survei Terpadu Puskesmas (STP) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
13.4	Kusta MB	Jumlah kasus penyakit Kusta MB, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri mycobacterium leprae (Kondisi ini terutama memengaruhi kulit, mata, hidung, dan saraf perifer. Gejalanya termasuk bercak-bercak berwarna terang atau kemerahan di kulit disertai dengan berkurangnya kemampuan merasa, mati rasa, dan lemas pada tangan dan kaki.), berdasarkan hasil Survei Terpadu Puskesmas (STP) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan



No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
13.5	Pneumonia	Jumlah kasus penyakit pneumonia, yaitu penyakit infeksi yang menyerang paru, sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru (alveolus) meradang dan membengkak (sering juga disebut dengan paru-paru basah, sebab paru bisa saja dipenuhi dengan air atau cairan lender), berdasarkan hasil Survei Terpadu Puskesmas (STP) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
13.6	Sifilis	Jumlah kasus penyakit sifilis atau raja singa, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bakteri treponema pallidum (gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, atau dubur), berdasarkan hasil Survei Terpadu Puskesmas (STP) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
13.7	Gonorrhoe	Jumlah kasus penyakit gonore (gonorrhea), yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri neisseria gonorrhoeae (terjadi pada pria, di saluran kemih pria atau uretra, ataupun pada wanita, di mulut rahim), berdasarkan hasil Survei Terpadu Puskesmas (STP) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
14	Penyakit Tidak Menular/Degeneratif				Dinas Kesehatan
14.1	Hipertensi	Jumlah kasus penyakit Hipertensi atau tekanan darah tinggi (kondisi ketika tekanan darah di 130/80 mmHg atau lebih) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
14.2	Diabetes Melitus	Jumlah kasus penyakit diabetes (penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi yang disebabkan oleh gangguan pada sekresi insulin atau gangguan kerja insulin atau keduanya) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
15	Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan				Dinas Kesehatan
15.1	Jumlah Kepesertaan Berdasarkan Jaminan	Banyaknya kepesertaan berdasarkan jaminan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
15.1.1	BPJS	Banyaknya penduduk yang tercatat menjadi anggota BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
15.1.1.1	Kabupaten Kulon Progo	Banyaknya penduduk yang tercatat menjadi anggota BPJS di Kab. Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
15.1.1.2	Kabupaten Bantul	Banyaknya penduduk yang tercatat menjadi anggota BPJS di Kab. Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
15.1.1.3	Kabupaten Gunungkidul	Banyaknya penduduk yang tercatat	Tahunan	Orang	Dinas



No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		menjadi anggota BPJS di Kab. Gunungkidul pada tahun berkenaan.			Kesehatan
15.1.1.4	Kabupaten Sleman	Banyaknya penduduk yang tercatat menjadi anggota BPJS di Kab. Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
15.1.1.5	Kota Yogyakarta	Banyaknya penduduk yang tercatat menjadi anggota BPJS di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
15.1.2	Jamkesda Kabupaten/Kota	Banyaknya penduduk yang tercatat menjadi anggota program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
15.1.2.1	Kabupaten Kulon Progo	Banyaknya penduduk yang tercatat menjadi anggota program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
15.1.2.2	Kabupaten Bantul	Banyaknya penduduk yang tercatat menjadi anggota program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
15.1.2.3	Kabupaten Gunungkidul	Banyaknya penduduk yang tercatat menjadi anggota program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
15.1.2.4	Kabupaten Sleman	Banyaknya penduduk yang tercatat menjadi anggota program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
15.1.2.5	Kota Yogyakarta	Banyaknya penduduk yang tercatat menjadi anggota program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kesehatan
16	Data Kinerja Dinas Kesehatan				Dinas Kesehatan
16.1	Persentase Rumah Tangga yang Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persentase jumlah rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan jumlah total seluruh rumah tangga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.2	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terfasilitasi untuk Akreditasi	Persentase dari Fasilitasi oleh Dinas Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk pencapaian akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama terhadap jumlah total fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.3	Persentase Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF)	Persentase dari ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap jumlah total ibu bersalin di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan



No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
16.4	Persentase Cakupan Kunjungan Neonatus Pertama (KN 1)	Persentase dari pelayanan kunjungan neonatal pertama pada 6-48 jam setelah lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial dengan menggunakan pendekatan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda) terhadap jumlah total neonatus di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.5	Persentase Cakupan Penjangkauan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	Persentase Pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik SD/ sederajat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah minimal pemeriksaan status gizi (TB dan BB), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan, dan tajam pendengaran terhadap jumlah total siswa SD di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.6	Persentase Puskesmas Mampu Memberikan Layanan Lansia	Persentase puskesmas santun lansia (puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pra-lansia dan lansia yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang lebih menekankan unsur proaktif, kemudahan proses pelayanan, santun sesuai standar pelayanan, dan kerja sama dengan unsur lintas sektor) terhadap jumlah total puskesmas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.8	Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Kecamatan Sehat	Persentase jumlah kecamatan yang memiliki lingkungan sehat, berperilaku sehat, tersedia pelayanan kesehatan yang bermutu, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal bagi penduduk terhadap jumlah seluruh kecamatan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.9	Persentase Rumah Sakit Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan	Persentase jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terhadap jumlah seluruh rumah sakit yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.10	Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan	Persentase Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan yang menerapkan standar kefarmasian dan keamanan pangan terhadap jumlah seluruh Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.11	Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dengan Predikat Purnama dan Mandiri	Persentase desa dan kelurahan siaga aktif dengan predikat purnama dan mandiri terhadap jumlah seluruh kelurahan siaga aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.12	Persentase Rumah Sakit Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan	Persentase rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terhadap jumlah keseluruhan rumah	Tahunan	%	Dinas Kesehatan

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		sakit yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
16.13	Prevelensi Ibu Hamil KEK	Persentase ibu hamil yang memiliki keadaan KEK (kekurangan Energi Kalori) di mana mengalami malnutrisi yang disebabkan kekurangan satu atau lebih zat gizi makanan yang berlangsung menahun (kronik) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu hamil secara relatif atau absolut dibandingkan dengan jumlah seluruh ibu hamil di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.14	Persentase Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan Lengkap (K4)	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga umur kehamilan terhadap jumlah total ibu hamil di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.15	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Persentase pemberian pelayanan kesehatan pada bayi minimal 4 kali, yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, 1 kali pada umur 3-5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB/HiB1-3, Polio 1-4, Campak), pemantauan pertumbuhan, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), pemberian vitamin A pada bayi umur 6-11 bulan, penyuluhan pemberian ASI eksklusif, dan Makanan Pendamping ASI (MP ASI) terhadap jumlah total bayi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.16	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase jumlah balita berusia 0-59 bulan mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit terhadap jumlah total balita berusia 0-59 bulan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.17	Persentase Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Posbindu untuk Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular	Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu untuk deteksi dini penyakit tidak menular terhadap jumlah total desa/kelurahan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.18	Persentase WUS yang Melakukan Deteksi Dini Ca Cervix	Persentase wanita usia subur (usia 30-50 tahun) yang diperiksa ada tidaknya warna bercak putih yang disebut acetowhite epithelium, dengan cara mengamati dengan	Tahunan	%	Dinas Kesehatan

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		menggunakan spekulum, melihat leher rahim yang telah dipulas dengan asam asetat atau asam cuka (3-5%) terhadap jumlah total WUS yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
16.19	Persentase Keberhasilan Pengobatan HIV/AIDS	Persentase penderita HIV/AIDS yang berobat teratur dan sembuh terhadap semua penderita HIV/AIDS yang diobati di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.20	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB	Persentase pasien tuberkulosis semua kasus yang sembuh (ketika hasil pemeriksaan BTA atau tes dahak TBC menunjukkan hasil negative) dan pengobatan lengkap terhadap jumlah total kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.21	Persentase CFR DBD	Persentase kematian/CFR (Case Fatality Rate) yang disebabkan oleh penyakit DBD di antara 100 penderita DBD di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.22	Annual Parasite Incidence (API) Malaria	Jumlah kasus malaria positif (dengan pemeriksaan sediaan darah) di antara 1.000 penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Per Mil	Dinas Kesehatan
16.23	Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase upaya yang dilakukan dalam menanggulangi KLB meliputi penyelidikan epidemiologi, penatalaksanaan penderita, yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, pencegahan, dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat KLB/wabah, penyuluhan kepada masyarakat, dan upaya penanggulangan lainnya dalam waktu 24 jam di antara 100 kejadian KLB di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.24	Persentase Universal Coverage Imunization	Persentase desa/kelurahan UCI (Universal Child Immunization), desa/kelurahan dimana minimal 80% dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap terhadap jumlah seluruh desa/kelurahan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kesehatan
16.25	Jumlah Jenis Pelayanan Bapel Jamkesos	Banyaknya jenis pelayanan di bidang kesehatan yang di berikan oleh BAPELJAMKESOS (Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta) yang bertugas menyelenggarakan kegiatan jaminan kesehatan bagi masyarakat DIY pada	Tahunan	Jenis	Dinas Kesehatan

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		tahun berkenaan.			
16.26	Total Fertility Rate	Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate (TFR). TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita di wilayah DIY pada waktu berkenaan.	Tahunan	Angka	Dinas Kesehatan



1.03 PEKERJAAN UMUM

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Peruntukan Lahan	Upaya penggunaan/pemanfaatan lahan dan pembagian wilayah dalam suatu kawasan untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu, semisal fungsi pemukiman, perdagangan, industri, dll.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
1.1	Luas Lahan Pertambangan dan Penggalian	Luas lahan yang dimanfaatkan untuk fungsi pertambangan dan penggalian hasil tambang dan barang galian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Hektar	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
2	Perijinan	Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
2.1	Jumlah Rekomendasi Teknis Untuk Ijin Pengusaha Pertambangan	Jumlah dokumen rekomendasi teknis untuk ijin yang dikeluarkan untuk hak usaha pertambangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Jumlah Rekomendasi	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
3	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan sampah adalah Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
3.1	Jumlah TPS	Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) dalam sistem pengolahan sampah terpadu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
3.2	Daya Tampung TPS	Jumlah kapasitas tampung sampah pada seluruh TPS di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.3	Jumlah Depo Sampah	Jumlah unit sarana penampungan sampah sangat sementara/transit yang dilengkapi dengan container pengangkut di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.4	Jumlah TPA	Jumlah unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral



No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
3.5	Jumlah TPST	Jumlah unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
3.6	Volume Sampah yang Ditangani	Total volume sampah yang bisa diproses dalam sistem pengolahan sampah terpadu TPA Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton/Hari	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
3.7	Volume Produksi Sampah	Total volume sampah yang timbul dari masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton/Hari	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
3.8	Peningkatan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah peningkatan volume sampah yang dikelola secara regional dengan provinsi lain yang berbatasan wilayah administratif.	tahunan	Ton/Hari	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
4	Prasarana Pengolahan Air Limbah	Prasarana dalam proses penghilangan kontaminan dari air limbah dan limbah rumah tangga, baik limpasan maupun domestik. Hal ini meliputi proses fisika, kimia, dan biologi untuk menghilangkan kontaminan fisik, kimia dan biologis.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
4.1	Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik Secara Terpusat	Jumlah unit Prasarana Pengolah Air Limbah yang berupa Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik Secara Terpusat (yaitu dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
4.2	Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga	Jumlah unit Prasarana Pengolah Air Limbah yang berupa Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan, bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
4.3	Jumlah IPAL Terpusat	Jumlah unit prasarana pengolahan air limbah yang berupa Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat (yaitu bangunan yang digunakan untuk memproses limbah cair domestik yang difungsikan secara komunal) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
4.4	Kapasitas Pengolahan IPAL Terpusat	Kapasitas volume air limbah yang bisa diolah IPAL terpusat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Meter Kubik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
4.5	Jumlah IPLT	Jumlah unit Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (yaitu instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang akan diangkut melalui mobil tinja) yang terpasang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
4.6	Kapasitas Pengolahan IPLT	Kapasitas volume lumpur tinja yang bisa diolah Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Meter Kubik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
5	Panjang Jalan Berdasarkan Material	Pengelompokan jalan berdasarkan kelas jalan dan material yang digunakan dalam proses pembangunan jalan.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
5.1	Jalan Nasional	Jalan nasional adalah jalan yang dikelola oleh Kementerian PUPR yang meliputi 4 kelompok yakni jalan arteri primer, jalan kolektor primer (penghubung antar-ibu kota provinsi), jalan tol (bebas hambatan), dan jalan strategis nasional.	Tahunan		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
5.1.1	Hotmix (Aspal Beton)	Jumlah kilometer badan jalan kelas Jalan Nasional dengan material hotmix yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
5.2	Jalan Provinsi	Jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategi provinsi.	Tahunan		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber



No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Daya Mineral
5.2.1	Hotmix (Aspal Beton)	Jumlah kilometer badan jalan kelas jalan provinsi dengan material hotmix yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
5.2.2	Tanah	Jumlah kilometer badan jalan kelas jalan provinsi dengan material tanah yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
6	Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi	Panjang jalan dan kondisi dari jalan yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
6.1	Jalan Baik	Jumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi baik (jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
6.2	Jalan Sedang	Jumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi sedang (jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
6.3	Jalan Kondisi Mantap	Jumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi mantap (jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
6.4	Jalan Rusak Sedang	Jumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi rusak sedang jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan, dan penambalan kurang dari 20% dari luas jalan yang ditinjau) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
6.5	Jalan Rusak Berat	Jumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi rusak berat (banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya, dan terkelupas yang cukup besar	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi



No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		20-60% dari ruas jalan yang ditinjau disertai dengan kerusakan lapis pondasi seperti ambblas) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Sumber Daya Mineral
6.6	Jalan Kondisi Tidak Mantap	Jumlah kilometer badan jalan dengan kriteria kondisi tidak mantap (jalan dengan kondisi pelayanan tidak mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi rusak sedang atau rusak berat) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
6.7	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	Nilai persentase panjang jalan dengan kriteria kondisi mantap terhadap total panjang jalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
7	Jembatan	Konstruksi yang digunakan untuk meneruskan/menyambungkan jalur jalan yang terputus melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau lalu lintas biasa.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
7.1	Panjang	Jumlah kilometer panjang seluruh jembatan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
7.2	Jumlah	Jumlah unit jembatan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
8	Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi	Panjang jalan berdasar fungsi adalah pembagian klasifikasi panjang jalan berdasar dari fungsi pada wilayah tertentu.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
8.1	Jalan Nasional	Jalan yang dikelola oleh Kementerian PUPR yang meliputi 4 kelompok yakni jalan arteri primer, jalan kolektor primer (penghubung antar-ibu kota provinsi), jalan tol (bebas hambatan), dan jalan strategis nasional. Jumlah panjang jalan Nasional yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral



No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
8.1.1	Arteri	Jumlah kilometer panjang jalan kelas jalan nasional yang berfungsi sebagai arteri yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
8.1.2	Kolektor	Jumlah kilometer panjang jalan kelas jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan kolektor, yaitu yang menghubungkan secara berdaya guna antara kegiatan nasional dengan kegiatan wilayah yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
8.2	Jalan Provinsi	Jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategi provinsi.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
8.2.1	Kolektor 2	Jumlah kilometer panjang jalan kelas Jalan provinsi yang berfungsi sebagai jalan kolektor 2 (yaitu yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota) yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
8.2.2	Kolektor 3	Jumlah kilometer panjang jalan kelas jalan provinsi yang berfungsi sebagai jalan kolektor 3 (yaitu penghubung antar ibukota kabupaten/kota) yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
8.2.3	Jalan Strategis Provinsi	Jumlah kilometer panjang jalan kelas jalan provinsi yang berfungsi sebagai jalan strategis provinsi yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
9	Panjang Jalan yang Memiliki Fasilitas	Panjang jalan yang memiliki fasilitas adalah Panjang jalan dengan fasilitas berupa trotoar, drainase, dan sempadan jalan.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
9.1	Trotoar	Jumlah kilometer badan jalan yang memiliki fasilitas trotoar yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Daya Mineral
9.2	Drainase/Saluran Pembuangan Air	Jumlah kilometer badan jalan yang memiliki fasilitas drainase yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
9.3	Sempadan Jalan	Jumlah kilometer badan jalan yang memiliki fasilitas sempadan jalan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
9.4	Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Liima atau Bangunan Rumah Liar	Jumlah kilometer panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (bahu jalan) pada tahun berkenaan .	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
10	Sempadan Sungai	Zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
10.1	Sungai Progo	Jumlah kilometer panjang seluruh sempadan Sungai Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
10.2	Sungai Opak	Jumlah kilometer panjang seluruh sempadan Sungai Opak pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
10.3	Sungai Serang	Jumlah kilometer panjang seluruh sempadan Sungai Serang pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
10.4	Sungai Oyo	Jumlah kilometer panjang seluruh sempadan Sungai Oyo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
10.5	Winongo	Jumlah kilometer panjang seluruh sempadan Sungai Winongo pada	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		tahun berkenaan.			Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
10.6	Code	Jumlah kilometer panjang seluruh sempadan Sungai Code pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
10.7	Gajah Wong	Jumlah kilometer panjang seluruh sempadan Sungai Gajah Wong pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
10.8	Bedog	Jumlah kilometer panjang seluruh sempadan Sungai Bedog pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
10.9	Jumlah Kelompok Masyarakat Sekitar Sungai yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Sungai	Jumlah kelompok masyarakat sekitar sungai yang berpartisipasi dalam pengelolaan sungai.		Kelompok	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
11	Drainase	Prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari satu tempat ke tempat lain, misalnya wadiah air, baik yang alamiah maupun buatan. Kelebihan air kemudian dilanjutkan menuju laut, sungai, danau, sumur, dan sarana resapan lainnya.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
11.1	Jaringan sistem Drainase	Jumlah unit jaringan sistem drainase yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
12	Prasarana Irigasi/Pengaliran	Prasarana Irigasi adalah infrastruktur penunjang Irigasi yang terdiri dari Bangunan Irigasi dan Saluran Irigasi.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
12.1	Teknis	Jumlah meter panjang prasarana irigasi teknis yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Meter	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi



No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Sumber Daya Mineral
12.1.1	Primer	Jumlah meter panjang prasarana irigasi teknis primer yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Meter	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
12.1.2	Sekunder	Jumlah meter panjang prasarana irigasi teknis sekunder yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Meter	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
12.1.3	Tersier	Jumlah meter panjang prasarana irigasi teknis tersier yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Meter	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
12.2	Luas Irigasi	Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
12.3	Panjang Jaringan Sarana Irigasi dalam Kondisi Baik	Jumlah meter panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baik di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Meter	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
12.4	Luas Irigasi dalam Kondisi Baik	Luas area lahan irigasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan dalam kriteria kondisi baik.	Tahunan	Hektar	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
13	Pelestarian Lingkungan Hidup	rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
13.1	Penambangan Liar yang Ditertibkan	Jumlah hektar luasan kawasan penambangan liar yang ditertibkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Hektar	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
13.2	Penambahan Kapasitas Air Baku	Jumlah penambahan debit kapasitas air baku di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	Tahunan		Dinas Pekerjaan Umum

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pada tahun berkenaan.			Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
13.3	Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	Debit air curah yang dikelola dalam Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Regional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.		Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
14	Status Jalan	Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan, berdasarkan administrasi pemerintahan dan berdasarkan muatan sumbu yang menyangkut dimensi dan berat kendaraan.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
14.1	Nasional	Panjang kilometer jalan nasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
14.2	Provinsi	Panjang kilometer jalan provinsi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
14.3	Kabupaten	Panjang kilometer jalan kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan	Tahunan	Kilometer	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
15	Data Kinerja Dinas PUP dan ESDM	Data Kinerja Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Persentase Aksesibilitas Jalan, Persentase Penduduk Berkases Air Minum, Persentase Penduduk Berakses Sanitasi yang Layak, Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Persentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan SKPD, Peningkatan Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi, Persentase Penduduk yang Menempati Tempat Tinggal yang Layak, Persentase Rumah Tangga Berakses Listrik, dan Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah, dan Pertambahan Terhadap Rencana Tata Ruang.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
15.1	Persentase Aksesibilitas Jalan di Wilayah Provinsi	Persentase aksesibilitas jalan terhadap total panjang jalan di	Tahunan	%	Dinas Pekerjaan



No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
15.2	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum terhadap total jumlah penduduk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
15.3	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi yang Layak	Persentase penduduk berakses sanitasi yang layak terhadap total jumlah penduduk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
15.4	Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
15.5	Persentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan SKPD	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan SKPD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
15.6	Peningkatan Luas Fungsional Daerah Irigasi yang Terlayani Air Irigasi	Peningkatan luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan terhadap luas fungsional daerah irigasi tahun sebelumnya.	Tahunan	%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
15.7	Persentase Penduduk yang Menempati Tempat Tinggal yang Layak	Persentase penduduk yang menempati tempat tinggal yang layak terhadap total jumlah penduduk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan	Tahunan	%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
15.8	Persentase Rumah Tangga Berakses Listrik	Persentase rumah tangga berakses listrik terhadap total rumah tangga yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
15.9	Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang	Nilai persentase kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
16	Potensi Ketersediaan Air	Potensi ketersediaan air merupakan proyeksi ketersediaan jumlah volume air yang terdapat dalam siklus hidrologi di suatu wilayah, yang merupakan gabungan dari air hujan, air permukaan, dan air tanah.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.1	Volume Air Permukaan	Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.1.1	DAS Serang	Jumlah ketersediaan volume permukaan debit air dalam juta meter kubik di Daerah Alirah Sungai (DAS) Serang.	Tahunan	Juta m ³	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.1.2	DAS Progo	Jumlah ketersediaan volume permukaan debit air dalam juta meter kubik di Daerah Alirah Sungai (DAS) Progo.	Tahunan	Juta m ³	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.1.3	DAS Opak	Jumlah ketersediaan volume permukaan debit air dalam juta meter kubik di Daerah Alirah Sungai (DAS) Opak.	Tahunan	Juta m ³	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.1.4	DAS Oyo	Jumlah ketersediaan volume permukaan debit air dalam juta meter kubik di Daerah Alirah Sungai (DAS) Oyo.	Tahunan	Juta m ³	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.1.5	DTA Karst	Jumlah ketersediaan volume permukaan debit air dalam juta meter kubik di Daerah Tangkapan Air (DTA) Karst di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Juta m ³	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.2	Volume Air Tanah	Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Sumber utama dari air tanah yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Peresapan air hujan ini terjadi selama pengaliran air hujan ke laut atau ke aliran sungai.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.2.1	DAS Serang	Jumlah ketersediaan Volume air	Tahunan	Juta m ³	Dinas

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		tanah dalam satuan juta meter kubik di Daerah Alirah Sungai (DAS) Serang.			Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.2.2	DAS Progo	Jumlah ketersediaan volume air tanah dalam satuan juta meter kubik di Daerah Alirah Sungai (DAS) Progo.	Tahunan	Juta m ³	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.2.3	DAS Opak	Jumlah ketersediaan volume air tanah dalam satuan juta meter kubik di Daerah Alirah Sungai (DAS) Opak.	Tahunan	Juta m ³	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.2.4	DAS Oyo	Jumlah ketersediaan volume air tanah dalam satuan juta meter kubik di Daerah Alirah Sungai (DAS) Oyo.	Tahunan	Juta m ³	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.2.5	DTA Karst	Jumlah ketersediaan volume air tanah dalam satuan juta meter kubik di Daerah Tangkapan Air (DTA) Karst di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Juta m ³	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.3	Potensi Sumber Daya Air	Nilai kemampuan ketersediaan air dalam memenuhi kebutuhan air di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.3.1	DAS Serang	Jumlah potensi sumber daya air dalam satuan juta meter kubik di Daerah Alirah Sungai (DAS) Serang.	Tahunan	Juta m ³	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.3.2	DAS Progo	Jumlah potensi sumber daya air dalam satuan juta meter kubik di Daerah Alirah Sungai (DAS) Progo.	Tahunan	Juta m ³	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.3.3	DAS Opak	Jumlah potensi sumber daya air dalam satuan juta meter kubik di Daerah Alirah Sungai (DAS) Opak.	Tahunan	Juta m ³	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Daya Mineral
16.3.4	DAS Oyo	Jumlah potensi sumber daya air dalam satuan juta meter kubik di Daerah Aliran Sungai (DAS) Oyo.	Tahunan	Juta m ³	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
16.3.5	DTA Karst	Jumlah potensi sumber daya air dalam juta meter kubik di Daerah Tangkapan Air (DTA) Karst di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Juta m ³	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17	Debit Rerata Sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta	Jumlah rata-rata debit air sungai (M3/debit) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.1	Sungai Progo (Duwet)	Debit rata-rata air sungai Progo (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.1.1	Min	Debit minimal aliran air sungai Progo (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	M3 / Detik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.1.2	Max	Debit maksimal aliran sungai Progo (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	M3 / Detik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.2	Sungai Bedog (Guwosari)	Debit rata-rata air sungai Bedog (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.2.1	Min	Debit minimal aliran air sungai Bedog (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	M3 / Detik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.2.2	Max	Debit maksimal aliran sungai Bedog (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	M3 / Detik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					dan Energi Sumber Daya Mineral
17.3	Sungai Code (Kaloran)	Debit rata-rata air Sungai Code (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.3.1	Min	Debit minimal aliran air Sungai Code (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	M3 / Detik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.3.2	Max	Debit maksimal aliran Sungai Code (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	M3 / Detik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.4	Sungai Winongo (Padokan)	Debit rata-rata air Sungai Winongo (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.4.1	Min	Debit minimal aliran air Sungai Winongo (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	M3 / Detik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.4.2	Max	Debit maksimal aliran Sungai Winongo (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	Tahunan	M3 / Detik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.5	Sungai Gajahwong (Papringan)	Debit rata-rata air Sungai Gajahwong (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.5.1	Min	Debit minimal aliran air Sungai Gajahwong (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	M3 / Detik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.5.2	Max	Debit maksimal aliran Sungai Gajahwong (M3/detik) di wilayah	Tahunan	M3 / Detik	Dinas Pekerjaan

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Daerah Istimewa Yogyakarta.			Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.6	Sungai opak (Pulo)	Debit rata-rata air Sungai Opak (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.6.1	Min	Debit minimal aliran air Sungai Opak (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	M3 / Detik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
17.6.2	Max	Debit maksimal aliran Sungai Opak (M3/detik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	M3 / Detik	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral



1.04 PERUMAHAN

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Luas Lahan Perumahan dan Permukiman	Luas lahan yang diperuntukan untuk perumahan dan permukiman dalam hektar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Hektar	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2	Perumahan	Perumahan adalah sekelompok rumah atau bangunan lainnya yang dibangun bersamaan sebagai sebuah pengembangan tunggal.			DPUPESDM
2.1	Perumnas	Banyaknya perumahan yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara Perumnas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang perumahan dan permukiman.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
2.2	Penyedia Perumahan	Jumlah unit rumah yang dibangun oleh Perusahaan Penyedia Perumahan yang tergabung dalam APERNAS (Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional) yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
2.3	Real Estate	Jumlah unit rumah yang dibangun oleh perusahaan pengembang (real estate) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun berkenaan pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
2.4	Status Kepemilikan Rumah	Status rumah yang dimaksud di sini adalah rumah dengan status penguasaan bangunan milik sendiri, kontrak, dan sewa.			DPUPESDM
2.4.1	Rumah Milik Sendiri	Jumlah unit rumah dengan status milik sendiri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
2.4.2	Rumah Sewa	Jumlah unit rumah dengan status sewa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
2.4.3	Persentase Rumah Milik Sendiri	Persentase rumah dengan status milik sendiri terhadap total jumlah rumah yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	DPUPESDM
2.4.4	Persentase Rumah Sewa	Persentase rumah dengan status milik sewa terhadap total jumlah rumah yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	DPUPESDM
2.5	Kebutuhan Rumah	Jumlah unit rumah yang dibutuhkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
2.6	Penyediaan Jaringan/Instalasi	Penyediaan jaringan PLN dan PDAM untuk kebutuhan rumah.	Tahunan		DPUPESDM
2.6.1	Jumlah Rumah dengan Jaringan Instalasi PLN	Jumlah unit rumah yang telah tersambung dengan jaringan listrik	Tahunan	Unit	DPUPESDM



		PLN di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			
2.6.2	Jumlah Rumah dengan Jaringan Instalasi PDAM	Jumlah unit rumah yang telah tersambung dengan jaringan instalasi air PDAM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
2.7	Penambahan Jumlah Rumah Tangga yang Menikmati Listrik	Angka penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan terhadap tahun sebelumnya.	Tahunan	Rumah	DPUPESDM
2.8	Bangunan/Gedung Pemerintah, Komersial, dan Industri yang Telah Diaudit Energi	Banyaknya bangunan/gedung pemerintah, komersial, dan industri yang telah diaudit energi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Gedung	DPUPESDM
2.9	Penambahan Izin Ketenagalistrikan Sesuai Ketentuan	Angka penambahan jumlah izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan terhadap tahun sebelumnya.	Tahunan	Izin	DPUPESDM
3	Jumlah Rumah Berdasarkan Kelayakan				
3.1	Layak Huni	Banyaknya rumah dengan kriteria layak huni di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
4	Jumlah Bangunan	Banyaknya bangunan berdasar kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	DPPM
5	Tingkat Kekumuhan dan Keterisolasian Serta Lahan Kritis				
5.1	Tingkat Kekumuhan Permukiman	Permukiman kumuh adalah sebuah kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan populasi tinggi yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi.	Tahunan		DPUPESDM
5.1.1	Lokasi Permukiman Kumuh	Jumlah Lokasi permukiman dengan kriteria kumuh di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lokasi	DPUPESDM
6	Rumah Tinggal Berakses Sanitasi	Banyaknya rumah tinggal yang memiliki akses fasilitas sanitasi, minimal yang bersifat komunal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	SR	DPUPESDM



1.05 PENATAAN RUANG

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Tata Ruang	Data terkait perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang pada level provinsi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.1	Luas Kawasan Budidaya	Luasan kawasan yang ditetapkan perencanaannya dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.1.1	Kawasan Hutan Produksi	Luas Kawasan Budidaya peruntukan hutan yang hasil produksi hasil hutannya dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.1.2	Kawasan Perkebunan Rakyat	Luas Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat. Kawasan hutan rakyat berupa hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.1.3	Kawasan Peruntukan Industri	Luas Kawasan Budidaya peruntukan kegiatan industri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.1.4	Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Budidaya peruntukan permukiman di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.1.5	Kawasan Pertanian	Luas Kawasan Budidaya peruntukan kegiatan pertanian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.1.6	Kawasan Pertambangan dan Energi	Luas Kawasan Budidaya peruntukan kegiatan pertambangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.1.7	Kawasan Transportasi	Luas Kawasan Budidaya peruntukan kegiatan transportasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.2	Luas Kawasan Lindung	Luasan kawasan yang ditetapkan perencanaannya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
1.2.1	Kawasan Konservasi/KSA/KPA/TB	Luas Kawasan Lindung peruntukan kegiatan konservasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.2.2	Kawasan Perlindungan Setempat	Luas Kawasan Lindung peruntukan kegiatan perlindungan setempat (lokal), meliputi kegiatan penelitian, sempadan sungai sempadan waduk, dan sempadan pantai di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.2.3	Kawasan Lindung Geologi	Luas Kawasan Lindung peruntukan bentuk pengelolaan Cagar Alam Geologi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.2.4	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Luas Kawasan Lindung peruntukan bentuk pengelolaan Hutan Lindung sesuai Undang-Undang RI No. 41/1999 tentang Kehutanan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
1.2.5	Badan Air	Luas kawasan Lindung dalam bentuk tubuh air yang mengalir atau menetap di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2	Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta				
2.1	Penggunaan Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemanfaatan lahan/penggunaan lahan didefinisikan sebagai sejumlah pengaturan, aktivitas, dan input yang dilakukan manusia pada luasan lahan tertentu menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, dan permukiman di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.1.1	Bandara	Luasan lahan dalam bentuk pemanfaatan berupa prasarana dimana pesawat terbang seperti pesawat udara dan helikopter dapat lepas landas dan mendarat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.1.2	Danau/Waduk	Luasan lahan dalam bentuk pemanfaatan berupa massa tubuh air menetap baik secara alamiah ataupun buatan dengan tujuan sebagai reservoir di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.1.3	Hutan Lindung	Luasan lahan dalam bentuk pemanfaatan berupa kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang



No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah, tetap terjaga dan manfaatnya dirasakan masyarakat sekitarnya, sesuai Undang-Undang RI No. 41/1999 tentang Kehutanan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.1.4	Hutan Produksi	Luasan lahan dalam bentuk pemanfaatan berupa kawasan hutan yang produksi hasil hutannya dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri, dan ekspor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.1.5	Permukiman	Luasan lahan dalam bentuk pemanfaatan berupa tempat bermukim dan melakukan aktivitas sehari-hari di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.1.6	Sawah Irigasi	Luasan lahan dalam bentuk pemanfaatan kegiatan pertanian berupa sawah dengan pengairan teknis berupa sistem irigasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.1.7	Sawah Tadah Hujan	Luasan lahan dalam bentuk pemanfaatan kegiatan pertanian berupa sawah yang sepenuhnya mengandalkan hujan sebagai sumber air dikarenakan wilayah sulit air di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta .	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.1.8	Semak/Belukar	Luasan lahan dalam bentuk pemanfaatan berupa tutupan lahan semak belukar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.1.9	Sungai	Luasan lahan dalam bentuk pemanfaatan berupa massa tubuh air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.1.10	Tambak	Luasan lahan dalam bentuk pemanfaatan berupa massa tubuh air yang berukuran antara 1 m ² hingga 2 Ha yang bersifat permanen atau musiman dengan tujuan budidaya perikanan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.1.11	Tegalan/Ladang	Luasan lahan dalam bentuk pemanfaatan berupa kegiatan pertanian lahan kering dengan tanaman semusim dan terpisah	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		dengan halaman sekitar rumah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.1.12	Gedung	Luasan lahan dalam bentuk pemanfaatan berupa bangunan gedung di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.1.13	Hutan	Luasan lahan dalam bentuk pemanfaatan berupa tutupan vegetasi berkayu keras di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.1.14	Kebun/Perkebunan	Luasan lahan dalam bentuk pemanfaatan berupa kebun/perkebunan (tanaman produksi pertanian tahunan) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.1.15	Pasir Darat	Luasan lahan dalam bentuk tutupan permukaan berupa hamparan pasir di darat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.1.16	Rumput/Tanah Kosong	Luasan lahan dalam bentuk pemanfaatan berupa padang rumput atau tanah kosong di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.1.17	Sungai	Luasan lahan dalam bentuk tubuh air mengalir dari hulu ke hilir dan bermuara ke laut, danau, atau sungai yang lebih besar.			
2.2	Luasan Lahan Kawasan Lindung di Daerah Istimewa Yogyakarta	Luasan lahan yang pemanfaatannya ditetapkan sebagai kawasan dengan fungsi lindung dengan tujuan untuk melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan Pembangunan berkelanjutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.2.1	Hutan Lindung	Luasan Lahan Kawasan Lindung berupa kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu sebagai Hutan Lindung, agar fungsi-fungsi ekologisnya tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta .	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.2.2	Sempadan Pantai	Luasan Lahan Kawasan Lindung berupa Sempadan pantai yang berfungsi untuk pengamanan dan pelestarian pantai di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.2.3	Sempadan Sungai	Luasan Lahan Kawasan Lindung berupa Sempadan sungai sebagai batas perlindungan sungai di	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan yang berfungsi sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 5 ayat (5) PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yaitu sebagai penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.			Ruang
2.2.4	Sekitar Danau Waduk	Luasan Lahan Kawasan Lindung berupa kawasan sekitar danau/waduk sebagai kawasan perlindungan setempat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan yang berfungsi untuk melindungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.2.5	Kawasan Suaka Margasatwa	Luasan Lahan Kawasan Lindung berupa Kawasan suaka margasatwa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan yang berfungsi sebagai tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.2.6	Taman Hutan Raya	Luas Kawasan Lindung peruntukan bentuk pengelolaan Taman Hutan Raya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.2.7	Taman Nasional Gunung Merapi	Luas Kawasan Lindung peruntukan bentuk pengelolaan Taman Nasional di area lereng atas gunung merapi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.2.8	Taman Wisata Alam	Luas Kawasan Lindung peruntukan bentuk pengelolaan Taman Wisata Alam di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.2.9	Cagar Alam	Luas Kawasan Lindung peruntukan bentuk pengelolaan Cagar Alam di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.2.10	Hutan Penelitian	Luas Kawasan Lindung peruntukan bentuk pengelolaan Hutan Penelitian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.			
2.2.11	Cagar Alam Geologi	Luas Kawasan Lindung peruntukan bentuk pengelolaan Cagar Alam Geologi di wilayah			

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.2.12	Rawan Bencana Geologi	Luas Kawasan Lindung peruntukan bentuk pengelolaan Kawasan Rawan terhadap Bencana yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.2.13	Sungai	Luas kawasan Lindung dalam bentuk tubuh air yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.2.14	Danau/Waduk	Luas kawasan Lindung dalam bentuk tubuh air yang menetap baik itu alamiah (danau) ataupun buatan (waduk) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.3	Kawasan Budidaya	Luasan Lahan Kawasan Lidung pada Kawasan Budidaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.3.1	Hutan Produksi	Luasan Lahan Kawasan Lindung pada Kawasan Budidaya berupa Kawasan Hutan Produksi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
2.3.2	Pemukiman Pedesaan	Luas lahan Kawasan Budidaya peruntukan permukiman pedesaan (dominan sektor pertanian) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.3.3	Permukiman Perkotaan	Luas lahan Kawasan Budidaya peruntukan permukiman pekotaan (dominan sektor jasa dan permukiman) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.3.4	Hutan Rakyat	Luas Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat. Kawasan hutan rakyat berupa hutan produksi di luar kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.3.5	Industri	Luas Kawasan Budidaya peruntukan kegiatan industri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.3.6	Perkebunan	Luas Kawasan Budidaya peruntukan kegiatan perkebunan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.3.7	Lahan Pangan Beririgasi	Luas Kawasan Budidaya peruntukan lahan pangan beririgasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.3.8	Lahan Pangan Tidak Beririgasi	Luas Kawasan Budidaya peruntukan lahan pangan tidak beririgasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
2.3.9	Bandar Udara	Luas Kawasan Budidaya peruntukan Bandar udara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.			
2.3.10	Pelabuhan	Luas Kawasan Budidaya peruntukan pelabuhan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
2.3.11	Riset dan Pendidikan Tinggi	Luas Kawasan Budidaya peruntukan kegiatan riset dan pendidikan tinggi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
3	Data Kinerja Dinas Pertahanan dan Tata Ruang				
3.1	Persentase Penataan Ruang pada Kawasan Keistimewaan	Persentase Luas kawasan perencanaan Penataan Ruang pada Kawasan Keistimewaan terhadap luas total Kawasan Keistimewaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.2	Bidang SG, PAG, dan TKD yang Memiliki Kepastian Hukum	Jumlah Bidang SG, PAG, dan TKD yang Memiliki Kepastian Hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Bidang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.3	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Provinsi Meningkat (IKU)	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW Provinsi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.4	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan (Kinerja Pemda)	Persentase Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.5	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	Jumlah Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Bidang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.6	Persentase Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
3.7	Persentase Dukungan Program Pemda terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang	Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	%	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang



1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No.	Nama Elemen Data	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan Perda	Banyaknya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Perda di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Dokumen	BAPPEDA
2	Jumlah Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan Perda	Banyaknya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Dokumen	BAPPEDA
3	Jumlah Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan Perkada	Banyaknya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah di Daerah Istimewa.	Tahunan	Dokumen	BAPPEDA
4	Data Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil kerja yang telah dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			BAPPEDA
4.1	Persentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD terhadap rencana program dukungan sasaran SKPD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	%	BAPPEDA
4.2	Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah	Persentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah terhadap rencana pembangunan daerah di wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	%	BAPPEDA
4.3	Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (menggambarkan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan) melalui sistem pertanggung-jawaban secara periodik.	Tahunan	Nilai	BAPPEDA
5	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD GRK	Pengamatan kepada pemerintah provinsi untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.	Tahunan	Dokumen	BAPPEDA



1.07 PERHUBUNGAN

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
1.1	Dikelola Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	Banyaknya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang Dikelola Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
1.2	Dikelola Distrik Navigasi	Banyaknya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dikelola Distrik Navigasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
1.3	Dikelola Satker Perhubungan Darat Daerah Istimewa Yogyakarta	Banyaknya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dikelola Satker Perhubungan Darat Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Terminal Darat	Terminal darat merupakan tempat yang melayani segala jenis kegiatan layanan transportasi darat.			Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.1	Terminal Barang	Jumlah unit terminal darat yang melayani barang (tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda, dan antarmoda angkutan barang dan konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.2	Terminal Penumpang	Jumlah unit terminal darat yang melayani Penumpang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.3	Jumlah Terminal	Banyaknya terminal penumpang berdasarkan tipe jangkauan layanannya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.3.1	Tipe A	Banyaknya terminal tipe A (jangkauan layanan kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan pedesaan (ADES)) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.3.2	Tipe B	Banyaknya terminal tipe B	Tahunan	Unit	Dinas

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		(jangkauan layanan kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK), dan angkutan pedesaan (ADES)) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.3.3	Tipe C	Banyaknya terminal tipe C (jangkauan layanan kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES)) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3	Perhubungan	Data terkait sarana perhubungan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.1	Transportasi Darat	Banyaknya sarana transportasi yang menggunakan prasarana berupa jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Bentuk awal dari transportasi darat adalah menggunakan kuda, keledai atau bahkan manusia untuk membawa barang melewati jalan setapak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.1.1	Angkutan Darat	Banyaknya transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.1.1.1	Jumlah Penumpang yang Terangkut Angkutan Umum	Jumlah penumpang yang diberangkatkan semua angkutan umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Orang	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.1.2	Jumlah Orang Melalui Terminal	Banyaknya orang melalui terminal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Orang	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.1.2.1	Jumlah Orang Melalui Terminal	Banyaknya orang melalui terminal berdasarkan tipe Terminal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta			Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.1.2.1.1	Tipe A	Banyaknya orang melalui terminal tipe A (terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota,	Tahunan	Orang	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		dan angkutan pedesaan) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
3.1.2.1.2	Tipe B	Banyaknya orang melalui terminal tipe B (terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota, dan/atau angkutan pedesaan) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Orang	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.1.3	Jumlah Jembatan Timbang	Banyaknya seperangkat unit alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara permanen atau alat portabel yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.1.4	Stasiun Kereta Api	Banyaknya prasarana operasi kereta api yang berfungsi sebagai tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaik-turunkan penumpang atau membongkar-muat barang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.1.5	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu	Jumlah perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.1.6	Jumlah Rambu-Rambu yang Seharusnya Tersedia	Jumlah unit rambu-rambu yang seharusnya tersedia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.1.7	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Perbandingan jumlah kendaraan per km panjang jalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit/km	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.1.7.1	V/C Ratio pada Ruas Jalan Perkotaan	Volume Capacity ratio (VCR) atau tingkat pelayanan jalan yang diformulasikan sebagai perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Semakin tinggi volume kendaraan yang lewat maka tingkat pelayanan jalan tersebut semakin rendah, begitu juga sebaliknya.	Tahunan	%	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.2	Transportasi Udara	Banyaknya prasarana transportasi udara di wilayah Daerah Istimewa			

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Yogyakarta. Transportasi udara adalah moda transportasi yang beroperasi di udara.			
3.2.1	Jumlah Bandara	Jumlah unit bandara di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandara atau bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai prasarana tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.2.1.1	Internasional	Jumlah unit bandara yang melayani transportasi udara tingkat Internasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.2.1.2	Jumlah Orang yang Melalui Bandara (Penumpang)	Banyaknya penumpang yang datang dan berangkat melalui bandar udara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Orang	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
3.2.1.3	Jumlah Barang yang Melalui Bandara	Banyaknya barang yang datang dan berangkat melalui bandar udara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ton	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
4	Angkutan Umum	Angkutan umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan.			Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
4.1	Jumlah Angkutan Umum	Banyaknya Angkutan Umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
4.2	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Banyaknya Angkutan Umum yang melakukan uji KIR di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. KIR (Bahasa Belanda = KEUR) merupakan kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya dan memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pengguna.			
4.3	Jumlah Uji KIR Angkutan Bukan Umum	Banyaknya Angkutan Bukan Umum yang melakukan uji KIR di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
5	Pelayanan Transportasi	Pelayanan transportasi merupakan pelayanan standar minimal yang seharusnya dimiliki pada setiap moda transportasi.			Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
5.1	Fasilitas Pendukung Keselamatan (Pengujian, dll)	Banyaknya Fasilitas Pendukung Keselamatan (Pengujian, dll) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelayanan transportasi berupa fasilitas-fasilitas pelengkap jalan pendukung keselamatan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan jalan, fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas pendukung dan lalu lintas angkutan jalan.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
5.2	Fasilitas Perlengkapan Jalan (Halte Trans Jogja)	Banyaknya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Halte Trans Jogja) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelayanan transportasi berupa fasilitas perlengkapan jalan merupakan seluruh bangunan pelengkap jalan yang disediakan untuk pengguna jalan guna memberikan pelayanan demi kelancaran, keamanan, kenyamanan, serta keselamatan bagi pengguna jalan.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
5.3	Jaringan Jalan dan Perambuan	Jumlah unit struktur hirarki Jaringan Jalan dan Perambuan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelayanan transportasi berupa jaringan Jalan sebagai satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
5.4	Jaringan Pelayanan Angkutan	Banyaknya Jaringan Pelayanan Angkutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelayanan transportasi berupa jaringan Pelayanan sistem angkutan kota yaitu tersedianya jaringan rute pelayanan yang ideal untuk suatu wilayah tertentu.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
5.5	Manajemen Rekayasa	Banyaknya Manajemen Rekayasa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan. Pelayanan transportasi berupa manajemen rekayasa aliran lalu lintas yang bertujuan penyelesaian masalah dalam layanan transportasi.			Istimewa Yogyakarta
5.6	Pelayanan Angkutan	Banyaknya unit Pelayanan Angkutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Pelayanan transportasi berupa pelayanan angkutan umum adalah memberikan pelayanan angkutan yang aman, cepat, nyaman, dan murah pada masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat, terutama bagi para pekerja dalam menjalankan kegiatannya.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
5.7	Penerangan Jalan Lingkungan	Banyaknya Penerangan Jalan Lingkungan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Pelayanan transportasi berupa lampu Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari, sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
5.8	Penerangan Jalan Umum di Jalan Provinsi	Jumlah unit Penerangan Jalan Umum di jalan provinsi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelayanan transportasi berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan kelas Jalan Provinsi yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari, sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keselamatan lalu lintas dan keamanan.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
6	Data Kinerja Dinas Perhubungan	Hasil kerja yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
6.1	Penumpang yang Terlayani Angkutan Umum di Daerah Istimewa Yogyakarta	Banyaknya penumpang yang terlayani angkutan umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Orang	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
6.2	Persentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	Persentase hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD terhadap capaian kinerja Tahun berkenaan sebesar 100%.	Tahunan	%	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
6.3	Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan	Persentase capaian kinerja layanan angkutan umum dan	Tahunan	%	Dinas Perhubungan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Tingkat Pelayanan Jalan	tingkat pelayanan jalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Daerah Istimewa Yogyakarta
6.4	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi	Persentase penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi pada sistem jaringan jalan provinsi pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	%	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
6.5	Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	%	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7	DATA KENDARAAN ANGKUTAN AKDP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Data jumlah unit Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA menurut Penyedia Jasa yang terdaftar pada Dinas Perhubungan.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.1	KOP. ABADI	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. ABADI di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. KOP. ABADI Srandakan adalah sebuah koperasi bus.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.2	KOP. ABADI UNIT IMOIRI (MAHARDIKA)	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. ABADI UNIT IMOIRI (MAHARDIKA) di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. KOP. ABADI UNIT IMOIRI (MAHARDIKA) adalah sebuah koperasi bus jurusan imogiri.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.3	PO. MAJU LANCAR	Banyaknya Unit Kendaraan PO. MAJU LANCAR di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. PO. MAJU LANCAR adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat dan barang yang berasal dari Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.4	PO. PRATAMA	Banyaknya Unit Kendaraan PO. PRATAMA di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. PO. PRATAMA adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat dan barang.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.5	PO. BIROWO	Banyaknya Unit Kendaraan PO. BIROWO di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		terdaftar pada Dinas Perhubungan. PO. BIROWO adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat dan barang yang berasal dari Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.			Istimewa Yogyakarta
7.6	PO. JANGKAR BUMI	Banyaknya Unit Kendaraan PO. JANGKAR BUMI di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. PO. JANGKAR BUMI adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat dan barang yang berasal dari Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.7	PO. TIRTO MULYO	Banyaknya Unit Kendaraan PO. TIRTO MULYO di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. PO. TIRTO MULYO adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat dan barang.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.8	PO. JAYA SEHATI	Banyaknya Unit Kendaraan PO. JAYA SEHATI di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. PO. JAYA SEHATI adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat dan barang yang berasal dari Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.9	PO. KUKUH	Banyaknya Unit Kendaraan PO. KUKUH di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. PO. KUKUH adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat dan barang yang berasal dari Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.10	PO. KUKUH PLS	Banyaknya Unit Kendaraan PO. KUKUH PLS di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. PO. KUKUH PLS adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat dan barang yang berasal dari Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.11	KOP. MENOREH	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. MENOREH di wilayah Provinsi	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. KOP. Menoreh adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat dan barang yang berasal dari wates Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.			Daerah Istimewa Yogyakarta
7.12	PO. MLIWIS	Banyaknya Unit Kendaraan PO. MLIWIS di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. PO. Mliwis adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat dan barang.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.13	NIKKO PUTERA	Banyaknya Unit Kendaraan NIKKO PUTERA di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Nikko Putera adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat dan barang.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.14	KOP. PEMUDA KAB. SLEMAN	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. PEMUDA KAB. SLEMAN di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (Kop. Pemuda Kab. Sleman).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.15	KOP. PEMUDA UNIT PRAMBANAN	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. PEMUDA UNIT PRAMBANAN di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (Kop. Pemuda Unit Prambanan).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.16	KOP. PEMUDA Unit KALIURANG	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. PEMUDA Unit KALIURANG di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (Kop. Pemuda Unit Kaliurang).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.17	KOP. MANUNGGAL	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. MANUNGGAL di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (Kop. Manunggal).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
7.18	PT. PRAYOGO MUGI HARTONO	Banyaknya Unit Kendaraan PT. PRAYOGO MUGI HARTONO di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (PT. Prayogo Mugi Hartono) .	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.19	KOP. PRIMKOVERI	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. PRIMKOVERI di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (KOP. Primkoveri).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.20	PO. PULUNG SARI	Banyaknya Unit Kendaraan PO. PULUNG SARI di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (PO. Pulung Sari) yang berasal dari kabupaten Gunungkidul.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.21	PO. RAWIT MULYO	Banyaknya Unit Kendaraan PO. RAWIT MULYO di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (PO. Rawit Mulyo).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.22	KOP. RUKUN AGAWA SANTOSA (RAS)	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. RUKUN AGAWA SANTOSA (RAS) di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (KOP. Rukun Agawe Santosa (RAS)).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.23	PO. SARI MULYO	Banyaknya Unit Kendaraan PO. SARI MULYO di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (PO. Sari Mulyo) yang berasal dari kabupaten Gunungkidul.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.24	KOP. SARI MANUNGAL	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. SARI MANUNGAL di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (KOP. Sari Manunggal) yang berasal dari kabupaten Gunungkidul.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
7.25	KOPERASI MANUNGAL	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah KOPERASI MANUNGAL Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (Koperasi Manunggal).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.26	PO. SISWANTORO	Jumlah Unit Kendaraan PO. SISWANTORO di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (PO. Siswantoro).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.27	PO. SUMBER REJEKI	Banyaknya Unit Kendaraan PO. SUMBER REJEKI di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. PO. Sumber Rejei adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat dan barang .	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.28	PO. SUMBER MAKMUR	Banyaknya Unit Kendaraan PO. SUMBER MAKMUR di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. PO. Sumber Makmur adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang darat dan barang.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.29	PO. WOLU MULYO	Banyaknya Unit Kendaraan PO. WOLU MULYO di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (PO. Wolu Mulyo).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.30	KOP. YOSAWA	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. YOSAWA di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (KOP. Yosawa).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.31	KOP. ABADI UNIT KOPATEK	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. ABADI UNIT KOPATEK di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (KOP. Abadi Unit Kopatek).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.32	KOP. ABADI UNIT RIAS	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. ABADI UNIT RIAS di wilayah	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (KOP. Abadi Unit Rias).			Daerah Istimewa Yogyakarta
7.33	KOP. ABADI UNIT PPKS	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. ABADI UNIT PPKS di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (KOP. Abadi Unit PPKS).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.34	KOP. ABADI PASA	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. ABADI PASA di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (KOP. Abadi Pasa).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.35	KOP. PRASOJO MARGO REJEKI	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. PRASOJO MARGO REJEKI di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (KOP. Prasajo Margo Rejek).).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.36	KOP. SAPTA MANUNGGAL	Banyaknya Unit Kendaraan KOP. SAPTA MANUNGGAL di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (KOP. Sapta Manunggal).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
7.37	PT. PRATAMA BARU INDAH	Banyaknya Unit Kendaraan PT. PRATAMA BARU INDAH di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan kota antar provinsi berdasarkan perusahaan (PT. Pratama Baru Indah).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8	JUMLAH ANGKUTAN TAKSI	Angkutan Orang Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan, permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa.			Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
8.1	PT. MULIA ADI SARANA	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (PT. Mulia Adi Sarana).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.2	PT. CENTRIS RAYA TAKSI	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (PT. Centris Raya Taksi).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.3	PT. WASTU MULYA CANDRA	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (PT. Wastu Mulya Candra).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.4	PT. SEWU TRANS SEJAHTERA	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (PT. Sewu Trans Sejahtera).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.5	KOP SETIA KAWAN	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (KOP. Setia Kawan).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.6	PT. RESTU INTAN ARMADA	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (PT. Restu Intan Armada).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.7	KOP. PRIMKOPPOLD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (KOP. Primkoppolda Daerah Istimewa Yogyakarta).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.8	PT. INDRA KELANA	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (PT. Indra Kelana).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.9	CV. AFDA	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (CV. Afda).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.10	KOP. SADEWA	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (KOP. Sadewa).			Daerah Istimewa Yogyakarta
8.11	KOP. TAMBAYO	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (KOP. Tambayo).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.12	KOP. PRIMKOPAU II	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (KOP. Primkopau II).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.13	PRIMKOP KARTIKA B-1/PAMUNGKAS	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (Primkop Kartika B-1/Pamungkas).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.14	PT. PANCA SARANA ARMADA BARU	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (PT. Panca Sarana Armada Baru).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.15	KOP. SERBA USAHA PATAGA	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (KOP. Serba Usaha Pataga).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.16	KOP. PANDAWA	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (KOP. Pandawa).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.17	PT. ARGASURYA ALAMPERKASA	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (PT. Argasurya Alamperkasa).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.18	PT. JARI ALAM SUPATRA	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (PT. Jari Alam Supatra).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.19	PT. CITRA CANDRA PANCA	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (PT. Citra Candra Panca).			Istimewa Yogyakarta
8.20	KOP. PUSKOVERI	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (KOP. Puskoveri).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
8.21	KOP. KOKASINDO	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Taksi berdasarkan perusahaan (KOP. Kokasindo).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
9	JUMLAH ANGKUTAN PERKOTAAN	Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur Jasa yang terdaftar pada Dinas Perhubungan.			Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
9.1	KOPATA	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Perkotaan (Kopata) atau koperasi angkutan umum kota.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
9.2	PUSKOPKAR	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Perkotaan berdasarkan perusahaan (Puskopkar).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
9.3	KOBUTRI	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Perkotaan berdasarkan perusahaan (KOBUTRI).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
9.4	ASPADA	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Perkotaan berdasarkan perusahaan (ASPADA).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
9.5	PERUM DAMRI	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Angkutan Perkotaan berdasarkan perusahaan (PERUM DAMRI).	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
9.6	PT. JOGJA TUGU TRANS	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Dinas Perhubungan. Angkutan Perkotaan PT. Jogja Tugu Trans adalah perusahaan konsorsium koperasi angkutan perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta.			Istimewa Yogyakarta
10	JUMLAH PENUMPANG PERKOTAAN TERANGKUT	Penumpang Perkotaan adalah penumpang di suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota yang mempergunakan layanan angkutan umum dalam perkotaan.			Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
10.1	Trans Jogja	Banyaknya Unit Kendaraan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar pada Dinas Perhubungan. Trans Jogja adalah sebuah sistem transportasi bus cepat, murah, dan ber-AC di seputar Kota Yogyakarta, Indonesia. Trans Jogja merupakan salah satu bagian dari program penerapan Bus Rapid Transit yang dicanangkan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
10.1.1	Penumpang/Hari	Banyaknya Penumpang Angkutan Umum Trans Jogja per Hari di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penumpang adalah seseorang yang hanya menumpang, baik itu pesawat, kereta api, bus, maupun jenis transportasi lainnya, tetapi tidak termasuk awak mengoperasikan dan melayani wahana tersebut tiap harinya.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
10.1.2	Penumpang/Tahun	Banyaknya Penumpang Angkutan Umum Trans Jogja per Tahun di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penumpang adalah seseorang yang hanya menumpang, baik itu pesawat, kereta api, bus, maupun jenis transportasi lainnya, tetapi tidak termasuk awak mengoperasikan dan melayani wahana tersebut tiap tahunnya.	Tahunan	Unit	Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta



1.08 LINGKUNGAN HIDUP

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Kasus Lingkungan	Perubahan pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
1.1	Jumlah Kasus Lingkungan	Banyaknya kasus lingkungan hidup berupa aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	Triwulan	Kasus	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
1.2	Jumlah Kasus Lingkungan yang Diselesaikan Pemda	Banyaknya kasus lingkungan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bisa diselesaikan Pemda hingga terjadi pemulihan kondisi lingkungan.	Triwulan	Kasus	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2	Luas Ruang Terbuka Hijau	Area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaan lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.1	Penanaman di Ruang Terbuka Hijau	Luas lahan yang dilakukan penanaman dalam ruang terbuka hijau di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3	Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup	Suatu tempat atau fasilitas yang digunakan untuk pengendalian lingkungan hidup.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3.1	Laboratorium Penguji Lingkungan	Jumlah laboratorium penelitian lingkungan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3.1.1	Milik Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta	Jumlah laboratorium penelitian lingkungan milik Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3.1.2	Yang Ada di Daerah Istimewa Yogyakarta	Jumlah laboratorium penelitian lingkungan yang dimiliki oleh lembaga lain/swasta yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3.2	Sarana Monitoring Polusi Udara	Jumlah alat monitor polusi udara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4	Pemantauan Kualitas Udara	Pemantauan terhadap kandungan polutan yang ada di udara seperti (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , NO ₂).			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1	Sekitar Jalan Raya	Lokasi pemantauan kualitas udara di sekitar jalan raya.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
4.1.1	Simpang Empat Ngeplang Sentolo Kulon Progo	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Simpang Empat Ngeplang Sentolo Kulon Progo.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.2	Simpang Tiga Toyan Kulon Progo	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Simpang Tiga Toyan Kulon Progo.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.3	Terminal Wates Kulon Progo	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar Terminal Wates Kulon Progo.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.4	Pertigaan Teteg/Simpang Tiga Kulon Progo	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Pertigaan Teteg/Simpang Tiga Kulon Progo.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.5	Depan GKBI Medari Sleman	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Depan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) Medari Sleman.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.6	Perempatan Deggung Sleman	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Perempatan Deggung Sleman.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.7	Depan TVRI Jl. Magelang Yogyakarta	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Depan TVRI Jl. Magelang Yogyakarta.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.8	Depan UPN Seturan Jl. Ring Road Utara	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Depan UPN Seturan Jl. Ring Road Utara.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.9	Depan Ruiko Janti Jl. Laks. Adisucipto Yogyakarta	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Depan Ruiko Janti Jl. Laks. Adisucipto Yogyakarta.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.10	Depan Kampus STTL Jl. Janti Km. 4 Gedong Kuning YK	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Depan Kampus STTL Jl. Janti Km.4 Gedong Kuning Yogyakarta.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.11	Depan Pasar Sepeda Jl. Menteri Supeno	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Depan Pasar sepeda Jl. Menteri Supeno.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.12	Depan Hotel Matahari Jl.	Mengetahui kualitas udara	Tahunan	Ug/m ³	Dinas

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Parangtritis Yogyakarta	(Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Depan Hotel Matahari Jl. Parangtritis Yogyakarta.			Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.13	Depan RS PKU Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Depan RS PKU Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.14	Depan Pasar Beringharjo Jl. Jend. A. Yani 16 Yogyakarta	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Depan Pasar Beringharjo Jl. Jend. A. Yani 16 Yogyakarta.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.15	Depan Ruko Bayeman Jl. Wates Yogyakarta	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya depan ruko Bayeman Jl. Wates Yogyakarta.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.16	Depan Bekas Kantor Merapi Golf Jl. Kaliurang Yogyakarta	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Depan Bekas Kantor Merapi Golf Jl. Kaliurang Yogyakarta.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.17	Perempatan Mirota Kampus	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Perempatan Mirota Kampus.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.18	Depan Hotel Shapir Jl. Laks. Adisucipto Yogyakarta	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Depan Hotel Shapir Jl. Laks. Adisucipto Yogyakarta.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.19	Depan Kantor Hotel Tentrem (Ex Pizza Hut) Jl. Jend. Sudirman YK	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Depan Kantor Hotel Tentrem (Ex Pizza Hut) Jl. Jend. Sudirman Yogyakarta.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.20	Depan Kantor Kecamatan Jetis Jl. Diponegoro Yogyakarta	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya depan Kantor Kecamatan Jetis Jl. Diponegoro Yogyakarta.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.21	Depan Mirota Godean Jalan Godean Km. 12 Yogyakarta	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Depan Mirota Godean Jalan Godean Km. 12 Yogyakarta.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.22	Perempatan Wojo Jl. Imogiri Bara Bantul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Perempatan Wojo Jl. Imogiri Bara Bantul.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.23	Perempatan Druwo Jl. Parangtritis Bantul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ ,	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		dan NO2) di sekitar jalan raya Perempatan Druwo Jl. Parangtritis Bantul.			Hidup Dan Kehutanan
4.1.24	Depan Toko Besi Selatan Dongkelan Jl. Bantul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO2, dan NO2) di sekitar jalan raya Depan Toko Besi Selatan Dongkelan Jl. Bantul.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.25	Perempatan Gose Jl. Bantul Yogyakarta	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO2, dan NO2) di sekitar jalan raya Perempatan Gose Jl. Bantul Yogyakarta.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.26	Depan Kec. Patuk Wonosari Gunungkidul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO2, dan NO2) di sekitar jalan raya Depan Kec. Patuk Wonosari Gunungkidul.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.27	Perempatan Gading Wonosari Gunungkidul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO2, dan NO2) di sekitar jalan raya Perempatan Gading Wonosari Gunungkidul.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.28	Simpang Empat, Siyono, Wonosari, Gunungkidul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO2, dan NO2) di sekitar jalan raya Simpang Empat, Siyono, Wonosari, Gunungkidul.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.29	Terminal Wonosari, Gunungkidul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO2, dan NO2) di sekitar jalan raya Terminal Wonosari, Gunungkidul.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.30	Perempatan RSUD Wonosari, Gunungkidul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO2, dan NO2) di sekitar jalan raya Perempatan RSUD Wonosari, Gunungkidul.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.31	Kantor Cabang BRI Wates Jl. Wates Kulon Progo	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO2, dan NO2) di sekitar jalan raya Kantor cabang BRI Wates Jl. Wates Kulon Progo.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.32	Perempatan Jodog Jl. Srandakan Bantul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO2, dan NO2) di sekitar jalan raya Perempatan Jodog Jl. Srandakan Bantul.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.33	Halaman Kantor DLH Kabupaten Gunungkidul, Jl. Wonosari-Yogya Km. 3 Siyono Wetan, Playen, Gunungkidul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO2, dan NO2) di sekitar jalan raya Halaman Kantor DLH Kabupaten Gunungkidul, Jl. Wonosari-Yogya Km. 3 Siyono Wetan, Playen, Gunungkidul.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.34	Jl. Tempel Turi Km. 2,	Mengetahui kualitas udara	Tahunan	Ug/m ³	Dinas



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Keringan, Wonokerto, Turi, Sleman	(Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar Jl. Tempel Turi Km. 2, Keringan, Wonokerto, Turi, Sleman.			Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.1.35	Jl. Pemukti Blok UH 7 No. 700 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta (Kantor Kelurahan Giwangan)	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar jalan raya Jl. Pemukti Blok UH 7 No. 700 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta (Kantor Kelurahan Giwangan).	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2	Sekitar Industri	Lokasi pemantauan kualitas udara di sekitar industri di wilayah DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.1	Sebelah Utara PT. Jogjatex	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Sebelah Utara PT. Jogjatex.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.2	Sebelah Timur PT. Jogjatex	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Sebelah Timur PT. Jogjatex.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.3	Sebelah Selatan PT. Jogjatex	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Sebelah Selatan PT. Jogjatex.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.4	Tapak/PT. Jogjatex	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , NO ₂) di sekitar industri Tapak/PT. Jogjatex.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.5	Sebelah Barat PT. Jogjatex	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Sebelah Barat PT. Jogjatex.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.6	Sebelah Utara PT. Madu Baru	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Sebelah Utara PT. Madu Baru.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.7	Tapak/PT. Madu Baru Tirtonirmolo Kasihan Bantul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Tapak/PT. Madu Baru Tirtonirmolo Kasihan Bantul.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.8	Sebelah Timur PT. Madu Baru	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Sebelah Timur PT. Madu Baru.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.9	Sebelah Selatan PT. Madu Baru	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Sebelah Selatan PT. Madu Baru.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.10	Sebelah Barat PT. Madu Baru	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Sebelah Barat PT. Madu Baru.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
4.2.11	PC. GKBI Medari Sleman	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri PC. GKBI Medari Sleman.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.12	Sebelah Barat PC. GKBI Medari	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Sebelah Barat PC. GKBI Medari.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.13	Sebelah Utara PC. GKBI Medari	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Sebelah Utara PC. Gabungan Koperasi Batik Indonesia Medari.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.14	Sebelah Timur PC. GKBI Medari	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Sebelah Timur PC. Gabungan Koperasi Batik Indonesia Medari.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.15	Sebelah Selatan PC. GKBI Medari	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Sebelah Selatan PC. Gabungan Koperasi Batik Indonesia Medari.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.16	PT. Aneka Sinendo Sentolo Kulon Progo	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri PT. Aneka Sinendo Sentolo Kulon Progo.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.17	Sebelah Barat PT. Aneka Sinendo	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Sebelah Barat PT. Aneka Sinendo.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.18	Sebelah Utara PT. Aneka Sinendo	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Sebelah Utara PT. Aneka Sinendo.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.19	Sebelah Timur PT. Aneka Sinendo	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Sebelah Timur PT. Aneka Sinendo.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.20	Sebelah Selatan PT. Aneka Sinendo	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , NO ₂) di sekitar industri Sebelah Selatan PT. Aneka Sinendo	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.21	PT. Aneka Sinedo Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Industri PT. Aneka Sinedo Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
4.2.22	PT. Samitex Sewon, Bantul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri PT. Samitex Sewon, Bantul.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.23	Halaman BPP Semanu, Jl. Wonosari-Semanu, Semanu, Gunungkidul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Halaman BPP Semanu, Jl. Wonosari-Semanu, Semanu, Gunungkidul.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.24	Lingkungan PT. Sport Glove Indonesia (SGI) Kradon, Pandowoharjo, Sleman, Sleman	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Lingkungan PT. Sport Glove Indonesia (SGI) Kradon, Pandowoharjo, Sleman, Sleman.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.2.25	Jl. Gurami No. 236, Sorosutan, Umbulharjo. Yogyakarta (Kantor Kelurahan Sorosutan)	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar industri Gurami No. 236, Sorosutan, Umbulharjo. Yogyakarta (Kantor Kelurahan Sorosutan).	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.3	Sekitar Pemukiman	Lokasi pemantauan kualitas udara di sekitar pemukiman.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.3.1	Rumah Bapak Sudarmadi, ST Kasatriyan, Giripeni, Wates, Kulon Progo	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar pemukiman Rumah Bapak Sudarmadi, ST Kasatriyan, Giripeni, Wates, Kulon Progo.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.3.2	Perumahan Sewon Asri, Bantul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar pemukiman Perumahan Sewon Asri, Bantul.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.3.3	Rumah Bapak Eko Suharso, Madusari, Wonosari, Gunungkidul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar pemukiman Rumah Bapak Eko Suharso, Madusari, Wonosari, Gunungkidul.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.3.4	Perumahan Griya Taman Asri II (GTA) Panasan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar Perumahan Griya Taman Asri II (GTA) Panasan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.3.5	Jl. Mawar II No. 33 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta (Kantor Kelurahan Baciro)	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar pemukiman Jl. Mawar II No. 33 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta (Kantor Kelurahan Baciro).	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.4	Sekitar Yogyakarta	Lokasi pemantauan kualitas udara di sekitar Yogyakarta.			Dinas Lingkungan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Hidup Dan Kehutanan
4.4.1	DLH Kabupaten Kulon Progo Jl. Sugiman, Wates, Kulon Progo	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar DLH Kabupaten Kulonprogo Jl. Sugiman, Wates, Kulon Progo.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.4.2	Komplek 2 Pemda Bantul Jl. Lingkar Timur Manding, Bantul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar Komplek 2 Pemda Bantul Jl. Lingkar Timur Manding, Bantul.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.4.3	Kompleks Bangsal Sewoprojo, Wonosari, Gunungkidul	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar Kompleks Bangsal Sewoprojo, Wonosari, Gunungkidul.	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.4.4	Halaman Kantor Badan Narkotika (BNN) Sleman (Komplek Perkantoran Pemda Sleman)	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar Halaman Kantor Badan Narkotika (BNN) Sleman (Komplek Perkantoran Pemda Sleman).	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
4.4.5	Jl. Malioboro No. 56 Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta (Kantor UPT Malioboro)	Mengetahui kualitas udara (Karbon Monoksida (CO), SO ₂ , dan NO ₂) di sekitar Jl. Malioboro No 56 Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta (Kantor UPT Malioboro).	Tahunan	Ug/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5	Pemantauan Kualitas Air Sungai	Pemantauan terhadap kandungan unsur kualitas air sungai seperti (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di beberapa titik.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.1	Sungai Oya	Lokasi pemantauan kualitas air sungai Oya.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.1.1	Hulu	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hulu sungai Oya.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.1.2	Tengah	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian tengah sungai Oya.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.1.3	Hilir	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) dibagian hilir sungai Oya.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
				Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	
5.2	Sungai Kuning	Lokasi pemantauan kualitas air Sungai Kuning.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.2.1	Hulu	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hulu Sungai Kuning.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.2.2	Tengah	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian tengah Sungai Kuning	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.2.3	Hilir	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hilir Sungai Kuning.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.3	Sungai Tambakbayan	Lokasi pemantauan kualitas air Sungai Tambakbayan.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.3.1	Hulu	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hulu Sungai Tambakbayan.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.3.2	Tengah	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian tengah Sungai Tambakbayan.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.3.3	Hilir	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hilir Sungai Tambakbayan.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.4	Sungai Gajahwong	Lokasi pemantauan kualitas air sungai Gajahwong.			Dinas Lingkungan Hidup Dan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Kehutanan
5.4.1	Hulu	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hulu Sungai Gajahwong.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.4.2	Tengah	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian tengah Sungai Gajahwong.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.4.3	Hilir	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hilir Sungai Gajahwong.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.5	Sungai Belik	Lokasi pemantauan kualitas air Sungai Belik.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.5.1	Hulu	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hulu Sungai Belik.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.5.2	Tengah	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian tengah Sungai Belik.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.5.3	Hilir	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hilir Sungai Belik.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.6	Sungai Code	Lokasi pemantauan kualitas air Sungai Code.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.6.1	Hulu	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hulu Sungai Code.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja,	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
				Koli Total : MPN/100ml	
5.6.2	Tengah	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian tengah Sungai Code.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.6.3	Hilir	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hilir Sungai Code.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.7	Sungai Winongo	Lokasi pemantauan kualitas air Sungai Winongo.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.7.1	Hulu	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hulu Sungai Winongo.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.7.2	Tengah	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian tengah Sungai Winongo.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.7.3	Hilir	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hilir Sungai Winongo.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.8	Sungai Bedog	Lokasi pemantauan kualitas air Sungai Bedog.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.8.1	Hulu	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hulu Sungai Bedog.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.8.2	Tengah	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) dibagian tengah Sungai Bedog.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
				Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	
5.8.3	Hilir	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hilir Sungai Bedog.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.9	Sungai Konteng	Lokasi pemantauan kualitas air sungai Konteng.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.9.1	Hulu	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hulu Sungai Konteng.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.9.2	Tengah	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian tengah Sungai Konteng.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.9.3	Hilir	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hilir Sungai Konteng.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.10	Sungai Bulus	Lokasi pemantauan kualitas air Sungai Bulus.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.10.1	Hulu	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian hulu Sungai Bulus.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.10.2	Tengah	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, dan Koli Total) di bagian tengah Sungai Bulus.	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat : mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
5.10.3	Hilir	Mengetahui kualitas air (BOD, COD, TSS, DO, Total Fosfat, Koli Tinja, Koli Total) di bagian hilir	Semester	BOD, COD, TSS, DO, TOTAL Fosfat	Dinas Lingkungan Hidup Dan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Sungai Bulus		: mg/m ³ Koli Tinja, Koli Total : MPN/100ml	Kehutanan
6	Pemantauan Kualitas Air Laut	Pemantauan terhadap kandungan unsur kualitas air laut ,seperti BOD, COD, TSS, Coliform Total, DHL, Salinitas, Cd, Cr, Pb, Ni, dan Zn.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
6.1	Pantai Baron	Hasil pemantauan kandungan unsur kualitas air laut meliputi BOD, COD, TSS, Coliform Total, DHL, Salinitas, Cd, Cr, Pb, Ni, dan Zn di Pantai Baron.	Semester	BOD, COD, TSS, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn : mg/L Coliform Total : MPN/100ml DHL : uS/mc Salinitas : %	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
6.2	Pantai Congot	Hasil pemantauan kandungan unsur kualitas air laut meliputi BOD, COD, TSS, Coliform Total, DHL, Salinitas, Cd, Cr, Pb, Ni, dan Zn di Pantai Congot	Semester	BOD, COD, TSS, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn : mg/L Coliform Total : MPN/100ml DHL : uS/mc Salinitas : %	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
6.3	Pantai Depok	Hasil pemantauan kandungan unsur kualitas air laut meliputi BOD, COD, TSS, Coliform Total, DHL, Salinitas, Cd, Cr, Pb, Ni, dan Zn di Pantai Depok.	Semester	BOD, COD, TSS, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn : mg/L Coliform Total : MPN/100ml DHL : uS/mc Salinitas : %	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
6.4	Pantai Glagah	Hasil pemantauan kandungan unsur kualitas air laut meliputi BOD, COD, TSS, Coliform Total, DHL, Salinitas, Cd, Cr, Pb, Ni, dan Zn di Pantai Glagah.	Semester	BOD, COD, TSS, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn : mg/L Coliform Total : MPN/100ml DHL : uS/mc Salinitas : %	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
6.5	Pantai Kuwaru	Hasil pemantauan kandungan unsur kualitas air laut meliputi BOD, COD, TSS, Coliform Total, DHL, Salinitas, Cd, Cr, Pb, Ni, dan Zn di Pantai Kuwaru.	Semester	BOD, COD, TSS, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn : mg/L Coliform Total : MPN/100ml DHL : uS/mc Salinitas : %	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
6.6	Pantai Pandansimo	Hasil pemantauan kandungan unsur kualitas air laut meliputi BOD, COD, TSS, Coliform Total, DHL, Salinitas, Cd, Cr, Pb, Ni, dan Zn di Pantai Pandansimo	Semester	BOD, COD, TSS, Cd, Cr, Pb, Ni, Zn : mg/L Coliform Total : MPN/100ml DHL : uS/mc	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
				Salinitas : %	
7	Pemantauan Kualitas Air Sumur	Melakukan pemantauan terhadap kualitas air yang ada di sumur.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
7.1	Jumlah Sumur yang Dipantau	Jumlah titik lokasi pemantauan sumur pada periode berkenaan.	Semester	Unit	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
8	Industri	Usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
8.1	Industri yang Memiliki IPAL	Jumlah industri yang memiliki IPAL dan melaporkan pemantauan limbah cair.	Triwulan	Perusahaan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
8.2	Industri yang Memiliki Sarana Pengendalian Pencemaran Udara	Jumlah industri yang memiliki sarana pengendalian pencemaran udara	Triwulan	Perusahaan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
9	Perusahaan Wajib Dokumen Lingkungan	Dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
9.1	Jumlah Perusahaan Wajib Dokumen Lingkungan yang Diawasi	Jumlah perusahaan wajib dokumen lingkungan yang diawasi.	Semester	Perusahaan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
9.2	Jumlah Perusahaan yang Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan dan Telah diverifikasi DLHK Daerah Istimewa Yogyakarta	Jumlah perusahaan yang pengajuan dokumen lingkungannya telah diverifikasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	Semester	Perusahaan	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
10	Pelestarian Lingkungan Hidup	Rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
10.1	Penanaman Hutan Bakau	Luas lahan penanaman hutan bakau di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
10.2	Penanaman Cemara Udang di Pesisir Pantai	Jumlah tanaman cemara udang yang ditanam di pesisir pantai di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tanaman	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
10.3	Pembuatan Telaga Desa	Pelestarian lingkungan hidup dengan cara Pembuatan telaga desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Telaga	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
10.3.1	Jumlah Lokasi	Jumlah unit Telaga Desa yang dibuat di wilayah Daerah	Tahunan	Unit	Dinas Lingkungan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Hidup Dan Kehutanan
10.3.2	Luas Telaga	Luas lahan yang digunakan untuk Pembuatan Telaga Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
10.4	Dokumen Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	Dokumen inventarisasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
10.5	Penambahan Luas Tutupan Vegetasi dan Lahan Terkonservasi	Luasan lahan (dalam hektar) yang menyatakan Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan terhadap luasan tutupan vegetasi di tahun sebelumnya.	Tahunan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
11	Data kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hasil kerja yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
11.1	Peningkatan Akses Informasi Lingkungan Hidup	Angka yang menyatakan peningkatan jenis Informasi lingkungan hidup berbasis web yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan dibandingkan tahun sebelumnya.	Tahunan	Jenis	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
11.2	Presentase Ketercapaian Sasaran Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	Angka persentase yang menyatakan proporsi sasaran pembangunan lingkungan hidup yang tercapai dibandingkan terhadap semua sasaran pembangunan bidang Lingkungan Hidup yang direncanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
11.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi kualitas lingkungan hidup di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
11.3.1	Indeks Kualitas Air	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat kondisi kualitas air di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
11.3.2	Indeks Kualitas Udara	Gambaran atau indikasi awal	Tahunan	Indeks	Dinas

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		yang memberikan kesimpulan cepat kondisi kualitas udara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
11.3.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari kondisi kualitas tutupan lahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan



1.09 PERTANAHAN

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Pulau	Jumlah pulau yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Biro Tata Pemerintahan
1.1	Pulau Tidak Berpenduduk	Jumlah pulau tidak berpenduduk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Biro Tata Pemerintahan
1.2	Pulau Bernama	Jumlah pulau yang memiliki nama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Biro Tata Pemerintahan
1.2.1	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk yang tinggal di pulau bernama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Orang	Biro Tata Pemerintahan
1.2.2	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah kepala keluarga yang tinggal di pulau bernama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	KK	Biro Tata Pemerintahan
1.3	Pulau Tidak Bernama	Jumlah pulau yang tidak mempunyai nama yang terletak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Biro Tata Pemerintahan
1.3.1	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk yang tinggal pada pulau tidak bernama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Orang	Biro Tata Pemerintahan
1.3.2	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah kepala keluarga yang tinggal pada pulau tidak bernama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	KK	Biro Tata Pemerintahan
1.4	Pulau-Pulau Kecil	Jumlah pulau yang memiliki luas wilayah sempit sehingga tingkat ketergantungan masyarakat yang ada di dalamnya bergantung penuh pada pulau lain ataupun pulau induk yang lebih besar terdapat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Biro Tata Pemerintahan
1.4.1	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk yang tinggal pada pulau-pulau kecil di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Orang	Biro Tata Pemerintahan
1.4.2	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah kepala keluarga yang tinggal pada pulau-pulau kecil di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	KK	Biro Tata Pemerintahan
2	Administrasi Pemerintahan	Banyaknya wilayah administrasi Pemerintahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Biro Tata Pemerintahan
2.1	Jumlah Kabupaten	Jumlah wilayah administrasi tingkat kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Biro Tata Pemerintahan
2.2	Jumlah Kota	Jumlah wilayah administrasi tingkat kota administratif yang terdapat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Biro Tata Pemerintahan
2.3	Jumlah Kecamatan	Jumlah wilayah administrasi tingkat kecamatan/Kapanewon di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Biro Tata Pemerintahan
2.4	Jumlah Kelurahan	Jumlah wilayah administrasi tingkat Kelurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Biro Tata Pemerintahan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
2.5	Jumlah Desa	Jumlah wilayah administrasi tingkat desa yang dipimpin oleh kepala desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Biro Tata Pemerintahan
2.6	Jumlah RW	Jumlah satuan wilayah manajerial Rukun Warga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Biro Tata Pemerintahan
2.7	Jumlah RT	Jumlah satuan wilayah manajerial Rukun Tetangga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Biro Tata Pemerintahan
2.8	Jumlah Dusun	Jumlah satuan wilayah manajerial dusun (bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Biro Tata Pemerintahan
3	Jumlah Sarana Prasarana Pemerintahan	Data terkait jumlah sarana prasarana pemerintahan.			Biro Tata Pemerintahan
3.1	Kantor Bupati/Walikota	Jumlah kantor bupati atau walikota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Biro Tata Pemerintahan
3.2	Kantor Camat	Jumlah kantor pemerintahan camat/panewu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Biro Tata Pemerintahan
3.3	Kantor Lurah	Jumlah kantor pemerintahan lurah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Biro Tata Pemerintahan
3.4	Kantor Pemerintah Desa	Jumlah kantor pemerintahan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Biro Tata Pemerintahan
4	Data Kinerja Biro Tata Pemerintahan	Hasil kerja yang telah dicapai oleh Biro Tata Pemerintahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Biro Tata Pemerintahan
4.1	Persentase Penduduk yang Ber-KTP (NIK)	Persentase penduduk ber-KTP terhadap total jumlah penduduk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Biro Tata Pemerintahan
4.2	Persentase Dinamika Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah yang Direspon dengan Kebijakan	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan terhadap seluruh dinamika penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	%	Biro Tata Pemerintahan
4.3	Persentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD terhadap seluruh program SKPD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	%	Biro Tata Pemerintahan
4.4	Terwujudnya Penetapan Kepala Daerah Sesuai UU Keistimewaan	Data penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Kali	Biro Tata Pemerintahan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
4.5	Persentase Dinamika Penyelenggaraan Pemerintah Umum, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama yang Direspon dengan Kebijakan	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintah umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan terhadap seluruh dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	%	Biro Tata Pemerintahan



1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Pertumbuhan Penduduk	Perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran.			
1.1	Rasio Migrasi (Masuk/Keluar)	Perbandingan antara jumlah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan atau disebut migrasi masuk dengan perpindahan penduduk keluar pada tingkat wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan		Biro Tata Pemerintahan
1.2	Jumlah Migrasi Masuk	Banyaknya atau tingkat penduduk masuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Biro Tata Pemerintahan
1.3	Jumlah Migrasi Keluar	Banyaknya atau tingkat penduduk keluar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Biro Tata Pemerintahan
1.4	Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil	Perbandingan anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Biro Tata Pemerintahan
2	Jumlah Kepala Keluarga	Banyaknya seseorang yang mempunyai tanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala keluarga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	KK (Kepala Keluarga)	Biro Tata Pemerintahan



1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.1	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
1.2	Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif	Persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif terhadap jumlah total keseluruhan keputusan yang sudah diambil dalam lembaga eksekutif, legislatif di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	DP3AP
1.3	Jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	Jumlah Kabupaten/Kota di DIY yang sudah mendapatkan kategori layak anak (kota layak anak Secara umum harus memiliki empat hak dasar anak, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi) berkategori nindya ke atas (pencapaian yang sangat baik).	Tahunan	Kab./Kota	DP3AP
1.4	Jumlah Desa Prima	Jumlah kelompok Desa Prima (Desa Prima adalah program meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam suatu wilayah melalui peningkatan produktivitas ekonomi agar tercipta kehidupan yang lebih baik. Program ini bertujuan untuk mewujudkan perempuan Indonesia yang maju dan mandiri di bidang ekonomi melalui pengembangan kegiatan ekonomi produktif untuk kesejahteraan keluarga masyarakat maupun bangsa.) yang telah dibentuk dan dibina baik oleh provinsi DIY.	Tahunan	Desa	DP3AP
1.4.1	Kota Yogyakarta	Jumlah Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) di wilayah Kota Yogyakarta.	Tahunan	Desa	DP3AP
1.4.2	Kab. Bantul	Jumlah Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) di wilayah Kabupaten Bantul.	Tahunan	Desa	DP3AP



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1.4.3	Kab. Gunungkidul	Jumlah Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) di wilayah Kabupaten Gunungkidul.	Tahunan	Desa	DP3AP
1.4.4	Kab. Kulon Progo	jumlah Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) di wilayah Kabupaten Kulon Progo.	Tahunan	Desa	DP3AP
1.4.5	Kab. Sleman	Jumlah Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) di wilayah Kabupaten Sleman.	Tahunan	Desa	DP3AP
1.5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan begitu erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi penerus bangsa.	Tahunan	Angka	DP3AP
1.6	Jumlah Kebijakan yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan	Banyaknya kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	DP3AP
1.7	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Perempuan dan Laki-Laki 0-17 Tahun	Jumlah korban kekerasan terhadap anak (usia 0 s.d. 17 tahun) dibagi jumlah penduduk anak dikali 1.000 di DIY.	Tahunan	Angka	DP3AP
1.8	Proporsi Perempuan dan Anak Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Proporsi perempuan dan anak perempuan mengalami KDRT adalah jumlah korban KDRT (segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain) perempuan dan anak perempuan dibagi keseluruhan jumlah penduduk perempuan di Wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	DP3AP
1.9	Proporsi Perempuan dan Anak Perempuan Mengalami Kekerasan Non-KDRT	Proporsi perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan non KDRT adalah jumlah korban non KDRT perempuan dan anak perempuan dibagi keseluruhan jumlah penduduk perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	DP3AP
1.10	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	Persentase jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif terhadap jumlah keseluruhan korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	DP3AP
1.11	Median Usia Kawin	Median usia kawin pertama	Tahunan	tahun	DP3AP



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 25-49 Tahun	untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
1.12	UU dan PP yang Menjamin Perempuan Umur 15-49 Tahun untuk Mendapatkan Pelayanan Terkait Kesehatan Seksual	Jumlah UU dan PP yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan terkait kesehatan seksual.	Tahunan	Angka	DP3AP
1.13	Tersedianya Pusat Layanan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di DIY	Jumlah lembaga yang memberikan layanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	DP3AP
2	Data Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat				
2.1	Penurunan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Rasio angka penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap jumlah total kasus di wilayah DIY pada tahun berkenaan	Tahunan	Rasio	DP3AP
2.2	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase jumlah kekerasan yang terjadi terhadap anak yang meliputi salah satu dari satu tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional (dapat terjadi tumpang tindih antara tiga jenis kekerasan tersebut) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	DP3AP
2.3	Umur Menikah Pertama Perempuan	Median usia kawin pertama umur 25-49 Tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	DP3AP
2.4	Persentase Legalitas Keluarga (Perkawinan dan Kelahiran)	Persentase legalitas sebuah keluarga yang dapat dilihat dari apakah anak tersebut sudah tercatat dan memiliki akta kelahiran dan apakah perkawinan orangtua dicatatkan dan memiliki akta menikah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	DP3AP
2.5	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap jumlah total kasus yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	DP3AP
2.6	Persentase Perempuan Pengambilan Keputusan di Ranah Publik	Persentase perempuan pengambil keputusan di ranah publik (Anggota Legislatif) di wilayah DIY pada tahun berkenaan terhadap jumlah perempuan yang terdapat di	Tahunan	%	DP3AP



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
2.7	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga	Jumlah anak yang dilahirkan di bagi dengan jumlah keluarga (KK) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	DP3AP
2.8	Rasio Kekerasan dalam Keluarga	Perbandingan jumlah kasus kekerasan yang terjadi di dalam keluarga dengan jumlah total kejadian kekerasan di wilayah DI DIY.	Tahunan	Rasio	DP3AP
3	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi	Jumlah kasus Kekerasan yang terjadi Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi di suatu wilayah pada tahun berkenaan.			
3.1	Kulon Progo	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di wilayah kabupaten kulon progo pada tahun berkenaan.			
3.1.1	Laki-Laki	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap laki laki di wilayah kabupaten kulon progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.1.1.1	Kelompok Umur	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap kelompok umur anak laki laki yang mengalami kekerasan di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.1.1.1.1	0-17 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.1.1.1.2	18-25 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.1.1.1.3	25 Tahun ke Atas	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada laki-laki pada kelompok umur 25 Tahun keatas di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.1.1.2	Tempat Kejadian	Tempat terjadinya tindak kekerasan.			
3.1.1.2.1	Rumah Tangga	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pada laki laki di Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.1.1.2.2	Tempat Kerja	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada laki laki di Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.1.1.2.3	Lainnya	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada laki laki di Kulon Progo	Tahunan	Kasus	DP3AP

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pada tahun berkenaan.			
3.1.2	Perempuan	Jumlah Kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.1.2.1	Kelompok Umur	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap kelompok umur tertentu di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.1.2.1.1	0-17 Tahun	Jumlah Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.1.2.1.2	18-25 Tahun	Jumlah Kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.1.2.1.3	25 Tahun ke Atas	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pada kelompok umur 25 tahun keatas di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.1.2.2	Tempat Kejadian	Tempat terjadinya tindak kekerasan.			
3.1.2.2.1	Rumah Tangga	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga pada perempuan di Kulon Progo pada tahun berkenaan.			
3.1.2.2.2	Tempat Kerja	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada perempuan di Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.1.2.2.3	Lainnya	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada perempuan di Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2	Bantul	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.			
3.2.1	Laki-Laki	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap laki laki di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2.1.1	Kelompok Umur	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap kelompok umur anak laki laki yang mengalami kekerasan di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2.1.1.1	0-17 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
3.2.1.1.2	18-25 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2.1.1.3	25 Tahun ke Atas	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada laki-laki pada kelompok umur 25 Tahun keatas di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2.1.2	Tempat Kejadian	Tempat terjadinya tindak kekerasan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2.1.2.1	Rumah Tangga	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pada laki laki di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2.1.2.2	Tempat Kerja	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada laki laki di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2.1.2.3	Lainnya	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada laki laki di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2.2	Perempuan	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2.2.1	Kelompok Umur	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap kelompok umur tertentu di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2.2.1.1	0-17 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2.2.1.2	18-25 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2.2.1.3	25 Tahun ke Atas	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pada kelompok umur 25 tahun keatas di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2.2.2	Tempat Kejadian	Tempat terjadinya tindak kekerasan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2.2.2.1	Rumah Tangga	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga pada perempuan di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2.2.2.2	Tempat Kerja	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada perempuan di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.2.2.2.3	Lainnya	Jumlah kasus kekerasan yang	Tahunan	Kasus	DP3AP



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada perempuan di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.			
3.3	Gunungkidul	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.			
3.3.1	Laki-Laki	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap laki-laki di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.3.1.1	Kelompok Umur	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap kelompok umur anak laki laki yang mengalami kekerasan di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.3.1.1.1	0-17 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.3.1.1.2	18-25 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 18-25 di wilayah kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.3.1.1.3	25 Tahun ke Atas	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada laki-laki pada kelompok umur 25 tahun ke atas di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.3.1.2	Tempat Kejadian	Tempat terjadinya tindak kekerasan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.3.1.2.1	Rumah Tangga	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pada laki laki di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.3.1.2.2	Tempat Kerja	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada laki-laki di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.3.1.2.3	Lainnya	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada laki laki di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.3.2	Perempuan	Jumlah Kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.3.2.1	Kelompok Umur	Jumlah Kasus kekerasan yang terjadi terhadap kelompok umur tertentu di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
3.3.2.1.1	0-17 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.3.2.1.2	18-25 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.3.2.1.3	25 Tahun ke Atas	Jumlah Kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pada kelompok umur 25 tahun ke atas di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.3.2.2	Tempat Kejadian	Tempat terjadinya tindak kekerasan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.3.2.2.1	Rumah Tangga	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga pada perempuan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.3.2.2.2	Tempat Kerja	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada perempuan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.3.2.2.3	Lainnya	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada perempuan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4	Sleman	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.			
3.4.1	Laki-Laki	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap laki-laki di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4.1.1	Kelompok Umur	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap kelompok umur anak laki-laki yang mengalami kekerasan di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4.1.1.1	0-17 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4.1.1.2	18-25 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4.1.1.3	25 Tahun ke Atas	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada laki-laki pada	Tahunan	Kasus	DP3AP



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		kelompok umur 25 tahun ke atas di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.			
3.4.1.2	Tempat Kejadian	Tempat terjadinya tindak kekerasan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4.1.2.1	Rumah Tangga	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pada laki-laki di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4.1.2.2	Tempat Kerja	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada laki-laki di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4.1.2.3	Lainnya	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada laki-laki di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4.2	Perempuan	Jumlah Kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4.2.1	Kelompok Umur	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap kelompok umur tertentu di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4.2.1.1	0-17 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4.2.1.2	18-25 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4.2.1.3	25 Tahun ke Atas	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pada kelompok umur 25 tahun ke atas di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4.2.2	Tempat Kejadian	Tempat terjadinya tindak kekerasan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4.2.2.1	Rumah Tangga	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga pada perempuan di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4.2.2.2	Tempat Kerja	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada perempuan di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.4.2.2.3	Lainnya	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada perempuan di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5	Kota Yogyakarta	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Yogyakarta			

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pada tahun berkenaan.			
3.5.1	Laki-Laki	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap laki laki di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5.1.1	Kelompok Umur	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap kelompok umur anak laki laki yang mengalami kekerasan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5.1.1.1	0-17 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan .	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5.1.1.2	18-25 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5.1.1.3	25 Tahun ke Atas	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada laki-laki pada kelompok umur 25 tahun keatas di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5.1.2	Tempat Kejadian	Tempat terjadinya tindak kekerasan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5.1.2.1	Rumah Tangga	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pada laki-laki di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5.1.2.2	Tempat Kerja	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada laki-laki di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5.1.2.3	Lainnya	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada laki laki di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5.2	Perempuan	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5.2.1	Kelompok Umur	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap kelompok umur tertentu di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5.2.1.1	0-17 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan pada kelompok umur 0-17 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5.2.1.2	18-25 Tahun	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak	Tahunan	Kasus	DP3AP



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		perempuan pada kelompok umur 18-25 di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.			
3.5.2.1.3	25 Tahun ke Atas	Jumlah Kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pada kelompok umur 25 tahun keatas di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5.2.2	Tempat Kejadian	Tempat terjadinya tindak kekerasan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5.2.2.1	Rumah Tangga	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga pada perempuan di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5.2.2.2	Tempat Kerja	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat kerja pada perempuan di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP
3.5.2.2.3	Lainnya	Jumlah kasus kekerasan yang terjadi di tempat lain selain rumah tinggal dan tempat kerja pada perempuan di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	DP3AP



1.13 SOSIAL

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial	Data penduduk penyandang masalah sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan			Dinas Sosial
1.1	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.1	Anak Jalanan	Jumlah anak jalanan (anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.2	Eks Psikotik	Jumlah penderita eks psikotik (seseorang yang mengalami cacat mental atau gangguan jiwa (telah dirawat di rumah sakit jiwa dan direkomendasikan dalam kondisi tenang) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.3	Pengemis	Jumlah pengemis (orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.4	Gelandangan	Jumlah gelandangan (orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.5	Anak Balita Terlantar	Jumlah anak balita terlantar (seorang anak berusia 5 tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.6	Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar (anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.7	Korban Tindak kekerasan	Jumlah korban tindak kekerasan (orang (baik individu, keluarga, maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah,	Tahunan	Orang	Dinas Sosial

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk kekerasan lainnya, maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
1.1.8	Pemulung	Jumlah pemulung (orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaurulang barang-barang bekas) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.9	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi (seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.10	Lanjut Usia Terlantar	Jumlah lanjut usia terlantar (seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.11	Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas (setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.11.1	Penyandang Tuna Netra	Jumlah penyandang cacat netra (mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total serta mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal dan dari jarak normal meskipun dibantu dengan kaca mata) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.11.2	Penyandang Tuna Rungu-Wicara	Jumlah penyandang tuna rungu-wicara (seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya dan kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen serta seseorang yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.11.3	Penyandang Tuna Daksa	Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio, dan lumpuh. Jumlah penyandang tuna daksa di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.11.4	Penyandang Tuna Grahita	Tuna grahita adalah sebutan bagi orang-	Tahunan	Orang	Dinas



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Jumlah penyandang tuna grahita di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Sosial
1.1.11.5	Penyandang Disabilitas Mental	Penyandang disabilitas mental adalah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat. Jumlah penyandang cacat jiwa di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.11.6	Penyandang Disabilitas Ganda	Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli. Jumlah penyandang cacat ganda di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.11.7	Jumlah Penyandang Difabilitas Miskin dan Rentan yang Menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jumlah penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.11.8	Tidak Diketahui Jenis Kecatatannya	Jumlah penyandang disabilitas yang tidak diketahui jenis kecacatannya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.9	Tuna Susila	Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa. Jumlah tuna susila di wilayah DIY pada tahun berkenaan pada tahun.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.10	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP) adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal. Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.11	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA. Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.12	Keluarga Fakir Miskin	Fakir miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk	Tahunan	KK	Dinas Sosial

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan. Jumlah keluarga fakir miskin di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
1.1.13	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. Jumlah keluarga bermasalah sosial psikologis di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	KK	Dinas Sosial
1.1.14	Korban Bencana Alam	Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Jumlah korban bencana alam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.15	Korban Bencana Sosial	Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Jumlah korban bencana sosial dan pengungsi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.16	Pekerja Migran Bermasalah	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), serta ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial. Jumlah keluarga migran terlanter di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.1.17	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan, dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
1.2	Jumlah Panti Sosial (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial)	Jumlah panti sosial (lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional,	Tahunan	Unit	Dinas Sosial

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi, dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
1.2.1	Panti Sosial Asuhan Anak (Balai rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak)	Jumlah panti sosial asuhan anak (suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial kepada anak asuh) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Sosial
1.2.2	Panti Sosial Bina Remaja (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja)	Jumlah panti sosial bina remaja (lembaga sosial yang dapat menolong remaja putus sekolah dan keluarga tidak mampu agar remaja tersebut mendapat pendidikan dan pembinaan yang layak dan baik) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Sosial
1.2.3	Panti Sosial Tresna Wredha (Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha)	Jumlah panti sosial tresna werdha (suatu institusi yang memberikan pelayanan dan perawatan berupa perawatan jasmani, perawatan rohani, perawatan sosial, serta perlindungan untuk lansia agar dapat menikmati taraf hidup secara wajar) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Sosial
1.2.4	Panti Sosial Karya Wanita (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita)	Jumlah panti sosial karya wanita (panti pemerintah yang berdiri sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sosial di wilayah provinsi yang telah mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan semakin tingginya kemajuan teknologi informasi) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Sosial
1.2.5	Panti Sosial Bina Karya (Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras)	Jumlah panti sosial bina karya (panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para gelandangan, pengemis, dan orang terlantar, agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Sosial
1.2.6	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	Jumlah balai rehabilitasi terpadu penyandang disabilitas (pusat perlindungan, pelayanan, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas yang kreatif, inovatif, dan profesional) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Sosial
1.3	Pusat Rehabilitasi Narkoba	Jumlah pusat rehabilitasi narkoba (sebuah tempat yang dikhususkan untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Sosial
1.4	Rumah Singgah	Jumlah rumah singgah (tempat perantara	Tahunan	Unit	Dinas

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		yang sifatnya sementara, bagi para para anak jalanan yang erat hubungannya dengan pihak pihak yang mau menolong mereka) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Sosial
1.5	Jumlah Panti Sosial	Jumlah panti sosial (lembaga yang menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan baik swasta maupun negeri) yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Sosial
1.5.1	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah panti sosial (lembaga yang menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan baik swasta maupun negeri) yang berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo.	Tahunan	Unit	Dinas Sosial
1.5.2	Kabupaten Bantul	Jumlah panti sosial (lembaga yang menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan baik swasta maupun negeri) yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.	Tahunan	Unit	Dinas Sosial
1.5.3	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah panti sosial (lembaga yang menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan baik swasta maupun negeri) yang berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul.	Tahunan	Unit	Dinas Sosial
1.5.4	Kabupaten Sleman	Jumlah panti sosial (lembaga yang menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan baik swasta maupun negeri) yang berada di wilayah Kabupaten Sleman.	Tahunan	Unit	Dinas Sosial
1.5.5	Kota Yogyakarta	Jumlah panti sosial (lembaga yang menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan baik swasta maupun negeri) yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.	Tahunan	Unit	Dinas Sosial
1.4	Pusat Rehabilitasi Narkoba	Jumlah pusat rehabilitasi narkoba (sebuah tempat yang dikhususkan untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba) di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Sosial
1.5	Rumah Singgah	Jumlah rumah singgah (tempat perantara yang sifatnya sementara, bagi para para anak jalanan yang erat hubungannya dengan pihak pihak yang mau menolong mereka) di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Sosial
1.6	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/PKH Graduasi	Jumlah keluarga miskin (suatu kondisi ketidakmampuan secara keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat (bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu)/PKH graduasi (adalah mereka yang masih dalam kategori miskin dan rentan miskin, tetapi sudah graduasi	Tahunan	Keluarga	Dinas Sosial

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		karena komponennya tidak terpenuhi) di wilayah DIY pada tahun berkenaan pada tahun bersangkutan.			
1.7	Pemulangan Orang Terlantar	Jumlah orang terlantar (perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat yang oleh karena sesuatu sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat sosial, ekonomi atau psikologis, serta tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitannya) yang sudah bisa dipulangkan ke daerah asal di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Jiwa	Dinas Sosial
2	Jumlah PMKS				
2.1	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar), yaitu gelandangan, pengemis, psikotik, atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan wanita rawan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
2.2	PMKS yang Tertangani	Jenis masalah pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yaitu gelandangan, pengemis, psikotik atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), anak jalanan, dan wanita rawan sosial yang sudah tertangani di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Jenis	Dinas Sosial
2.3	PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima intervensi berupa layanan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
2.4	PMKS yang Diberikan Bantuan	Jumlah PMKS yang telah diberikan menerima intervensi berupa layanan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
3	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung, atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial, dan alam.			Dinas Sosial
3.1	Karang Taruna	Jumlah karang taruna (organisasi sosial kepemudaan, wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan secara organisasi berdiri sendiri) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Dinas Sosial
3.2	Tenaga Kesejahteraan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial	Tahunan	Orang	Dinas

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Sosial Kecamatan (TKSK)	Kecamatan (TKSK), yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dalam penanganan kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat Kecamatan, di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Sosial
3.3	Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah organisasi sosial (suatu lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Sosial
3.4	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah pekerja sosial (warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan di bidang kesejahteraan sosial) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
3.5	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Jumlah Taruna Siaga Bencana/Tagana (orang/relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Sosial
3.6	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB)	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat/WKSMB (merupakan sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Dinas Sosial
4	Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	Jumlah kegiatan pembinaan yang sudah dilakukan terhadap (LSM), Ormas, dan OKP di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	Dinas Sosial
5	Data Kinerja Dinas Sosial				Dinas Sosial
5.1	Persentase PMKS yang Memperoleh Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan, dan Berfungsi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, berfungsi sosial terhadap total penduduk penyandang masalah sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Sosial
5.2	Persentase PSKS dan Masyarakat Sasaran yang Meningkatkan Kemampuan dan Partisipasinya dalam Penyelenggaraan Kesosialan.	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat sasaran yg meningkatkan kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kegiatan sosial terhadap peningkatan pelayanan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Sosial



1.14 KETENAGAKERJAAN

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha				
1.1	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
1.1.1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
1.1.2	Pertambangan dan Penggalian	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
1.1.3	Industri Pengolahan	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan usaha industri pengolahan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
1.1.4	Pengadaan Listrik dan Gas	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
1.1.5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
1.1.6	Konstruksi	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan usaha konstruksi di wilayah DIY.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
1.1.7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan usaha perdagangan dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
1.1.8	Transportasi dan Pergudangan	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha transportasi dan pergudangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
1.1.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
1.1.10	Informasi dan Komunikasi	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha informasi dan komunikasi di wilayah DIY pada tahun	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			
1.1.11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
1.1.12	Real Estate	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan usaha real estate di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
1.1.13	Jasa Perusahaan	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan usaha jasa perusahaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
1.1.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Wajib, dan Jaminan Sosial Wajib	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan usaha administrasi pemerintah, pertahanan wajib, dan jaminan sosial wajib di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
1.1.15	Jasa Pendidikan	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan usaha jasa pendidikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
1.1.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
1.1.17	Jasa Lainnya	Banyaknya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan usaha jasa lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan jasa.			Badan Pusat Statistik
2.1	Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan	Banyaknya penduduk berusia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan yang dilakukan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.1.1	Menurut Jenis Kegiatan	Jenis kegiatan yang dilakukan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester		Badan Pusat Statistik
2.1.1.1	Angkatan Kerja	Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dan menganggur di wilayah DIY pada tahun berkenaan berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.1.1.1.1	Bekerja	Banyaknya penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di wilayah DIY pada tahun	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan. Bekerja adalah melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama satu minggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan.			
2.1.1.1.2	Pengangguran	Banyaknya penduduk berusia 15 tahun keatas yang menganggur di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.1.1.2	Bukan Angkatan Kerja	Penduduk usia 15 tahun ke atas yang hanya bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.1.1.2.1	Sekolah	Banyaknya penduduk berusia 15 tahun ke atas yang masih bersekolah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Sekolah adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan (tidak termasuk yang sedang libur sekolah).	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.1.1.2.2	Lainnya	Banyaknya penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mempunyai kegiatan lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.1.1.2.3	Mengurus Rumah Tangga	Banyaknya penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mengurus kegiatan rumah tangga di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.1.2	Menurut Status Pekerjaan	Status pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester		Badan Pusat Statistik
2.2	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	Banyaknya pencari kerja yang ditempatkan di wilayah DIY pada tahun berkenaan .	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.2.1	Antar Kerja Lokal (AKL)	Banyaknya pencari kerja yang ditempatkan di antar kerja lokal (AKL) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem penempatan tenaga kerja dalam 1 (satu) daerah.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.2.1.1	Laki-Laki	Banyaknya pencari kerja yang di tenpatkan di antar kerja lokal (AKL) yang berjenis kelamin laki-	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
2.2.1.2	Perempuan	Banyaknya pencari kerja yang ditempatkan di antar kerja lokal (AKL) yang berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.2.2	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Banyaknya pencari kerja di wilayah DIY yang ditempatkan melalui mekanisme antar daerah pada tahun berkenaan. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat (AKAD) adalah sistem penempatan tenaga kerja antar daerah provinsi.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.2.2.1	Laki-Laki	Banyaknya pencari kerja di wilayah DIY yang di tempatkan di antar kerja antar daerah (AKAD) yang berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.2.2.2	Perempuan	Banyaknya pencari kerja di wilayah DIY yang ditempatkan di antar kerja antar daerah (AKAD) berjenis kelamin perempuan pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.2.3	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	Banyaknya pencari kerja di wilayah DIY yang di tempatkan melalui mekanisme antar kerja antar negara (AKAN) pada tahun berkenaan. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah sistem penempatan tenaga kerja di luar negeri.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.2.3.1	Laki-Laki	Banyaknya pencari kerja di wilayah DIY yang ditempatkan di antar kerja antar negara (AKAN) berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.2.3.2	Perempuan	Banyaknya pencari kerja di wilayah DIY yang ditempatkan di antar kerja antar negara (AKAN) berjenis kelamin perempuan pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.3	Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan	Banyaknya pencari kerja di wilayah DIY yang belum mendapatkan penempatan kerja pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.3.1	Laki-Laki	Banyaknya pencari kerja berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY yang belum mendapatkan penempatan pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.3.2	Perempuan	Banyaknya pencari kerja berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY yang belum mendapatkan penempatan pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.4	Jumlah Pengangguran	Banyaknya pengangguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Pengangguran adalah	Semester	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan.			
2.5	PHK	Banyaknya pemutusan hubungan Kerja di wilayah DIY pada tahun berkenaan. PHK adalah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh sebuah perusahaan kepada karyawannya.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.5.1	Kasus PHK	Banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja perusahaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.5.2	Orang Terkena Kasus PHK	Banyaknya orang terkena pemutusan hubungan kerja perusahaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.6	Upah Minimum (UMK) Kabupaten/Kota	Banyaknya Upah Minimum DIY (UMK) di wilayah kab./kota. Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap kabupaten/kota berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum DIY.	Tahunan	Rp	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
26.1	Kota Yogyakarta	Besaran upah minimum regional/bulan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.6.2	Sleman	Besaran upah minimum regional/bulan di wilayah Kab. Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.6.3	Bantul	Besaran upah minimum regional/bulan di wilayah Kab. Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.6.4	Kulon Progo	Besaran upah minimum regional/bulan di wilayah Kab. Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.6.5	Gunungkidul	Besaran upah minimum regional/bulan di wilayah Kab. Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan	Banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.7.1	Berusaha Sendiri	Banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang membuka lahan usaha sendiri di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Berusaha sendiri adalah bekerja atau	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.			
2.7.2	Berusaha Dibantu Buruh Tak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	Banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai buruh tidak tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.7.3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	Banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai buruh tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja dibayar.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.2.4	Buruh/Karyawan/Pegawai	Banyaknya penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yang di bayar tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Buruh/Karyawan/Pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.7.5	Pekerja Bebas di Pertanian	Banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas sebagai pekerja bebas di pertanian di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dengan sistem pembayaran harian maupun borongan, Lapangan usaha pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		perburuan, termasuk juga jasa pertanian.			
2.7.6	Pekerja Bebas di Non Pertanian	Banyaknya penduduk usia 15 tahun keatas sebagai pekerja bebas di non pertanian di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan, usaha non pertanian meliputi usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, dan usaha lainnya di luar usaha pertanian.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.7.8	Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	Banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada lapangan usaha pertambangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.7.8.1	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Pertanian	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian terhadap total jumlah penduduk di DIY pada tahun berkenaan.	Semester	%	Badan Pusat Statistik
2.7.8.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Non Pertanian	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor non pertanian terhadap total jumlah penduduk di DIY pada tahun berkenaan.	Semester	%	Badan Pusat Statistik
2.7.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	%	Badan Pusat Statistik
2.7.9	Penduduk yang Bekerja	Banyaknya penduduk yang bekerja di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.7.1	Tingkat Penganggur Terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	%	Badan Pusat Statistik
2.7.1.1	Pencari Kerja Terdaftar	Banyaknya pencari kerja di wilayah DIY yang mendaftarkan melalui kartu kuning pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.1.2	Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian terhadap jumlah penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	%	Badan Pusat Statistik
2.7.1.3	Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian	Persentase tenaga kerja informal di sektor pertanian terhadap jumlah penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	%	Badan Pusat Statistik

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
2.7.1.4	Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Pengolahan	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan terhadap jumlah penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	%	Badan Pusat Statistik
2.7.1.5	Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Banyaknya penempatan pekerja migran indonesia di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.1.6	Perusahaan yang Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Aktif	Banyaknya perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.1.7	Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aktif	Banyaknya kepesertaan BPJS ketenagakerjaan aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.1.7.1	Penerima Upah	Banyaknya peserta BPJS ketenagakerjaan penerima upah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.1.7.2	Bukan Penerima Upah	Banyaknya peserta BPJS bukan penerima upah bukan penerima upah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.1.7.3	Jasa Konstruksi	Banyaknya peserta/tenaga kerja di lapangan usaha jasa konstruksi di wilayah DIY pada tahun berkenaan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.1.8	Penduduk Usia Kerja Umur 15-24 Tahun yang Tidak Sedang Bekerja, Tidak Sedang Bersekolah, dan Tidak Sedang Mengikuti Pelatihan (Not in Employment Education)	Banyaknya penduduk usia muda yang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (youth not in education, employment or training atau NEET) adalah kaum muda yang melakukan kegiatan lain di luar sekolah, bekerja, atau pelatihan. Penduduk dalam kategori usia muda adalah penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 15-24 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.7.1.9	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal	Banyaknya penduduk yang bekerja menurut sektor formal dan informal di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Pekerja sektor formal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai. Pekerja sektor informal merupakan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		keluarga/tidak dibayar.			
2.7.1.9.1	Formal	Banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor formal di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.7.1.9.2	Presentase Formal	Presentase penduduk yang bekerja pada sektor formal terhadap jumlah total penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	%	Badan Pusat Statistik
2.7.1.9.3	Informal	Banyaknya penduduk yang bekerja menurut sektor informal di wilayah DIY pada tahun berkenaan pada waktu berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.7.1.9.4	Presentase Informal	Presentase penduduk yang bekerja menurut sektor informal terhadap jumlah total penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan pada waktu berkenaan.	Semester	%	Badan Pusat Statistik
2.7.2	Penganggur	Banyaknya penganggur di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jumlah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.7.2.1	Pekerja Tidak Penuh	Banyaknya penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.7.2.1.1	Setengah Penganggur	Banyaknya pekerja paruh waktu di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Pekerja setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.7.2.1.2	Pekerja Paruh Waktu	Banyakna Pekerja paruh waktu di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Bekerja secara paruh waktu adalah bekerja kurang dari 7 jam 1 hari dan kurang dari 35 jam 1 minggu.	Semester	Orang	Badan Pusat Statistik
2.7.2.2	Perusahaan Wajib Lapor	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis pada saat mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Setiap perusahaan wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada menteri atau pejabat yang telah ditunjuk.			
2.7.2.2.1	Perusahaan Wajib Lapor Menurut Kategori	Banyaknya Perusahaan Wajib Lapor menurut kategori di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.2.1.1	Besar	Banyaknya Perusahaan Wajib Lapor Menurut Kategori Perusahaan Besar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.2.1.2	Sedang	Banyaknya Perusahaan Wajib Lapor Menurut Kategori Perusahaan Sedang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.2.1.3	Kecil	Banyaknya Perusahaan Wajib Lapor Menurut Kategori Perusahaan Kecil di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.2.2	Perusahaan Wajib Lapor Menurut Status Perusahaan	Banyaknya Perusahaan Wajib Lapor Menurut Status Perusahaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
2.7.2.2.2.1	Swasta	Banyaknya perusahaan swasta wajib lapor di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Sektor swasta adalah salah satu bagian dalam sektor ekonomi suatu negara yang terdiri dari kegiatan di lapangan usaha badan usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak dikuasai oleh pemerintah.	Tahunan	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.2.2.2	PMDN	Banyaknya perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri yang wajib lapor di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Baik perorangan maupun badan usaha bisa menjadi penanam modal dalam negeri tersebut.	Tahunan	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.2.2.3	PMA	Banyaknya perusahaan Penanaman Modal Asing wajib lapor di wilayah DIY pada tahun berkenaan. PMA (Penanaman Modal Asing) merupakan pembentukan modal bisnis di Republik Indonesia yang ditujukan untuk investor asing, dengan sepenuhnya menggunakan modal asing atau sebagian dengan	Tahunan	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		investor domestik.			
2.7.2.2.2.4	Joint Venture	Banyaknya perusahaan Joint Ventura yang wajib lapor di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Joint Venture atau yang biasa disebut dengan perusahaan patungan adalah perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dengan tujuan untuk menyatukan sumber daya dan menjalankan bisnis dalam jangka waktu tertentu.	Tahunan	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.3	Tenaga Kerja Perusahaan Wajib Lapor	Banyaknya tenaga kerja dari perusahaan yang terdaftar dalam wajib lapor ketenagakerjaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.3.1	WNI	Banyaknya tenaga kerja WNI yg wajib dilaporkan oleh perusahaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Seorang Warga Negara Indonesia adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.3.2	WNA	Banyaknya tenaga kerja WNA yg wajib dilaporkan perusahaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis, maupun hal lainnya.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.4	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara dua pihak karena adanya perselisihan dua pihak karena adanya perselisihan.			Badan Pusat Statistik
2.7.2.4.1	Perjanjian Bersama	Banyaknya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan secara perjanjian bersama di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Perjanjian Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara pihak-pihak yang terlibat.	Tahunan	Kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.4.2	Anjuran	Banyaknya kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Tahunan	Kasus	Dinas Tenaga Kerja dan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		dengan anjuran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Transmigrasi
2.7.2.4.3	Pengadilan Hubungan Industrial	Banyaknya penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan secara pengadilan hubungan industrial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.5	Rata-Rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Selama Sebulan Buruh/Karyawan Menurut Kabupaten/Kota	Gaji bersih adalah jumlah akhir yang diterima karyawan setelah dikurangi pajak yang harus pekerja bayarkan dan pemberi pekerjaan bayarkan pada pemerintah. Upah/gaji bersih adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan tersebut.			Badan Pusat Statistik
2.7.2.5.1	Kota Yogyakarta	Banyaknya rata-rata upah minimum regional/bulan di wilayah Kota Yogyakarta.	Tahunan	Rupiah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.5.2	Sleman	Banyaknya rata-rata upah minimum regional/bulan di wilayah Kab. Sleman.	Tahunan	Rupiah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.5.3	Bantul	Banyaknya rata-rata upah minimum regional/bulan di wilayah Kab. Bantul.	Tahunan	Rupiah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.5.4	Kulon Progo	Banyaknya rata-rata upah minimum regional/bulan di wilayah Kab. Kulon Progo.	Tahunan	Rupiah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.5.5	Gunungkidul	Banyaknya rata-rata upah minimum regional/bulan di wilayah Kab. Gunungkidul.	Tahunan	Rupiah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.6	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Upah Minimum Kabupaten adalah aturan pemerintah yang menetapkan besaran standar upah minimum per bulan bagi pekerja di tingkat Kabupaten/Kota.			
2.7.2.6.1	Kota Yogyakarta	Besaran Upah Minimum bagi pekerja di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.6.2	Sleman	Besaran Upah Minimum bagi pekerja di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.6.3	Bantul	Besaran Upah Minimum bagi pekerja di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.6.4	Kulon Progo	Besaran Upah Minimum bagi pekerja di Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.5.5	Gunungkidul	Besaran Upah Minimum bagi pekerja di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.7	Upah Minimum Provinsi (UMP)	Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah di satu provinsi.	Tahunan	Rupiah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.7.2.8	Indeks Pembangunan	Indeks Pembangunan	Tahunan	Indeks	Dinas Tenaga

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar.			Kerja dan Transmigrasi
3	Pelayanan Ketenagakerjaan				
3.1	Balai Pelatihan Kerja (BLK)	Banyaknya Unit Balai Pelatihan Ketenagakerjaan (BLK) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Balai Latihan Kerja atau (BLK) adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dilapangan usahanya masing-masing.	Tahunan	Unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.2	Pelayanan Ketenagakerjaan	Banyaknya pelayanan dalam ketenagakerjaan yang terdapat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.3	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Banyaknya Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) merupakan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh pihak swasta.	Tahunan	Lembaga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.4	Lembaga Pelatihan kerja Swasta (LPKS) Terakreditasi	Banyaknya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang sudah mendapat perizinan serta memenuhi persyaratan untuk melaksanakan suatu kegiatan pelatihan kerja di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lembaga	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.5	Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)	Banyaknya badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.6	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK)	Bursa Kerja Khusus adalah Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, dan Lembaga Pelatihan Kerja yang melakukan kegiatan memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan karir, serta penyaluran dan penempatan tenaga kerja.	Tahunan	BKK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Data Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
4.1	Jumlah Kesempatan Kerja	Data hasil kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Pusat Statistik
4.1	Jumlah Kesempatan Kerja	Kesempatan kerja adalah suatu	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan di masyarakat. Banyaknya Kesempatan kerja di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Kerja dan Transmigrasi
4.2	Jumlah Kasus yang Diselesaikan di Luar Pengadilan Hubungan Industrial	Banyaknya kasus yang diselesaikan di luar pengadilan hubungan industrial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.3	Jumlah Lulusan Pelatihan yang Ditempatkan	Banyaknya lulusan pelatihan yang ditempatkan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.4	Jumlah Pekerja yang Meningkatkan Produktivitasnya	Banyaknya pekerja yang meningkat produktivitasnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.5	Persentase Perusahaan yang Diawasi dari Jumlah Perusahaan dalam WLKP Online	Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan Online di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



1.15 KOPERASI DAN UKM

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Keragaman Koperasi	Koperasi juga dipahami sebagai badan hukum yang didirikan berdasar asas kekeluargaan. Menganut prinsip ekonomi kerakyatan, dibentuknya sebuah koperasi bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Jadi, seluruh keuntungan yang didapat oleh koperasi akan dikelola untuk kemajuan kinerja koperasi dan dibagikan pada anggota aktif.			Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.1	Jumlah Koperasi	Banyaknya koperasi yang terdapat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.1.1	Koperasi Aktif	Banyaknya koperasi aktif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahunan terakhir.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.1.2	Koperasi Pasif	Banyaknya koperasi pasif di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi pasif ialah koperasi yang membuat laporan keuangan tetapi tidak pernah menyelenggarakan rapat anggota walaupun masih memiliki anggota 8. Rapat Anggota merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi koperasi.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.2	Jumlah Anggota Koperasi	Banyaknya anggota yang tergabung dalam koperasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.2.1	Laki-Laki	Banyaknya anggota koperasi berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.2.2	Perempuan	Banyaknya anggota koperasi berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.3	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	Banyaknya koperasi yang rutin melaksanakan rapat anggota di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.4	Jumlah Pengurus Koperasi	Banyaknya pengurus koperasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.4.1	Laki-Laki	Banyaknya pengurus koperasi berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.4.2	Perempuan	Banyaknya anggota koperasi berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1.5	Jumlah Pengawas Koperasi	Banyaknya anggota pengawas koperasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.5.1	Laki-Laki	Banyaknya pengawas koperasi berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.5.2	Perempuan	Banyaknya pengawas koperasi berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.6	Jumlah Dewan Syariah	Banyaknya anggota dewan syariah di koperasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.6.1	Laki-Laki	Banyaknya dewan syariah koperasi berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.7	Jumlah Manajer Koperasi	Banyaknya manajer koperasi di setiap wilayah DIY.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.7.1	Laki-Laki	Banyaknya manajer koperasi berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.7.2	Perempuan	Banyaknya manajer koperasi berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.8	Jumlah Karyawan Koperasi	Banyaknya karyawan koperasi di setiap wilayah DIY.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.8.1	Laki-Laki	Banyaknya karyawan koperasi berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.8.2	Perempuan	Banyaknya karyawan koperasi berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.9	Modal Sendiri	Banyaknya nilai modal sendiri koperasi di setiap wilayah DIY.	Tahunan	Rp	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.1	Modal Luar	Banyaknya nilai modal luar koperasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.11	Volume Usaha Koperasi	Banyaknya nilai volume usaha koperasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.12	Selisih Hasil Usaha	Banyaknya nilai selisih hasil usaha (SHU) koperasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.13	Aset Koperasi	Banyaknya nilai aset koperasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.14	Jumlah KUD	Banyaknya Koperasi Unit Desa di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
1.15	Jumlah Non KUD	Banyaknya koperasi non KUD di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			UKM DIY
2	Jumlah Koperasi per Bentuk Anggota	Banyaknya koperasi menurut bentuk anggota.			Dinas Koperasi dan UKM DIY
2.1	Koperasi Primer	Banyaknya koperasi primer di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang perseorangan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
2.2	Koperasi Sekunder	Banyaknya koperasi sekunder di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi Sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
3	Jumlah Koperasi per Jenis Usaha	Banyaknya koperasi menurut jenis usaha.			Dinas Koperasi dan UKM DIY
3.1	Koperasi Produsen	Banyaknya koperasi produsen di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user). Dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku menjadi barang jadi.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
3.2	Koperasi Konsumen	Banyaknya koperasi konsumen di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
3.3	Koperasi Jasa	Banyaknya koperasi jasa di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi jasa adalah koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
3.4	Koperasi Simpan Pinjam	Banyaknya koperasi simpan pinjam di wilayah DIY. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
3.5	Koperasi Pemasaran	Banyaknya koperasi pemasaran di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.			
4	Jumlah Koperasi per Prinsip Keuangan	Banyaknya Koperasi per Prinsip Keuangan.			Dinas Koperasi dan UKM DIY
4.1	Koperasi Konvensional	Banyaknya koperasi konvensional di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi Konvensional adalah sebuah organisasi ekonomi atau badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi bersama. Anggota yang meminjam dana atau barang harus mengembalikan beserta dengan bunga pinjaman di waktu yang sudah disepakati.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
4.2	Koperasi Syariah	Banyaknya koperasi syariah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi syariah merupakan aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil (syariah).	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5	UMKM				
5.1	Profil UKM	Merupakan gambaran umum keadaan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang melakukan kegiatan ekonomi di DIY.	Tahunan		Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1	Usaha Mikro	Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Tahunan		Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.1	Jumlah Usaha per Sektor ekonomi	Banyaknya usaha mikro per sektor ekonomi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.1.1	Sektor Pertanian	Banyaknya usaha mikro di sektor pertanian di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.1.2	Sektor Perdagangan	Banyaknya usaha mikro di sektor perdagangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.1.3	Sektor Kelautan dan Perikanan	Banyaknya usaha mikro di sektor kelautan dan perikanan di wilayah	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		DIY pada tahun berkenaan.			UKM DIY
5.1.1.1.4	Sektor Kehutanan	Banyaknya usaha mikro di sektor kehutanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.1.5	Sektor Energi dan Sumber daya mineral	Banyaknya usaha mikro di sektor energi dan sumber daya mineral di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.1.6	Sektor Transportasi	Banyaknya usaha mikro di sektor Transportasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.1.7	Sektor Komunikasi	Banyaknya usaha mikro di sektor komunikasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.1.8	Sektor Pariwisata	Banyaknya usaha mikro di sektor pariwisata di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.1.9	Sektor Jasa Kesehatan	Banyaknya usaha mikro di sektor jasa kesehatan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.1.10	Sektor Konstruksi	Banyaknya usaha mikro di sektor Konstruksi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.1.11	Sektor Real Estate dan Usaha Persewaan	Banyaknya usaha mikro di sektor real estate dan usaha persewaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.1.12	Sektor Jasa Pendidikan	Banyaknya usaha mikro di sektor pendidikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.1.13	Sektor Industri Pengolahan	Banyaknya usaha mikro di sektor industri pengolahan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.1.14	Sektor Ekonomi Kreatif	Banyaknya usaha mikro di sektor ekonomi kreatif di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.1.15	Sektor Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	Banyaknya usaha mikro di sektor jasa perorangan yang melayani rumah tangga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.2	Jumlah Tenaga Kerja	Banyaknya tenaga kerja pada usaha mikro yang berstatus tenaga tidak tetap maupun tenaga tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.2.1	Laki-Laki	Banyaknya tenaga kerja laki-laki yang bekerja pada unit usaha mikro yang berstatus tenaga tidak tetap maupun tenaga tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.2.2	Perempuan	Banyaknya tenaga kerja perempuan yang bekerja pada unit usaha mikro yang berstatus tenaga tidak tetap maupun tenaga tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.1.2.3	Tenaga Borongan	Banyaknya tenaga kerja borongan yang bekerja pada unit usaha mikro di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Tenaga kerja	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		borongan merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan.			
5.1.1.3	Nilai Omset dalam 1 Tahunan	Jumlah nilai omset yang dihasilkan oleh unit usaha mikro di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2	Usaha Kecil	Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriteria Usaha Kecil sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan Tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).	Tahunan		Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.1	Jumlah Perusahaan per Sektor Ekonomi	Banyaknya perusahaan kecil per sektor ekonomi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.1.1	Sektor Pertanian	Banyaknya perusahaan kecil di sektor Pertanian di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.1.2	Sektor Perdagangan	Banyaknya perusahaan kecil di sektor perdagangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.1.3	Sektor Kelautan dan Perikanan	Banyaknya perusahaan kecil di sektor kelautan dan perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.1.4	Sektor Kehutanan	Banyaknya perusahaan kecil di sektor kehutanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.1.5	Sektor Energi dan Sumber daya Mineral	Banyaknya perusahaan kecil di sektor energi dan sumber daya mineral di wilayah kab./kota.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.1.6	Sektor Transportasi	Banyaknya perusahaan kecil di sektor transportasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.1.7	Sektor Komunikasi	Banyaknya perusahaan kecil di sektor komunikasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.1.8	Sektor Pariwisata	Banyaknya perusahaan kecil di	Tahunan	Unit	Dinas



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		sektor pariwisata di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.1.9	Sektor Jasa Kesehatan	Banyaknya perusahaan kecil di sektor jasa Kesehatan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.1.10	Sektor Konstruksi	Banyaknya perusahaan kecil di sektor Konstruksi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.1.11	Sektor Real Estate dan Usaha Persewaan	Banyaknya perusahaan kecil di sektor real estate dan usaha persewaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.1.12	Sektor Pendidikan	Banyaknya perusahaan kecil di sektor pendidikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.1.13	Sektor Industri Pengolahan	Banyaknya perusahaan kecil di sektor industri pengolahan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.1.14	Sektor Ekonomi Kreatif	Banyaknya perusahaan kecil di sektor ekonomi kreatif di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.1.15	Sektor Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	Banyaknya perusahaan kecil di sektor ekonomi kreatif di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.2	Jumlah Tenaga Kerja	Banyaknya tenaga kerja pada perusahaan kecil yang berstatus tenaga tidak tetap maupun tenaga tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.2.1	Laki-Laki	Banyaknya tenaga kerja laki-laki pada perusahaan kecil yang berstatus tenaga tidak tetap maupun tenaga tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.2.2	Perempuan	Banyaknya tenaga kerja perempuan pada perusahaan kecil yang berstatus tenaga tidak tetap maupun tenaga tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.2.3	Tenaga Borongan	Banyaknya tenaga kerja borongan pada perusahaan kecil di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Tenaga kerja borongan merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.2.3	Nilai Omset dalam 1 Tahunan	Banyaknya total nilai volume usaha perusahaan kecil di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3	Usaha Menengah	Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian	Tahunan		Dinas Koperasi dan UKM DIY



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).			
5.1.3.1	Jumlah Perusahaan per Sektor Ekonomi	Banyaknya usaha menengah per sektor ekonomi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
5.1.3.1.1	Sektor Pertanian	Banyaknya usaha menengah sektor Pertanian di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.1.2	Sektor Perdagangan	Banyaknya usaha menengah sektor Perdagangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKMDIY
5.1.3.1.3	Sektor Kelautan dan Perikanan	Banyaknya usaha menengah sektor Kelautan dan Perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.1.4	Sektor Kehutanan	Banyaknya usaha menengah sektor Kehutanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.1.5	Sektor Energi dan Sumber daya Mineral	Banyaknya usaha menengah sektor energi dan sumber daya mineral di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.1.6	Sektor Transportasi	Banyaknya usaha menengah sektor Transportasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.1.7	Sektor Komunikasi	Banyaknya usaha menengah sektor Komunikasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.1.8	Sektor Pariwisata	Banyaknya usaha menengah sektor Pariwisata di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.1.9	Sektor Jasa Kesehatan	Banyaknya usaha menengah sektor Jasa Kesehatan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.1.10	Sektor Konstruksi	Banyaknya usaha menengah sektor Konstruksi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.1.11	Sektor Real Estate dan Usaha Persewaan	Banyaknya usaha menengah sektor real estate dan usaha Persewaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.1.12	Sektor Pendidikan	Banyaknya usaha menengah	Tahunan	Unit	Dinas

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		sektor pendidikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.1.13	Sektor Industri Pengolahan	Banyaknya usaha menengah sektor industri pengolahan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.1.14	Sektor Ekonomi Kreatif	Banyaknya usaha menengah sektor ekonomi kreatif di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.1.15	Sektor Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	Banyaknya usaha menengah sektor jasa perorangan yang melayani rumah tangga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.2	Jumlah Tenaga Kerja	Banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada unit usaha menengah yang berstatus sebagai tenaga kerja tidak tetap maupun tenaga kerja tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.2.1	Laki-Laki	Banyaknya tenaga kerja laki-laki yang bekerja pada unit usaha menengah yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja tidak tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan .	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.2.2	Perempuan	Banyaknya tenaga kerja perempuan yang bekerja pada unit usaha menengah yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja tidak tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan .	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.2.3	Tenaga Borongan	Banyaknya tenaga kerja borongan yang bekerja pada unit usaha menengah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Tenaga kerja borongan merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.3.3	Nilai Omset dalam 1 Tahunan	Jumlah nilai omset yang dihasilkan oleh unit usaha menengah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4	Usaha Besar	Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah DIY.			
5.1.4.1	Jumlah Perusahaan per Sektor Ekonomi	Banyaknya usaha besar per sektor ekonomi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
5.1.4.1.1	Sektor Pertanian	Banyaknya usaha besar sektor	Tahunan	Unit	Dinas

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		industri pertanian di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.1.2	Sektor Perdagangan	Banyaknya usaha besar sektor industri Perdagangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.1.3	Sektor Kelautan dan Perikanan	Banyaknya usaha besar sektor industri kelautan dan perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.1.4	Sektor Kehutanan	Banyaknya usaha besar sektor industri kehutanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.1.5	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Banyaknya usaha besar sektor industri energi dan sumber daya mineral di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.1.6	Sektor Transportasi	Banyaknya usaha besar sektor transportasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.1.7	Sektor Komunikasi	Banyaknya usaha besar sektor komunikasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.1.8	Sektor Pariwisata	Banyaknya usaha besar sektor pariwisata di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.1.9	Sektor Jasa Kesehatan	Banyaknya usaha besar sektor jasa kesehatan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.1.10	Sektor Konstruksi	Banyaknya usaha besar sektor konstruksi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.1.11	Sektor Real Estate dan Usaha Persewaan	Banyaknya usaha besar sektor real estate dan usaha persewaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.1.12	Sektor Pendidikan	Banyaknya usaha besar sektor pendidikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.1.13	Sektor Industri Pengolahan	Banyaknya usaha besar sektor industri pengolahan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.1.14	Sektor Ekonomi Kreatif	Banyaknya usaha besar di sektor ekonomi kreatif di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.1.15	Sektor Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	Banyaknya usaha di sektor jasa perorangan yang melayani rumah tangga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.2	Jumlah Tenaga Kerja	Data terkait jumlah tenaga kerja yang bekerja pada unit usaha besar yang mencakup tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja tidak tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.2.1	Laki-Laki	Banyaknya tenaga kerja laki-laki yang bekerja pada unit usaha besar yang mencakup tenaga kerja tetap maupun tenaga tidak tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
5.1.4.2.2	Perempuan	Banyaknya tenaga kerja perempuan yang bekerja pada unit usaha besar yang mencakup tenaga kerja tetap maupun tenaga kerja tidak tetap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.2.3	Tenaga Borongan	Banyaknya tenaga kerja borongan yang bekerja pada unit usaha besar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Tenaga kerja borongan merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.1.4.3	Nilai Omset dalam 1 Tahunan	Jumlah nilai omset yang dihasilkan oleh unit usaha besar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.2	Jumlah UKM berdasarkan Jenis Usaha	Banyaknya UKM menurut jenis usaha di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.2.1	Sektor Pertanian	Banyaknya UKM di sektor pertanian di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.2.2	Sektor Perdagangan	Banyaknya UKM di sektor perdagangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.2.3	Sektor Kelautan dan Perikanan	Banyaknya UKM di sektor kelautan dan perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.2.4	Sektor Kehutanan	Banyaknya UKM di sektor kehutanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.2.5	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Banyaknya UKM di sektor energi dan sumber daya mineral di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.2.6	Sektor Transportasi	Banyaknya UKM di sektor transportasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.2.7	Sektor Komunikasi	Banyaknya UKM di sektor komunikasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.2.8	Sektor Pariwisata	Banyaknya UKM di sektor pariwisata di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.2.9	Sektor Jasa Kesehatan	Banyaknya UKM di sektor jasa kesehatan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.2.10	Sektor Konstruksi	Banyaknya UKM di sektor konstruksi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.2.11	Sektor Real Estate dan Usaha Persewaan	Banyaknya UKM di sektor real estate dan usaha persewaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.2.12	Sektor Pendidikan	Banyaknya UKM di sektor pendidikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.2.13	Sektor Industri	Banyaknya UKM di sektor industri	Tahunan	Unit	Dinas

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Pengolahan	pengolahan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Koperasi dan UKM DIY
5.2.14	Sektor Ekonomi Kreatif	Banyaknya UKM di sektor ekonomi kreatif di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.2.15	Sektor Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	Banyaknya UKM di sektor jasa perorangan yang melayani rumah tangga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.3	Jumlah UKM Berdasarkan Skala Usaha	Banyaknya UKM menurut skala usaha di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.3.1	Usaha Mikro	Banyaknya usaha mikro di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.3.2	Usaha kecil	Banyaknya usaha kecil di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.3.3	Usaha Menengah	Banyaknya usaha menengah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.4	Jumlah UKM berdasarkan wilayah	Banyaknya UKM berdasarkan pada wilayah masing-masing DIY.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.4.1	Kabupaten Bantul	Banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.4.2	Kabupaten Gunungkidul	Banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.4.3	Kabupaten Kulon Progo	Banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.4.4	Kabupaten Sleman	Banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.4.5	Kota Yogyakarta	Banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.4.6	Lainnya	Banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah DIY namun pemiliknya berKTP luar DIY.	Tahunan	Orang	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.5	Proporsi Kredit UKM terhadap Total Kredit	Persentase nilai tambah industri kecil menengah terhadap jumlah total nilai tambah industri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Koperasi dan UKM DIY
5.6	Jumlah Pembiayaan yang Diperoleh Koperasi dan UKM yang Dibina pada Tahunan	Banyaknya pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Dinas Koperasi dan UKM DIY
6	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	Banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja.	Tahunan	Tenaga kerja	Dinas Koperasi dan UKM DIY



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
6.1	Mikro	Banyaknya penyerapan tenaga kerja pada usaha mikro di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan UKM DIY
6.2	Kecil	Banyaknya penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan UKM DIY
6.3	Menengah	Banyaknya penyerapan tenaga kerja pada usaha menengah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan UKM DIY
7	Data Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Data hasil kerja dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah DIY di wilayah kabupaten/kota.			Dinas Koperasi dan UKM DIY
7.1	Nilai Omzet Koperasi	Banyaknya Nilai Omzet yang dihasilkan oleh seluruh Koperasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang/jasa tertentu selama suatu masa jual.	Tahunan	Rp	Dinas Koperasi dan UKM DIY
7.2	Nilai Omzet UKM	Banyaknya Nilai Omzet yang dihasilkan oleh seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang/jasa tertentu selama suatu masa jual.	Tahunan	Rp	Dinas Koperasi dan UKM DIY
7.3	Presentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru	Presentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru terhadap jumlah total wirausaha yang sudah ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Koperasi dan UKM DIY



1.16 PENANAMAN MODAL

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN)	Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Baik perorangan maupun badan usaha bisa menjadi penanam modal dalam negeri tersebut.			
1.1	Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN)	Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN tahun n dikurangi tahun (n-1) dibagi jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN tahun (n-1) dikali 100%.	Tahunan	%	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
1.2	Kenaikan Nilai Investasi (PMA/PMDN)	Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN tahun n dikurangi jumlah nilai realisasi investasi PMA & PMDN tahun (n-1).	Tahunan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2	Jumlah Proyek PMA	Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Jumlah Proyek Penanaman Modal Asing di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Proyek	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.1	Realisasi Investasi PMA	Persentase nilai investasi Penanaman Modal Asing pada periode berkenaan dibandingkan dengan target realisasi investasi PMA di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	%	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2	Realisasi Investasi PMA per Sektor	Realisasi Penanaman Modal Asing per sektor di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	%	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.1	Sektor Primer	Realisasi Penanaman Modal Asing pada Sektor Primer di wilayah DIY pada periode berkenaan. Sektor primer merupakan sektor utama yang berkaitan dengan industri ekstraksi sumber daya alam yang berasal dari tanah.	Triwulan		Dinas Perizinan dan Penanaman Modal

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
2.2.1.1	Perikanan	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada sektor perikanan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.1.2	Pertambangan	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada sektor pertambangan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.1.3	Tanaman Pangan	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada tanaman pangan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.2	Sektor Sekunder	Realisasi Penanaman Modal Asing pada sektor sekunder di wilayah DIY pada tahun berkenaan sektor sekunder merupakan sektor produksi yang berkaitan dengan manufaktur. Sektor sekunder berkaitan erat dengan sektor primer, karena dalam proses pengolahannya membutuhkan bahan mentah dari sektor primer.	Triwulan		Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.2.1	Industri Makanan	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada industri makanan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.2.2	Industri Tekstil	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada industri tekstil di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.2.3	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.2.4	Industri Kayu	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Industri Kayu di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp.	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.2.5	Industri Kertas dan Percetakan	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Industri Kertas dan Percetakan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp.	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.2.6	Industri Kimia dan Farmasi	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Industri Kimia dan farmasi di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp.	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.2.7	Industri Karet dan Plastik	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Industri Karet dan Plastik di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.2.8	Industri Mineral Non Logam	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Industri Mineral Non Logam di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.2.9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Industri Logam dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
2.2.2.10	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik, dan Jam	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik, dan Jam di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.2.11	Industri Lainnya	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Industri Lainnya di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.2.12	Industri Barang dari Semen	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Industri Barang dari Semen di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.3	Sektor Tersier	Realisasi Penanaman Modal Asing pada sektor tersier di wilayah DIY pada periode berkenaan. Sektor tersier merupakan sektor penyedia layanan berupa jasa.	Triwulan		Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.3.1	Listrik, Gas, dan Air	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Listrik, Gas, dan Air di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.3.2	Konstruksi	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Konstruksi di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.3.3	Perdagangan dan Reparasi	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Perdagangan dan Reparasi di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.3.4	Perhotelan dan Restoran	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Perhotelan dan Restoran di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.3.5	Transportasi, Gudang, dan Komunikasi	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Transportasi, Gudang, dan Komunikasi di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.3.6	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.2.3.7	Jasa Lainnya	Nilai total investasi Penanaman Modal Asing pada Jasa Lainnya di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
2.3	Realisasi Investasi PMA	Nilai investasi Penanaman Modal Asing yang direalisasikan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
3	Jumlah Proyek PMDN	Jumlah proyek Penanaman Modal Dalam Negeri pada periode berkenaan. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh			Dinas Perizinan dan Penanaman Modal

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Baik perorangan maupun badan usaha bisa menjadi penanam modal dalam negeri tersebut.			
3.1	Realisasi Investasi PMDN	Persentase capaian nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dibandingkan dengan target investasi (PMA dan PMDN) pada periode berkenaan.	Triwulan	%	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
3.1.1	Pertumbuhan Investasi PMDN	Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun berkenaan dikurangi nilai PMDN Tahun n-1 dibagi dengan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun n-1 dikali 100% di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	%	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
3.1.2	Realisasi Investasi PMDN	Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun berkenaan yang direalisasikan di wilayah DIY.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4	Realisasi Investasi PMDN per Sektor	Data terkait realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri per Sektor di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.1	Sektor Primer	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada sektor primer di wilayah DIY pada periode berkenaan. Sektor primer merupakan sektor utama yang berkaitan dengan industri ekstraksi sumber daya alam yang berasal dari tanah.	Triwulan		Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.1.1	Perikanan	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada sektor perikanan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.1.2	Pertambangan	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada pertambangan di wilayah DIY pada periode berkenaan	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.1.3	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.2	Sektor Skunder	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada sektor sekunder di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Sektor sekunder merupakan sektor produksi yang berkaitan dengan manufaktur. Sektor sekunder berkaitan erat dengan sektor primer, karena dalam proses pengolahannya membutuhkan bahan mentah dari sektor primer.	Triwulan		Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.2.1	Industri Makanan	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Makanan di wilayah DIY pada	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		periode berkenaan.			Modal
4.2.2	Industri Tekstil	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada industri tekstil di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.2.3	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.2.4	Industri Kayu	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Kayu di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.2.5	Industri Kertas dan Percetakan	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Kertas dan Percetakan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.2.6	Industri Kimia dan Farmasi	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Kimia dan Farmasi di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.2.7	Industri Karet dan Plastik	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Karet dan Plastik di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.2.8	Industri Mineral Non Logam	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Mineral Non Logam di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.2.9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.2.10	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik, dan Jam	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik, dan Jam di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.2.11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.2.12	Industri Barang Dari Semen	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Barang Dari Semen di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.2.13	Industri Lainnya	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Industri Lainnya di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.3	Sektor Tersier	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada sektor tersier di wilayah DIY pada periode berkenaan. Sektor tersier merupakan sektor penyedia layanan berupa jasa.	Triwulan		Dinas Perizinan dan Penanaman Modal

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
4.3.1	Listrik, Gas, dan Air	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Listrik, Gas, dan Air di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.3.2	Konstruksi	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Konstruksi di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp.	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.3.3	Perdagangan dan Reparasi	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Perdagangan dan Reparasi di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp.	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.3.4	Perhotelan dan Restoran	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Perhotelan dan Restoran di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp.	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.3.5	Transportasi, Gudang, dan Komunikasi	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Transportasi, Gudang, dan Komunikasi di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp.	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.3.6	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp.	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
4.3.7	Jasa Lainnya	Nilai total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada Jasa Lainnya di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp.	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
5	Data Kinerja Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal	Data hasil kinerja Badan Kerja Sama dan Penanaman Modal DIY pada periode berkenaan.			Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
5.1	Nilai PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.	triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
5.2	Persentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	Realisasi anggaran tahun n dibagi total anggaran program dukungan sasaran SKPD dikali 100% di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
5.3	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Akumulasi)	Akumulasi nilai realisasi investasi PMA dan PMDN di wilayah DIY sampai dengan dengan periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
5.4	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Total nilai investasi PMA dan PMDN di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
5.5	Nilai Rencana Investasi	Nilai rencana investasi baru yang	Triwulan	Rp	Dinas

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	yang Tercatat dalam Ijin Prinsip	diajukan dalam ijin penanaman modal tahun n di wilayah DIY pada periode berkenaan.			Perizinan dan Penanaman Modal
5.6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal dan Eksternal)	Nilai IKM pada produk pelayanan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY pada periode berkenaan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik (dalam hal ini Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (BPS Prov DIY).	Bulanan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
5.7	Persentase Waktu Penyelesaian Layanan Perizinan terhadap SOP	Prosedur Operasi Standar atau Standar Operasional Prosedur yang dapat disingkat sebagai SOP adalah suatu alur/cara kerja yang sudah ter-standarisasi, Standar Operasional Prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur tertulis yang pasti. Rata-rata Waktu penyelesaian layanan perizinan pada periode berkenaan dibagi dengan target waktu penyelesaian sesuai SOP dikali 100%	Triwulan	%	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
5.8	Waktu Penyelesaian Ijin Usaha	Nilai rata-rata durasi waktu penyelesaian ijin usaha di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Rp	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal



1.17 KEBUDAYAAN

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Kebudayaan	Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa latin yaitu cultura.			Dinas Kebudayaan
1.1	Jumlah Group kesenian	Jumlah group kesenian (suatu organisasi tradisional maupun modern yang berbentuk sanggar tari, teater, grup, musik, dan seni suara, yang menunjukkan hasil karya seninya secara komersial maupun non komersial untuk suatu tontonan maupun tujuan lain yang sudah memiliki nomor registras) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Grup	Dinas Kebudayaan
1.2	Jumlah Gedung kesenian	Jumlah gedung kesenian yang baik dimiliki perorangan, swasta, maupun pemerintah (Merupakan tempat para seniman dalam menciptakan atau memunculkan serta mengembangkan kreatifitas serta ide-ide dalam bidang kesenian. Gedung kesenian juga merupakan tempat untuk melakukan berbagai kegiatan dalam bidang berkesenian, misalnya kegiatan tarian, musik, serta teater) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kebudayaan
1.3	Museum dan Pusat Kebudayaan	Jumlah museum (institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan) dan Pusat Kebudayaan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kebudayaan
1.4	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang mendapatkan ijin dari pemerintah (merupakan rangkaian festival atau pertunjukan seni budaya di daerah yang menyajikan berbagai bentuk karya seni dan budaya berskala lokal, nasional, atau internasional dengan kekhasan masing-masing) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	Dinas Kebudayaan
1.5	Benda Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah benda cagar budaya (benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia) yang dilestarikan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
1.6	Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan (lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya, sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
1.7	Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan (satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kawasan	Dinas Kebudayaan
1.8	Jumlah Total Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dimiliki	Jumlah semua benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
1.9	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi	Persentase jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi pada tahun n dengan tahun sebelumnya (n-1) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kebudayaan
1.10	Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	Persentase jumlah budaya benda yang dilestarikan pada tahun n dengan tahun sebelumnya (n-1) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kebudayaan
1.11	Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	Persentase jumlah budaya tak benda yang dilestarikan pada tahun (n) dengan tahun sebelumnya (n-1) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kebudayaan
1.12	Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima)	Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata), desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima (desa/kelurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kaistimewaan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam ke-bhinneka-tunggal-ikaan) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	Dinas Kebudayaan
2	Jumlah Peristiwa Sejarah yang Diarsipkan Peristiwa Sejarah	Jumlah peristiwa sejarah yang diarsipkan (peristiwa yang penting (berpengaruh). Peristiwa yang terjadi dapat dijadikan momentum dan berpengaruh bagi kehidupan banyak orang) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Arsip	Dinas Kebudayaan
3	Jumlah Monumen Sejarah	Jumlah monumen sejarah (bangunan yang memuat informasi politik bersejarah, sebagai bangunan untuk memperkuat citra keunggulan kekuatan	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		politik. Monumen dapat berusia ribuan tahun, sebagai simbol yang bertahan lama suatu peradaban purba) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
4	Jumlah Film Dokumenter	Jumlah film dokumenter yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan kenyataan. Istilah dokumenter digunakan untuk semua film non-fiksi, termasuk film mengenai perjalanan dan film pendidikan.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
5	Jumlah Bangunan Cagar Budaya	Jumlah bangunan cagar budaya yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Bangunan cagar budaya adalah sebuah kelompok bangunan bersejarah dan lingkungannya, yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan nilai sosial budaya masa kini maupun masa lalu.	Tahunan	Unit	Dinas Kebudayaan
6	Jumlah Penghargaan Warisan Budaya	Jumlah penghargaan warisan budaya yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Warisan budaya dikategorikan menjadi dua kelompok, benda dan tak benda.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
7	Upacara Adat	Jumlah upacara adat yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
8	Upacara Tradisi	Jumlah upacara tradisi yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Upacara tradisional adalah suatu rangkaian atau perbuatan yang terkait dengan aturan-aturan tertentu menurut adat yang mengalir dalam kelompok masyarakat.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
9	Organisasi Seni Rupa	Jumlah organisasi seni rupa yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Organisasi seni rupa adalah organisasi yang menaungi cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
10	Organisasi Seni Pertunjukan	Jumlah organisasi seni pertunjukan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Organisasi seni pertunjukan adalah organisasi yang menaungi karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		performance biasanya melibatkan empat unsur waktu, ruang, tubuh si seniman dan, hubungan seniman dengan penonton.			
11	Organisasi Sinematografi	Jumlah organisasi sinematografi yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Organisasi sinematografi adalah organisasi yang menaungi kegiatan yang terkait tentang teknik menangkap gambar dan sekaligus menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang memiliki kemampuan menyampaikan ide dan cerita.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
12	Permainan Tradisional	Jumlah permainan tradisional yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Permainan tradisional adalah suatu aktifitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu guna memperoleh kegembiraan. Permainan tradisional memiliki kandungan nilai dan manfaat yang tersimpan di dalamnya dan dapat memberikan efek positif bagi siapa saja yang memainkannya.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
13	Kerajinan Properti Budaya	Jumlah kerajinan properti budaya yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
14	Galeri Seni Rupa	Jumlah galeri seni rupa yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Galeri seni rupa adalah tempat atau wadah untuk menunjukkan atau memamerkan benda/karya seni.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
15	Penghargaan Seniman Budayawan	Jumlah penghargaan seniman budaya yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Budayawan adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang yang memiliki pengetahuan budaya, atau seseorang yang berkecimpung dalam bidang kebudayaan. Seorang Budayawan sering membagikan gagasannya, baik melalui interaksi sosial, baik dalam lingkup kecil sampai dengan lingkup nasional dan internasional.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
16	Tokoh Seniman Budayawan	Jumlah tokoh seniman budayawan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kebudayaan
17	Perusahaan Film	Jumlah perusahaan film yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Film adalah gambar-hidup yang juga sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
18	Perusahaan Bioskop	Jumlah perusahaan bioskop yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Bioskop adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Gambar film diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
19	Perusahaan	Jumlah perusahaan persewaan dan	Tahunan	Buah	Dinas

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Persewaan dan Penjualan Film	penjualan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film adalah tempat persewaan dan penjualan alat atau fasilitas keperluan film.			Kebudayaan
20	Usaha Makanan Tradisional	Jumlah usaha makanan tradisional yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Makanan tradisional adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang resepnya diwariskan secara turun-temurun dan memiliki ciri khas tertentu di setiap daerahnya.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
21	Jenis Makanan Tradisional	Jumlah jenis makanan tradisional yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Makanan tradisional atau kuliner lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang resepnya diwariskan secara turun-temurun dan memiliki ciri khas tertentu di setiap daerahnya.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
22	Jenis Busana Tradisional	Jumlah jenis budaya tradisional yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Busana tradisional adalah kostum yang mengekspresikan identitas, yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Busana tradisional juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
23	Sanggar Rias Tradisional	Jumlah sanggar rias tradisional yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
24	Prasarana Budaya	Jumlah prasarana budaya yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Prasarana budaya adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses kebudayaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kebudayaan
25	Lembaga Budaya	Jumlah lembaga budaya yang ada di wilayah di DIY pada tahun berkenaan. Lembaga budaya adalah Lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, seni, lingkungan, dan pendidikan pada masyarakat yang ada pada suatu daerah atau negara.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
26	Lembaga Pendidikan Budaya	Jumlah lembaga pendidikan budaya yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lembaga pendidikan merupakan suatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai (values) yang dianut oleh pemimpin lembaga pendidikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru dan para karyawan yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut. Nilai-nilai tersebut dibangun oleh pikiran-pikiran manusia yang ada dalam madrasah.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
27	Desa Budaya	Jumlah desa budaya yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Desa/Kelurahan Budaya adalah desa atau kelurahan yang	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.			
28	Pelaku Sejarah	Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah karena pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah sehingga bisa menjadi salah satu sumber yang dapat dipercaya atau sumber autentik penelitian sejarah.	Tahunan	Tokoh	Dinas Kebudayaan
29	Benda Cagar Budaya	Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
29.1	Museum	Museum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
29.2	Situs	Situs budaya adalah lokasi yang berada di darat yang mengandung benda cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.	Tahunan	-	Dinas Kebudayaan
29.3	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	Tahunan	Kawasan	Dinas Kebudayaan
29.4	Cerita Rakyat	Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat yang telah diwarisi secara turun temurun melalui lisan.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
29.5	Naskah Kuno	Naskah kuno atau manuskrip adalah dokumen dalam bentuk apapun yang ditulis dengan tangan atau diketik yang belum dicetak atau dijadikan buku tercetak yang berumur 50 tahun lebih.	Tahunan	Naskah	Dinas Kebudayaan
30	Motif Batik	Motif batik adalah kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk dan isen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif batik disebut juga corak batik atau pola batik.	Tahunan	Jenis	Dinas Kebudayaan
30.1	Motif Lurik	Lurik merupakan salah satu nama kain yang berasal dari Jawa, yang memiliki arti lorek atau garis-garis. Pada umumnya motif utama dari kain ini adalah garis-garis, baik horizontal maupun vertikal.	Tahunan	Jenis	Dinas Kebudayaan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
31	Data Kinerja Dinas Kebudayaan				
31.1	Jumlah Budaya Benda yang Dikelola dan Dilestarikan	Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarika di wilayah DIY pada tahun berkenaan pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Dinas Kebudayaan
31.2	Meningkatnya Kinerja Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya, dan Museum	Persentase meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah warisan budaya dan museum terhadap total kinerja pengembangan yang telah dilakukan di wilayah DIY pada tahun berkenaan pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kebudayaan
31.3	Peningkatan Penyelenggaraan Even Budaya Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional di Taman Budaya	Persentase meningkatnya penyelenggaraan even budaya terhadap jumlah total even budaya yang telah diselenggarakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kebudayaan
31.4	Peningkatan Kinerja Pengembangan Seni Budaya DIY	Persentase meningkatnya kinerja pengembangan seni budaya terhadap total kinerja pengembangan budaya yang telah dilakukan di wilayah DIY pada tahun berkenaan pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kebudayaan



1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1.	Pemuda dan Olahraga	Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang, sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki Ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan Dasar Negara atau Pancasila.			
1.1	Jumlah Klub Olahraga	Jumlah klub olahraga di DIY. Klub olahraga atau perkumpulan olahraga atau asosiasi olahraga, merupakan suatu klub dengan tujuan bermain satu atau beberapa olahraga.	Tahunan	Klub	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.2	Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga di DIY. Lapangan/Gedung Olahraga (GOR) adalah pusat kegiatan olahraga untuk peningkatan minat prestasi, kategori olahraga yang melakukan kegiatan di luar maupun di dalam gedung.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.3	Jumlah Kegiatan Olahraga	Jumlah kegiatan olahraga yang resmi terdaftar di Dispora DIY. Kegiatan olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani.	Tahunan	Kali	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.4	Jumlah Organisasi Pemuda	Jumlah organisasi pemuda yang terdaftar di Dispora di DIY. Organisasi pemuda merupakan wadah pengembangan potensi pemuda.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.5	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Jumlah kegiatan kepemudaan di DIY. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.	Tahunan	Kali	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1.6	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)	Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) di DIY. Gelanggang Remaja adalah tempat pusat kegiatan para remaja untuk menyalurkan hobi dan aktifitas yang berhubungan dengan kegiatan dalam ruangan maupun luar ruangan.	Tahunan	Unit	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	Banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pembinaan terhadap LSM, Ormas, atau OKP di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di DIY pada tahun berkenaan. Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.1	Jumlah Orkesmas Berdasarkan Profesi	Banyaknya Organisasi Kemasyarakatan yang teregistrasi pada Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan kesamaan profesi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.2	Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama	Banyaknya Organisasi Kemasyarakatan yang teregistrasi pada Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.3	Jumlah Orkesmas Berdasarkan Kedaerahan	Banyaknya Organisasi Kemasyarakatan yang teregistrasi pada Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan kesamaan kedaerahan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang teregistrasi di DIY pada tahun berkenaan. LSM adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun kelompok orang secara suka rela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.			
3.1	Total Jumlah LSM Lokal	Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.2	Jumlah LSM Nasional	Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional yang beroperasi di daerah pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
3.3	Jumlah LSM Asing atau Internasional yang Beroperasi di Daerah	Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat Asing atau Internasional yang beroperasi di daerah pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.4	Jumlah LSM Lokal Baru	Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Baru di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Banyaknya pelaksanaan kegiatan pembinaan politik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta selama satu tahun anggaran di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kegiatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Data Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
5.1	Indeks Aspek Kebebasan Sipil dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia)	Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Right), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.2	Indeks Aspek Hak-Hak Politik dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia)	Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Right), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Indeks ini mengukur capaian pelaksanaan hak-hak politik setiap individu sebagai warga negara di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.3	Indeks Aspek Lembaga demokrasi dalam IDI (Indeks demokrasi Indonesia)	Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak	Tahunan	Angka	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Politik (Political Right), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Indeks ini mengukur kinerja lembaga demokrasi di DIY pada tahun berkenaan.			
5.4	Skor Indeks Ketahanan Nasional	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan ketahanan nasional pada tahun berkenaan.	Tahunan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.4.1	Gatra Ideologi	Indeks yang mengukur tentang gatra ideologi pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.4.2	Gatra Politik	Indeks yang mengukur tentang gatra politik pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.4.3	Gatra Ekonomi	Indeks yang mengukur tentang gatra ekonomi pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.4.4	Gatra Sosial Budaya	Indeks yang mengukur tentang gatra sosial budaya pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



**1.20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI, KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN**



a. INSPEKTORAT

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Banyaknya temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan di DIY pada tahun berkenaan.			
1,1	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	Banyaknya atau jumlah temuan hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di DIY pada tahun berkenaan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.	Tahunan	Temuan	Inspektorat
1,2	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Banyaknya rekomendasi oleh BPK tentang pemeriksaan di DIY pada tahun yang berkenaan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.	Tahunan	Rekomendasi	Inspektorat
1,3	Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	Banyaknya atau jumlah temuan hasil pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di DIY pada tahun berkenaan. APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya, melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.	Tahunan	Temuan	Inspektorat
1,4	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Banyaknya atau jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP pada tahun berkenaan. APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya, melalui	Tahunan	Rekomendasi	Inspektorat



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.			
2	Data Kinerja Inspektorat				
2.1	Jumlah SKPD dengan Kinerja Sangat Baik (BB)	Banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki hasil kinerja sangat baik di DIY pada tahun berkenaan. Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Untuk mengetahui jumlah total SKPD dengan kinerja sangat baik, ada lima komponen penilaian yang menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, yaitu 1) perencanaan kinerja, 2) pengukuran kinerja, 3) pelaporan kinerja, 4) evaluasi, 5) capaian kinerja.	Tahunan	Unit SKPD	Inspektorat
2.2	Persentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	Persentase hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap total keseluruhan program dukungan sasaran di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Inspektorat
2.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (IKU)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.	Tahunan	%	Inspektorat
3.	Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan	Upaya untuk menyelesaikan rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil.			
3.1	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Persentase dari pelaksanaan rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap total keseluruhan rekomendasi pemeriksaan BPK.	Tahunan	%	Inspektorat
3.2	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	Persentase dari pelaksanaan rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan	Tahunan	%	Inspektorat

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		APIP terhadap total keseluruhan rekomendasi pemeriksaan APIP.			

b. BPKA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
4	Pengelolaan Aset	Pengelolaan aset adalah proses untuk mengelola permintaan dan akuisisi panduan, penggunaan dan penjualan aset untuk memanfaatkan potensi layanan, dan mengelola risiko dan biaya seumur hidup aset.			
4.1	Jumlah Aset Daerah	Banyaknya aset daerah yang dimiliki di DIY pada tahun berkenaan. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, maupun yang berasal dari perolehan lain.	Tahunan	Unit	BPKA
4.1.1	Aset Bergerak	Banyaknya aset bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset bergerak adalah aset yang dapat berpindah tanpa mengubah fungsinya.	Tahunan	Unit	BPKA
4.1.2	Aset Tidak Bergerak	Banyaknya aset tidak bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset tidak bergerak adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang.	Tahunan	Unit	BPKA
4.2	Nilai Aset/Barang Daerah	Nilai aset daerah di DIY pada tahun berkenaan. Nilai aset daerah adalah nilai perolehan aset berwujud yang terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya kelas semua (tanpa memandang nilai barang dan kondisi barang).	Tahunan	Rp	BPKA
4.2.1	Aset Bergerak	Nilai aset bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset bergerak adalah aset yang dapat berpindah tanpa mengubah fungsinya.	Tahunan	Rp	BPKA
4.2.2	Aset Tidak Bergerak	Nilai aset tidak bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset tidak bergerak adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang.	Tahunan	Rp	BPKA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
4.3	Nilai Penyusutan	Nilai penyusutan aset daerah di DIY pada tahun berkenaan. Nilai penyusutan aset adalah nilai aset berwujud yang terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya kelas semua (tanpa memandang nilai barang dan kondisi barang) yang susut.	Tahunan	Rp	BPKA
4.3.1	Aset Bergerak	Nilai penyusutan aset bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset bergerak adalah aset yang dapat berpindah tanpa mengubah fungsinya.	Tahunan	Rp	BPKA
4.3.2	Aset Tidak Bergerak	Nilai penyusutan aset tidak bergerak di DIY pada tahun berkenaan. Aset tidak bergerak adalah aset yang digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit jangka panjang.	Tahunan	Rp	BPKA
4.4	Opini Pemeriksaan	Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern, dalam hal ini BPK.	Tahunan	Opini	BPKA
5	Ringkasan APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif (DPRD).			
5.1	Pendapatan Daerah	Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.1.1	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
5.1.1.1	Pajak Daerah	Jumlah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	Tahunan	Rp	BPKA
5.1.1.2	Retribusi Daerah	Jumlah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.1.1.5	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Belanja APBD	Persentase pendapatan asli daerah terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	%	BPKA
5.1.1.6	Persentase Pertumbuhan PAD	Persentase pertumbuhan pendapatan anggaran daerah terhadap belanja daerah di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	%	BPKA
5.1.2	Dana Perimbangan	Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Tahunan	Rp	BPKA
5.1.2.1.1	Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan	Capaian perbandingan antara dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak terhadap dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.1.2.1.2	Rasio Dana Bagi Hasil	Capaian perbandingan antara	Tahunan	%	BPKA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pendapatan Daerah	dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan.			
5.1.2.1.3	Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Total Belanja APBD	Persentase dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak terhadap total belanja APBD di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.1.2.1.4	Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Persentase pertumbuhan pendapatan dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak di wilayah kabupaten atau dalam satu tahun.	Tahunan	%	BPKA
5.1.2.1.5	Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan	Persentase pertumbuhan dana perimbangan di satu wilayah kerja SIPD pada kurun waktu tertentu.	Tahunan	%	BPKA
5.1.2.1.6	Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Belanja APBD	Persentase dana perimbangan terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	%	BPKA
5.1.2.2	Dana Alokasi Umum	Jumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Tahunan	Rp	BPKA
5.1.2.2.1	Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan	Capaian perbandingan antara dana alokasi umum terhadap dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.1.2.2.2	Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah	Capaian perbandingan antara dana alokasi umum terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	%	BPKA
5.1.2.2.3	Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Belanja APBD	Persentase dana alokasi umum terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	%	BPKA
5.1.2.2.4	Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Umum	Persentase pertumbuhan dana alokasi umum di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	%	BPKA
5.1.2.3	Dana Alokasi Khusus	Jumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.	Tahunan	Rp	BPKA
5.1.2.3.1	Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan	Capaian perbandingan antara dana alokasi khusus terhadap dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.1.2.3.2	Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Pendapatan Daerah	Capaian perbandingan dana alokasi khusus terhadap	Tahunan	%	BPKA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan.			
5.1.2.3.3	Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap Total APBD	Persentase dana alokasi khusus terhadap total APBD di DIY .	Tahunan	%	BPKA
5.1.2.3.4	Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus	Persentase pertumbuhan dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Jumlah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.1.3.1	Hibah	Jumlah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.	Tahunan	Rp	BPKA
5.1.3.2	Dana Darurat	Jumlah dana darurat di DIY pada tahun berkenaan. Dana darurat adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan peristiwa luar biasa. Dana darurat termasuk salah satu sumber penerimaan daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
5.1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah dana bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan di dalam Pasal 25 dan Pasal 29 tentang Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, serta Pajak Penghasilan di dalam Pasal 21.	Tahunan	Rp	BPKA
5.1.3.3.1	Nilai Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.1.3.3.2	Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Lain-Lain Pendapatan	Persentase dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap lain-lain pendapatan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.1.3.3.3	Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Pendapatan Daerah	Persentase dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.1.3.3.4	Rasio Dana Bagi Hasil Pajak	Persentase dana bagi hasil	Tahunan	%	BPKA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap Total Belanja APBD	pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.			
5.1.3.3.5	Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Persentase pertumbuhan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Jumlah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
5.1.3.4.1	Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Capaian perbandingan antara dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.1.3.4.2	Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Pendapatan Daerah	Capaian perbandingan antara dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap pendapatan daerah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.1.3.4.3	Rasio Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Total Belanja APBD	Persentase dana penyesuaian dan otonomi khusus terhadap total belanja APBD di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.1.3.4.4	Persentase Pertumbuhan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Persentase pertumbuhan dana penyesuaian dan otonomi khusus di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah bantuan yang bersumber dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya.	Tahunan	Rp	BPKA
5.1.3.6	Rasio Jumlah Pendapatan Daerah terhadap Total Belanja APBD	Persentase pendapatan daerah terhadap total belanja APBD di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	%	BPKA
5.1.3.7	Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan	Persentase pertumbuhan total pendapatan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.2	Belanja Daerah	Jumlah belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.2.1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah belanja tidak langsung di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.2.1.1	Belanja Tidak Langsung	Jumlah belanja tidak langsung	Tahunan	Rp	BPKA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Pegawai	pegawai di DIY . Belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi yang diberikan dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
5.2.1.1.1	Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai terhadap Belanja Langsung	Persentase belanja tidak langsung pegawai terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.2.1.1.2	Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai terhadap Belanja Daerah	Persentase belanja tidak langsung pegawai terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.2.1.1.3	Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Jumlah realisasi belanja tidak langsung pemenuhan kebutuhan aparatur di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.2.1.1.4	Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pegawai	Persentase pertumbuhan belanja tidak langsung pegawai di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.2.1.2	Belanja Bunga	Jumlah belanja bunga di DIY pada tahun berkenaan. Belanja bunga utang adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik dalam negeri maupun utang luar negeri. Belanja bunga utang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru.	Tahunan	Rp	BPKA
5.2.1.3	Belanja Subsidi	Jumlah belanja subsidi di DIY pada tahun berkenaan. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup masyarakat sehingga harga jualnya dapat terjangkau.	Tahunan	Rp	BPKA
5.2.1.4	Belanja Hibah	Jumlah belanja hibah di DIY pada tahun berkenaan. Belanja hibah adalah setiap pengeluaran pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya, atau perusahaan daerah, yang spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak	Tahunan	Rp	BPKA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		mengikat, serta tidak secara menerus.			
5.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	Jumlah belanja bantuan sosial di DIY pada tahun berkenaan. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.	Tahunan	Rp	BPKA
5.2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, atau kota dan pemerintah desa di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, atau kota dan pemerintah desa di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.2.1.8	Belanja Tidak Terduga	Jumlah belanja tidak terduga di DIY pada tahun berkenaan. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas tahun-tahun sebelumnya.	Tahunan	Rp	BPKA
5.2.2	Belanja Langsung	Jumlah belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.2.2.1	Belanja Langsung Pegawai	Jumlah belanja langsung pegawai di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Rp	BPKA
5.2.2.1.1	Rasio Belanja Langsung Pegawai terhadap Belanja Langsung	Persentase belanja langsung pegawai terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.2.2.1.2	Rasio Belanja Langsung Pegawai terhadap Belanja Daerah	Persentase belanja langsung pegawai terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.2.2.1.3	Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung Pegawai	Persentase pertumbuhan belanja langsung pegawai di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.2.2.1.4	Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung	Persentase pertumbuhan belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah belanja barang dan jasa di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.2.2.2.1	Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Langsung	Persentase belanja barang dan jasa terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.2.2.2.2	Rasio Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Daerah	Persentase belanja barang dan jasa terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.2.2.2.3	Persentase Pertumbuhan	Persentase pertumbuhan	Tahunan	%	BPKA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Belanja Barang dan Jasa	belanja barang dan jasa di DIY pada tahun berkenaan.			
5.2.2.3	Belanja Modal	Jumlah belanja modal di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.2.2.3.1	Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Langsung	Persentase belanja modal terhadap belanja langsung di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.2.2.3.2	Rasio Belanja Modal terhadap Belanja Daerah	Persentase belanja modal terhadap belanja daerah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.2.2.3.3	Persentase Pertumbuhan Belanja Modal	Persentase pertumbuhan belanja modal di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.2.2.4	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	Jumlah sisa penghematan belanja atau akibat lainnya di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.2.2.5	Persentase Pertumbuhan Total Belanja	Persentase pertumbuhan total belanja di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPKA
5.3	Pembiayaan Daerah	Jumlah pembiayaan daerah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.3.1	Penerimaan Pembiayaan	Jumlah penerimaan pembiayaan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	Jumlah pencairan dana cadangan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	Jumlah penerimaan pinjaman daerah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	Jumlah penerimaan piutang daerah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah pengeluaran pembiayaan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah pembentukan dana cadangan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	Jumlah pembayaran pokok utang di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah pemberian pinjaman daerah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.3.2.5	Pembayaran Kegiatan Lanjutan	Jumlah pembayaran kegiatan	Tahunan	Rp	BPKA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		lanjutan di DIY pada tahun berkenaan.			
5.3.2.6	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	Jumlah pengeluaran perhitungan pihak ketiga di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
5.3.2.7	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	Jumlah kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Rp Rp	BPKA
5.3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
6.	Pajak Daerah	Jumlah pungutan yang diwajibkan kepada orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan perpu dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dalam jumlah besar.			BPKA
6.1	Pajak Hotel	Jumlah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.	Tahunan	Rp	BPKA
6.2	Pajak Restoran	Jumlah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.	Tahunan	Rp	BPKA
6.3	Pajak Hiburan	Jumlah pajak atas penyelenggaraan hiburan, berupa jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.	Tahunan	Rp	BPKA
6.4	Pajak Reklame	Jumlah pajak reklame di DIY pada tahun berkenaan. Pajak reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.	Tahunan	Rp	BPKA
6.5	Pajak Penerangan Jalan	Jumlah pajak penerangan jalan di DIY pada tahun berkenaan. Setiap penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama pajak penerangan jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.	Tahunan	Rp	BPKA
6.6	Pajak Mineral Bukan Logam dan	Jumlah pajak atas kegiatan	Tahunan	Rp	BPKA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Batuan	pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.			
6.7	Pajak Parkir	Jumlah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.	Tahunan	Rp	BPKA
6.8	Pajak Air Tanah	Jumlah pajak air tanah di DIY pada tahun berkenaan. Pajak air tanah dipungut pajak sebagai pembayaran atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah.	Tahunan	Rp	BPKA
6.9	Pajak Sarang Burung Walet	Jumlah pajak sarang burung walet di DIY pada tahun berkenaan. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.	Tahunan	Rp	BPKA
6.10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	Jumlah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.	Tahunan	Rp	BPKA
6.11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)	Jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di DIY pada tahun berkenaan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan atau bangunan yang termasuk perbuatan atau peristiwa hukum orang pribadi atau badan.	Tahunan	Rp	BPKA
6.12	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Jumlah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.	Tahunan	Rp	BPKA
6.13	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Jumlah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.	Tahunan	Rp	BPKA
6.14	Pajak Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah pajak atas penggunaan	Tahunan	Rp	BPKA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Bermotor (PBBKB)	bahan bakar kendaraan bermotor.			
6.15	Pajak Air Permukaan	Jumlah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.	Tahunan	Rp	BPKA
6.16	Pajak Rokok	Jumlah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.	Tahunan	Rp	BPKA
7.	Retribusi Daerah	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan di DIY pada tahun berkenaan.			BPKA
7.1	Retribusi Jasa Umum	Jumlah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.	Tahunan	Rp	BPKA
7.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
7.1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengolahan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
7.1.3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat, serta sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
7.1.4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tahunan	Rp	BPKA
7.1.5	Retribusi Pelayanan Pasar	Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan penyediaan fasilitas pasar tradisional/serderhana, berupa pelataran, los, serta kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.	Tahunan	Rp	BPKA
7.1.6	Retribusi Pengujian Kendaraan	Jumlah retribusi yang dipungut	Tahunan	Rp	BPKA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Bermotor	terkait dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.			
7.1.7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
7.1.8	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengolahan limbah cair yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
7.1.9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Tahunan	Rp	BPKA
7.1.10	Retribusi Pelayanan Pendidikan	Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
7.1.11	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.	Tahunan	Rp	BPKA
7.2	Retribusi Jasa Usaha	Jumlah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.	Tahunan	Rp	BPKA
7.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pemakaian kekayaan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
7.2.2	Retribusi Tempat Pelelangan	Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas	Tahunan	Rp	BPKA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.			
7.2.3	Retribusi Terminal	Jumlah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
7.2.4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
7.2.5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
7.2.6	Retribusi Rumah Potong Hewan	Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
7.2.7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
7.2.8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
7.2.9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Jumlah retribusi yang dipungut atas setiap penjualan produksi usaha daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
7.3	Retribusi Perizinan Tertentu	Jumlah pemungutan terhadap kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian	Tahunan	Rp	BPKA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		lingkungan.			
7.3.1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Jumlah Retribusi yang dipungut terkait dengan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.	Tahunan	Rp	BPKA
7.3.2	Retribusi Izin Gangguan (HO)	Jumlah retribusi yang dipungut terkait dengan pemberian izin tempatusaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, serta memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.	Tahunan	Rp	BPKA
7.3.3	Retribusi Izin Trayek	Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan izin trayek yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
7.3.4	Retribusi Izin Usaha Perikanan	Jumlah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan izin usaha perikanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.	Tahunan	Rp	BPKA
8.	Dana Perimbangan	Jumlah dan perimbangan yang ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN di DIY pada tahun berkenaan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.			BPKA
8.1	Jumlah Dana Alokasi Khusus	Jumlah dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
8.1.1	Pagu	Jumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana alokasi khusus. di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
8.1.2	Realisasi	Jumlah penerimaan pendapatan dari dana alokasi khusus di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
8.2	Jumlah Dana Alokasi Umum	Jumlah dana alokasi umum di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
8.2.1	Pagu	Jumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana alokasi umum di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
8.2.2	Realisasi	Jumlah penerimaan pendapatan dari dana alokasi umum di DIY pada tahun	Tahunan	Rp	BPKA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			
8.3	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	Jumlah dana bagi hasil di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
8.3.1	Pagu	Jumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana bagi hasil pajak di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
8.3.2	Realisasi	Jumlah penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
8.4	Jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Jumlah dana bagi hasil sumber daya alam di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
8.4.1	Pagu	Jumlah alokasi anggaran pendapatan dari dana bagi hasil sumber daya alam di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
8.4.2	Realisasi	Jumlah penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil sumber daya alam di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
8.5	Jumlah Dana Perimbangan (a+b+c+d)	Jumlah dana perimbangan (a+b+c+d) di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
8.5.1	Pagu	Jumlah pagu yang dianggarkan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
8.5.2	Realisasi	Jumlah realisasi yang tercapai di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
8.6	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	Jumlah pelampauan penerimaan dana perimbangan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
8.7	Jumlah Dana Perimbangan dari Provinsi ke Kab./Kota	Jumlah dana perimbangan dari provinsi yang diturunkan ke kab./kota di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		BPKA
8.8	Jumlah dana Perimbangan dari Provinsi ke Desa	Jumlah dana perimbangan dari provinsi yang diturunkan ke desa di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		BPKA
9.	Pinjaman Daerah	Alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas di DIY pada tahun berkenaan.			
691	Pinjaman Dalam Negeri	Jumlah pinjaman dalam negeri di DIY pada tahun berkenaan. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) merupakan jenis pinjaman yang dilakukan pemerintah dan diperoleh dari lender dalam negeri, dalam hal ini yaitu BUMN atau Pemerintah Daerah (Pemda), yang harus dibayar kembali dengan masa berlaku.	Tahunan	Rp	BPKA
9.2	Pinjaman Luar Negeri	Jumlah pinjaman luar negeri di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPKA
9.2.1	Pinjaman Luar Negeri Pemerintah	Jumlah pinjaman luar negeri pemerintah di DIY pada tahun	Tahunan	Rp	BPKA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan. Pinjaman luar negeri pemerintah atau yang biasa disebut utang luar negeri pemerintah adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari lender luar negeri.			
9.2.2	Pinjaman Luar Negeri Swasta	Jumlah pinjaman luar negeri swasta di DIY pada tahun berkenaan. Pinjaman luar negeri swasta yaitu utang penduduk (selain pemerintah dan bank sentral) kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah berdasarkan perjanjian utang (loan agreement) atau perjanjian lainnya, simpanan, dan kewajiban lainnya.	Tahunan	Rp	BPKA
9.3	Pinjaman Obligasi Daerah	Jumlah pinjaman obligasi daerah di DIY pada tahun berkenaan. Pinjaman obligasi daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.	Tahunan	Rp	BPKA
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset				
10.1	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase kontribusi komponen PAD terhadap total pendapatan daerah.	Tahunan	%	BPKA
10.2	Opini Pemeriksaan BPK (WTP = 1, WDP = 2, TW = 3, D = 4)	Banyaknya pemeriksaan yang diberikan oleh BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda DIY. BPKA (Akuntansi) memberikan keyakinan atas LK yang disusun sekaligus mendampingi dalam proses pemeriksaan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Tahunan	Angka	BPKA
10.3	Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Tahunan	%	BPKA

c. Badan Kepegawaian Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
11	Aparatur Negara	Data mengenai aparatur negara di DIY pada tahun berkenaan.			
11.1	Jumlah PNS Bersarakan Golongan	Banyaknya PNS berdasarkan golongan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
11.1.1	Golongan I	Banyaknya PNS golongan I di	Tahunan	Orang	Badan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		DIY pada tahun berkenaan.			Kepegawaian Daerah
11.1.2	Golongan II	Banyaknya PNS golongan II di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
11.1.3	Golongan III	Banyaknya PNS golongan III di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
11.1.4	Golongan IV	Banyaknya PNS golongan IV di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
11.2	Jumlah Pejabat Struktural	Banyaknya pejabat struktural berdasarkan eselon di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
11.2.1	Eselon I	Banyaknya pejabat struktural eselon I di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
11.2.2	Eselon II	Banyaknya pejabat struktural eselon II di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
11.2.3	Eselon III	Banyaknya pejabat struktural eselon III di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
11.2.4	Eselon IV	Banyaknya pejabat struktural eselon IV di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
12	Jumlah Pejabat Fungsional	Banyaknya pejabat fungsional di DIY pada tahun berkenaan. Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan fungsinya.			
12.1	Auditor	Banyaknya sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
12.2	P2UPD	Banyaknya Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
13	Jumlah Pensiunan PNS (Berdasarkan Golongan)	Banyaknya jumlah pensiunan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan.	Tahunan		
13.1	Golongan I	Banyaknya pensiunan PNS golongan I di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
13.2	Golongan II	Banyaknya pensiunan PNS golongan II di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
13.3	Golongan III	Banyaknya pensiunan PNS golongan III di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
13.4	Golongan IV	Banyaknya pensiunan PNS golongan IV di DIY pada tahun	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			Daerah
14	Jumlah Pegawai Kabupaten /kota Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Data jumlah pegawai kabupaten atau kota berdasarkan tingkat pendidikan di DIY pada tahun berkenaan.			
14.1	Tingkat Pendidikan PNS Provinsi	Banyaknya PNS berdasarkan pendidikan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.1.1	SMA dan Sederajat	Banyaknya PNS pendidikan SMA atau sederajat di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.1.2	Diploma	Banyaknya PNS pendidikan Diploma di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.1.3	Strata 1	Banyaknya PNS pendidikan S1t di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.1.4	Strata 2	Banyaknya PNS pendidikan S2 di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.1.5	Tamat SD atau Sederajat	Banyaknya PNS pendidikan S1 di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.1.6	SMP dan Sederajat	Banyaknya PNS pendidikan SMP atau ssederajat di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.1.7	Strata 3	Banyaknya PNS pendidikan S3 di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.2	Jumlah Pegawai Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Banyaknya pegawai berdasarkan pendidikan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.2.1	Tamat SD atau Sederajat	Banyaknya pegawai pendidikan SD atau sederajat di Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.2.2	SMP dan Sederajat	Banyaknya pegawai pendidikan SMP atau sederajat di Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.2.3	SMA dan Sederajat	Banyaknya pegawai pendidikan SMA atau sederajat di Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.2.4	Diploma	Banyaknya pegawai pendidikan diploma di Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.2.5	Srata 1	Banyaknya pegawai pendidikan S1 di Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.2.6	Strata 2	Banyaknya pegawai pendidikan S2 di Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.2.7	Strata 3	Banyaknya pegawai pendidikan S3 di Kabupaten Kulon Progo	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.3	Jumlah Pegawai Kabupaten Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Banyaknya pegawai berdasarkan pendidikan di Kabupaten Bantul.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
14.3.1	Tamat SD atau Sederajat	Banyaknya pegawai pendidikan SD atau sederajat di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.3.2	SMP dan Sederajat	Banyaknya pegawai pendidikan SMP atau sederajat di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.3.3	SMA dan Sederajat	Banyaknya pegawai pendidikan SMA atau sederajat di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.3.4	Diploma	Banyaknya pegawai pendidikan diploma di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.3.5	Srata 1	Banyaknya pegawai pendidikan S1 di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.3.6	Strata 2	Banyaknya pegawai pendidikan S2 di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.3.7	Strata 3	Banyaknya pegawai pendidikan S3 di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.4	Jumlah Pegawai Kabupaten Gunung Kidul Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Banyaknya pegawai berdasarkan pendidikan di Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.4.1	Tamat SD atau Sederajat	Banyaknya pegawai pendidikan SD atau sederajat di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.4.2	SMP dan Sederajat	Banyaknya pegawai pendidikan SMP atau sederajat di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.4.3	SMA dan Sederajat	Banyaknya pegawai pendidikan SMA atau sederajat di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.4.4	Diploma	Banyaknya pegawai pendidikan diploma di Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.4.5	Srata 1	Banyaknya pegawai pendidikan S1 di Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.4.6	Strata 2	Banyaknya pegawai pendidikan S2 di Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.4.7	Strata 3	Banyaknya pegawai pendidikan S3 di Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.5	Jumlah Pegawai Kabupaten Sleman Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Banyaknya pegawai berdasarkan pendidikan di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.5.1	Tamat SD atau Sederajat	Banyaknya pegawai pendidikan SD atau sederajat di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.5.2	SMP dan Sederajat	Banyaknya pegawai pendidikan SMP atau sederajat di Kabupaten Sleman pada tahun	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			
14.5.3	SMA dan Sederajat	Banyaknya pegawai pendidikan SMA atau sederajat di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.5.4	Diploma	Banyaknya pegawai pendidikan diploma di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.5.5	Srata 1	Banyaknya pegawai pendidikan S1 di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.5.6	Strata 2	Banyaknya pegawai pendidikan S2 di Kabupaten Sleman	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.5.7	Strata 3	Banyaknya pegawai pendidikan S3 di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.6	Jumlah Pegawai kota yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Banyaknya pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.6.1	Tamat SD atau Sederajat	Banyaknya pegawai pendidikan SD atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.6.2	SMP dan Sederajat	Banyaknya pegawai pendidikan SMP atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.6.3	SMA dan Sederajat	Banyaknya pegawai pendidikan SMA atau sederajat di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.6.4	Diploma	Banyaknya pegawai pendidikan diploma di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.6.5	Srata 1	Banyaknya pegawai pendidikan S1 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.6.6	Strata 2	Banyaknya pegawai pendidikan S2 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
14.6.7	Strata 3	Banyaknya pegawai pendidikan S3 di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
15	Jumlah Pegawai Pemda DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Banyaknya PNS yang aktif pada periode tertentu berdasarkan tingkat pendidikan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			
15.1	Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Banyaknya staf berdasarkan pendidikan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
15.1.1	Tidak Sekolah/Belum Tamat SD	Banyaknya staf pendidikan tidak sekolah/belum tamat SD di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
15.1.2	Tamat SD atau Sederajat	Banyaknya staf pendidikan tamat SD atau sederajat di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
15.1.3	SMP dan Sederajat	Banyaknya staf pendidikan SMP	Tahunan	Orang	Badan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		atau sederajat di DIY pada tahun berkenaan.			Kepegawaian Daerah
15.1.4	SMA dan Sederajat	Banyaknya staf pendidikan SMA atau sederajat di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
15.1.5	Diploma	Banyaknya staf pendidikan diploma di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
15.1.6	Strata 1	Banyaknya staf pendidikan strata 1 di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
15.1.7	Strata 2	Banyaknya staf pendidikan strata 2 di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
15.1.8	Strata 3	Banyaknya staf pendidikan strata 3 di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan SKPD Pemda DIY	Data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan SKPD Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			
16.1	Kantor Dinas Daerah	Banyaknya pegawai dan staf pada dinas daerah berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.1	Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Banyaknya staf berdasarkan pendidikan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.1.1	Tamat SD atau Sederajat	Banyaknya staf pendidikan tamat SD atau sederajat di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.1.2	SMP dan Sederajat	Banyaknya staf pendidikan SMP atau sederajat di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.1.3	SMA dan Sederajat	Banyaknya staf pendidikan SMA atau sederajat di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.1.4	Diploma	Banyaknya staf pendidikan diploma di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.1.5	Strata 1	Banyaknya staf pendidikan strata 1 di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.1.6	Strata 2	Banyaknya staf pendidikan strata 2 di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.1.7	Strata 3	Banyaknya staf pendidikan strata 3 di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16..1.2	Jumlah Staf Berdasrkan Golongan	Banyaknya staf berdasarkan golongan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.2.1	Golongan I	Banyaknya staf golongan I di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.2.2	Golongan II	Banyaknya staf golongan II di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
16.1.2.3	Golongan II	Banyaknya staf golongan III di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.2.4	Golongan IV	Banyaknya staf golongan IV di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.3	Jumlah pejabat Struktural	Banyaknya pejabat struktural di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.3.1	Eselon I	Banyaknya pejabat struktural eselon I di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.3.2	Eselon II	Banyaknya pejabat struktural eselon II di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.3.3	Eselon III	Banyaknya pejabat struktural eselon III di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.3.4	Eselon IV	Banyaknya pejabat struktural eselon IV di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
6.1.3.5	Eselon V	Banyaknya pejabat struktural eselon V di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.4	Jumlah Pejabat Fungsional	Banyaknya pejabat fungsional di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.1.5	Jumlah Pensiunan	Banyaknya jumlah pensiunan PNS di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.2	Kantor Lembaga Teknis Daerah	Banyaknya pegawai dan staf pada kantor lembaga teknis daerah berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16..2.1	Jumlah Staf Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Banyaknya staf berdasarkan pendidikan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.2.1.1	Tamat SD atau Sederajat	Banyaknya staf pendidikan tamat SD atau sederajat di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.2.1.2	SMP dan Sederajat	Banyaknya staf pendidikan SMP atau sederajat di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.2.1.3	SMA dan Sederajat	Banyaknya staf pendidikan SMA atau sederajat di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.2.1.4	Diploma	Banyaknya staf pendidikan diploma di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.2.1.5	Strata 1	Banyaknya staf pendidikan strata 1 di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.2.1.6	Strata 2	Banyaknya staf pendidikan strata 2 di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.2.1.7	Strata 3	Banyaknya staf pendidikan strata 3 di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.3.1.	Jumlah Staf Berdasrkan Golongan	Banyaknya staf berdasarkan golongan di DIY pada tahun	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			Daerah
16.3.1.1	Golongan I	Banyaknya staf golongan I di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.3.1.2	Golongan II	Banyaknya staf golongan II di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.3.1.3	Golongan II	Banyaknya staf golongan III di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.3.1.4	Golongan IV	Banyaknya staf golongan IV di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.4.1	Jumlah pejabat Struktural	Banyaknya pejabat struktural di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.4.1.1	Eselon I	Banyaknya pejabat struktural eselon I di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.4.1.2	Eselon II	Banyaknya pejabat struktural eselon II di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.4.1.3	Eselon III	Banyaknya pejabat struktural eselon III di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.4.1.4	Eselon IV	Banyaknya pejabat struktural eselon IV di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.4.1.5	Eselon V	Banyaknya pejabat struktural eselon V di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.5.1	Jumlah Pejabat Fungsional	Banyaknya pejabat fungsional di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
16.6.1	Jumlah Pensiunan	Banyaknya pensiunan PNS di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17	Jumlah Pegawai Pemda DIY	Banyaknya pegawai Pemda DIY pada tahun berkenaan.			
17.1	Sekretariat Daerah	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Sekretariat Daerah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.1.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.1.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.2	Biro Tata Pemerintahan	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Biro Tata Pemerintahan DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.2.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.2.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.3	Biro Hukum	Banyaknya pegawai negeri sipil	Tahunan	Orang	Badan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		laki-laki dan perempuan di Biro Hukum DIY pada tahun berkenaan.			Kepegawaian Daerah
17.3.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.3.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.4	Biro Organisasi	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Biro Organisasi DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.4.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.4.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.5	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.5.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.5.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.6	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.6.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.6.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.7	Biro Bina Mental Spiritual	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Biro Bina Metal dan Spiritual DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.7.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.7.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.8	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.8.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.8.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Daerah
17.9	Paniradya kaistimewaan	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan yang ada di Paniradya Kaistimewaan DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.9.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.9.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.10	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan yang ada di Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan pembiayaan Pembangunan DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.10.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.10.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.11	Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.11.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.11.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.12	Inspektorat	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Inspektorat DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.12.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.12.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.13	Dinas pariwisata	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Pariwisata DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.13.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.13.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.14.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Daerah
17.14.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.15.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.15.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.16.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.16.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.17.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.17.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.18	Dinas Kelautan dan Perikanan	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.18.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.18.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.19.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.19.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.20	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan energi Sumber Daya Mineral	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Pekerjaan Umum,	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY pada tahun berkenaan.			
17.20.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.20.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.21	Dinas Perhubungan	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Perhubungan DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.21.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.21.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.22	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.22.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.22.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.23	Dinas komunikasi dan Informatika	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.23.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.23.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.24	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.24.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.24.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.25	Dinas Kesehatan	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Kesehatan DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.25.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.25.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Daerah
17.26	Rumah Sakit Paru Respira	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Rumah Sakit Paru Respira DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.26.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.26.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.27	Rumah Sakit Jiwa Grasia	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Rumah Sakit Jiwa Grasia DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.27.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.27.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.28	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.28.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.28.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.29	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.29.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.29.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.30	Dinas Sosial	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Sosial DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.30.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.30.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.31	Dinas Kebudayaan	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Kebudayaan DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.31.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.31.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis	Tahunan	Orang	Badan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		kelamin perempuan.			Kepegawaian Daerah
17.32	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.32.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.32.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.33	Satuan Polisi Pamong Praja	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Satuan Polisi Pamong Praja DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.33.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.33.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.34.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.34.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.35.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.35.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.36	Badan Kepegawaian Daerah	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.36.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.36.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.37	Badan Pendidikan dan pelatihan	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			
17.37.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.37.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.38.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.38.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.39.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.39.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.40	Badan Penghubung Daerah	Banyaknya pegawai negeri sipil laki-laki dan perempuan di Badan Penghubung Daerah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.40.1	Laki-Laki	Banyaknya PNS berjenis kelamin laki-laki.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
17.40.2	Perempuan	Banyaknya PNS berjenis kelamin perempuan.	Tahunan	Orang	Badan Kepegawaian Daerah
18	Data Kinerja Badan Kepegawaian Daerah				
18.1	Persentase Kualitas Manajemen Sumber Daya Aparatur	Persentase kualitas manajemen sumber daya aparatur terhadap total jumlah sumber daya aparatur yang ada di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Kepegawaian Daerah
18.2	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian dan Kebenaran Pembuatan SK	Persentase ketepatan waktu penyelesaian dan kebenaran pembuatan SK terhadap total jumlah SK yang ada di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Kepegawaian Daerah
18.3	Persentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi	Persentase kesesuaian penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi terhadap total jumlah PNS yang ada di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Kepegawaian Daerah

d. Biro Hukum

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
19	Jumlah Produk Hukum	Banyaknya produk hukum yang dimiliki Pemda DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum
19.1	Jumlah Perda Keistimewaan	Banyaknya perda untuk keistimewaan yang sudah/ pernah diterbitkan Pemda DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum
19.2	Jumlah Perda yang Sudah Diterbitkan	Banyaknya perda yang sudah/ pernah diterbitkan Pemda DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum
19.3	Jumlah Peraturan Gubernur	Banyaknya peraturan gubernur yang diterbitkan/ berlaku di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum
19.4	Jumlah Keputusan Gubernur	Banyaknya keputusan gubernur yang diterbitkan/ berlaku di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum
19.5	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim	Banyaknya keputusan gubernur yang diterbitkan tentang pembentukan tim di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum
19.6	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia	Banyaknya keputusan gubernur yang diterbitkan tentang pembentukan tim di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum
19.7	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin	Banyaknya keputusan gubernur yang diterbitkan tentang pemberian izin di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum
19.8	Jumlah Instruksi Gubernur	Banyaknya instruksi gubernur yang berlaku di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum
19.9	Jumlah Surat Edaran Gubernur	Banyaknya surat edaran gubernur dalam kurun waktu satu tahun tertentu di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum
19.10	Jumlah Keputusan Sekretaris Daerah	Banyaknya keputusan sekretaris daerah yang diterbitkan Pemda DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum
19.11	Perjanjian Gubernur	Banyaknya perjanjian kerja sama yang didelegasikan melalui surat kuasa dari gubernur.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum
19.12	Perjanjian Sekda	Banyaknya perjanjian kerja sama yang didelegasikan melalui surat kuasa dari sekda.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum
19.13	Keputusan Wagub	Banyaknya keputusan Pemerintah Daerah DIY yang diambil langsung tanggung jawabnya oleh wagub.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum
19.14	Keputusan Asisten	Banyaknya keputusan yang diambil langsung tanggung jawabnya oleh asisten.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
20	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	Banyaknya perda yang mendukung iklim usaha yang diterbitkan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Peraturan	Biro Hukum
21	Jumlah kepemilikan Perda Transparansi	Banyaknya perda transparansi yang diterbitkan oleh Pemda DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Peraturan	Biro Hukum
22	Jumlah Perda untuk RTRW	Banyaknya perda untuk RTRW yang diterbitkan Pemda DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum
23	Jumlah Revisi Yang Dilakukan Sejak Terbitnya Perda RTRW	Banyaknya revisi perda oleh Pemda DIY sejak terbitnya perda RTRW pada tahun berkenaan.	Tahunan	Dokumen	Biro Hukum
25	Data Kinerja Biro Hukum				
25.1	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Biro Hukum
25.2	Persentase Kesesuaian/Keselarasan Produk Hukum Kabupaten/Kota dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi	Persentase kesesuaian/keselarasan produk hukum kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Biro Hukum
25.3	Persentase Layanan dan Bantuan Hukum serta Layanan Informasi Hukum	Persentase layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Biro Hukum
25.4	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Berkualitas	Persentase rancangan produk hukum yang berkualitas di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Biro Hukum
25.5	Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Biro Hukum
25.6	Persentase Kualitas Produk Hukum, Layanan Hukum, dan Layanan Informasi	Persentase kualitas produk hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Biro Hukum

e. Biro Organisasi

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Data terkait nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
26.1	Kantor Bupati/Walikota	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan di kantor bupati dan walikota.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
26.2	Kantor Setda	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan	Tahunan	Poin	Biro Organisasi

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		publik yang diselenggarakan di kantor setda.			
26.3	Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan di kantor DPRD dan sekretariat DPRD.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
26.4	Kantor Inspektorat	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan di kantor Inspektorat.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
26.5	Kantor Bappeda	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan di kantor Bappeda.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
26.6	Kantor Dinas Daerah	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan di kantor dinas daerah.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27	IKM Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga	Data terkait nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga DIY pada tahun berkenaan.			
27.1	Badan Latihan Pendidikan Teknik	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Badan Latihan Pendidikan Teknik.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.2	SMK N. 2 Wates Kulon Progo	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan di SMK N. 2 Wates Kulon Progo.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.3	SMK N. 2 Wonosari	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan di SMK N. 2 Wonosari.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.4	SMA N. 1 Wonosari	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan di SMA N. 1 Wonosari.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.5	SMP N. 1 Wonosari	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan di SMP N. 1 Wonosari.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.6	SMK N. 2 Pengasih Kulon Progo	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan di SMK N. 2 Pengasih Kulon Progo.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.7	SMP N. 1 Wates	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan di SMP N. 1 Wates.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.7	SMP N. 1 Galur	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan di SMP N. 1 Galur.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.9	SMP N. 1 Karangmojo	Nilai indeks kepuasan	Tahunan	Poin	Biro

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan di SMP N. 1 Karangmojo.			Organisasi
27.10	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.11	Balai Pemuda dan Olah Raga	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pemuda dan Olah Raga.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.12	SLBN Pembina Yogyakarta	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan SLBN Pembina Yogyakarta.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.13	SLBN 1 Yogyakarta	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan SLBN 1 Yogyakarta.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.14	SLBN 2 Yogyakarta	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan SLBN 2 Yogyakarta.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.15	SLBN 1 Bantul	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan SLBN 1 Bantul.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.16	SLBN 2 Bantul	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan SLBN 2 Bantul.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.17	SLBN 1 Gunungkidul	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan SLBN 1 Gunungkidul.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.18	SLBN 1 Sleman	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan SLBN 1 Sleman.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.19	SLBN 1 Kulon Progo	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan SLBN 1 Kulon Progo.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.20	SLBN 2 Gunungkidul	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan SLBN 2 Gunungkidul.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.21	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.22	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.23	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan	Tahunan	Poin	Biro Organisasi

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		publik yang diselenggarakan Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul.			
27.24	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pendidikan Menengah Kulon Progo.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
27.25	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
28	IKM Dinas Kesehatan dan RS Ghrasia	Data terkait nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Dinas Kesehatan dan RS Grasia DIY pada tahun berkenaan.			
28.1	RSK Paru Respira	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan RS Paru Respira.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
28.2	Balai Laboratorium Kesehatan dan Penguji Kalibrasi	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Laboratorium Kesehatan.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
28.3	Balai Pelatihan Kesehatan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pelatihan Kesehatan.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
28.4	Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
28.5	RS Jiwa Ghrasia	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan RS Jiwa Ghrasia.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
29	IKM DPPKA/BPKA	Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat pada lingkungan DPPKA.			
29.1	KPPD Kab. Sleman	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan KPPD Kab. Sleman.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
29.2	KPPD Kab. Kulon Progo	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan KPPD Kab. Kulon Progo.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
29.3	KPPD Kab. Gunungkidul	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan KPPD Kab. Gunungkidul.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
29.4	KPPD Kab. Bantul	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan KPPD Kab. Bantul.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
29.5	KPPD Kota Yogyakarta	Nilai indeks kepuasan	Tahunan	Poin	Biro

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan KPPD Kota Yogyakarta.			Organisasi
30	IKM Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data terkait nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY pada tahun berkenaan.			
30.1	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
30.2	Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura DIY.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
30.3	Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengembangan SDM Pertanian.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
30.4	Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak, dan Diagnostik Kehewan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak, dan Diagnostik Kehewan.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
30.5	Balai Proteksi Tanaman Pertanian	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Proteksi Tanaman Pertanian.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
30.6	Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
31	IKM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Data terkait nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY pada tahun berkenaan.			
31.1	Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan/Balai Perbenihan Kehutanan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan atau Balai Perbenihan Kehutanan.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
31.2	Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Kesatuan Pengelolaan	Tahunan	Poin	Biro Organisasi

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Hutan Yogyakarta.			
31.3	Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih, dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih, dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
31.4	Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
31.5	Balai Pengelolaan Sampah DIY	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengelolaan Sampah DIY.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
31.6	Balai Laboratorium Lingkungan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Laboratorium Lingkungan.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
32	IKM Dinas Perikanan dan Kelautan	Data terkait nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY pada tahun berkenaan.			
32.1	Pelabuhan Perikanan Pantai	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Pelabuhan Perikanan Pantai.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
32.2	Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan (BPTKP)	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan BPTKP.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
33	IKM Dinas Sosial	Data terkait nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Dinas Sosial DIY pada tahun berkenaan.			
33.1	Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)/Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Panti Sosial Asuhan Anak.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
33.2	Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)/Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Panti Sosial Bina Remaja.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
33.3	Panti Sosial Tresna Werdha/Balai pelayanan Sosial Tresna werdha	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Panti Sosial Tresna Wredha.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
33.4	Panti Sosial Bina Karya (PSBK)/Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Panti Sosial Bina Karya.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
33.5	Panti Sosial karya Wanita (PSKW)/Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Panti Sosial Karya Wanita.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
33.6	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas.	Tahunan	Poin	Biro Organisasi
34	IKM Dinas Lainnya	Data terkait nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan dinas DIY lainnya pada tahun berkenaan.			
34.1	Dinas Kebudayaan	Data terkait nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Dinas Kebudayaan.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
34.1.1	Museum Sonobudoyo	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Museum Sonobudoyo.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
34.1.2	Taman Budaya	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Taman Budaya.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
34.2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat pada lingkungan Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
34.2.1	Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Latihan Kerja dan Transmigrasi.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
34.2.2	Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
34.3	Dinas Perhubungan	Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat pada lingkungan Dinas Dinas Perhubungan.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
34.3.1	Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengelolaan Terminal dan Parkir.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
34.4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Data terkait Indeks Kepuasan Masyarakat pada lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
34.4.1	Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
34.4.2	Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
34.5	Dinas Pekerjaan Umum,	Data terkait Indeks Kepuasan	Tahunan	poin	Biro

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Perumahan, dan ESDM	Masyarakat pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM.			Organisasi
34.5.1	Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengujian, Informasi Permukiman, dan Jasa Konstruksi.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
34.5.2	Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum Perkotaan.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
34.5.3	Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
34.5.4	Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Bantul dan Kulon Progo	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM Wilayah Bantul dan Kulon Progo.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
35	IKM Badan	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan badan daerah di DIY pada tahun berkenaan.			
35.1	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Daerah.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
35.1.1	Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
35.2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
35.2.1	Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah	Nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah.	Tahunan	poin	Biro Organisasi
36	Data Kinerja Biro Organisasi	Data hasil kerja Biro Organisasi.			
36.1	Persentase dari Kelembagaan yang Efektif dan Efisien	Persentase banyaknya kelembagaan yang efektif dan efisien terhadap banyaknya kelembagaan yang berada di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Biro Organisasi

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
36.2	Persentase Peningkatan Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada Unit Pelayanan Publik	Persentase peningkatan skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Biro Organisasi
36.3	Persentase dari Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional terhadap jumlah total perangkat daerah yang berada di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Biro Organisasi
36.4	Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Nilai Minimal Baik	Persentase indeks kepuasan masyarakat minimal baik di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Biro Organisasi
36.5	Persentase SKPD yang Menerapkan SOP	Persentase SKPD yang menerapkan SOP di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Biro Organisasi
36.6	Jumlah Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik pada Zona Hijau	Banyaknya instansi penyelenggara pelayanan publik pada zona hijau di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Biro Organisasi
36.7	Indeks Reformasi Birokrasi Pemda DIY	Indeks Reformasi Birokrasi Pemda DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Biro Organisasi
43	Organisasi Daerah	Banyaknya organisasi yang berasal dari DIY.			
43.1	Jumlah Biro	Banyaknya biro berdasarkan Perdas Nomor 1 Tahun 2018.	Tahunan	Lembaga	Biro Organisasi
43.2	Jumlah Dinas	Banyaknya dinas berdasarkan Perdas Nomor 1 Tahun 2018.	Tahunan	Lembaga	Biro Organisasi
43.3	Jumlah Lembaga Teknis Daerah	Banyaknya lembaga teknis berdasarkan Perdas Nomor 1 Tahun 2018.	Tahunan	Lembaga	Biro Organisasi
43.3.1	Jumlah Kantor	Banyaknya kantor yang berada pada lembaga teknis daerah.	Tahunan	Lembaga	Biro Organisasi
43.3.2	Jumlah Badan	Banyaknya badan yang berada pada lembaga teknis daerah.	Tahunan	Lembaga	Biro Organisasi
43.3.3	Rumah Sakit Ghrasia	Banyaknya Rumah Sakit Ghrasia yang berada pada lembaga teknis daerah.	Tahunan	Lembaga	Biro Organisasi
43.3.4	Satpol PP	Banyaknya Satpol PP yang berada pada lembaga teknis daerah.	Tahunan	Lembaga	Biro Organisasi
43.3.5	Inspektorat	Banyaknya inspektorat yang berada pada lembaga teknis daerah.	Tahunan	Lembaga	Biro Organisasi
43.4	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Banyaknya UPT yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.	Tahunan	Lembaga	Biro Organisasi
43.5	Jumlah Lembaga Lain	Banyaknya lembaga lain yang berada di DIY.	Tahunan	Lembaga	Biro Organisasi
43.6	Sekretariat DPD	Banyaknya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung	Tahunan	Lembaga	Biro Organisasi

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretaris daerah.			

f. Satuan Polisi

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
37	Jumlah Pelanggaran Perda	Banyaknya seluruh pelanggaran perda di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Satuan Polisi Pamong Praja
38	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	Banyaknya seluruh penyelesaian penegakan perda di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	Satuan Polisi Pamong Praja
1	Jumlah Pelanggaran Perda	Banyaknya seluruh pelanggaran perda di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	Banyaknya seluruh penyelesaian penegakan perda di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	Satuan Polisi Pamong Praja
39	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Data keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.			
39.1	Aparat dan Sarana Keamanan	Banyaknya aparat dan sarana keamanan di DIY pada tahun berkenaan.			
39.1.1	Jumlah Aparat Satuan Pamong Praja	Banyaknya aparat satuan pamong praja yang ada di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
39.1.2	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 Jam	Banyaknya patroli petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 jam di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	Satuan Polisi Pamong Praja
39.1.3	Jumlah Linmas	Banyaknya perlindungan masyarakat di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Satuan Polisi Pamong Praja
39.2	Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	Banyaknya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Satuan Polisi Pamong Praja
39.3	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	Banyaknya penyelesaian pelanggaran K3 di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Satuan Polisi Pamong Praja
40	Data Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja				
40.1	Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Satuan Polisi Pamong Praja
40.2	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Tertangani	Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tertangani di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Satuan Polisi Pamong Praja
40.3	Persentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan	Persentase hasil ketercapaian pelaksanaan program	Tahunan	%	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Program Dukungan Sasaran SKPD	dukungan sasaran SKPD di DIY pada tahun berkenaan.			

g. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
41	Jumlah Perjanjian Kerja Sama dengan Daerah Lain yang Masih Berlaku	Banyaknya seluruh perjanjian kerja sama dengan daerah lain yang masih berlaku di DIY dalam satu tahun.			
41.1	Kerja Sama di Dalam Negeri	Banyaknya kerja sama yang masih berlaku dan berada dalam negeri di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Perjanjian	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
41.2	Kerja Sama Luar Negeri	Banyaknya kerja sama yang masih berlaku dan berada pada luar negeri di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	MoU	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal

h. Sekretariat DPRD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
42	Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD	Banyaknya kantor DPRD dan sekretariat DPRD yang merupakan lembaga atau perwakilan rakyat (parlemen) dan masyarakat daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	Tahunan	Unit	Sekretariat DPRD
52	Rekapitulasi Kegiatan DPRD	Data kegiatan DPRD di DIY pada tahun berkenaan.			
52.1	Rapat Paripurna	Banyaknya kegiatan rapat paripurna yang dilakukan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.2	Rapat Komisi	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan komisi di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.2.1	Komisi A	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan komisi A di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.2.2	Komisi B	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan komisi B di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.2.3	Komisi C	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan komisi C di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.2.4	Komisi D	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan komisi D di	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		wilayah DIY pada periode berkenaan.			
52.3	Peninjauan Komisi	Banyaknya kegiatan peninjauan yang dilakukan komisi di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.3.1	Komisi A	Banyaknya kegiatan peninjauan yang dilakukan komisi A di wilayah DIY pada periodenya.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.3.2	Komisi B	Banyaknya kegiatan peninjauan yang dilakukan komisi B di wilayah DIY pada periodenya.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.3.3	Komisi C	Banyaknya kegiatan peninjauan yang dilakukan komisi C di wilayah DIY pada periodenya.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.3.4	Komisi D	Banyaknya kegiatan peninjauan yang dilakukan komisi D di wilayah DIY pada periodenya.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.4	Rapat Pimpinan	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan pimpinan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.5	Rapat Badan Anggaran	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan badan anggaran di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.6	Rapat Badan Musyawarah	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan badan musyawarah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.7	Rapat Badan Pembentukan Daerah	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan badan pembentukan daerah di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.8	Rapat Badan Kehormatan	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan badan kehormatan daerah di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.9	Rapat Konsultasi	Banyaknya kegiatan rapat konsultasi yang dilakukan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.10	Rapat Gabungan Komisi	Banyaknya kegiatan rapat gabungan komisi yang dilakukan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.11	Rapat-Rapat Pansus	Banyaknya kegiatan rapat pansus yang dilakukan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.12	Rapat Dengar Pendapat Umum/Tamu dan Public Hearing	Banyaknya kegiatan rapat dengar pendapat yang dilakukan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.13	Menerima Unjuk Rasa	Banyaknya kegiatan	Triwulanan	Kali	Sekretariat



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		penerimaan unjuk rasa yang dilakukan di wilayah DIY pada periode berkenaan.			DPRD
52.14	Rapat Fraksi	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan fraksi di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.14.1	Fraksi PDIP	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan fraksi PDIP di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.14.2	Fraksi PAN	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan fraksi PAN di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.14.3	Fraksi Golkar	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan fraksi Golkar di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.14.4	Fraksi Gerindra	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan fraksi Gerindra di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.14.5	Fraksi PKS	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan fraksi PKS di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.14.6	Fraksi Kebangkitan Nasional	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan fraksi Kebangkitan Nasional di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.14.7	Fraksi Persatuan Demokrat	Banyaknya kegiatan rapat yang dilakukan fraksi Persatuan Demokrat di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.15	Kunjungan Kerja alat kelengkapan DPRD ke luar DIY	Banyaknya kegiatan kunjungan kerja DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.15.1	Komisi A	Banyaknya kegiatan kunjungan kerja komisi A DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.15.2	Komisi B	Banyaknya kegiatan kunjungan kerja komisi B DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.15.3	Komisi C	Banyaknya kegiatan kunjungan kerja komisi C DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.15.4	Komisi D	Banyaknya kegiatan kunjungan kerja komisi D DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.15.5	Badan Anggaran	Banyaknya kegiatan kunjungan kerja badan anggaran DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
52.15.6	Badan Musyawarah	Banyaknya kegiatan kunjungan kerja badan musyawarah DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.15.7	Badan Pembentukan Perda	Banyaknya kegiatan kunjungan kerja badan pembentukan perda DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.15.8	Badan Kehormatan	Banyaknya kegiatan kunjungan kerja badan kehormatan DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.15.9	Pansus-Pansus	Banyaknya kegiatan kunjungan kerja pansus-pansus DPRD ke luar DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.16	Konsultasi	Banyaknya kegiatan konsultasi yang dilakukan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.16.1	Badan Anggaran	Banyaknya kegiatan konsultasi yang dilakukan badan anggaran di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.16.2	Badan Musyawarah	Banyaknya kegiatan konsultasi yang dilakukan badan musyawarah di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.16.3	Badan Pembentukan Perda	Banyaknya kegiatan konsultasi yang dilakukan badan pembentukan perda di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.16.4	Badan Kehormatan	Banyaknya kegiatan konsultasi yang dilakukan badan kehormatan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.16.5	Pansus-Pansus	Banyaknya kegiatan konsultasi yang dilakukan pansus-pansus di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.17	Delegasi	Banyaknya perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusny menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga pada periode berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.18	Bimbingan Teknis	Banyaknya kegiatan di mana peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta yang di mana materi yang diberikan meliputi pembangunan tim kerja efektif pada periode yang berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.19	Reses	Banyaknya reses atau masa	Triwulanan	Kali	Sekretariat

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		reses, yaitu masa di mana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan, maupun secara berkelompok. Masa reses ditiadakan pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR.			DPRD
52.20	Kunjungan ke Luar Negeri	Banyaknya kegiatan kunjungan ke luar negeri pada periode yang berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.21	Pendampingan	Banyaknya kegiatan pendampingan yang dilakukan pada periode yang berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.21.1	Komisi A	Banyaknya kegiatan pendampingan yang dilakukan komisi A pada periode yang berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.21.2	Komisi B	Banyaknya kegiatan pendampingan yang dilakukan komisi B pada periode yang berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.21.3	Komisi C	Banyaknya kegiatan pendampingan yang dilakukan komisi C pada periode yang berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
52.21.4	Komisi D	Banyaknya kegiatan pendampingan yang dilakukan komisi D pada periode yang berkenaan.	Triwulanan	Kali	Sekretariat DPRD
53	Produk Hukum DPRD yang Dihasilkan	Banyaknya produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD di DIY pada tahun berkenaan.			
53.1	Peraturan daerah	Banyaknya peraturan daerah, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yang disadurkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019.	Tahunan	Buah	Sekretariat DPRD
53.2	Peraturan daerah istimewa	Banyaknya peraturan daerah istimewa DIY yang selanjutnya disebut perdais, yaitu peraturan daerah DIY yang bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY bersama gubernur untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan istimewa.	Tahunan	Buah	Sekretariat DPRD
53.3	Peraturan DPRD	Banyaknya peraturan DPRD, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.	Tahunan	Buah	Sekretariat DPRD
53.4	Keputusan DPRD	Banyaknya keputusan yang berasal dari rapat anggota dewan DPRD.	Tahunan	Buah	Sekretariat DPRD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
53.5	Keputusan pimpinan DPRD	Banyaknya keputusan yang beradal dari pimpinan DPRD.	Tahunan	Buah	Sekretariat DPRD

i. BPBD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
44	Kerusakan Kawasan Akibat Bencana	Data terkait kerusakan kawasan akibat bencana di DIY pada tahun berkenaan.			
44.1	Longsor	Banyaknya desa atau kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana longsor di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	BPBD
44.2	Banjir	Banyaknya desa atau kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	BPBD
44.3	Angin Ribut	Banyaknya desa atau kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana angin ribut di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	BPBD
44.4	Kebakaran	Banyaknya desa atau kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana kebakaran di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	BPBD
44.5	Gempa Bumi	Banyaknya desa atau kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	BPBD
44.6	Gunung Meletus	Banyaknya desa atau kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana gunung meletus di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	BPBD
44.7	Tsunami	Banyaknya desa atau kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana tsunami di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	BPBD
44.8	Badai	Banyaknya desa atau kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana badai di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	BPBD
44.9	Kebakaran Hutan	Banyaknya desa atau kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana kebakaran hutan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	BPBD
44.10	Kekeringan	Banyaknya desa atau kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana kekeringan di DIY pada	Tahunan	Desa	BPBD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		tahun berkenaan.			
45	Kawasan Rawan Bencana Alam	Data terkait peta kawasan rawan bencana di DIY pada tahun berkenaan.			
45.1	Jumlah Kawasan Rawan Longsor	Banyaknya kecamatan yang masuk ke dalam peta kawasan rawan longsor di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	kecamatan	BPBD
45.2	Jumlah Kawasan Rawan Banjir	Banyaknya kecamatan yang masuk ke dalam peta kawasan rawan banjir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	kecamatan	BPBD
45.3	Jumlah Kawasan Rawan Angin Ribut	Banyaknya kecamatan yang masuk ke dalam peta kawasan rawan angin ribut di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	kecamatan	BPBD
45.4	Jumlah Kawasan Rawan Kebakaran	Banyaknya kecamatan yang masuk ke dalam peta kawasan rawan kebakaran di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	kecamatan	BPBD
45.5	Jumlah Kawasan Rawan Gunung Meletus	Banyaknya kecamatan yang masuk ke dalam peta kawasan rawan gunung meletus di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	kecamatan	BPBD
45.6	Jumlah Kawasan Rawan Tsunami	Banyaknya kecamatan yang masuk ke dalam peta kawasan rawan tsunami di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	kecamatan	BPBD
45.7	Jumlah Kawasan Rawan Gempa Bumi	Banyaknya kecamatan yang masuk ke dalam peta kawasan rawan gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	kecamatan	BPBD
45.8	Jumlah Kawasan Rawan Kekeringan	Banyaknya kecamatan yang masuk ke dalam peta kawasan rawan kekeringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	kecamatan	BPBD
46	Frekuensi Terjadinya Bencana	Data terkait frekuensi terjadinya bencana di DIY pada tahun berkenaan.			
46.1	Longsor	Banyaknya kejadian bencana longsor di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
46.2	Banjir	Banyaknya kejadian bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
46.3	Angin Ribut	Banyaknya kejadian bencana angin ribut di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
46.4	Kebakaran	Banyaknya kejadian bencana kebakaran di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
46.5	Gempa Bumi	Banyaknya kejadian bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
46.6	Gunung Meletus	Banyaknya kejadian	Tahunan	Kali	BPBD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		bencana gunung meletus di DIY pada tahun berkenaan.			
46.7	Tsunami	Banyaknya kejadian bencana tsunami di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
46.8	Badai	Banyaknya kejadian bencana badai di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
46.9	Kebakaran Hutan	Banyaknya kejadian bencana kebakaran hutan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
46.10	Kekeringan	Banyaknya kejadian bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
47	Bencana Alam	Data terkait bencana alam yang terjadi di DIY pada tahun berkenaan.			
47.1	Pusat Evakuasi Bencana	Data terkait pusat evakuasi bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lokasi	BPBD
47.1.1	Jumlah	Banyaknya pusat evakuasi bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
47.1.2	Lokasi	Banyaknya kecamatan yang digunakan sebagai evakuasi bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kecamatan	BPBD
47.2	Jumlah Pengungsi Akibat Bencana	Data terkait pengungsi akibat bencana.	Tahunan	Orang	BPBD
47.2.1	Banjir	Banyaknya pengungsi karena bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
47.2.2	Gunung Meletus	Banyaknya pengungsi karena bencana gunung meletus di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
47.2.3	Longsor	Banyaknya pengungsi karena bencana longsor di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
47.2.4	Gempa	Banyaknya pengungsi karena bencana gempa di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
47.2.5	Tsunami	Banyaknya pengungsi karena bencana tsunami di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
47.2.6	Lainnya	Banyaknya pengungsi karena bencana lainnya di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
47.3	Jumlah Lokasi Pengungsian	Banyaknya tempat yang dijadikan lokasi pengungsian di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lokasi	BPBD
47.4	Jumlah Pengungsi yang Telah Kembali ke Lokasi Asal	Banyaknya pengungsi yang telah kembali ke lokasi asal di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
47.5	Jumlah Pengungsi yang Telah Direlokasi	Banyaknya pengungsi yang telah direlokasi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
47.6	Jumlah Korban Bencana Alam	Data terkait korban bencana	Tahunan	Orang	BPBD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		alam di DIY pada tahun berkenaan.			
47.6.1	Meninggal	Banyaknya korban meninggal karena kejadian bencana alam di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
47.6.2	Hilang	Banyaknya korban hilang karena kejadian bencana alam di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
47.6.3	Luka-Luka	Banyaknya korban luka-luka karena kejadian bencana alam di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
47.7	Jumlah Lokasi Bencana				
47.1	Jumlah Lokasi Bencana	Banyaknya lokasi yang menjadi titik terjadinya bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lokasi	BPBD
47.2	Jumlah Kecamatan Lokasi Bencana	Banyaknya kecamatan yang menjadi lokasi terjadinya bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kecamatan	BPBD
47.8	Jumlah Perkiraan Kerugian Akibat Bencana	Nilai perkiraan kerugian yang diakibatkan kejadian bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kecamatan	BPBD
47.9	Kebutuhan Bantuan	Data terkait kebutuhan bantuan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPBD
47.9.1	Dana	Jumlah dana yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BPBD
47.9.2	Beras	Jumlah beras yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	BPBD
47.9.3	Mie Instan	Banyaknya mie instan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kardus	BPBD
47.9.4	Minyak Goreng	Jumlah minyak goreng yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Liter	BPBD
47.9.5	Obat-Obatan	Banyaknya obat-obatan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Paket	BPBD
47.9.6	Pakaian	Banyaknya pakaian yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Paket	BPBD
47.9.7	Material Bangunan	Banyaknya material bangunan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Paket	BPBD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
47.9.8	Peralatan Tanggap Darurat Bencana	Banyaknya peralatan tanggap darurat yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
47.9.9	Air Bersih	Jumlah air bersih yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Liter	BPBD
47.9.10	Kecap Botol Kecil	Banyaknya kecap botol kecil yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Botol	BPBD
47.9.11	Saos Botol Kecil	Banyaknya saos botol kecil yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Botol	BPBD
47.9.12	Sarden Kecil	Banyaknya sarden kecil yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kaleng	BPBD
47.9.13	Sambal Botol Kecil	Banyaknya sambal botol kecil yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Botol	BPBD
47.9.14	Piring Melamin	Banyaknya piring melamin yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	BPBD
47.9.15	Gelas Melamin	Banyaknya gelas melamin yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	BPBD
47.9.16	Tas Paket	Banyaknya tas pake yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	BPBD
47.9.17	Terpal	Banyaknya terpal yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	BPBD
47.9.18	Lainnya	Banyaknya kebutuhan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pengungsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Paket	BPBD
47.10	Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Kebakaran	Banyaknya bantuan logistik untuk korban bencana kebakaran.	Tahunan	Paket	BPBD
47.11	Persentase Korban Meninggal dan Hilang terhadap Jumlah Kejadian Bencana	Persentase korban meninggal dan hilang terhadap jumlah kejadian bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPBD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
47.12	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Data resiko bencana di Indonesia.	Tahunan		BPBD
47.13	Jumlah Sistem Peringatan Dini yang Sudah Terintegrasi	Banyaknya sistem peringatan dini yang sudah terintegrasi.	Tahunan	Unit	BPBD
47.14	Capaian Indeks Pemulihan Pasca Bencana di DIY	Persentase capaian indeks pemulihan pasca bencana.	Tahunan	%	BPBD
47.15	Persentase Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi terhadap 5 (Lima) Jenis Ancaman Bencana di DIY	Persentase banyaknya dokumen rencana koontijensi terhadap 5 (lima) jenis ancaman bencana di DIY.	Tahunan	%	BPBD
47.16	Persentase Korban Meninggal dan Hilang terhadap Jumlah Kejadian Bencana	Persentase korban meninggal dan hilang terhadap jumlah kejadian bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPBD
47.17	Jumlah Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	Banyaknya Kerusakan dan Kerugian akibat bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		BPBD
47.18	Jumlah Korban Akibat Bencana	Banyaknya korban akibat bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Korban	BPBD
47.19	Pemulihan Pasca Bencana	Banyaknya pemulihan pasca bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		BPBD
48	Catatan Data Bencana di DIY	Data Kejadian Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.			BPBD
48.1	Banjir	Data kejadian bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan.			BPBD
48.1.1	Jumlah Kejadian	Banyaknya kejadian bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
48.1.2	Meninggal	Banyaknya orang meninggal karena bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.1.3	Luka-Luka	Banyaknya orang luka-luka karena bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.1.4	Hilang	Banyaknya orang hilang karena bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.1.5	Menderita	Banyaknya orang menderita karena bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.1.6	Mengungsi	Banyaknya orang mengungsi karena bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.1.7	Rumah Rusak Berat	Banyaknya rumah rusak berat karena bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.1.8	Rumah Rusak Ringan	Banyaknya rumah rusak ringan karena bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.2	Epidemi dan Wabah	Data kejadian bencana epidemi dan wabah di DIY			BPBD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pada tahun berkenaan.			
48.2.1	Jumlah Kejadian	Banyaknya kejadian bencana epidemi dan wabah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
48.2.2	Meninggal	Banyaknya orang meninggal karena bencana epidemi dan wabah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.2.3	Luka-Luka	Banyaknya orang luka-luka karena bencana epidemi dan wabah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.2.4	Hilang	Banyaknya orang hilang karena bencana epidemi dan wabah di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Orang	BPBD
48.2.5	Menderita	Banyaknya orang menderita karena bencana epidemi dan wabah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.2.6	Mengungsi	Banyaknya orang menderita karena bencana epidemi dan wabah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.2.7	Rumah Rusak Berat	Banyaknya rumah rusak berat karena bencana epidemi dan wabah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.2.8	Rumah Rusak Ringan	Banyaknya rumah rusak ringan karena bencana epidemi dan wabah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.3	Penyakit	Data kejadian bencana penyakit di DIY pada tahun berkenaan.			BPBD
48.3.1	Jumlah Kejadian	Banyaknya kejadian bencana penyakit di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
48.3.2	Meninggal	Banyaknya orang meninggal karena bencana penyakit di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.3.3	Luka-Luka	Banyaknya orang luka-luka karena bencana penyakit di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.3.4	Hilang	Banyaknya orang hilang karena bencana penyakit di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.3.5	Menderita	Banyaknya orang menderita karena bencana penyakit di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.3.6	Mengungsi	Banyaknya orang mengungsi karena bencana penyakit di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.3.7	Rumah Rusak Berat	Banyaknya rumah rusak berat karena bencana penyakit di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.3.8	Rumah Rusak Ringan	Banyaknya rumah rusak ringan karena bencana	Tahunan	Unit	BPBD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		penyakit di DIY pada tahun berkenaan.			
48.4	Gelombang Pasang/Abrasi	Data kejadian bencana gelombang pasang/abrasi di DIY pada tahun berkenaan.			BPBD
48.4.1	Jumlah Kejadian	Banyaknya kejadian bencana gelombang pasang/abrasi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
48.4.2	Meninggal	Banyaknya orang meninggal karena bencana gelombang pasang/abrasi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.4.3	Luka-Luka	Banyaknya orang luka-luka karena bencana gelombang pasang/abrasi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.4.4	Hilang	Banyaknya orang hilang karena bencana gelombang pasang/abrasi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.4.5	Menderita	Banyaknya orang menderita karena bencana gelombang pasang/abrasi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.4.6	Mengungsi	Banyaknya orang mengungsi karena bencana gelombang pasang/abrasi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.4.7	Rumah Rusak Berat	Banyaknya rumah rusak berat karena bencana gelombang pasang/abrasi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.4.8	Rumah Rusak Ringan	Banyaknya rumah rusak ringan karena bencana gelombang pasang/abrasi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.5	Gempa Bumi	Data kejadian bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan.			BPBD
48.5.1	Jumlah Kejadian	Banyaknya kejadian bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
48.5.2	Meninggal	Banyaknya orang meninggal karena bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.5.3	Luka-Luka	Banyaknya orang luka-luka karena bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.5.4	Hilang	Banyaknya orang hilang karena bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.5.5	Menderita	Banyaknya orang menderita karena bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.5.6	Mengungsi	Banyaknya orang mengungsi	Tahunan	Orang	BPBD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		karena bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan.			
48.5.7	Rumah Rusak Berat	Banyaknya rumah rusak berat karena bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.5.8	Rumah Rusak Ringan	Banyaknya rumah rusak ringan karena bencana gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.6	Tsunami	Data kejadian bencana tsunami di DIY pada tahun berkenaan.			BPBD
48.6.1	Jumlah Kejadian	Banyaknya kejadian bencana tsunami di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
48.6.2	Meninggal	Banyaknya orang meninggal karena bencana tsunami di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.6.3	Luka-Luka	Banyaknya orang luka-luka karena bencana tsunami di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.6.4	Hilang	Banyaknya orang hilang karena bencana tsunami di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.6.5	Menderita	Banyaknya orang menderita karena bencana tsunami di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.6.6	Mengungsi	Banyaknya orang mengungsi karena bencana tsunami di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.6.7	Rumah Rusak Berat	Banyaknya rumah rusak berat karena bencana tsunami di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.6.8	Rumah Rusak Ringan	Banyaknya rumah rusak ringan karena bencana tsunami di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.7	Kegagalan Teknologi	Data kejadian bencana kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan.			BPBD
48.7.1	Jumlah Kejadian	Banyaknya kejadian bencana kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
48.7.2	Meninggal	Banyaknya orang meninggal karena bencana kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.7.3	Luka-Luka	Banyaknya orang luka-luka karena bencana kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.7.4	Hilang	Banyaknya orang hilang karena bencana kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.7.5	Menderita	Banyaknya orang menderita	Tahunan	Orang	BPBD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		karena bencana kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan.			
48.7.6	Mengungsi	Banyaknya orang mengungsi karena bencana kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.7.7	Rumah Rusak Berat	Banyaknya rumah rusak berat karena bencana kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.7.8	Rumah Rusak Ringan	Banyaknya rumah rusak ringan karena bencana kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.8	Kekeringan	Data kejadian bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan.			BPBD
48.8.1	Jumlah Kejadian	Banyaknya kejadian bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
48.8.2	Meninggal	Banyaknya orang meninggal karena bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.8.3	Luka-Luka	Banyaknya orang luka-luka karena bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.8.4	Hilang	Banyaknya orang hilang karena bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.8.5	Menderita	Banyaknya orang menderita karena bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.8.6	Mengungsi	Banyaknya orang mengungsi karena bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.8.7	Rumah Rusak Berat	Banyaknya rumah rusak berat karena bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.8.8	Rumah Rusak Ringan	Banyaknya rumah rusak ringan karena bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.9	Letusan Gunung Api	Data kejadian bencana letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan.			BPBD
48.9.1	Jumlah Kejadian	Banyaknya kejadian bencana letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
48.9.2	Meninggal	Banyaknya orang meninggal karena bencana letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
48.9.3	Luka-Luka	Banyaknya orang luka-luka karena bencana letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.9.4	Hilang	Banyaknya orang hilang karena bencana letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.9.5	Menderita	Banyaknya orang menderita karena bencana letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.9.6	Mengungsi	Banyaknya orang mengungsi karena bencana letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.9.7	Rumah Rusak Berat	Banyaknya rumah rusak berat karena bencana letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.9.8	Rumah Rusak Ringan	Banyaknya rumah rusak ringan karena bencana letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.10	Cuaca Ekstrem	Data kejadian bencana cuaca ekstrem di DIY pada tahun berkenaan.			BPBD
48.10.1	Jumlah Kejadian	Banyaknya kejadian bencana cuaca ekstrem di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	BPBD
48.10.2	Meninggal	Banyaknya orang meninggal karena bencana cuaca ekstrem di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.10.3	Luka-Luka	Banyaknya orang luka-luka karena bencana cuaca ekstrem di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.10.4	Hilang	Banyaknya orang hilang karena bencana cuaca ekstrem di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.10.5	Menderita	Banyaknya orang menderita karena bencana cuaca ekstrem di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.10.6	Mengungsi	Banyaknya orang mengungsi karena bencana cuaca ekstrem di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	BPBD
48.10.7	Rumah Rusak Berat	Banyaknya rumah rusak berat karena bencana cuaca ekstrem di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
48.10.8	Rumah Sakit Ringan	Banyaknya rumah rusak ringan karena bencana cuaca ekstrem di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	BPBD
49	Potensi Bencana Alam di Wilayah DIY	Potensi ancaman bencana adalah kondisi yang			BPBD



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		disebabkan oleh kejadian alam dan ulah manusia. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara lain adalah bahaya alam dan bahaya karena ulah manusia yang ada di DIY pada tahun berkenaan.			
49.1	Potensi Luas Banjir	Data potensi luas bencana banjir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.1.1	Kulon Progo	Potensi luas bencana banjir di Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.1.2	Bantul	Potensi luas bencana banjir di Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.1.3	Gunungkidul	Potensi luas bencana banjir di Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.1.4	Sleman	Potensi luas bencana banjir di Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.1.5	Kota Yogyakarta	Potensi luas bencana banjir di Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.2	Potensi Luas Banjir Bandang	Data potensi luas bencana banjir bandang di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.2.1	Kulon Progo	Potensi luas bencana banjir bandang di Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.2.2	Bantul	Potensi luas bencana banjir bandang di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.2.3	Gunungkidul	Potensi luas bencana banjir bandang di Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.2.4	Sleman	Potensi luas bencana banjir bandang di Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.2.5	Kota Yogyakarta	Potensi luas bencana banjir bandang di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.3	Potensi Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Data potensi luas bencana gelombang ekstrem dan abrasi di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Ha	BPBD
49.3.1	Kulon Progo	Potensi luas bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.3.2	Bantul	Potensi luas bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.3.3	Gunungkidul	Potensi luas bencana gelombang ekstrem dan abrasi di Gunungkidul pada	Tahunan	Ha	BPBD



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		tahun berkenaan.			
49.3.4	Sleman	Potensi luas bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.3.5	Kota Yogyakarta	Potensi luas bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.4	Potensi Kekeringan	Data potensi luas bencana kekeringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.4.1	Kulon Progo	Potensi luas bencana kekeringan di Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.4.2	Bantul	Potensi luas bencana kekeringan di Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.4.3	Gunungkidul	Potensi luas bencana kekeringan di Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.4.4	Sleman	Potensi luas bencana kekeringan di Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.4.5	Kota Yogyakarta	Potensi luas bencana kekeringan di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.5	Potensi Letusan Gunung Api	Data potensi luas bencana gunung api di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.5.1	Kulon Progo	Potensi luas bencana letusan gunung api di Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.5.2	Bantul	Potensi luas bencana letusan gunung api di Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.5.3	Gunungkidul	Potensi luas bencana letusan gunung api di Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.5.4	Sleman	Potensi luas bencana letusan gunung api di Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.5.5	Kota Yogyakarta	Potensi luas bencana letusan gunung api di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.6	Potensi Dampak Cuaca Ekstrim	Data potensi luas bencana dampak cuaca ekstrim di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.6.1	Kulon Progo	Potensi luas bencana dampak cuaca ekstrim di Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.6.2	Bantul	Potensi luas bencana dampak cuaca ekstrim di Bantul pada tahun	Tahunan	Ha	BPBD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			
49.6.3	Gunungkidul	Potensi luas bencana dampak cuaca ekstrim di Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.6.4	Sleman	Potensi luas bencana dampak cuaca ekstrim di Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.6.5	Kota Yogyakarta	Potensi luas bencana dampak cuaca ekstrim di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.7	Potensi Tanah Longsor	Data potensi luas bencana tanah longsor di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.7.1	Kulon Progo	Potensi luas bencana tanah longsor di Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.7.2	Bantul	Potensi luas bencana tanah longsor di Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.7.3	Gunungkidul	Potensi luas bencana tanah longsor di Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.7.4	Sleman	Potensi luas bencana tanah longsor di Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.7.5	Kota Yogyakarta	Potensi luas bencana tanah longsor di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.8	Potensi Wilayah Terdampak Gempa Bumi	Data potensi luas bencana terdampak gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.8.1	Kulon Progo	Potensi luas bencana terdampak gempa bumi di Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.8.2	Bantul	Potensi luas bencana terdampak gempa bumi di Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.8.3	Gunungkidul	Potensi luas bencana terdampak gempa bumi di Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.8.4	Sleman	Potensi luas bencana terdampak gempa bumi di Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.8.5	Kota Yogyakarta	Potensi luas bencana terdampak gempa bumi di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.9	Potensi Wilayah Terdampak Tsunami	Data potensi luas bencana terdampak tsunami di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.9.1	Kulon Progo	Potensi luas bencana terdampak tsunami di Kulon Progo pada tahun	Tahunan	Ha	BPBD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			
49.9.2	Bantul	Potensi luas bencana terdampak tsunami di Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.9.3	Gunungkidul	Potensi luas bencana terdampak tsunami di Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.9.4	Sleman	Potensi luas bencana terdampak tsunami di Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.9.5	Kota Yogyakarta	Potensi luas bencana terdampak tsunami di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.10	Potensi Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit	Data potensi luas bencana epidemik dan wabah penyakit di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.10.1	Kulon Progo	Potensi luas bencana epidemik dan wabah penyakit di Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.10.2	Bantul	Potensi luas bencana epidemik dan wabah penyakit di Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.10.3	Gunungkidul	Potensi luas bencana epidemik dan wabah penyakit di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.10.4	Sleman	Potensi luas bencana epidemik dan wabah penyakit di Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.10.5	Kota Yogyakarta	Potensi luas bencana epidemik dan wabah penyakit di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.11	Potensi Wilayah Terdampak Kegagalan Teknologi	Data potensi luas bencana terdampak kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.11.1	Kulon Progo	Potensi luas bencana terdampak kegagalan teknologi di Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.11.2	Bantul	Potensi luas bencana terdampak kegagalan teknologi di Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.11.3	Gunungkidul	Potensi luas bencana terdampak kegagalan teknologi di Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.11.4	Sleman	Potensi luas bencana terdampak kegagalan teknologi di Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		teknologi di Sleman pada tahun berkenaan.			
49.11.5	Kota Yogyakarta	Potensi luas bencana terdampak kegagalan teknologi di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.12	Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan	Data potensi kebakaran hutan dan lahan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.12.1	Kulon Progo	Potensi luas bencana kebakaran hutan dan lahan di Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.12.2	Bantul	Potensi luas bencana kebakaran hutan dan lahan di Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.12.3	Gunungkidul	Potensi luas bencana kebakaran hutan dan lahan di Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.12.4	Sleman	Potensi luas bencana kebakaran hutan dan lahan di Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
49.12.5	Kota Yogyakarta	Potensi luas bencana kebakaran hutan dan lahan di Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
50	Data Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
50.1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks ketahanan daerah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	BPBD
50.2	Persentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan Sasaran SKPD	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BPBD
50.3	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Banyaknya desa tangguh bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	BPBD
50.4	Jumlah Sekolah Siaga Bencana	Banyaknya sekolah siaga bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Sekolahan	BPBD
50.5	Regulasi	Banyaknya regulasi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Dokumen	BPBD
50.6	Indeks Risiko Bencana	Indeks resiko bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	BPBD
50.7	Indeks Pemulihan Pasca Bencana	Indeks pemulihan pasca bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	BPBD
50.8	Rerata Kecepatan Waktu Respon Kejadian Bencana	Rata-rata kecepatan waktu respon kejadian bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Menit	BPBD
50.9	Capaian indeks pemulihan pascabencana di DIY	Capaian indeks pemulihan pasca bencana di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	BPBD
50.10	Jumlah dokumen RPB DIY & RADPRB DIY	Banyaknya dokumen RPB DIY dan RADPRB DIY.	Tahunan	Dokumen	BPBD
51	Tingkat Ancaman Bencana di wilayah DIY	Data tingkat ancaman di wilayah DIY pada tahun			BPBD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			
51.1	Banjir	Data ancaman banjir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.1.1	Luas	Luas banjir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
51.1.2	Kelas Resiko	Kelas resiko banjir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.2	Banjir Bandang	Data ancaman banjir bandang di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.2.1	Luas	Luas banjir bandang di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
51.2.2	Kelas Resiko	Kelas resiko banjir bandang di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.3	Cuaca Ekstrem	Data ancaman cuaca ekstrem di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.3.1	Luas	Luas cuaca ekstrem di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Ha	BPBD
51.3.2	Kelas Resiko	Kelas resiko cuaca ekstrem di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.4	Epidemi dan Wabah Penyakit	Data ancaman epidemi dan wabah penyakit di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.4.1	Luas	Luas epidemi dan wabah penyakit di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
51.4.2	Kelas Resiko	Kelas resiko epidemi dan wabah penyakit di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.5	Gelombang Pasang/Abrasi	Data ancaman gelombang pasang/abrasi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.5.1	Luas	Luas gelombang pasang/abrasi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
51.5.2	Kelas Resiko	Kelas resiko gelombang pasang/abrasi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.6	Gempa Bumi	Data ancaman gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.6.1	Luas	Luas gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
51.6.2	Kelas Resiko	Kelas resiko gempa bumi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.7	Kebakaran Hutan dan Lahan	Data ancaman kebakaran hutan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.7.1	Luas	Luas kebakaran hutan dan lahan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
51.7.2	Kelas Resiko	Kelas Resiko kebakaran hutan dan lahan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.8	Kegagalan Teknologi	Data ancaman kegagalan teknologi di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	-	BPBD

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
51.8.1	Luas	Luas kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
51.8.2	Kelas Resiko	Kelas resiko kegagalan teknologi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.9	Kekeringan	Data ancaman kekeringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.9.1	Luas	Luas kekeringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
51.9.2	Kelas Resiko	Kelas resiko kekeringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.10	Letusan Gunung Api	Data ancaman letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.10.1	Luas	Luas letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
51.10.2	Kelas Resiko	Kelas resiko letusan gunung api di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.11	Tanah Longsor	Data ancaman tanah longsor di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.11.1	Luas	Luas tanah longsor di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	Ha	BPBD
51.11.2	Kelas Resiko	Kelas resiko tanah longsor di DIY dalam satu tahun.	Tahunan	-	BPBD
51.12	Tsunami	Data ancaman tanah longsor di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD
51.12.1	Luas	Luas tsunami di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	BPBD
51.12.2	Kelas Resiko	Kelas resiko di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	-	BPBD



1.21 KETAHANAN PANGAN

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Konsumsi	Jumlah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung.			
1.1	Jumlah Konsumsi Beras	Jumlah konsumsi beras di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.2	Jumlah Konsumsi Gula	Jumlah konsumsi gula pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.3	Jumlah Konsumsi Jagung	Jumlah konsumsi jagung pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.4	Jumlah Konsumsi Kacang Kedelai	Jumlah total konsumsi kacang kedelai pada wilayah Provinsi DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.5	Jumlah Konsumsi Kacang Hijau	Jumlah konsumsi kacang hijau pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.6	Jumlah Konsumsi Kacang Tanah	Jumlah konsumsi kacang tanah pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.7	Jumlah Konsumsi Ubi Kayu	Jumlah konsumsi ubi kayu pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.8	Jumlah Konsumsi Ubi Jalar	Jumlah konsumsi ubi jalar pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.9	Jumlah Konsumsi Buah Mangga	Jumlah konsumsi buah mangga pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.1	Jumlah Konsumsi Buah Jeruk	Jumlah konsumsi buah jeruk pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.11	Jumlah Konsumsi Buah Pepaya	Jumlah konsumsi buah pepaya pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.12	Jumlah Konsumsi Buah Pisang	Jumlah konsumsi buah pisang pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.13	Jumlah Konsumsi Buah Durian	Jumlah konsumsi buah durian pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.14	Jumlah Konsumsi Buah	Jumlah konsumsi buah	Tahunan	Kg	Dinas

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Duku/Langsar	duku/langsar pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.15	Jumlah Konsumsi Buah Salak	Jumlah konsumsi buah salak pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.16	Jumlah Konsumsi Buah Rambutan	Jumlah konsumsi buah rambutan pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.17	Jumlah Konsumsi Bawang Merah	Jumlah konsumsi bawang merah pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.18	Jumlah Konsumsi Kentang	Jumlah konsumsi kentang pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.19	Jumlah Konsumsi Cabai	Jumlah konsumsi cabai pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.2	Jumlah Konsumsi Bawang Putih	Jumlah konsumsi bawang putih pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.21	Jumlah Konsumsi Terigu	Jumlah konsumsi terigu pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Jumlah Konsumsi Ikan dan Hasil Peternakan	Jumlah konsumsi ikan dan Hasil Peternakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1	Jumlah Konsumsi Ikan	Jumlah konsumsi ikan hasil peternakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2	Jumlah Konsumsi Hasil Peternakan	Jumlah konsumsi hasil peternakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.1	Jumlah Konsumsi Daging Ruminansia	Jumlah konsumsi daging ruminansia hasil peternakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.2	Jumlah Konsumsi Daging Unggas	Jumlah konsumsi daging Unggas hasil peternakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.3	Jumlah Konsumsi Telur	Jumlah konsumsi telur hasil peternakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.4	Jumlah Konsumsi Susu	Jumlah konsumsi susu hasil peternakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai Skor PPH di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	Dinas Pertanian dan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Total skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperoleh dengan menjumlahkan skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk. Semakin tinggi skor PPH, pola konsumsi pangan penduduk semakin beragam dan bergizi seimbang.			Ketahanan Pangan
3.1	Pola Konsumsi Padi-Padian (Skor PPH Standar 25,0)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok Padi-Padian (Skor PPH Standar = 25,0) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jenis komoditas yang termasuk dalam kelompok padi-padian adalah beras dan olahannya, jagung dan olahannya, serta gandum dan olahannya.	Tahunan	Angka	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.2	Pola Konsumsi Umbi-Umbian (Skor PPH Standar 2,5)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok Umbi-Umbian (Skor PPH Standar = 2,5) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jenis komoditas yang termasuk dalam kelompok umbi-umbian adalah ubi kayu dan olahannya, ubi jalar, kentang, talas, dan sagu (termasuk makanan berpati).	Tahunan	Angka	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.3	Pola Konsumsi Pangan Hewani (Skor PPH Standar 24,0)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok Pangan Hewani (Skor PPH Standar = 24) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jenis komoditas yang termasuk dalam kelompok pangan hewani adalah daging dan olahannya, ikan dan olahannya, telur, serta susu dan olahannya.	Tahunan	Angka	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4	Pola Konsumsi Minyak dan Lemak (Skor PPH Standar 5,0)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok Minyak dan Lemak (Skor PPH Standar = 5) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jenis komoditas	Tahunan	Angka	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		yang termasuk dalam kelompok minyak dan lemak adalah minyak kelapa, minyak sawit, margarin, dan lemak hewani.			
3.5	Pola Konsumsi Buah/Biji Berminyak (Skor PPH Standar 1,0)	Skor Pola Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok Buah/Biji berminyak (Skor PPH Standar = 1,0) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jenis komoditas yang termasuk dalam kelompok buah/biji berminyak adalah kelapa, kemiri, kenari, dan coklat.	Tahunan	Angka	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.6	Pola Konsumsi Kacang-Kacangan (Skor PPH Standar 10,0)	Skor Pola Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok kacang-kacangan (Skor PPH Standar = 10) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jenis komoditas yang termasuk dalam kelompok kacang-kacangan adalah kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang mete, kacang tunggak, kacang lain, tahu, tempe, tauco, oncom, sari kedelai, dan kecap.	Tahunan	Angka	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.7	Pola Konsumsi Gula (Skor PPH Standar 2,5)	Skor Pola Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok Gula (Skor PPH Standar = 2,5) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jenis komoditas yang termasuk dalam kelompok gula adalah gula pasir, gula merah, sirup, dan minuman jadi dalam botol/kaleng.	Tahunan	Angka	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8	Pola Konsumsi Sayur dan Buah (Skor PPH Standar 30,0)	Skor Pola Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok Sayur dan Buah (Skor PPH Standar = 30,0) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jenis komoditas yang termasuk dalam kelompok sayur dan buah adalah sayur segar dan olahannya serta buah segar dan olahannya, termasuk emping.	Tahunan	Angka	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.9	Pola Konsumsi Lain-Lain (Skor PPH Standar 0,0)	Skor Pola Pola Pangan Harapan (PPH) untuk kelompok lain-lain (Skor PPH Standar = 0,00) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jenis komoditas yang termasuk dalam lain-lain	Tahunan	Angka	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		adalah aneka bumbu dan bahan minuman, seperti terasi, cengkeh, ketumbar, merica, pala, asam, bumbu masak, teh, dan kopi.			
4	Ketersediaan Pangan per Kapita	Bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain dibagi dengan jumlah penduduk tengah tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg/ Kapita/ Tahun	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.1	Tingkat Ketersediaan				
4.1.1	Ketersediaan Energi	Ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk energi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kkal/ Kapita/Hari	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.1.2	Ketersediaan Protein	Ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk protein di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Gram/ Kapita/Hari	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.2	Tingkat Konsumsi				
4.2.1	Konsumsi Energi	Rata-rata jumlah energi yang dikonsumsi tiap penduduk perhari di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kkal/ Kapita/Hari	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.2.2	Konsumsi Protein	Rata-rata jumlah protein yang dikonsumsi tiap penduduk perhari di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Gram/ Kapita/Hari	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5	Stok Beras sebagai Bahan Makanan	Jumlah beras sebagai bahan makanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6	Jumlah Ekspor dan Impor				
6.1	Jumlah Impor Beras	Jumlah berat kelompok komoditas beras, yang diimpor ke DIY melewati batas negara Indonesia pada tahun berkenaan. Data impor beras tersebut utamanya dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen keterangan ekspor impor yang dihasilkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Selain itu sejak tahun 2015 data ekspor/impor juga berasal dari PT. Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan lintas batas laut.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.2	Jumlah Ekspor Beras	Jumlah berat kelompok komoditas beras, yang diekspor keluar DIY melewati batas negara Indonesia pada tahun	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan. Data ekspor beras tersebut utamanya dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen keterangan ekspor impor yang dihasilkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Selain itu sejak tahun 2015 data ekspor/impor juga berasal dari PT. Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan lintas batas laut.			
6.3	Jumlah Impor Jagung	Jumlah berat kelompok komoditas jagung, yang diimpor ke DIY melewati batas negara Indonesia pada tahun berkenaan. Data impor jagung tersebut utamanya dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen keterangan ekspor impor yang dihasilkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Selain itu sejak tahun 2015 data ekspor/impor juga berasal dari PT. Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan lintas batas laut.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.4	Jumlah Ekspor Jagung	Jumlah berat kelompok komoditas jagung, yang diekspor keluar DIY melewati batas negara Indonesia pada tahun berkenaan. Data ekspor jagung tersebut utamanya dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen keterangan ekspor impor yang dihasilkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Selain itu sejak tahun 2015 data ekspor/impor juga berasal dari PT. Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan lintas batas laut.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.5	Jumlah Impor Kacang Tanah Berkulit	Jumlah berat kelompok komoditas kacang tanah berkulit, yang diimpor ke DIY melewati batas negara Indonesia pada tahun berkenaan. Data impor kacang tanah berkulit tersebut utamanya dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		keterangan ekspor impor yang dihasilkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Selain itu sejak tahun 2015 data ekspor/impor juga berasal dari PT. Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan lintas batas laut.			
6.6	Jumlah Ekspor Kacang Tanah Berkulit	Jumlah berat kelompok komoditas kacang tanah berkulit, yang diekspor keluar DIY melewati batas negara Indonesia pada tahun berkenaan. Data ekspor kacang tanah berkulit tersebut utamanya dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen keterangan ekspor impor yang dihasilkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Selain itu sejak tahun 2015 data ekspor/impor juga berasal dari PT. Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan lintas batas laut.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.7	Jumlah Impor Kacang Hijau	Jumlah berat kelompok komoditas kacang hijau, yang diimpor ke DIY melewati batas negara Indonesia pada tahun berkenaan. Data impor kacang hijau tersebut utamanya dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen keterangan ekspor impor yang dihasilkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Selain itu sejak tahun 2015 data ekspor/impor juga berasal dari PT. Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan lintas batas laut.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.8	Jumlah Ekspor Kacang Hijau	Jumlah berat kelompok komoditas kacang hijau, yang dieskpor keluar DIY melewati batas negara Indonesia pada tahun berkenaan. Data ekspor kacang hijau tersebut utamanya dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen keterangan ekspor impor yang dihasilkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Selain	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		itu sejak tahun 2015 data ekspor/impor juga berasal dari PT. Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan lintas batas laut.			
6.9	Jumlah Impor Ubi Kayu	Jumlah berat kelompok komoditas ubi kayu, yang diimpor ke DIY melewati batas negara Indonesia pada tahun berkenaan. Data impor ubi kayu tersebut utamanya dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen keterangan ekspor impor yang dihasilkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Selain itu sejak tahun 2015 data ekspor/impor juga berasal dari PT. Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan lintas batas laut.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.10	Jumlah Ekspor Ubi kayu	Jumlah berat kelompok komoditas ubi kayu, yang dieskpor keluar DIY melewati batas negara Indonesia pada tahun berkenaan. Data ekspor ubi kayu tersebut utamanya dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen keterangan ekspor impor yang dihasilkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Selain itu sejak tahun 2015 data ekspor/impor juga berasal dari PT. Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan lintas batas laut.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.11	Jumlah Impor Ubi Jalar	Jumlah berat kelompok komoditas ubi jalar, yang diimpor ke DIY melewati batas negara Indonesia pada tahun berkenaan. Data impor ubi jalar tersebut utamanya dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen keterangan ekspor impor yang dihasilkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Selain itu sejak tahun 2015 data ekspor/impor juga berasal dari PT. Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan lintas batas	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		laut.			
6.12	Jumlah Eksport Ubi Jalar	Jumlah berat kelompok komoditas ubi jalar, yang dieskpor keluar DIY melewati batas negara Indonesia pada tahun berkenaan. Data ekspor ubi jalar tersebut utamanya dikumpulkan berdasarkan dokumen-dokumen keterangan ekspor impor yang dihasilkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Selain itu sejak tahun 2015 data ekspor/impor juga berasal dari PT. Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan lintas batas laut.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7	Jumlah Desa Rawan Pangan	Kondisi desa di wilayah DIY yang mengalami ketidakcukupan pangan untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8	Cadangan Pangan Pemerintah	Banyaknya cadangan pangan yang dimiliki pemerintah DIY pada tahun berkenaan. Persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah lembaga, organisasi, atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan yang ada di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lembaga	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.1	LPMD/K	Jumlah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat dan merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lembaga	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.1.1	Kota Yogyakarta	Jumlah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat dan merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lembaga	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.1.2	Kab. Bantul	Jumlah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat dan merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan di wilayah Kab. Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lembaga	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.1.3	Kab. Kulon Progo	Jumlah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat dan merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan di wilayah Kab. Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lembaga	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.1.4	Kab. Gunungkidul	Jumlah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat dan merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan di wilayah Kab. Gunung kidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lembaga	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.1.5	Kab. Sleman	Jumlah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat	Tahunan	Lembaga	Biro Bina Pemberdayaan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat dan merupakan mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan di wilayah Kab. Sleman pada tahun berkenaan.			Masyarakat Setda Yogyakarta
1.2	PKK	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.2.1	Kota Yogyakarta	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.2.2	Kab. Bantul	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia yang ada di wilayah Kab. Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.2.3	Kab. Kulon Progo	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia yang ada di wilayah Kab. Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.2.4	Kab. Gunungkidul	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia yang ada di wilayah Kab. Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.2.5	Kab. Sleman	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia yang ada di wilayah Kab. Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.3	Posyandu	Jumlah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Posyandu	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.3.1	Kota Yogyakarta	Jumlah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Posyandu	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.3.2	Kab. Bantul	Jumlah Kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan yang ada di wilayah Kab. Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Posyandu	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1.3.3	Kab. Kulon Progo	Jumlah Kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan yang ada di wilayah Kab. Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Posyandu	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.3.4	Kab. Gunungkidul	Jumlah Kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan yang ada di wilayah Kab. Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Posyandu	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.3.5	Kab. Sleman	Jumlah Kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan yang ada di wilayah Kab. Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Posyandu	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.4	Badan Usaha Milik Desa di DIY	Badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.4.1	Kab. Bantul	Badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa di Kab. Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.4.2	Kab. Kulon Progo	Badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa di Kab. Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
1.4.3	Kab. Gunungkidul	Badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan	Tahunan	Desa	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		masyarakat desa di Kab Gunungkidul pada tahun berkenaan.			
1.4.4	Kab. Sleman	Badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa di Kab. Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
2	Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah program pemberdayaan masyarakat (merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa) yang ada di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Program	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
3	Jumlah Program Segoro Amarto	Jumlah program Segoro Amarto (merupakan suatu gerakan bersama seluruh masyarakat Yogyakarta untuk menanggulangi kemiskinan dengan lebih menekankan pada perubahan nilai yang tercermin pada sikap, perilaku, gaya hidup, dan wujud kebersamaan dalam kehidupan yang mencakup semua aspek fisik dan non fisik) yang ada di kota yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Program	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
4	Jumlah Program Global Gotong Royong (G2R)	Jumlah desa yang menerapkan program Global Gotong Royong (inovasi solidaritas gerakan gotong royong dan wirausaha desa yang bertujuan membawa kearifan lokal Indonesia) yang ada di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta
5	Jumlah Program Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah program swadaya masyarakat (kegiatan yang dibiayai secara swadaya oleh masyarakat) yang mendukung program pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Yogyakarta



1.23 STATISTIK



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Program RKPD Tahun Berkenaan	Banyaknya jumlah program dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun.	Tahunan	Program	BAPPEDA
2	Jumlah Program RPJMD yang Harus Dilaksanakan Tahun Berkenaan	Banyaknya jumlah program dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.	Tahunan	Program	BAPPEDA
3	Upaya Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan	Data tentang upaya pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengentasan kemiskinan pada tahun berkenaan. Pengentasan kemiskinan adalah seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.			
3.1	Target Penurunan Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan (dalam persen) yang menggambarkan target yang ingin dicapai dalam penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BAPPEDA
3.2	Jumlah Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Program	BAPPEDA
3.3	Jumlah Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah kegiatan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kegiatan	BAPPEDA
3.4	Jumlah Anggaran Pengentasan Kemiskinan	Jumlah anggaran (dalam rupiah) yang disediakan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BAPPEDA
4	Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi ketimpangan	Data tentang upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan antar kelompok masyarakat yang memiliki status yang sama.			



4.1	Jumlah Program	Jumlah program pemerintah dalam upaya mengurangi ketimpangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Program	BAPPEDA
4.2	Jumlah Kegiatan	Jumlah kegiatan pemerintah dalam upaya mengurangi ketimpangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kegiatan	BAPPEDA
4.3	Jumlah Anggaran	Jumlah anggaran (dalam rupiah) yang disediakan pemerintah dalam upaya mengurangi ketimpangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BAPPEDA
5	Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Pengangguran	Data tentang upaya dari pemerintah untuk mengurangi pengangguran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.			
5.1	Target Penurunan Angka Pengangguran	Angka pengangguran (dalam persen) yang menggambarkan target yang ingin dicapai dalam penurunan jumlah pengangguran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	BAPPEDA
5.2	Jumlah Program Penurunan Pengangguran	Jumlah program pemerintah dalam upaya penurunan pengangguran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Program	BAPPEDA
5.3	Jumlah Kegiatan Penurunan Pengangguran	Jumlah kegiatan pemerintah dalam upaya penurunan pengangguran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kegiatan	BAPPEDA
5.4	Jumlah Anggaran Penurunan Pengangguran	Jumlah anggaran (dalam rupiah) yang disediakan pemerintah dalam upaya penurunan pengangguran di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BAPPEDA
6	Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Angka Kematian Bayi	Data tentang upaya dari pemerintah untuk mengurangi angka kematian bayi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.			
6.1	Jumlah Program Penurunan AKB	Jumlah program pemerintah dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Program	BAPPEDA
6.2	Jumlah Kegiatan Penurunan AKB	Jumlah kegiatan pemerintah dalam upaya penurun Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kegiatan	BAPPEDA

6.3	Jumlah Anggaran Penurunan AKB	Jumlah anggaran (dalam rupiah) yang disediakan pemerintah dalam upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	BAPPEDA
-----	-------------------------------	---	---------	----	---------



1.24 KEARSIPAN

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1.	Kearsipan	Sistem yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan dokumentasi informasi. Mengingat banyaknya aktivitas yang menyebabkan banyaknya ledakan informasi dalam bentuk banyaknya dokumen yang ditemukan dalam tiap organisasi.			Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.1	Pengelolaan Arsip Secara Baku	Jumlah satuan unit kerja perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku (pengelolaan dokumen yang ada terjamin kemanannya dan memudahkan untuk pencarian arsip apabila suatu saat dokumen tersebut dibutuhkan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Jumlah kegiatan peningkatan SDM untuk pengelola kearsipan (peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kearsipan dalam kecakapan tugasnya dalam mengelola arsip) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kegiatan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.3	Jumlah Arsiparis	Jumlah orang yang bekerja pada Perpustakaan dan yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.3.1	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah orang yang bekerja pada Perpustakaan dan yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan di Kab. Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.3.2	Kabupaten Bantul	Jumlah orang yang bekerja pada Perpustakaan dan yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan di Kab. Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.3.3	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah orang yang bekerja pada Perpustakaan dan yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan di Kab Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.3.4	Kabupaten Sleman	Jumlah orang yang bekerja pada Perpustakaan dan yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan di Kab Sleman pada tahun berkenaan.			
1.3.5	Kota Yogyakarta	Jumlah orang yang bekerja pada perpustakaan dan yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.4	Jumlah Arsip yang Dimanfaatkan	Jumlah Arsip (kumpulan dokumen bersejarah yang disimpan dan dimanfaatkan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Berkas	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.5	Jumlah Pengunjung Layanan Arsip Statis	Jumlah pengunjung perpustakaan/gedung arsip yang memanfaatkan Arsip Statis (Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang mengikuti diklat/kursus/sekolah/workshop atau pelatihan terkait kearsipan yang bertujuan meningkatkan wawasan dan kompetensi di bidang kearsipan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah



1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Titik yang Terkoneksi Jaringan Pemda DIY	Banyaknya titik lokasi yang telah terkoneksi jaringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Titik Lokasi	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
2	Data Provider Jaringan Internet				
2.1	Jumlah Distribusi Jaringan Internet di Wilayah DIY	Banyaknya distribusi jaringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
3	Data Provider Jaringan Telepon Seluler				
3.1	Jumlah Provider Seluler di Wilayah DIY	Banyaknya distribusi jaringan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
4	Lembaga Penyiaran di DIY	Banyaknya lembaga penyiaran di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lembaga	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
4.1	TV	Banyaknya lembaga penyiaran TV di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lembaga	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
4.2	Radio	Banyaknya lembaga penyiaran radio di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lembaga	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
5	Jumlah Surat Kabar yang Terbit di DIY	Banyaknya surat kabar yang terbit di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Surat Kabar	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
5.1	Lokal	Banyaknya surat kabar lokal yang terbit di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Surat Kabar	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
5.2	Nasional	Banyaknya surat kabar nasional yang terbit di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Surat Kabar	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
6	Data Infrastruktur Telekomunikasi Pemda DIY	Banyaknya titik lokasi infrastruktur telekomunikasi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Titik Lokasi	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
6.1	Jaringan Fiber Optic (FO)	Banyaknya titik lokasi jaringan fiber optic di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Titik Lokasi	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
6.2	Jaringan Wireless	Banyaknya titik lokasi jaringan wireless di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Titik Lokasi	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
6.3	Jaringan Virtual Private Network (VPN)	Banyaknya titik lokasi jaringan VPN di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Titik Lokasi	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
6.4	CCTV	Banyaknya titik lokasi CCTV di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Titik Lokasi	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
7	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat di DIY	Banyaknya kelompok informasi masyarakat di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
8	Cakupan Pelayanan Komunikasi dan Informatika	Persentase pelayanan komunikasi dan informatika terhadap kebutuhan masyarakat di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
8.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persentase cakupan layanan komunikasi terhadap kebutuhan masyarakat di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
8.2	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon	Persentase penduduk yang telah menggunakan HP/telepon di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
8.3	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persentase rumah tangga dengan akses internet di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
8.4	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi	Persentase rumah tangga yang memiliki komputer pribadi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
9	Data Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Data kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika di DIY pada tahun berkenaan.			
9.1	Peningkatan Layanan Unggulan DGS per Urusan	Banyaknya bidang/urusan untuk meningkatkan layanan unggulan DGS per urusan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Urusan/Bidang	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
9.2	Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi Masyarakat	Persentase penyebarluasan informasi pembangunan daerah bagi masyarakat di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
9.3	Persentase Penyediaan Jaringan	Persentase penyediaan	Tahunan	%	Dinas



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	IT di Pemda DIY	jaringan IT di DIY pada tahun berkenaan.			Komunikasi dan Informatika DIY
9.4	Peresentase Pengakses Informasi Aktivitas Pemda Melalui Web, Media Elektronik, dan Media Cetak	Persentase pengakses informasi aktivitas pemda melalui web, media elektronik, dan media cetak di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
9.5	Kualitas Standar Keamanan Informasi	Kualitas standar keamanan informasi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	ISO	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
9.6	Kualitas Standar Pelayanan TIK	Kualitas standar pelayanan TIK di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	ISO	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
9.7	Kualitas Layanan Penyelenggaraan Informasi Publik	Indeks kualitas layanan penyelenggaraan informasi publik di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
9.8	Peringkat Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik Level Provinsi	Data capaian peringkat keterbukaan informasi bagi badan publik level provinsi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Peringkat	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
9.9	Jumlah OPD Pemda DIY yang Telah Menyusun Draf Informasi Publik Sebagaimana Diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Banyaknya OPD Pemda DIY yang telah menyusun draf informasi publik tentang keterbukaan informasi publik di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Organisasi	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
9.10	Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi terhadap jumlah total sengketa yang ada di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY



1.26 PERPUSTAKAAN

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Perpustakaan				
1..1	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan (sebuah tempat dimana koleksi besar buku dan majalah yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah institusi/lembaga, serta dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin mengakses buku serta bahan bacaan lain yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.1.1	Perpustakaan Desa	Jumlah Perpustakaan Desa (perpustakaan yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa/kelurahan yang berada di tengah masyarakat desa) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.1.2	Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah (perpustakaan yang ada atau diselenggarakan di sekolah baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai sekolah lanjutan seperti perguruan tinggi yang dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika untuk menambah literasi) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.1.2.1	SD	Jumlah Perpustakaan Sekolah jenjang Sekolah Dasar/SD sederajat (perpustakaan yang ada atau diselenggarakan di sekolah dasar/SD sederajat yang dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika untuk menambah literasi) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.1.2.2	SMP	Jumlah Perpustakaan Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama/SMP sederajat (perpustakaan yang ada atau diselenggarakan di sekolah menengah pertama/SMP sederajat yang dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika untuk menambah literasi) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.1.2.3	SMA	Jumlah Perpustakaan Sekolah jenjang Sekolah Menengah Atas/SMA sederajat (perpustakaan yang ada atau diselenggarakan di sekolah menengah atas/SMA sederajat yang dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika untuk menambah literasi) yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.1.3	Perpustakaan Instansi	Jumlah Perpustakaan Instansi yang merupakan perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga (pemerintah/swasta) dan dimanfaatkan untuk menambah literasi karyawannya.	Tahunan	unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.2	Jumlah Perpustakaan Umum Tingkat Pemda DIY	Banyaknya perpustakaan untuk masyarakat luas yang dikelola oleh pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1.3	Jumlah Perpustakaan Umum Tingkat Kabupaten/Kota	Banyaknya perpustakaan untuk masyarakat luas yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.4.1	Kabupaten Kulon Progo	Banyaknya perpustakaan untuk masyarakat luas yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.4.2	Kabupaten Bantul	Banyaknya perpustakaan untuk masyarakat luas yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.4.3	Kabupaten Gunungkidul	Banyaknya perpustakaan untuk masyarakat luas yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.4.4	Kabupaten Sleman	Banyaknya perpustakaan untuk masyarakat luas yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.4.5	Kota Yogyakarta	Banyaknya perpustakaan untuk masyarakat luas yang dikelola oleh pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan				
2.1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip
2.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip
2.2.1	Tingkat Pemda DIY	Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang dikelola Pemda DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip
2.2.2	Kabupaten Kulon Progo	Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Bulanan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip
2.2.3	Kabupaten Bantul	Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Bulanan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip
2.2.4	Kabupaten Gunungkidul	Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Bulanan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip
2.2.5		Banyaknya pemustaka (pengunjung	Bulanan	Orang	Badan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Kabupaten Sleman	perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.			Perpustakaan dan Arsip
2.2.6	Kota Yogyakarta	Banyaknya pemustaka (pengunjung perpustakaan) yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas meminjam buku perpustakaan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Bulanan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip
2.3	Jumlah Orang dalam Populasi yang Harus Dilayani	Banyaknya jumlah penduduk usia 3-65 tahun yang potensial mendapatkan layanan perpustakaan di DIY pada waktu berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip
3	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan daerah	Jumlah semua bahan yang dikumpulkan diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi. Pada umumnya berupa buku, dari berbagai jenis, dengan beragam bentuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
3.1	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Jumlah semua bahan yang dikumpulkan diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi. Pada umumnya berupa buku, dari berbagai jenis, dengan beragam bentuk yang tersedia dan dapat dibaca dan atau dapat di pinjam oleh para pemustaka Di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Eksemplar	Badan Perpustakaan dan Arsip
3.1.1	Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Jumlah semua bahan yang dikumpulkan diolah, dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi. Pada umumnya berupa buku, dari berbagai jenis, dengan beragam bentuk yang tersedia dan dapat dibaca dan atau dapat di pinjam oleh para pemustaka di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Badan Perpustakaan dan Arsip
4	Rasio Orang dalam Populasi yang Harus Dilayani	Perbandingan antara jumlah populasi yang harus dilayani (banyaknya jumlah penduduk usia 3-65 tahun yang potensial mendapatkan layanan perpustakaan) dengan jumlah total penduduk di DIY pada waktu berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip
5	Jumlah Pustakawan	Banyaknya petugas yang memiliki kompetensi yang diperolehnya melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip
5.1	Jumlah Pustakawan Kabupaten/Kota	Banyaknya petugas yang memiliki kompetensi yang diperolehnya melalui	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.			dan Arsip
5.2	Kabupaten Kulon Progo	Banyaknya petugas yang memiliki kompetensi yang diperolehnya melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di wilayah Kab. Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip
5.3	Kabupaten Bantul	Banyaknya petugas yang memiliki kompetensi yang diperolehnya melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di wilayah Kab. Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip
5.4	Kabupaten Gunungkidul	Banyaknya petugas yang memiliki kompetensi yang diperolehnya melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di wilayah Kab. Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip
5.5	Kabupaten Sleman	Banyaknya petugas yang memiliki kompetensi yang diperolehnya melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di wilayah Kab. Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip
5.6	Kota Yogyakarta	Banyaknya petugas yang memiliki kompetensi yang diperolehnya melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip
6	Data Kinerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah				
6.1	Persentase Penambahan Khasanah Arsip dari Arsip yang Sudah Ada	Persentase Penambahan Khasanah Arsip terhadap keseluruhan Arsip yang Sudah Ada pada perpustakaan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Perpustakaan dan Arsip
6.2	Persentase Jumlah Arsip yang Dimanfaatkan Dibagi dengan Jumlah Keseluruhan Arsip yang Dimiliki	Persentase Jumlah Arsip yang Dimanfaatkan Dibagi dengan Jumlah Keseluruhan Arsip yang Dimiliki pada perpustakaan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Perpustakaan dan Arsip
6.3	Jumlah Pemustaka yang Berkunjung ke Perpustakaan	banyaknya pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Perpustakaan dan Arsip



2.01 PERTANIAN

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Pertanian	Jumlah luas pertanian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.1	Padi Sawah	Jumlah padi sawah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanaman padi sawah yang ditanam pada lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, lahan sawah rawa pasang surut, dan lahan sawah rawa lebak.			
1.1.1	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami padi sawah (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.1.2	Luas Panen	Jumlah luas panen padi sawah yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.1.3	Produksi Gabah	Jumlah produksi gabah dari padi sawah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Bulanan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.1.4	Produksi Beras	Jumlah produksi beras dari padi sawah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Bulanan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.1.5	Produktivitas	Produksi tanaman padi sawah per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Bulanan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.2	Padi Ladang	Tanaman padi ladang yang ditanam pada lahan pertanian bukan sawah, seperti lahan tegal/kebun dan ladang/huma.	Bulanan		



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1.2.1	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami padi ladang (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.2.2	Luas Panen	Jumlah luas panen padi ladang yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.2.3	Produksi Gabah	Jumlah produksi gabah dari padi ladang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Bulanan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.2.4	Produksi Beras	Jumlah produksi beras dari padi ladang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Bulanan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.2.5	Produktivitas	Produksi tanaman padi ladang per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Bulanan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.3	Jagung	Produksi tanam jagung yang ditanam pada lahan pertanian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			
1.3.1	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami jagung (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.3.2	Luas Panen	Jumlah luas panen jagung yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.3.3	Produksi	Jumlah produksi jagung di	Bulanan	Ton	Dinas



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan berkenaan.			Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.3.4	Produktivitas	Produksi tanaman jagung per satuan luas di di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Bulanan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.4	Kacang Kedelai	Jumlah tanaman kacang kedelai yang ditanam pada lahan pertanian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan berkenaan.			
1.4.1	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami kacang kedelai (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.4.2	Luas Panen	Jumlah luas panen kacang kedelai yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.4.3	Produksi	Jumlah produksi kacang kedelai di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan berkenaan.	Bulanan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.4.4	Produktivitas	Produksi kacang kedelai per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Bulanan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.5	Kacang Hijau	Jumlah tanaman kacang hijau yang ditanam pada lahan pertanian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan berkenaan.			
1.5.1	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami kacang hijau (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.			
1.5.2	Luas Panen	Jumlah luas panen kacang hijau yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.5.3	Produksi	Jumlah produksi kacang hijau di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan berkenaan.	Bulanan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.5.4	Produktivitas	Produksi kacang hijau per satuan luas di di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Bulanan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.6	Kacang Tanah	Jumlah tanaman Kacang tanah yang ditanam pada lahan pertanian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan berkenaan.			
1.6.1	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami kacang tanah (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.6.2	Luas Panen	Jumlah luas panen kacang tanah yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.6.3	Produksi	Jumlah produksi kacang tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan berkenaan.	Bulanan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.6.4	Produktivitas	Produksi kacang tanah per satuan luas di di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Bulanan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.7	Ubi Kayu	Jumlah tanaman ubi kayu			



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		yang ditanam pada lahan pertanian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan berkenaan.			
1.7.1	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami ubi kayu (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.7.2	Luas Panen	Jumlah luas panen ubi kayu yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.7.3	Produksi	Jumlah produksi ubi kayu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan berkenaan.	Bulanan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.7.4	Produktivitas	Produksi ubi kayu per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Bulanan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.8	Ubi Jalar	Jumlah tanaman Ubi jalar yang ditanam pada lahan pertanian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan berkenaan.			
1.8.1	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami ubi jalar (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.8.2	Luas Panen	Jumlah luas panen ubi jalar yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.8.3	Produksi	Jumlah produksi ubi jalar di wilayah Daerah Istimewa	Bulanan	Ton	Dinas Pertanian dan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Ketahanan Pangan
1.8.4	Produktivitas	Produksi ubi jalar per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Bulanan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.9	Luas Lahan Pertanian	Jumlah luas lahan pertanian yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan berkenaan.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.1	Industri Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah industri pengolahan hasil pertanian yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada bulan berkenaan.	Bulanan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.11	Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Luas lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	Bulanan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Hortikultura	Jumlah usaha membudidayakan tanaman buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias di wilayah DIY			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1	Mangga	Produksi tanam mangga di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.1	Luas Panen	Jumlah luas panen mangga yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi mangga di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon mangga yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.4	Produktivitas per Luas	Produksi mangga per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luas diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi mangga per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.			
2.2	Jeruk	Produksi tanam jeruk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
2.2.1	Luas Panen	Jumlah luas panen jeruk yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi jeruk di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon jeruk yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.4	Produktivitas per Luas	Produksi jeruk per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi jeruk per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3	Pepaya	Produksi tanam pepaya di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.3.1	Luas Panen	Jumlah luas panen pepaya yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi pepaya di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon pepaya yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3.4	Produktivitas per Luas	Produksi pepaya per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasn diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi pepaya per satuan pohon di Daerah Istimewa	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.			Ketahanan Pangan
2.4	Pisang	Produksi tanam pisang di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.4.1	Luas Panen	Jumlah luas panen pisang yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.4.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi pisang di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.4.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon pisang yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.4.4	Produktivitas per Luas	Produksi pisang per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasn diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.4.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi pisang per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.5	Nanas	Produksi tanam nanas di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.5.1	Luas Panen	Jumlah luas panen nanas yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.5.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi nanas di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.5.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon nanas yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.5.4	Produktivitas per Luas	Produksi nanas per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasn diperoleh dengan membagi jumlah produksi	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		dengan luas panennya.			
2.5.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi nanas per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.6	Durian	Produksi tanam durian di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.6.1	Luas Panen	Jumlah luas panen durian yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.6.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi durian di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.6.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon durian yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.6.4	Produktivitas per Luas	Produksi durian per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasn diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.6.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi durian per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.7	Manggis	Produksi tanam manggis di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.7.1	Luas Panen	Jumlah luas panen manggis yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.7.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi manggis di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.7.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon manggis yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.7.4	Produktivitas per Luas	Produksi manggis per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		tahun berkenaan. Produktivitas per luasan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.			Pangan
2.7.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi manggis per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.8	Melon	Produksi tanam melon di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
3.8.1	Luas Panen	Jumlah luas panen melon yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi melon di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon melon yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.4	Produktivitas per Luas	Produksi melon per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi melon per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.9	Alpukat	Produksi tanam alpukat di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.9.1	Luas Panen	Jumlah luas panen alpukat yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.9.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi alpukat di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.9.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon alpukat yang produktif/berbuah di	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Ketahanan Pangan
2.9.4	Produktivitas per Luas	Produksi alpukat per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.9.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi alpukat per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.1	Belimbing	Produksi tanam belimbing dari setiap kabupaten/kota di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.10.1	Luas Panen	Jumlah luas panen belimbing yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.10.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi belimbing di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.10.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon belimbing yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.10.4	Produktivitas per Luas	Produksi belimbing per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasn diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.10.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi belimbing per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.11	Dukuh/Langsar	Produksi tanam dukuh/langsar di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.11.1	Luas Panen	Jumlah luas panen dukuh/langsar yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			
2.11.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi dukuh/langsat di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.11.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon dukuh/langsat yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.11.4	Produktivitas per Luas	produksi dukuh/langsat per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luas diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.11.5	Produktivitas Pepohonan	produksi dukuh/langsat per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.12	Jambu Biji	Produksi tanam jambu biji di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.12.1	Luas Panen	Jumlah luas panen jambu biji yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.12.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi jambu biji di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.12.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon jambu biji yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.12.4	Produktivitas per Luas	Produksi jambu biji per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luas diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.12.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi jambu biji per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		jumlah pohon yang menghasilkan.			
2.13	Jambu Air	Produksi tanam jambu air di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.13.1	Luas Panen	Jumlah luas panen jambu air yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.13.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi jambu air di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.13.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon jambu air yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.13.4	Produktivitas per Luas	Produksi jambu air per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luas diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.13.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi jambu air per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.14	Nangka/Cempedak	Produksi tanam Nangka/cempedak di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.14.1	Luas Panen	Jumlah luas panen nangka/cempedak yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.14.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi nangka/cempedak di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.14.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon nangka/cempedak yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.14.4	Produktivitas per Luas	Produksi nangka/cempedak per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luas	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.			
2.14.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi nangka/cempedak per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.15	Salak	Produksi tanam salak di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.15.1	Luas Panen	Jumlah luas panen salak yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.15.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi salak di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.15.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon salak yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.15.4	Produktivitas per Luas	Produksi salak per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasn diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.15.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi salak per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.16	Rambutan	Produksi tanam rambutan di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.16.1	Luas Panen	Jumlah luas panen rambutan yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.16.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi rambutan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.16.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon rambutan yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			Pangan
2.16.4	Produktivitas per Luas	Produksi rambutan per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luas diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.16.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi rambutan per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.17	Sawo	Produksi tanam sawo di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.17.1	Luas Panen	Jumlah luas panen sawo yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.17.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi sawo di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.17.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon sawo yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.17.4	Produktivitas per Luas	Produksi sawo per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasn diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.17.5	Produktivitas pepohonan	produksi sawo per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.18	Sirsak	Produksi tanam sirsak di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.18.1	Luas Panen	Jumlah luas panen sirsak yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.18.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi sirsak di wilayah DIY pada periode	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			Ketahanan Pangan
2.18.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon sirsak yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.18.4	Produktivitas per Luas	Produksi sirsak per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasn diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.18.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi sirsak per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.19	Markisa	Produksi tanam markisa di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.19.1	Luas Panen	Jumlah luas panen markisa yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.19.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi markisa di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.19.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon markisa yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.19.4	Produktivitas per Luas	Produksi markisa per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasn diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.19.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi markisa per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.2	Sukun	Produksi tanam sukun di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.20.1	Luas Panen	Jumlah luas panen sukun yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Yogyakarta pada tahun berkenaan.			
2.20.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi sukun di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.20.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon sukun yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.20.4	Produktivitas per Luas	Produksi sukun per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasn diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.20.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi sukun per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.21	Melingo	Produksi tanam melingo di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.21.1	Luas Panen	Jumlah luas panen melingo yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.21.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi melingo di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.21.3	Jumlah Pohon yang Menghasilkan	Jumlah pohon melingo yang produktif/berbuah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.21.4	Produktivitas per Luas	Produksi melingo per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasn diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.21.5	Produktivitas Pepohonan	Produksi melingo per satuan pohon di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas pepohonan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah pohon yang menghasilkan.	Triwulan	Kw/Pohon	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.22	Bawang Merah	Produksi tanam bawang merah di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.22.1	Luas Panen	Jumlah luas panen bawang	Triwulan	Ha	Dinas



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		merah yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.22.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi bawang merah di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.22.3	Produktivitas perLuas	Produksi bawang merah per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasn diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.24	Kubis	Produksi tanam kubis di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.24.1	Luas Panen	Jumlah luas panen kubis yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.24.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi kubis di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.24.3	Produktivitas per Luas	Produksi kubis per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasn diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.25	Cabai	Produksi tanam cabai di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
2.25.1	Luas Panen	Jumlah luas panen cabai yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.25.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi cabai di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.25.3	Produktivitas per Luas	Produksi cabai per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasn diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.26	Petsai/Sawi	Produksi tanam petsai/sawi di wilayah DIY pada periode berkenaan.			



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
2.26.1	Luas Panen	Jumlah luas panen petsai/sawi yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.26.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi petsai/sawi di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.26.3	Produktivitas per Luas	Produksi petsai/sawi per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.29	Daun Bawang	Produksi tanam daun bawang di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.29.1	Luas Panen	Jumlah luas panen daun bawang yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.29.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi daun bawang di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.29.3	Produktivitas per Luas	Produksi daun bawang per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasan diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.3	Kembang Kol	Produksi tanam Kembang kol di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.30.1	Luas Panen	Jumlah luas panen kembang kol yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.30.2	Jumlah Produksi	Jumlah produksi kembang kol di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.30.3	Produktivitas per Luas	Produksi kembang kol per satuan luas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Produktivitas per luasan	Triwulan	Kw/Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		diperoleh dengan membagi jumlah produksi dengan luas panennya.			
3	Peternakan	Kegiatan pemeliharaan ternak meliputi penggemukan, pembibitan, pengembangbiakan, dan pemacekan yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual.			
3.1	Ternak Sapi Potong	Pemeliharaan ternak sapi potong yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual.			
3.1.1	Jumlah Populasi	Jumlah populasi ternak sapi potong di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.1.2	Jumlah Pemotongan per Tahun	Jumlah ternak sapi potong yang dipotong di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.1.3	Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun	Persentase perubahan jumlah populasi sapi potong tahun ke n dibandingkan dengan tahun ke n-1 di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jumlah populasi sapi potong pada tahun n dikurangi jumlah populasi sapi potong pada tahun n-1, dibagi jumlah populasi sapi potong pada tahun n-1 dikali 100, di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.2	Ternak Sapi Perah	Pemeliharaan ternak sapi perah yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.2.1	Jumlah Populasi	Jumlah populasi ternak sapi perah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.2.2	Jumlah Produksi Susu per Tahun	Jumlah produksi susu sapi perah di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Tahunan	Liter	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.2.3	Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun	Persentase perubahan jumlah populasi sapi perah tahun ke n dibandingkan dengan tahun ke n-1 di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jumlah populasi sapi perah pada tahun n dikurangi jumlah populasi sapi perah pada tahun n-1, dibagi jumlah populasi sapi	Tahunan	%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		perah pada tahun n-1 dikali 100, di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
3.3	Ternak Kecil	Pemeliharaan ternak kecil yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual. Yang termasuk kategori ternak kecil adalah kambing, domba, babi, kerbau, kuda, dan kelinci.			
3.3.1	Jumlah Populasi Kambing	Jumlah populasi kambing di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.3.2	Jumlah Populasi Domba	Jumlah populasi domba di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.3.3	Jumlah Populasi Babi	Jumlah populasi babi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.3.4	Jumlah Populasi Kerbau	Jumlah populasi kerbau di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.3.5	Jumlah Populasi Kuda	Jumlah populasi kuda di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.3.6	Jumlah Populasi Kelinci	Jumlah populasi kelinci di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4	Unggas	Pemeliharaan unggas yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual. Yang termasuk kategori unggas adalah ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik, itik manila, burung puyuh, dan burung dara.			
3.4.1	Ayam Buras	Pemeliharaan ternak ayam buras yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual.			
3.4.1.1	Jumlah Populasi	Jumlah ayam buras di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.1.2	Jumlah Produksi Daging	Jumlah produksi daging dari hasil ternak ayam buras di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.1.3	Jumlah Produksi Telur	Jumlah produksi telur dari hasil ternak ayam buras di	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Ketahanan Pangan
3.4.2	Ayam Petelur	Pemeliharaan ternak ayam petelur yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual.			
3.4.2.1	Jumlah Populasi	Jumlah ayam petelur di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.2.2	Jumlah Produksi Telur	Jumlah produksi telur dari hasil ternak ayam petelur di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.2.3	Jumlah Produksi Daging	Jumlah produksi daging dari hasil ternak ayam petelur di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.3	Ayam Pedaging	Pemeliharaan ternak ayam pedaging yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual.			
3.4.3.1	Jumlah Populasi	Jumlah ayam pedaging di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.3.2	Jumlah Produksi Daging	Jumlah produksi daging dari hasil ternak ayam pedaging di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.4	Itik	Pemeliharaan ternak itik yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual.			
3.4.4.1	Jumlah Populasi	Jumlah itik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.4.2	Jumlah Produksi Telur	Jumlah produksi telur hasil dari ternak itik di wilayah DIY pada tahun berkenaan	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.4.3	Jumlah Produksi Daging	Jumlah produksi daging dari hasil ternak itik di wilayah DIY pada tahun berkenaan	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.5	Itik Manila	Pemeliharaan ternak itik manila yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual.			
3.4.5.1	Jumlah Populasi	Jumlah itik manila di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.5.2	Jumlah Produksi Telur	Jumlah produksi telur dari hasil ternak itik manila di	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Ketahanan Pangan
3.4.5.3	Jumlah Produksi Daging	Jumlah produksi daging dari hasil ternak itik manila di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.6	Burung Puyuh	Pemeliharaan ternak burung puyuh yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual.			
3.4.6.1	Jumlah Populasi	Jumlah burung puyuh di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.6.2	Jumlah Produksi Telur	Jumlah produksi telur dari hasil ternak burung puyuh di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.6.3	Jumlah Produksi Daging	Jumlah produksi daging dari hasil ternak burung puyuh di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.7	Burung Dara	Pemeliharaan ternak burung dara yang menghasilkan produk peternakan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual.			
3.4.7.1	Jumlah Populasi	Jumlah burung dara di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.7.2	Jumlah Produksi Telur	Jumlah produksi telur dari hasil ternak burung dara di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.7.3	Jumlah Produksi Daging	Jumlah produksi daging dari hasil ternak burung dara di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.4.8	Jumlah Populasi Unggas	Jumlah seluruh populasi unggas di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.5	Industri Peternakan	Kegiatan ekonomi di bidang peternakan yang melakukan pengolahan mengubah bahan menjadi produk baru.			
3.5.1	Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam	Jumlah perusahaan pembibitan ayam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.5.2	Jumlah Perusahaan Penggemukan Sapi Potong	Jumlah perusahaan penggemukan sapi potong di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.5.3	Jumlah Pabrik Pakan Ternak	Jumlah pabrik pakan ternak di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.5.4	Jumlah Industri Pengolah Susu	Jumlah Industri Pengolahan	Triwulan	Unit	Dinas

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	(IPS)	Susu (IPS) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.6	Jumlah Koperasi Peternakan	Jumlah koperasi peternakan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.7	Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH)	Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) di wilayah DIY pada periode berkenaan. RPH merupakan sebuah tempat yang memberikan fasilitas untuk memotong hewan ternak. Tidak hanya melakukan pemotongan, namun rumah potong hewan juga mengolah hewan yang telah dipotong menjadi daging untuk di bahan makanan.	Triwulan	Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8	Komoditas Masuk	Komoditas pertanian yang masuk di wilayah DIY.			
3.8.1	Ternak	Jumlah komoditas ternak yang masuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
3.8.1.1	Sapi Potong	Jumlah komoditas ternak sapi potong yang masuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.1.2	Sapi Perah	Jumlah komoditas ternak Sapi perah yang masuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.1.3	Kerbau	Jumlah komoditas ternak Kerbau yang masuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.1.4	Kambing	Jumlah komoditas ternak Kambing yang masuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.1.5	Domba	Jumlah komoditas ternak Domba yang masuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.1.6	Babi	Jumlah komoditas ternak Babi yang masuk di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.1.7	Kuda	Jumlah komoditas ternak Kuda yang masuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.1.8	Ayam Buras	Jumlah komoditas ternak ayam buras yang masuk di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.1.9	Ayam Ras Petelur	Jumlah komoditas ternak ayam ras petelur yang masuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
3.8.1.10	Ayam Ras Pedaging	Jumlah komoditas ayam ras pedaging yang masuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.1.11	Itik	Jumlah komoditas ternak Itik yang masuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.1.12	Kelinci	Jumlah komoditas ternak kelinci yang masuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.1.13	Puyuh	Jumlah komoditas ternak Puyuh di yang masuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.2	Hasil Ternak Daging	Jumlah komoditas hasil ternak daging yang masuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.3	Hasil Ternak Telur (Kg)	Jumlah komoditas masuk hasil ternak telur yang masuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.8.4	Hasil Ternak telur (Butir)	Jumlah komoditas hasil ternak telur yang masuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	riwulan	Butir	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.9	Komoditas Keluar	Komoditas pertanian yang keluar wilayah DIY.			
3.9.1	Ternak	Jumlah komoditas ternak yang keluar di wilayah DIY pada periode berkenaan.			
3.9.1.1	Sapi Potong	Jumlah komoditas ternak Sapi potong yang keluar dari wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.9.1.2	Sapi Perah	Jumlah komoditas ternak Sapi perah yang keluar dari wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.9.1.3	Kerbau	Jumlah komoditas ternak Kerbau yang keluar dari wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.9.1.4	Kambing	Jumlah komoditas ternak kambing yang keluar dari wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.9.1.5	Domba	Jumlah komoditas hewan ternak domba yang keluar dari wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.9.1.6	Babi	Jumlah komoditas ternak babi yang keluar dari wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.9.1.7	Kuda	Jumlah komoditas ternak Kuda yang keluar dari wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
3.9.1.8	Ayam Buras	Jumlah komoditas ternak Ayam buras yang keluar wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.9.1.9	Ayam Ras Petelur	Jumlah komoditas ternak Ayam ras petelur yang keluar dari wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.9.1.10	Ayam Ras Pedaging	Jumlah komoditas ternak Ayam ras pedaging yang keluar dari wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.9.1.11	Itik	Jumlah komoditas ternak Itik yang keluar dari wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.9.1.12	Kelinci	Jumlah komoditas ternak Kelinci yang keluar dari wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.9.1.13	Puyuh	Jumlah komoditas ternak Puyuh yang keluar dari wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ekor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.9.2	Hasil Ternak Daging	Jumlah komoditas hasil ternak berupa daging yang keluar dari wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.9.3	Hasil Ternak Telur (Kg)	Jumlah komoditas hasil ternak berupa telur yang keluar dari wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Kg	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.9.4	Hasil Ternak Telur (Butir)	Jumlah komoditas hasil ternak berupa telur yang keluar dari wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Butir	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Kelompok Sumber Daya Sosial				
4.1	Perkumpulan Petani Pemakai Air	Jumlah kelompok perkumpulan petani pemakai air di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.2	Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk peningkatan pengembangan usaha. Kelompok tani sebagai pelaku utama menjadi salah satu kelembagaan pertanian yang berperan penting dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan pertanian.	Tahunan	Kelompok	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4.3	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Bantuan Pemda	Jumlah kelompok petani yang mendapat bantuan dari Pemda DIY pada tahun	Tahunan	Kelompok	Dinas Pertanian dan Ketahanan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			Pangan
5	Rumah Potong Hewan dan Unggas	Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) dan Unggas di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Rumah Potong Hewan (RPH) dan Unggas merupakan sebuah tempat yang memberikan fasilitas untuk memotong hewan ternak. Tidak hanya melakukan pemotongan, namun rumah potong hewan juga mengolah hewan yang telah dipotong menjadi daging untuk bahan makanan.	Tahunan	Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6	Jumlah Kasus Wabah/Endemi Pada Hewan				
6.1	Sapi Gila	Jumlah kasus wabah/endemi sapi gila pada hewan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Sapi Gila atau Mad Cow atau Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) adalah penyakit syaraf yang progresif dan fatal pada sapi dewasa domestik yang disebabkan oleh Prion Protein (PrP) yaitu sejenis protein yang dikategorikan ke dalam golongan transmissible spongiform encephalopathy.	Tahunan	Kasus	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.2	Flu Burung	Jumlah kasus wabah/endemi Flu Burung pada hewan di Wilayah DIY pada tahun berkenaan. Avian Influenza (AI) adalah penyakit hewan menular yang menyerang unggas, disebabkan oleh virus influenza tipe A, famili Orthomyxoviridae. Berbagai spesies unggas rentan terhadap infeksi virus AI, khususnya subtype H5N1.	Tahunan	kasus	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.3	Flu Babi	Jumlah kasus wabah/endemi Flu Babi pada hewan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Flu Babi adalah kasus-kasus influenza yang disebabkan oleh virus Orthomyxoviridae yang endemik pada populasi babi.	Tahunan	Kasus	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.4	Penyakit Kuku dan Mulut pada Hewan	Jumlah kasus wabah/endemi Penyakit Kuku dan Mulut pada hewan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Penyakit Mulut	Tahunan	Kasus	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		dan Kuku adalah penyakit hewan menular yang disebabkan oleh virus PMK menyebabkan luka dibagian mulut dan kuku pada hewan berkuku genap. Bersifat akut dan sangat cepat pada sapi, kerbau, babi, kambing, domba dan hewan berkuku genap lainnya.			
6.5	Rabies	Jumlah kasus wabah/endemi rabies pada hewan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Penyakit rabies merupakan salah satu jenis penyakit zoonosis yang menyerang susunan syaraf pusat yang bersifat fatal dan menimbulkan kematian. Rabies menyerang semua hewan berdarah panas dan manusia. Penyebab penyakit rabies adalah virus yang tergolong Lyssa virus dan family rhabdoviridae.	Tahunan	Kasus	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
6.6	Brucellosis	Jumlah kasus wabah/endemi brucellosis pada hewan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Brucellosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Brucella. Berbagai spesies hewan dan juga manusia dapat terjangkit penyakit ini. Brucellosis menyebabkan masalah reproduksi (misalnya aborsi, lahir mati, infertilitas) pada sebagian besar spesies hewan. Tanda-tanda lain dapat mencakup arthritis pada sapi dan babi, mastitis dan pincang pada kambing serta lesi kulit yang mengalir ("withers fistulous") pada kuda.	Tahunan	Kasus	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7	Data Kinerja Dinas Pertanian				
7.1	Jumlah Populasi Ternak	Pengukuran indikator dengan cara menghitung populasi ternak dalam satuan Animal Unit (AU) dimana populasi (AU) = jumlah populasi ternak (ekor) x satuan konversi (AU/ekor) dan menjumlahkan populasi ternak besar, ternak kecil dan, unggas di wilayah DIY	Tahunan	Animal Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pada tahun berkenaan.			
7.2	Produksi Perkebunan	Jumlah produksi yang dihasilkan dari perkebunan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.3	Produksi Tanaman Pangan	Jumlah produksi tanaman pangan dalam satuan ton (produksi (ton) = luas panen (ha) x produktivitas (ton/ha)) dan menjumlahkan hasil produksi 10 komoditas tanaman pangan selama 1 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.4	Produksi Hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura dengan cara menghitung produksi dalam satuan ton (produksi (ton) = luas panen (ha) x produktivitas (ton/ha)) dan menjumlahkan hasil produksi komoditas hortikultura (Sayuran Buah Semusim (SBS), Buah Sayuran Tahunan (BST), Tanaman Hias (TH), Tanaman Bio Farmaka (TBF) selama 1 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.5	Persentase Pertanaman Aman dari Serangan OPT dan DP	Luas tanaman aman dari serangan OPT dan DPI dibagi luas tanaman dikali seratus persen.	Tahunan	%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.6	Nilai Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan dalam PDRB	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	
7.7	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi	Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat terhadap jumlah yang telah terdistribusi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jumlah benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan bersertifikat yang telah terdistribusi dikali jumlah benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dikali 100 persen.	Triwulan	%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.8	Luasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.9	Persentase Bibit Ternak Bersertifikat yang Terdistribusi	Jumlah persentase bibit ternak bersertifikat terhadap jumlah yang terdistribusi di	Triwulan	%	Dinas Pertanian dan Ketahanan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jumlah bibit ternak bersertifikat yang telah terdistribusi dibagi jumlah bibit ternak bersertifikat dikali 100%.			Pangan
7.1	Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan SDM Pertanian	Nilai tingkat pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia Pertanian di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Skor	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7.11	Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan untuk Makan	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makan terhadap jumlah pengeluaran per kapita sebulan di DIY pada tahun berkenaan. Pengeluaran per kapita sebulan untuk makan dibagi pengeluaran perkapita keseluruhan dikali 100%.	Triwulan	%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8	Penyuluh Pertanian	Orang yang bertugas dalam memberikan dorongan kepada petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan baik pengetahuan budidaya maupun teknologi.			
8.1	Penyuluh PNS	Jumlah penyuluh pertanian berstatus Pegawai Negeri Sipil yang berada pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.2	Penyuluh Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP)	Jumlah Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.3	Penyuluh Swadaya	Petani yang berhasil dan mau melakukan penyuluhan kepada petani lain bersinergi dengan penyuluh pegawai negeri sipil. Jumlah penyuluh swadaya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8.4	Penyuluh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK)	Jumlah penyuluh yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



2.02 KEHUTANAN



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Izin untuk Hak Pengusaha Kehutanan	Hak pengusahaan hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam kawasan hutan produksi, yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.1	Jumlah Izin untuk Hak Pengusahaan Kehutanan	Jumlah izin yang diterbitkan untuk hak pengusahaan produk kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	triwulan	Unit	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.2	Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Kehutanan yang Memiliki Sertifikat	Angka yang menggambarkan proporsi jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat terhadap total jumlah usaha kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	triwulan	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Kehutanan	Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.1	Hasil Hutan Non HPH	Produksi hasil hutan yang termasuk kriteria non HPH (bisa dipungut tanpa perlu surat ijin) di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	triwulan		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.1.1	Kayu Bulat	Volume produksi hasil hutan non HPH berupa Kayu Bulat ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	triwulan	M ³	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.1.2	Kayu Olahan	Volume produksi hasil hutan non HPH berupa Kayu gergajian (balok dan papan) atau olahan lembaran jenis jenis kayu lapis (barecore, plywood, veneer, dan blockboard) di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	triwulan	M ³	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.1.3	Produksi Kayu Hutan Rakyat	Volume produksi hasil hutan non HPH berupa produksi kayu bulat yang berasal dari kawasan hutan rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	triwulan	M ³	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.2	Hasil Hutan Ikutan	Hasil Hutan Ikutan merupakan hasil hutan yang			Dinas Lingkungan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		bukan kayu, berasal dari bagian pohon atau tumbuh-tumbuhan yang memiliki sifat khusus yang dapat menjadi suatu barang yang diperlukan oleh masyarakat, dijual sebagai komoditi ekspor atau sebagai bahan baku untuk suatu industri.			Hidup dan Kehutanan
2.2.1	Bambu	Banyaknya hasil hutan ikutan tanaman bambu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	Triwulan	Batang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.2.2	Kayu Putih	Banyaknya hasil hutan ikutan tanaman kayu putih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.2.2.1	Jumlah Produksi Daun	Banyaknya hasil hutan ikutan tanaman kayu putih berupa massa daun kayu putih (dalam satuan ton) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.2.2.2	Jumlah Produksi Minyak	Banyaknya hasil hutan ikutan tanaman kayu putih berupa minyak kayu putih (dalam satuan liter) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	Tahunan	Liter	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.2.2.3	Jumlah PAD	Nilai Pendapatan Asli Daerah (dalam rupiah) yang berasal dari hasil hutan ikutan berupa minyak kayu putih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	Tahunan	Rp	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.3	Luas Lahan Reboisasi	Data terkait luas lahan kawasan hutan yang direboisasi (ditanami kembali) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.3.1	Target	Target luas lahan reboisasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.3.2	Realisasi	Realisasi luas lahan reboisasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.4	Luas Lahan Penghijauan	Data terkait luas lahan kawasan non hutan yang dilakukan penghijauan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.4.1	Pembuatan Baru	Luas lahan penghijauan tahap pembuatan baru pada lahan kritis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada	triwulan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		periode berkenaan.			
2.4.2	Pemeliharaan	Luas lahan penghijauan tahap pemeliharaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.5	Industri Pengolahan Hasil Hutan	Jumlah unit perusahaan industri pengolahan hasil hutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	Triwulan	Unit	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.6	Luas Lahan yang Dapat Dikembangkan untuk Hutan Produksi	Luas lahan (dalam hektar) yang dapat dikembangkan untuk hutan produksi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	Triwulan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.7	Produksi Bibit Tanaman Bersertifikat yang Ditanam (Batang)	Jumlah (batang) produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	Triwulan	Batang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.8	Rasio Pemanfaatan Sumber Daya Hutan	Nilai (dalam persen) yang menyatakan Perbandingan antara sumberdaya hutan yang sudah dimanfaatkan terhadap jumlah total sumberdaya hutan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	Triwulan	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	Kawasan Hutan (Luasan)	Luas total kawasan hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahunan berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1	Kebakaran Hutan	Data tentang kejadian kebakaran hutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahunan berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1.1	Luas Areal Hutan yang Terbakar	Luas areal hutan (dalam hektar) yang terbakar pada kawasan hutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1.2	Jumlah Lokasi Kebakaran Hutan	Jumlah lokasi kebakaran hutan pada kawasan hutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1.3	Jumlah Korban Jiwa	Jumlah korban jiwa akibat kebakaran hutan pada kawasan hutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Jiwa	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.2	Deforestasi (Penggundulan Hutan)	Luas area penggundulan hutan pada kawasan hutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Jumlah Polisi Hutan				



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
4.1	Jumlah Polisi Hutan	Jumlah personil petugas polisi hutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5	Volume Kayu yang Dicuri	Volume kayu yang dicuri (dalam satuan meter kubik) dari kawasan hutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan .	Tahunan	M ³	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.1	Jumlah Kasus	Jumlah kasus pencurian kayu pada kawasan hutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.2	Jumlah Lokasi Pencurian dan Penyelundup	Jumlah lokasi TKP pencurian dan penyelundupan kayu pada kawasan hutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6	Luas Lahan				
6.1	Luas Hutan Negara	Luas kawasan hutan negara (dalam hektar), yaitu kawasan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik (UU No. 5 Tahun 1967) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.1.1	Hutan Produksi	Luas kawasan hutan negara yang berfungsi sebagai hutan produksi (dalam hektar) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.1.2	Hutan Lindung	Luas kawasan hutan negara yang berfungsi sebagai hutan lindung (dalam hektar) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.1.3	Hutan Konservasi	Luas kawasan hutan negara yang berfungsi sebagai hutan konservasi (dalam hektar) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.2	Hutan Rakyat	Luas kawasan Hutan rakyat (dalam hektar), yaitu lahan milik pribadi dengan tutupan vegetasi berkayu lebih dari 50% (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 1997) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.3	Luas Lahan Padang	Luas area lahan padang (dalam hektar) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Kehutanan
6.4	Persentase Hutan Konservasi Terkelola	Persentase hutan konservasi yang terkelola terhadap total luasan hutan konservasi yang ada di wilayah DIY.	Tahunan	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7	Pelestarian Lingkungan Hidup				
7.1	Reboisasi	Luas lahan kawasan hutan yang direboisasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7.2	Penghijauan	Luas lahan kawasan non hutan yang dilakukan penghijauan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7.3	Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Persentase rehabilitasi kawasan hutan dan Lahan kritis di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7.4	Persentase Penurunan Kerusakan Hutan	Angka persentase yang menyatakan proporsi penurunan kerusakan hutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan terhadap angka tersebut pada tahun sebelumnya.	Tahunan	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8	Data Kinerja Dinas kehutanan dan Perkebunan				
8.1	Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Angka persentase yang menyatakan peningkatan produksi hasil hutan di wilayah DIY pada tahun berkenaan terhadap angka produksi Tahun sebelumnya.	Tahunan	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8.2	Persentase Luas Hutan	Angka persentase yang menyatakan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas total wilayah administrasi DIY.	Tahunan	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



2.03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Luas Lahan Energi dan Sumberdaya Mineral				
1.1	Luas Danau/Telaga Alam	Angka luasan dalam hektar yang menyatakan luas seluruh danau atau telaga alam di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	DPUPESDM
1.2	Luas Waduk (Buatan)	Angka luasan dalam hektar yang menyatakan luas seluruh waduk (buatan) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	DPUPESDM
2	Pertambangan	Data tentang pertambangan di wilayah DIY.			DPUPESDM
2.1	Mineral	Data terkait produksi dan perusahaan tambang mineral di wilayah DIY.	Tahunan		DPUPESDM
2.1.1	Gamping	Data terkait produksi dan perusahaan tambang jenis gamping di wilayah DIY.	Tahunan		DPUPESDM
2.1.1.1	Produksi	Jumlah total produksi (dalam ton) dari seluruh tambang gamping di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	DPUPESDM
2.1.1.2	Jumlah Perusahaan	Jumlah perusahaan tambang gamping di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode berkenaan.	Triwulan	Unit	DPUPESDM
2.1.2	Andesit	Data terkait produksi tambang batu andesit di wilayah DIY.	Tahunan		DPUPESDM
2.1.2.1	Produksi	Jumlah total produksi (dalam ton) seluruh tambang batu andesit di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Ton	DPUPESDM
2.1.2.2	Jumlah Perusahaan	Jumlah perusahaan tambang batu andesit di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	Unit	DPUPESDM
2.1.3	Pasir	Data terkait produksi tambang pasir di wilayah DIY.	Tahunan		DPUPESDM
2.1.3.1	Produksi	Volume total produksi bahan tambang pasir dalam satuan meter kubik di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Triwulan	M3	DPUPESDM
2.1.3.2	Jumlah Perusahaan	Jumlah perusahaan tambang pasir di wilayah DIY pada periode berkenaan.	triwulan	Unit	DPUPESDM
3	Energi				
3.1	Jangkauan Pelayanan Energi Listrik	Data terkait jangkauan pelayanan energi listrik di wilayah DIY.	Tahunan		DPUPESDM
3.1.1	Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik (PLN)	Banyaknya keluarga yang menggunakan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) di wilayah DIY.	Tahunan		DPUPESDM
3.1.2	Jumlah Keluarga yang Menggunakan Listrik Non PLN	Banyaknya keluarga yang menggunakan listrik bukan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) di wilayah DIY.	Tahunan		DPUPESDM
3.1.3	Jumlah Keluarga yang Belum Menggunakan Listrik	Banyaknya keluarga yang belum menggunakan listrik di	Tahunan		DPUPESDM

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		wilayah DIY.			
3.1.4	Rasio Elektrifikasi	Angka dalam persen yang menyatakan tingkat pemenuhan daya listrik terhadap total kebutuhan daya listrik di wilayah DIY.	Tahunan	%	DPUPESDM
3.1.5	Presentase Rumah Tangga Berakses Listrik (Rasio Elektrifikasi)	Persentase rumah tangga berakses listrik terhadap jumlah total rumah tangga yang ada di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	DPUPESDM
3.2	Sarana Pelayanan Bahan Bakar	Data terkait sarana pelayanan bahan bakar di wilayah DIY.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
3.2.1	SPBU	Banyaknya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah DIY.	Tahunan		DPUPESDM
3.2.2	Depo/Agen Minyak Tanah	Banyaknya depo atau agen minyak tanah di wilayah DIY.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
3.2.3	SPBE	Jumlah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di wilayah DIY.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
3.2.4	Agen LPG	Banyaknya agen Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayah DIY.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
3.3	Konsumsi Bahan Bakar per Kapita per Hari	Data terkait nilai konsumsi bahan bakar per kapita per hari di wilayah DIY.			DPUPESDM
3.3.1	Kabupaten Kulon Progo				
3.3.1.1	Bensin	Jumlah konsumsi bahan bakar Bensin per kapita per hari di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Liter	DPUPESDM
3.3.1.2	Minyak Tanah	Jumlah konsumsi bahan bakar Minyak Tanah per kapita per hari di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Liter	DPUPESDM
3.3.1.3	Solar	Jumlah konsumsi bahan bakar solar per kapita per hari di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Liter	DPUPESDM
3.3.1.4	LPG	Jumlah konsumsi bahan bakar Liquefied Petroleum Gas (LPG) per kapita per hari di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan (LPG).	Tahunan	Kg	DPUPESDM
3.3.2	Kabupaten Bantul				
3.3.2.1	Bensin	Jumlah konsumsi bahan bakar Bensin per kapita per hari di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Liter	DPUPESDM
3.3.2.2	Minyak Tanah	Jumlah konsumsi bahan bakar Minyak Tanah per kapita per hari di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Liter	DPUPESDM
3.3.2.3	Solar	Jumlah konsumsi bahan bakar solar per kapita per hari di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
3.3.2.4	LPG	Jumlah konsumsi bahan bakar	Tahunan	kg	DPUPESDM

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Liquefied Petroleum Gas (LPG) per kapita per hari di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan (LPG).			
3.3.3	Kabupaten Gunungkidul				
3.3.3.1	Bensin	Jumlah konsumsi bahan bakar Bensin per kapita per hari di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Liter	DPUPESDM
3.3.3.2	Minyak Tanah	Jumlah konsumsi bahan bakar Minyak Tanah per kapita per hari di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Liter	DPUPESDM
3.3.3.3	Solar	Jumlah konsumsi bahan bakar solar per kapita per hari di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Liter	DPUPESDM
3.3.3.4	LPG	Jumlah konsumsi bahan bakar Liquefied Petroleum Gas (LPG) per kapita per hari di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan (LPG).	Tahunan	kg	DPUPESDM
3.3.4	Kabupaten Sleman				
3.3.4.1	Bensin	Jumlah konsumsi bahan bakar Bensin per kapita per hari di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Liter	DPUPESDM
3.3.4.2	Minyak Tanah	Jumlah konsumsi bahan bakar Minyak Tanah per kapita per hari di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Liter	DPUPESDM
3.3.4.3	Solar	Jumlah konsumsi bahan bakar solar per kapita per hari di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Liter	DPUPESDM
3.3.4.4	LPG	Jumlah konsumsi bahan bakar Liquefied Petroleum Gas (LPG) per kapita per hari di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan (LPG).	Tahunan	kg	DPUPESDM
3.3.5	Kota Yogyakarta				
3.3.5.1	Bensin	Jumlah konsumsi bahan bakar Bensin per kapita per hari di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Liter	DPUPESDM
3.3.5.2	Minyak Tanah	Jumlah konsumsi bahan bakar Minyak Tanah per kapita per hari di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Liter	DPUPESDM
3.3.5.3	Solar	Jumlah konsumsi bahan bakar solar per kapita per hari di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Liter	DPUPESDM



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
3.3.5.4	LPG	Jumlah konsumsi bahan bakar Liquefied Petroleum Gas (LPG) per kapita per hari di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan (LPG).	Tahunan	kg	DPUPESDM
4	Sumber Air Minum				DPUPESDM
4.1	Sumur	Banyaknya sumur yang digunakan sebagai sumber air minum di wilayah DIY.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
5	Jumlah PDAM	Banyaknya Perusahaan PDAM yang ada di wilayah DIY.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
5.1	Jumlah PDAM	Banyaknya Perusahaan PDAM yang ada di wilayah DIY.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
5.2	Jumlah Sumur PDAM (Jumlah Sumur Air Tanah PDAM)	Jumlah sumur air tanah yang digunakan PDAM untuk pelayanan jasa PDAM.	tahunan	unit	DPUPESDM
6	Status Mutu Air	Status mutu air di wilayah DIY.			DPUPESDM
6.1.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persentase jumlah penduduk yang memiliki akses sumber air sebagai air minum terhadap jumlah total penduduk di wilayah DIY.	Tahunan	%	DPUPESDM
7	Data Jenis Energi Terbarukan				
7.1	PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya adalah sebuah konversi energi dari sinar surya menjadi listrik, secara langsung memakai fotovoltaiik, secara tidak langsung memakai tenaga surya terkonsentrasi, atau kombinasi keduanya. Sistem tenaga surya terkonsentrasi memakai lensa atau cermin dan sistem pelacak surya.	Tahunan		DPUPESDM
7.1.1	Potensi	Potensi energi surya yang tersedia dan berpeluang dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi energi listrik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.1.1.1	Kapasitas	Kapasitas produksi energi listrik yang bisa didapat dari potensi tenaga surya yang tersedia di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	MWp	DPUPESDM
7.1.1.2	TOE	Tonne of Oil Equivalent, angka yang menyatakan berat/massa energi surya yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi yang setara dengan hasil pembakaran 1 ton crude oil.	Tahunan		DPUPESDM
7.1.2	Terpasang	Jumlah instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.1.2.1	Kapasitas	Jumlah kapasitas energi dari Pembangkit Listrik Tenaga	Tahunan	MWp	DPUPESDM



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Surya yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
7.1.2.2	TOE	Angka TOE dari pembangkit listrik tenaga surya yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.2	PLTMH	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) adalah teknologi untuk memanfaatkan debit air yang ada di sekitar kita untuk diubah menjadi energi listrik.	Tahunan		DPUPESDM
7.2.1	Potensi	Potensi energi dari debit air yang tersedia dan berpotensi dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi energi listrik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.2.1.1	Kapasitas	Kapasitas produksi energi listrik yang bisa didapat dari potensi tenaga mikrohidro yang tersedia di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	MWp	DPUPESDM
7.2.1.2	TOE	Tonne of Oil Equivalent, angka yang menyatakan berat/massa energi mikrohidro yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi yang setara dengan hasil pembakaran 1 ton crude oil.	Tahunan		DPUPESDM
7.2.2	Terpasang	Jumlah unit instalasi Pembangkit Listrik Tenaga mikrohidro yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.2.2.1	Kapasitas	Jumlah kapasitas energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	MWp	DPUPESDM
7.2.2.2	TOE	Angka TOE dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.3	PLTBAYU	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTbayu) adalah teknologi yang memanfaatkan hembusan angin mengubahnya menjadi energi listrik. PLTBAYU memanfaatkan hembusan angin untuk menggerakkan turbin angin atau kincir angin sebagai generator listrik.	Tahunan		DPUPESDM
7.3.1	Potensi	Potensi energi bayu yang tersedia dan berpotensi dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi energi listrik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
7.3.1.1	Kapasitas	Kapasitas produksi energi listrik yang bisa didapat dari potensi tenaga bayu yang tersedia di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	MWp	DPUPESDM
7.3.1.2	TOE	Tonne of Oil Equivalent, angka yang menyatakan berat/massa energi bayu yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi yang setara dengan hasil pembakaran 1 ton crude oil.	Tahunan		DPUPESDM
7.3.2	Terpasang	Jumlah unit instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.3.2.1	Kapasitas	Jumlah kapasitas energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	MWp	DPUPESDM
7.3.2.2	TOE	Angka TOE dari pembangkit listrik tenaga bayu yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.4	PLT Bagasse	PLT Bagasse memanfaatkan biomasa dari ampas tebu sebagai bahan bakar yang memanaskan uap pada boiler steam dan mengkonversinya menjadi energi listrik.	Tahunan		DPUPESDM
7.4.1	Potensi	Potensi berupa ketersediaan ampas tebu yang dapat diolah menjadi energi bahan bakar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.4.1.1	Kapasitas	Kapasitas produksi energi listrik yang bisa didapat dari potensi ketersediaan bagasse yang tersedia di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.4.1.2	TOE	Tonne of Oil Equivalent, angka yang menyatakan berat/massa energi bagasse yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi yang setara dengan hasil pembakaran 1 ton crude oil.	Tahunan		DPUPESDM
7.4.2	Terpasang	Jumlah unit instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Bagasse yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.4.2.1	Kapasitas	Jumlah kapasitas energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Bagasse yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.4.2.2	TOE	Angka TOE dari pembangkit listrik tenaga bagasse yang	Tahunan		DPUPESDM

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
7.5	PLT Sampah	PLT Sampah memanfaatkan biomasa sampah dan atau gas metana sampah sebagai bahan bakar yang memanaskan uap pada boiler steam supercritical dan mengkonversi menjadi energi listrik.	Tahunan		DPUPESDM
7.5.1	Potensi	Potensi berupa ketersediaan biomassa sampah yang dapat diolah menjadi energi bahan bakar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.5.1.1	Kapasitas	Kapasitas produksi energi listrik yang bisa didapat dari potensi ketersediaan biomassa sampah yang tersedia di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	MWp	DPUPESDM
7.5.1.2	TOE	Tonne of Oil Equivalent, angka yang menyatakan berat/massa energi sampah yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi yang setara dengan hasil pembakaran 1 ton crude oil.	Tahunan		DPUPESDM
7.5.2	Terpasang	Jumlah unit instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.5.2.1	Kapasitas	Jumlah kapasitas energi dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.5.2.2	TOE	Angka TOE dari pembangkit listrik tenaga sampah yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.6	Bioethanol	Bahan bakar etanol adalah etanol dengan jenis yang sama dengan yang ditemukan pada minuman beralkohol dengan penggunaan sebagai bahan bakar. Etanol sering kali dijadikan bahan tambahan bensin sehingga menjadi biofuel.	Tahunan		DPUPESDM
7.6.1	Potensi	Potensi berupa ketersediaan bioethanol yang dapat diolah menjadi energi bahan bakar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.6.1.1	Kapasitas	Kapasitas produksi energi listrik yang bisa didapat dari potensi ketersediaan bioethanol yang tersedia di wilayah DIY pada tahun	Tahunan	Juta Liter	DPUPESDM

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			
7.6.1.2	TOE	Tonne of Oil Equivalent, angka yang menyatakan berat/massa energi bioethanol yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi yang setara dengan hasil pembakaran 1 ton crude oil.	Tahunan		DPUPESDM
7.6.2	Terpasang	Jumlah sumber energi Bioethanol yang terpasang di wilayah DIY.	Tahunan		DPUPESDM
7.6.2.1	Kapasitas	Jumlah kapasitas energi dari instalasi Bioethanol yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.6.2.2	TOE	Angka TOE dari pembangkit listrik tenaga bioethanol yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.7	Biogas Ternak	Biogas adalah gas yang berasal dari makhluk hidup yaitu hewan dan tanaman. Biogas diproduksi oleh bakteri dari bahan organik di dalam kondisi hampa udara (anaerobik).	Tahunan		DPUPESDM
7.7.1	Potensi	Potensi berupa ketersediaan biogas ternak yang dapat diolah menjadi energi bahan bakar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.7.1.1	Kapasitas	Kapasitas produksi energi yang bisa didapat dari potensi ketersediaan biogas yang tersedia di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
7.7.1.2	TOE	Tonne of Oil Equivalent, angka yang menyatakan berat/massa energi biogas yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi yang setara dengan hasil pembakaran 1 ton crude oil.	Tahunan		DPUPESDM
7.7.2	Terpasang	Jumlah sumber energi biogas yang terpasang di wilayah DIY.	Tahunan		DPUPESDM
7.7.2.1	Kapasitas	Jumlah kapasitas energi dari biogas ternak yang terpasang di wilayah DIY.	Tahunan		DPUPESDM
7.7.2.2	TOE	Angka TOE dari pembangkit listrik tenaga biogas ternak yang terpasang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.8	Biogas Sanitasi	Biogas sanitasi adalah gas yang berasal dari limbah sanitasi rumah tangga diproduksi oleh bakteri dari bahan organik di dalam kondisi hampa udara (anaerobik).	Tahunan		DPUPESDM
7.8.1	Potensi	Potensi berupa ketersediaan biogas sanitasi yang dapat	Tahunan		DPUPESDM

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		diolah menjadi energi bahan bakar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
7.8.1.1	Kapasitas	Kapasitas produksi energi yang bisa didapat dari potensi ketersediaan biogas sanitasi yang tersedia di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
7.8.1.2	TOE	Tonne of Oil Equivalent, angka yang menyatakan berat/massa energi biogas sanitasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi yang setara dengan hasil pembakaran 1 ton crude oil.	Tahunan		DPUPESDM
7.9	Biogas Ampas Tahu	Limbah ampas tahu yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjadi sumber energi bahan bakar.	Tahunan		DPUPESDM
7.9.1	Potensi	Potensi berupa ketersediaan ampas tahu yang dapat diolah menjadi energi bahan bakar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.9.1.1	Kapasitas	Kapasitas produksi energi yang bisa didapat dari potensi ketersediaan biogas ampas tahu yang tersedia di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	DPUPESDM
7.9.1.2	TOE	Tonne of Oil Equivalent, angka yang menyatakan berat/massa energi biogas ampas tahu yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi yang setara dengan hasil pembakaran 1 ton crude oil.	Tahunan		DPUPESDM
7.10	Biomassa Pelet	Biomassa Pelet digunakan sebagai pemanas ruang untuk ruang sekala kecil dan menengah. Pelet dibuat dari hasil samping terutama serbuk kayu.	Tahunan		DPUPESDM
7.10.1	Potensi	Potensi berupa ketersediaan bubuk kayu (bahan pelet) yang dapat diolah menjadi energi bahan bakar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		DPUPESDM
7.10.1.1	Kapasitas	Kapasitas produksi energi yang bisa didapat dari potensi ketersediaan biomassa pelet yang tersedia di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	DPUPESDM
7.10.1.2	TOE	Tonne of Oil Equivalent, angka yang menyatakan berat/massa energi biomassa pelet yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi yang setara dengan hasil pembakaran 1 ton crude oil.	Tahunan		DPUPESDM



2.04 PARIWISATA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Hotel	Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan, dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll.) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.			
1.1	Jumlah Hotel Bintang Lima	Hotel bintang lima adalah hotel yang paling mewah dan memiliki layanan multibahasa. Hotel ini menyediakan welcome drink, sampai ada daftar minuman wine yang bisa dipilih saat masuk ke kamar hotel. Hotel bintang lima harus punya kamar tipe standar minimal 100 unit dengan luas minimal 26 meter persegi.	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY
1.2	Jumlah Hotel Bintang Empat	Hotel bintang empat sudah dapat dikatakan sebagai hotel yang cukup berkelas dengan para karyawan dan staff yang lebih profesional dalam melayani tamu yang datang. Hotel bintang 4 juga mirip dengan hotel berbintang 5. Hanya, dari segi pelayanannya, tidak semuanya seperti hotel bintang 5.	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY
1.3	Jumlah Hotel Bintang Tiga	Banyaknya Hotel Bintang Tiga di wilayah DIY. Hotel bintang 3 adalah hotel yang memiliki luas lebih besar dari pada hotel bintang 2.	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY
1.4	Jumlah Hotel Bintang Dua	Banyaknya Hotel Bintang Dua di wilayah DIY. Hotel bintang 2 biasanya kamar suite memiliki ukuran kamar tidur dan kamar mandi yang lebih luas, fasilitas kamar mandi yang lebih lengkap, dan fasilitas kamar seperti mesin kopi, AC, TV, dan telepon.	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY
1.5	Jumlah Hotel Bintang Satu	Bintang satu merupakan peringkat terendah untuk hotel yang	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		telah disertifikasi. Hotel berbintang satu memiliki jumlah kamar yang tidak terlalu banyak. Minimal harus ada 15 kamar tidur standar dengan luas minimal 20 meter persegi.			
1.6	Jumlah Hotel Non Bintang	Hotel non bintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu. Hotel nonbintang tidak memiliki penggolongan kelas hotel dan dapat disebut sebagai hotel melati.	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY
2	Jenis Objek Wisata				
2.1	Jenis Objek Wisata Marina	Wisata marina merupakan objek wisata/tempat wisata yang berhubungan dengan laut/pantai.			
2.1.1	Jumlah Objek Wisata	Banyaknya obyek wisata marina di wilayah DIY.	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY
2.1.2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Banyaknya wisatawan nusantara pada objek wisata marina di wilayah DIY pada tahun berkenaan wisatawan nusantara (wisnus) yang digunakan pada penelitian ini adalah penduduk Indonesia yang melaksanakan perjalanan dalam wilayah Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
2.1.3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Banyaknya wisatawan mancanegara pada objek wisata marina di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Wisatawan Mancanegara adalah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
2.2	Jenis Objek Wisata Tirta	Objek wisata tirta adalah tempat wisata yang menggunakan kawasan perairan, baik untuk			



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		rekreasi maupun kegiatan olahraga air seperti menyelam, berselancar, dll.			
2.2.1	Jumlah Objek Wisata	Banyaknya Obyek Wisata Tirta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY
2.2.2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Banyaknya Wisatawan Nusantara pada objek wisata tirta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
2.2.3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Banyaknya wisatawan mancanegara pada objek wisata tirta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
2.3	Jenis Objek Wisata Sejarah	Objek Wisata Sejarah adalah tempat wisata yang dengan asli menggambarkan sejarah dan orang-orang di masa lalu.			
2.3.1	Jumlah Objek Wisata	Banyaknya Obyek Wisata Sejarah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY
2.3.2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Banyaknya Wisatawan Nusantara pada objek wisata sejarah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
2.3.3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Banyaknya wisatawan mancanegara pada objek wisata sejarah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
2.4	Jenis Objek Wisata Alam	Objek Wisata alam adalah tempat wisata dari sumber daya alam yang berpotensi serta mempunyai daya tarik wisatawan, baik yang alami maupun yang sudah dibudidayakan.			
2.4.1	Jumlah Objek Wisata	Banyaknya Obyek Wisata alam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY
2.4.2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Banyaknya wisatawan nusantara pada objek wisata alam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
2.4.3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Banyaknya wisatawan mancanegara pada objek wisata alam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
2.5	Jenis Objek Wisata Museum	Museum adalah lembaga yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Museum berfungsi mengumpulkan, merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk			



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		tujuan studi, penelitian dan kesenangan atau hiburan.			
2.5.1	Jumlah Objek Wisata	Banyaknya obyek wisata museum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY
2.5.2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Banyaknya wisatawan nusantara pada objek wisata museum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
2.5.3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Banyaknya wisatawan mancanegara pada objek wisata museum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
2.6	Jenis Objek Wisata Desa Wisata	Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama dengan menyesuaikan keterampilan individual berbeda. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian kami dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata diwilayah masing-masing desa.			
2.6.1	Jumlah Objek Wisata	Banyaknya obyek wisata desa wisata di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY
2.6.2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Banyaknya wisatawan nusantara pada objek wisata desa wisata di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
2.6.3	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Banyaknya wisatawan mancanegara pada objek wisata desa wisata di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
2.7	Capaian Kinerja Kunjungan Wisatawan	Wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pariwisata DIY
2.8	Jenis objek Wisata Lainnya				



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
2.8.1	Total Objek Wisata	Banyaknya obyek wisata lain selain disebutkan diatas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Dinas Pariwisata DIY
2.8.2	Total Wisatawan Nusantara	Banyaknya Wisatawan Nusantara pada objek wisata lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Jiwa	Dinas Pariwisata DIY
2.8.3	Total Wisatawan Mancanegara	Banyaknya Wisatawan Mancanegara pada objek wisata lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Jiwa	Dinas Pariwisata DIY
3	Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi				
3.1	Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Setiap orang yang mengunjungi suatu negara diluar negara tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi.			
3.1.1	Wisman Benua Asia	Banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara dari Benua Asia yang menggunakan jasa akomodasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
3.1.2	Wisman Benua Australia	Banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara dari Benua Australia yang menggunakan jasa akomodasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
3.1.3	Wisman Benua Afrika	Banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara dari Benua Afrika yang menggunakan jasa akomodasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
3.1.4	Wisman Benua Amerika	Banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara dari Benua Amerika yang menggunakan jasa akomodasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
3.1.5	Wisman Benua Eropa	Banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara dari Benua Eropa yang menggunakan jasa akomodasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
3.2	Wisatawan Nusantara (Wisnus)	Banyaknya Wisatawan Nusantara yang menggunakan jasa akomodasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
3.3	Total Wisatawan	Banyaknya wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Pariwisata DIY
3.4	Jumlah Belanja (Spending Money) Wisatawan	Banyaknya jumlah belanja wisatawan yang di keluarkan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah	Dinas Pariwisata DIY
4	Jumlah Kamar Hotel, Tingkat Hunian Kamar Hotel, dan Rata-Rata Lama Tinggal				
4.1	Jumlah Kamar Hotel yang Tersedia	Banyaknya hunian kamar hotel yang tersedia di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Dinas Pariwisata DIY
4.1.1	Hotel Bintang	Banyaknya hunian kamar hotel bintang yang tersedia di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Hotel Berbintang adalah suatu usaha akomodasi yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata. Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY
4.1.2	Non Bintang	Banyaknya hunian kamar hotel non bintang yang tersedia di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Hotel Non bintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu. Hotel non bintang tidak memiliki penggolongan kelas hotel dan dapat disebut sebagai hotel melati.	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY
4.2	Jumlah Kamar Hotel yang Terjual	Banyaknya kamar hotel yang terisi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY
4.2.1	Hotel Bintang	Banyaknya kamar yang terisi pada hotel berbintang di wilayah DIY	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pada tahun berkenaan.			
4.2.2	Hotel Non Bintang	Banyaknya kamar yang terisi pada hotel non bintang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Pariwisata DIY
4.3	Tingkat Hunian Kamar Hotel	Tingkat penghunian kamar adalah rata-rata jumlah kamar yang dihuni per malam dibagi dengan jumlah kamar yang tersedia kemudian dikalikan 100%.	Tahunan	%	Dinas Pariwisata DIY
4.3.1	Hotel Bintang	Persentase tingkat hunian kamar terhadap total jumlah kamar pada hotel berbintang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pariwisata DIY
4.3.2	Hotel Non Bintang	Persentase tingkat hunian kamar terhadap total jumlah kamar pada hotel non bintang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Pariwisata DIY
4.4	Rata-Rata Lama Tinggal (Length of Stay)	Rata rata lama pengunjung tinggal di hotel di suatu wilayah DIY pada bulan berkenaan.	Bulanan	Hari	DINAS PARIWSATA
4.4.1	Hotel Bintang	Rata-rata lama tinggal di kamar hotel berbintang di wilayah DIY pada bulan berkenaan.	Bulanan	Hari	DINAS PARIWSATA
4.4.2	Hotel Non Bintang	Rata-rata lama tinggal di kamar pada hotel non bintang di wilayah DIY pada bulan berkenaan.	bulanan	Hari	DINAS PARIWSATA
5	Restoran dan Rumah Makan	Rumah makan atau restoran adalah istilah umum untuk menyebut tempat usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya.			
5.1.1	Jumlah Restoran	Restoran adalah suatu jenis usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahan dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin restoran dan	Tahunan	Unit	DINAS PARIWISATA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		kualifikasinya diberikan oleh dinas terkait.			
5.1.2	Jumlah Rumah Makan	Rumah makan adalah Jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya dapat dilakukan di luar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak.	Tahunan	Unit	DINAS PARIWISATA
6	Jumlah Perusahaan/Cabang/ Agen Biro Perjalanan Wisata	Agen Perjalanan Wisata (APW) adalah usaha pariwisata yang menjalankan fungsi “keagenan” atau perantara, APW tidak memiliki produk, tapi menjual produk usaha lain misalnya Hotel, Restoran, Penerbangan, Paket Wisata dll. Banyaknya perusahaan/cabang/agen biro perjalanan di wilayah tertentu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	BUAH	DINAS PARIWISATA
7	Jumlah Pramuwisata	Pamuwisata adalah seorang yang memberi penerangan, penjelasan serta petunjuk kepada wisatawan dan traveler lainnya, tentang segala sesuatu yang hendak dilihat dan disaksikan bilamana mereka berkunjung pada suatu objek, tempat atau daerah tertentu. Banyaknya pramuwisata di di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	DINAS PARIWISATA
8	Jumlah Tenaga Kerja di Hotel Berbintang	Banyaknya tenaga kerja di hotel berbintang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	DINAS PARIWISATA
8.1.1	Laki-Laki	Banyaknya tenaga kerja laki-laki di hotel berbintang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	DINAS PARIWISATA
8.1.2	Perempuan	Banyaknya tenaga kerja perempuan di hotel berbintang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	DINAS PARIWISATA
9	Penyelenggaraan MICE	MICE merupakan singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. MICE adalah jenis kegiatan yang terdapat dalam industri			



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pariwisata, kegiatan ini telah direncanakan secara matang oleh sekelompok atau sekumpulan orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dunia MICE merupakan dunia bisnis yang sangat menjanjikan namun masih sangat baru dalam masyarakat karena belum banyak memiliki peminat seperti bisnis lainnya.			
9.1.1	Jumlah Penyelenggaraan	Banyaknya kegiatan penyelenggaraan MICE yang diselenggarakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kali	DINAS PARIWISATA
9.1.2	Jumlah Peserta	Banyaknya peserta pada kegiatan-kegiatan MICE yang diselenggarakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	DINAS PARIWISATA
10	Pariwisata	Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini.			
10.1	Jumlah Objek Wisata	Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut, baik yang dikelola secara komersial maupun non komersial.	Tahunan	Unit	DINAS PARIWISATA
10.1.1	Jumlah Objek Wisata Alam	Wisata alam adalah pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmani dan rohani.	Tahunan	Unit	DINAS PARIWISATA
10.1.2	Jumlah Objek Wisata Buatan	Wisata buatan adalah merupakan suatu obyek yang dibuat secara sengaja untuk menarik minat kunjungan wisatawan.	Tahunan	Unit	DINAS PARIWISATA
10.1.3	Jumlah Objek Wisata Sejarah	Objek wisata sejarah merupakan tempat atau kawasan yang memiliki	Tahunan	Unit	DINAS PARIWISATA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		nilai-nilai sejarah dan bukti-bukti sejarah yang difungsikan sebagai tempat wisata.			
10.2	Jumlah Desa Wisata	Desa wisata yang memiliki berbagai potensi wisata yang masih alami atau natural baik dalam bentuk potensi wisata alam dengan perkebunan kopi, peternakan kambing dan hamparan keindahan gunung serta bukitnya maupun potensi wisata seni dan budaya seperti jathilan, ketoprak, dan sebagainya hingga potensi wisata kulinernya.	Tahunan	Desa	DINAS PARIWISATA
10.2.1	Jumlah Desa Wisata Maju	Desa wisata maju adalah desa wisata yang masyarakatnya sadar akan potensi wisata yang ada di daerahnya. Masyarakat mampu mengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis maupun kelompok kerja lokal.	Tahunan	Desa	DINAS PARIWISATA
10.2.2	Jumlah Desa Wisata Berkembang	Banyaknya Desa Wisata Berkembang di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Desa wisata berkembang merupakan desa wisata yg sudah menerima tamu/wisatawan dari luar daerah. Sarana prasarana dan fasilitas sudah berkembang sehingga mulai tercipta lapangan kerja bagi penduduk daerah.	Tahunan	Desa	DINAS PARIWISATA
10.2.3	Jumlah Desa Wisata Tumbuh/Embrio	Banyaknya Desa Wisata Tumbuh/Embrio di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Desa wisata tumbuh merupakan desa wisata yg memiliki potensi dan siap untuk menjadi objek wisata berkembang.	Tahunan	Desa	DINAS PARIWISATA
10.2.4	Jumlah Desa Wisata Layak Jual	Desa wisata layak jual merupakan desa yg mempunyai tempat strategis dan nilai kunjungan wisatawan yang tinggi baik wisatawan dalam negeri atau mancanegara. Banyaknya Desa Wisata Layak Jual di wilayah DIY.	Tahunan	Desa	DINAS PARIWISATA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
10.3	Jumlah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) di DIY	Banyaknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di wilayah DIY ada tahun berkenaan pada tahun berkenaan. Pokdarwis adalah suatu kelompok masyarakat yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi.			
10.3.1	Jumlah Pokdarwis di Kabupaten Gunungkidul	Banyaknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan. Pokdarwis adalah suatu kelompok masyarakat yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi.	Tahunan	Kelompok	DINAS PARIWISATA
10.3.2	Jumlah Pokdarwis di Kabupaten Kulon Progo	Banyaknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Pokdarwis adalah suatu kelompok masyarakat yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi.	Tahunan	Kelompok	DINAS PARIWISATA
10.3.3	Jumlah Pokdarwis di Kabupaten Sleman	Banyaknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di wilayah Kabupaten Sleman ada tahun berkenaan. Pokdarwis adalah suatu kelompok masyarakat yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen	Tahunan	Kelompok	DINAS PARIWISATA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi.			
10.3.4	Jumlah Pokdarwis di Kabupaten Bantul	Banyaknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di wilayah Kabupaten Bantul ada tahun berkenaan. Pokdarwis adalah suatu kelompok masyarakat yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi.	Tahunan	Kelompok	DINAS PARIWISATA
10.3.5	Jumlah Pokdarwis di Kota Yogyakarta	Banyaknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di wilayah Kota Yogyakarta ada tahun berkenaan. Pokdarwis adalah suatu kelompok masyarakat yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi.	Tahunan	Kelompok	DINAS PARIWISATA
11	Data Kinerja Dinas Pariwisata	Hasil kerja yang telah dicapai oleh badan usaha yang melakukan kegiatan kepariwisataan dalam bentuk penyediaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata.			
11.1	Jumlah Wisatawan Nusantara yang Menggunakan Hotel Bintang dan Non Bintang (IKU)	Banyaknya wisatawan nusantara yang menggunakan hotel bintang dan hotel non bintang sebagai tempat menginap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	DINAS PARIWISATA
11.2	Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Menggunakan Hotel Bintang dan Non Bintang (IKU)	Banyaknya wisatawan mancanegara yang menggunakan hotel bintang dan hotel non bintang sebagai tempat menginap di wilayah DIY	Tahunan	Orang	DINAS PARIWISATA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pada tahun berkenaan.			
11.3	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara yang menggunakan Hotel Bintang dan Non Bintang (IKU)	Lamanya waktu tinggal wisatawan nusantara yang menggunakan hotel bintang dan hotel non bintang sebagai tempat menginap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Hari	DINAS PARIWISATA
11.4	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara yang Menggunakan Hotel Bintang dan Non Bintang (IKU)	Lamanya waktu tinggal wisatawan mancanegara yang menggunakan hotel bintang dan hotel non bintang sebagai tempat menginap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Hari	DINAS PARIWISATA
11.5	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Tujuan Wisata (IKP)	Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke tempat daerah tujuan wisata di wilayah DIY.	Tahunan	Orang	DINAS PARIWISATA
11.6	Jumlah Daya Tarik Baru (IKP)	Banyaknya daya tarik baru yang dapat menarik minat wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	DTW/Lokasi	DINAS PARIWISATA
11.7	Jumlah Desa Wisata (IKP)	Banyaknya jumlah desa wisata yang terdapat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Desa	DINAS PARIWISATA
11.8	Jumlah Pokdarwis (IKP)	Banyaknya pokdarwis di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok/Pokdarwis	DINAS PARIWISATA
11.9	Nilai Sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB DIY	Banyaknya nilai sektor akomodasi dan makan minum dalam Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Rupiah	DINAS PARIWISATA
11.1	Spending Money Wisatawan	Banyaknya tingkat pengeluaran dari wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke DIY pada tahun berkenaan . Pengeluaran yang dibelanjakan selama mengunjungi DIY meliputi pengeluaran untuk akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, paket tour, hiburan, cinderamata, belanja, dll.	Tahunan	Rp	DINAS PARIWISATA



2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Luas Hutan Ekosistem Laut				
1.3	Luas Lahan Ekosistem Laut	Ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal/litoral, dan ekosistem pasang surut.			
1.3.1	Hutan Bakau/Mangrove	Luas Hutan Bakau/Mangrove di seluruh di DIY pada tahun berkenaan. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut.	Tahunan	Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.3.2	Terumbu Karang	Luas terumbu karang di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae.	Tahunan	Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.4	Luas Lahan	Luas Lahan yang digunakan untuk budidaya ikan dan penggaraman.			
1.4.1	Penggaraman	Luas lahan yang digunakan untuk penggaraman di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
1.4.2	Perikanan Budidaya	Luas lahan yang digunakan untuk budidaya perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.5	Peningkatan Status Kawasan Konservasi Perairan	Kawasan konservasi perairan di wilayah DIY yang mengalami peningkatan status pada tahun berkenaan Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/Permen-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan).	Tahunan	Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.6	Persentase Kawasan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan kawasan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Luas Lahan	Luas lahan hamparan lahan			



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		yang digunakan untuk kegiatan budidaya di wilayah DIY.			
2.1	Kolam Air Tawar	Luas Lahan Kolam Air Tawar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.2	Tambak Ikan	Luas Lahan Tambak Ikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Perikanan Tangkap Laut	Jumlah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut) di wilayah DIY.			
3.1	Jumlah Nelayan	Banyaknya orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Nelayan terdiri dari nelayan penuh, nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan.	Tahunan	orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.1.1	Nelayan Penuh	Banyaknya orang yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan atau biota laut lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.1.2	Nelayan Sambilan Utama	Banyaknya nelayan yang sebagian besar waktunya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.1.3	Nelayan Sambilan Tambahan	Banyaknya orang yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan atau biota laut lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.2	Rumah Tangga Perikanan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan di seluruh di DIY pada tahun berkenaan. Rumah Tangga Perikanan merupakan rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air baik di perikanan laut atau perairan umum dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya	Tahunan	RTP	Dinas Kelautan dan Perikanan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		untuk dijual.			
3.2.1	Perikanan Laut	Jumlah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan/budidaya ikan/binatang/tanaman laut dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	RTP	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.2.2	Perairan Umum	Jumlah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan/budidaya ikan/binatang/tanaman perairan umum dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	RTP	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3	Armada/Kapal	Jumlah alat transportasi air yang digunakan untuk aktivitas penangkapan ikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.1	Jumlah Kapal Penangkap Ikan	Jumlah kapal penangkap ikan air yang digunakan untuk aktivitas penangkapan ikan di seluruh wilayah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.3.1	Perahu Tanpa Motor	Banyaknya perahu yang tidak menggunakan tenaga mesin sebagai penggerak, tetapi menggunakan layar atau dayung yang digunakan untuk penangkapan ikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.3.2	Perahu Motor Tempel	Banyaknya perahu motor tempel yang digunakan untuk aktivitas penangkapan ikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.3.3.3	Kapal Motor	Banyaknya kapal yang mempunyai mesin pembakaran dalam, biasanya mesin diesel yang digunakan untuk aktivitas penangkapan ikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4	Hasil Penangkapan Hasil Tangkap Laut	Hasil penangkapan perikanan tangkap mencakup semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami di laut dan bukan milik perorangan. Hasil penangkapan yang dimaksud adalah semua			

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		hasil yang diperoleh, baik yang dijual atau yang dibayar sebagai upah.			
3.4.1	Manyung	Banyaknya hasil penangkapan ikan manyung di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.2	Rajungan	Banyaknya hasil penangkapan rajungan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.3	Kepiting	Banyaknya hasil penangkapan kepiting di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.4	Kuwe	Banyaknya hasil penangkapan kuwe di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.5	Bawal Putih	Banyaknya hasil penangkapan bawal putih di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.6	Lemadang	Banyaknya hasil penangkapan lemadang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.7	Ikan Lidah	Banyaknya hasil penangkapan ikan lidah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.8	Peperek	Banyaknya hasil penangkapan peperek di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.9	Belanak	Banyaknya hasil penangkapan belanak di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.10	Kuniran	Banyaknya hasil penangkapan kuniran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.11	Lisong	Banyaknya hasil penangkapan lisong di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.12	Tongkol	Banyaknya hasil penangkapan tongkol di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.13	Cakalang	Banyaknya hasil penangkapan cakalang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.14	Kembung	Banyaknya hasil penangkapan kembung di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.15	Banyar	Banyaknya hasil penangkapan banyar di	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		wilayah DIY pada tahun berkenaan.			dan Perikanan
3.4.16	Tengiri	Banyaknya hasil penangkapan tengiri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.17	Gulamah/Tigawaja	Banyaknya hasil penangkapan gulamah/tigawaja di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.18	Tuna/Mandidihang	Banyaknya hasil penangkapan tuna/mandidihang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.19	Layur	Banyaknya hasil penangkapan layur di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.20	Ikan Pari	Banyaknya hasil penangkapan ikan pari di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.21	Udang	Banyaknya hasil penangkapan udang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.22	Lobster	Banyaknya hasil penangkapan lobster di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.23	Kakap Merah	Banyaknya hasil penangkapan kakap merah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.24	Binatang Laut Keras Lainnya	Banyaknya hasil penangkapan binatang laut keras lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.25	Rumput Laut	Banyaknya hasil penangkapan rumput laut di wilayah DIY.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.26	Ikan Lainnya	Banyaknya hasil penangkapan ikan lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.27	Ubur-Ubur	Banyaknya hasil penangkapan ubur-ubur di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.28	Binatang Lunak Lainnya	Banyaknya hasil penangkapan Binatang Lunak Lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.4.29	Binatang Air Lainnya	Banyaknya hasil penangkapan Binatang Air Lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.5	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut	Banyaknya nilai hasil penangkapan Perikanan	Tahunan	Juta	Dinas Kelautan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Tangkap Laut di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			dan Perikanan
3.6	Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum	Banyaknya hasil penangkapan Perikanan Tangkap Perairan Umum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.1	Sungai	Banyaknya hasil penangkapan sungai di wilayah DIY.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.2	Gabus	Banyaknya hasil penangkapan ikan gabus di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.3	Mujair	Banyaknya hasil penangkapan ikan mujair di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.4	Nila	Banyaknya hasil penangkapan ikan nila di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.5	Lele	Banyaknya hasil penangkapan ikan lele di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.6	Mas	Banyaknya hasil penangkapan ikan mas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.7	Tawes	Banyaknya hasil penangkapan ikan tawes di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.8	Gurami	Banyaknya hasil penangkapan ikan gurami di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.9	Ikan Lainnya	Banyaknya hasil penangkapan ikan lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.10	Udang Tawar	Banyaknya hasil penangkapan ikan udang tawar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.11	Udang Lainnya	Banyaknya hasil penangkapan udang lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.12	Siput	Banyaknya hasil penangkapan siput di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.13	Binatang Lunak Lainnya	Banyaknya hasil penangkapan binatang lunak lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
3.6.14	Kodok	Banyaknya hasil penangkapan kodok di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.15	Binatang Air Lainnya	Banyaknya hasil penangkapan binatang air lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.16	Waduk	Banyaknya hasil penangkapan waduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.17	Gabus	Banyaknya hasil penangkapan ikan gabus di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.18	Mujair	Banyaknya hasil penangkapan ikan mujair di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.19	Nila	Banyaknya hasil penangkapan ikan nila di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.20	Lele	Banyaknya hasil penangkapan ikan lele di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.21	Mas	Banyaknya hasil penangkapan ikan mas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.22	Ikan Lainnya	Banyaknya hasil penangkapan ikan lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.23	Udang Tawar	Banyaknya hasil penangkapan udang tawar di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.24	Udang Lainnya	Banyaknya hasil penangkapan udang lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.25	Siput	Banyaknya hasil penangkapan siput di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.26	Binatang Lunak Lainnya	Banyaknya hasil penangkapan binatang lunak lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.27	Kodok	Banyaknya hasil penangkapan kodok di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.28	Binatang Air Lainnya	Banyaknya hasil penangkapan binatang air lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
3.6.29	Genangan	Banyaknya hasil penangkapan genangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.30	Nila	Banyaknya hasil penangkapan ikan nila di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.31	Mas	Banyaknya hasil penangkapan ikan mas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.32	Tawes	Banyaknya hasil penangkapan ikan tawes di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.6.33	Lainnya	Banyaknya hasil penangkapan lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.7	Nilai Produksi Perikanan Tangkap PU	Banyaknya nilai yang dihasilkan dari proses penangkapan ikan di perairan umum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta	Dinas Kelautan dan Perikanan
4	Perikanan Budidaya	Banyaknya usaha pemeliharaan dan pengembang biakan ikan atau organisme air lainnya di wilayah DIY .			
4.3	Kolam	Wadah berupa lahan atau tempat yang dibuat khusus untuk membudidayakan ikan yang dibatasi oleh pematang/tanggul yang letaknya di daratan, atau wadah lain berupa terpal, akuarium, bak, drum, tong, dan blong, dimana sumber airnya merupakan air tawar yang berasal dari danau, waduk, sungai, saluran irigasi, rawa atau mata air.			
4.3.1	Luas Lahan	Luas lahan kolam Budidaya Perikanan di wilayah DIY .pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.2	Nilai Produksi	Jumlah nilai hasil budidaya ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan berupa kolam yang diusahakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.3	Jumlah Produksi	hasil budidaya ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan berupa kolam yang diusahakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.3.1	Ikan Mas	Banyaknya hasil panen ikan mas dengan media kolam di wilayah DIY pada tahun	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			Perikanan
4.3.3.2	Tawes	Banyaknya hasil panen tawes dengan media kolam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.3.3	Nila	Banyaknya hasil panen nila dengan media kolam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.3.4	Gurami	Banyaknya hasil panen gurami dengan media kolam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.3.5	Lele	Banyaknya hasil panen lele dengan media kolam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.3.6	Bawal Tawar	Banyaknya hasil panen bawal tawar dengan media kolam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.3.7	Grasscrap	Banyaknya hasil panen grasscrap dengan media kolam di wilayah DIY. pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.3.8	Udang Galah	Banyaknya hasil panen udang galah dengan media kolam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.3.9	Patin	Banyaknya hasil panen patin dengan media kolam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.3.3.10	Ikan Lainnya	Banyaknya hasil panen ikan lainnya selain disebutkan diatas dengan media kolam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.4	Tambak	Lahan yang biasanya digunakan untuk pemeliharaan/pembenihan ikan, baik yang terletak di lahan sawah ataupun lahan kering			
4.4.1	Luas Lahan	Luas Lahan tambak yang digunakan untuk budidaya perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.4.2	Nilai Produksi	Jumlah Nilai hasil budidaya ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan berupa tambak yang diusahakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.4.3	Jumlah Produksi	Hasil budidaya ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan berupa tambak yang diusahakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
4.4.3.1	Bandeng	Banyaknya hasil panen bandeng dengan media tambak di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.4.3.2	Udang Vanname	Banyaknya hasil panen vanname dengan media tambak di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.4.3.3	Ikan Lainnya	Banyaknya hasil selain bandeng dan udang vanname dengan media tambak di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.5	Karamba	Tempat pemeliharaan ikan/biota lain yang dilakukan di perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa) dengan wadah berbentuk kurungan yang terbuat dari bilah kayu, bambu, kawat, atau jaring.			
4.5.1	Luas Lahan	Luas lahan karamba yang digunakan untuk budidaya perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.5.2	Nilai Produksi	Jumlah nilai hasil budidaya ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan berupa karamba yang diusahakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.5.3	Jumlah Produksi	hasil budidaya ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan berupa karamba yang diusahakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.5.3.1	Ikan Mas	Banyaknya hasil panen ikan mas dengan media karamba di wilayah DIY.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.5.3.2	Nila	Banyaknya hasil panen nila dengan media karamba di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.5.3.3	Gurami	Banyaknya hasil panen gurami dengan media karamba di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.5.3.4	Lele	Banyaknya hasil panen lele dengan media karamba di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.5.3.5	Bawal Tawar	Banyaknya hasil panen bawal tawar dengan media karamba di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.5.3.6	Ikan Lainnya	Banyaknya hasil panen ikan lain selain disebutkan diatas dengan media karamba di wilayah DIY pada tahun	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			
4.6	Sawah	Wadah pemeliharaan ikan/biota lain yang dilakukan di sawah yang masih banyak digenangi air.			
4.6.1	Luas Lahan	Luas lahan karamba yang digunakan untuk budidaya perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.6.2	Nilai Produksi	Jumlah Nilai hasil budidaya ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan berupa sawah yang diusahakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.6.3	Jumlah Produksi	hasil budidaya ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan berupa sawah yang diusahakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.6.3.1	Ikan Mas	Banyaknya hasil panen ikan mas dengan media sawah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.6.3.2	Tawes	Banyaknya hasil panen tawes dengan media sawah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.6.3.3	Nila	Banyaknya hasil panen nila dengan media sawah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.6.3.4	Grasscrap	Banyaknya hasil panen grasscrap dengan media sawah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.6.3.5	Ikan Lainnya	Banyaknya hasil panen ikan lainnya selain disebutkan diatas dengan media sawah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.7	Telaga	Danau yang kecil di mana sinar Matahari bahkan dapat mencapai dasarnya pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Kelautan dan Perikanan
4.7.1	Luas Lahan	Luas lahan telaga yang digunakan untuk budidaya perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.7.2	Nilai Produksi	Jumlah Nilai hasil budidaya ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan berupa telaga yang diusahakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.7.3	Jumlah Produksi	hasil budidaya ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan berupa telaga yang diusahakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.7.3.1	Ikan Mas	Banyaknya hasil panen ikan	Tahunan	Ton	Dinas



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		mas dengan media telaga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Kelautan dan Perikanan
4.7.3.2	Tawes	Banyaknya hasil panen tawes dengan media telaga di wilayah DIY.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.7.3.3	Nila	Banyaknya hasil panen nila dengan media telaga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.7.3.4	Gurami	Banyaknya hasil panen gurami dengan media telaga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.7.3.5	Lele	Banyaknya hasil panen lele dengan media telaga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.7.3.6	Bawal Tawar	Banyaknya hasil panen bawal tawar dengan media telaga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.7.3.7	Ikan Lainnya	Banyaknya hasil panen ikan lainnya selain disebutkan diatas dengan media telaga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.8	Jaring Apung	Wadah pemeliharaan ikan/biota lain di perairan umum berbentuk kurungan dari jaring yang digantungkan pada sebuah rakit.			
4.8.1	Luas Lahan	Luas lahan jaring apung yang digunakan untuk budidaya perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.8.2	Nilai Produksi	Jumlah nilai hasil budidaya ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan berupa jaring apung yang diusahakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.8.3	Jumlah Produksi	Hasil budidaya ikan yang dipanen dari tempat pemeliharaan berupa jaring apung yang diusahakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.8.3.1	Ikan Mas	Banyaknya hasil panen ikan mas dengan media jaring apung di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.8.3.2	Tawes	Banyaknya hasil panen tawes dengan media jaring apung di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.8.3.3	Nila	Banyaknya hasil panen nila dengan media jaring apung	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			dan Perikanan
4.8.3.4	Gurami	Banyaknya hasil panen gurami dengan media jaring apung di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.8.3.5	Lele	Banyaknya hasil panen lele dengan media jaring apung di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.8.3.6	Bawal Tawar	Banyaknya hasil panen bawal tawar dengan media jaring apung di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.8.3.7	Ikan Lainnya	Banyaknya hasil panen ikan lainnya selain disebutkan diatas dengan media jaring apung di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.9	Jumlah Produksi Ikan Perikanan Darat	Jumlah hasil panen perikanan yang dibudidayakan di darat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Balai Benih Ikan	Sarana pemerintah untuk menghasilkan benih ikan dan untuk membina usaha pembenihan ikan rakyat.			
5.1	Jumlah Balai Benih Ikan (BBI)	Jumlah total Balai Benih Ikan (BBI) di seluruh di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	Unit usaha dari kelompok pembudidaya ikan yang telah memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam memproduksi benih ikan secara mandiri.			
6.1	Jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	Jumlah total unit pembenihan rakyat (UPR) di Seluruh di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Target Daerah Produksi Ikan	Produksi ikan yang ditargetkan di wilayah DIY.			
7.1	Perikanan Tangkap	Hasil panen perikanan tangkap yang ditargetkan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
7.2	Perikanan Budidaya	Hasil panen perikanan budidaya yang ditargetkan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
8	Target Konsumsi Ikan	Target Konsumsi Ikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg/Kap/Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan
9	Kelompok Sumber Daya Sosial	Kelompok sumber daya sosial di wilayah DIY.			Dinas Kelautan dan Perikanan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
9.1	Kelompok Nelayan (KUB)	Banyaknya KUB nelayan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah badan usaha yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.	Tahunan	Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
9.2	Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan Pemerintah	Banyaknya Kelompok Usaha Bersama Nelayan yang mendapat bantuan pemerintah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
9.3	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	Banyaknya kelompok pembudidaya ikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.	Tahunan	Kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
9.4	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Mendapat Bantuan Pemerintah	Banyaknya Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat bantuan pemerintah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
9.5	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar (Polahkasar) Hasil Perikanan	Kelompok pengolah dan pemasar (polahksar) adalah kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bersama dalam wadah kelompok. Banyaknya kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
9.6	Jumlah kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Polahkasar) yang Mendapat Bantuan Pemerintah	Banyaknya kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang mendapat bantuan pemerintah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
9.7	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmawas) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Banyaknya kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	kelompok	Dinas Kelautan dan Perikanan
10	Pendaratan Ikan	Tempat pendaratan ikan setelah penangkapan dari laut.			
10.1	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Banyaknya tempat pelelangan ikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
10.2	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Banyaknya pangkalan pendaratan ikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
10.3	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	Banyaknya pelabuhan perikanan pantai di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan
11	Tindak Pindana Perikanan	Suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal.			
11.1	Jumlah Kasus Pencurian Ikan	Banyaknya kasus pencurian ikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Dinas Kelautan dan Perikanan
11.2	Jumlah Kapal Pencuri Ikan yang Disita	Banyaknya Kasus kapal pencuri ikan yang disita di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Dinas Kelautan dan Perikanan
11.3	Jumlah Lokasi Pencurian Ikan	Banyaknya lokasi yang menjadi tempat kejadian pencurian ikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lokasi	Dinas Kelautan dan Perikanan
11.4	Jumlah Kasus Pencurian Pasir Putih	Banyaknya kasus pencurian pasir putih di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Dinas Kelautan dan Perikanan
11.5	Jumlah Lokasi Pencurian Pasir Putih	Banyaknya lokasi pencuri pasir putih yang disita di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lokasi	Dinas Kelautan dan Perikanan
11.6	Jumlah Kasus Pencurian Terumbu Karang	Banyaknya kasus pencurian terumbu karang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Dinas Kelautan dan Perikanan
11.7	Jumlah Lokasi Pencurian Terumbu Karang	Banyaknya lokasi pencurian terumbu karang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lokasi	Dinas Kelautan dan Perikanan
11.8	Persentase Penurunan Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan	Tahunan	%	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		dibandingkan dengan tahun n-1.			
12	Tingkat Ketersediaan Ikan	Tingkat ketersediaan ikan di wilayah DIY.			
12.1	Tingkat Ketersediaan Ikan	Capaian tingkat ketersediaan ikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg/kap	Dinas Kelautan dan Perikanan
12.2	Nilai Hasil Penangkapan ikan yang Masuk Melalui Pelabuhan/Tempat Pelelangan Ikan	Nilai hasil penangkapan ikan yang masuk melalui pelabuhan/tempat pelelangan ikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Tingkat Konsumsi Ikan	Tingkat konsumsi ikan masyarakat DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kg/kap	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Penyuluh Perikanan	Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk penyuluhan perikanan.			
14.1	Penyuluh Perikanan PNS	Banyaknya Penyuluh Perikanan yang berstatus PNS di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.2	Penyuluh Perikanan Kontrak	Banyaknya Penyuluh Perikanan yang berstatus kontrak di wilayah DIY.	Tahunan	Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
14.3	Penyuluh Perikanan Swadaya	Jumlah penyuluh perikanan swadaya di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Petani perikanan yang berhasil dan mau melakukan penyuluhan kepada petani lain bersinergi dengan penyuluh pegawai negeri sipil.	Tahunan	Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
15	Data Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
15.1	Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap	Banyaknya hasil panen dari Usaha Perikanan Budidaya dan Tangkap di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
15.2	NTP Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	Persentase Nilai Tukar Petani Sektor Kelautan dan Perikanan di DIY yang mengalami peningkatan pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kelautan dan Perikanan
15.3	Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan Tangkap dan Budidaya	Penambahan Jumlah Dokumen Perijinan Tangkap dan Budidaya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan
15.4	Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan Masyarakat Pesisir Atas Mitigasi Bencana dan Prakiraan Iklim	Penambahan Pemahaman dan Keterampilan Masyarakat Pesisir Atas Mitigasi Bencana dan Prakiraan Iklim di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan
15.5	Nilai Subsektor Perikanan	Banyaknya Nilai Subsektor	Tahunan	Rp	Dinas

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	dalam PDRB DIY Tahunan	Perikanan dalam PDRB DIY pada tahun berkenaan.			Kelautan dan Perikanan
15.6	Persentase Peningkatan Status Pertahanan Kawasan Konservasi	Persentase Peningkatan Status Pertahanan Kawasan Konservasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Kelautan dan Perikanan
15.7	Produksi Garam	Banyaknya hasil panen garam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan
15.8	Operasi Kapal Pengawas	Banyaknya operasi kapal pengawas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Hari	Dinas Kelautan dan Perikanan



2.06 PERDAGANGAN



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Sarana Perdagangan	Sarana Perdagangan adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Gudang Non Sistem Resi Gudang, dan Pusat Distribusi untuk mendukung kelancaran Distribusi arus barang.			
1.1.	Pasar Tradisional/Pasar Rakyat	Banyaknya pasar tradisional di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Pasar tradisional merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.	Tahunan	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.1.1.	Pasar Kabupaten/Negeri	Banyaknya pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.1.2	Pasar Desa	Banyaknya pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.2	Toko Modern	Banyaknya toko modern di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Toko modern adalah "toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan".	Tahunan	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Tanda Daftar Perusahaan	Banyaknya perusahaan yang terdaftar di wilayah Provinsi.			
2.1	PT	Jumlah PT (Perseroan terbatas) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.	Tahunan	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.2	Koperasi	Jumlah Koperasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama.	Tahunan	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.			
2.3	CV	Jumlah CV (Persekutuan Komanditer) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Persekutuan komanditer adalah suatu bentuk badan usaha berupa persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dimana sebagian para anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan sebagian anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas.	Tahunan	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.4	FA	Jumlah dari bentuk perusahaan Firma di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Firma adalah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama.	Tahunan	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.5	PO	Jumlah dari bentuk perusahaan perseorangan tersebut di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.6	Bentuk Lainnya	Jumlah bentuk lainnya dari perusahaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	UKM Berdasar SIUP	Jumlah UKM yang terdaftar di provinsi selama tahun berkenaan.			
3.1	Pengusaha Besar	Jumlah SIUP yang diterbitkan untuk pengusaha besar yaitu pelaku usaha yang merupakan badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.2	Pengusaha Menengah	Jumlah SIUP yang diterbitkan untuk pengusaha menengah di DIY di mana pengusaha menengah adalah pelaku usaha yang bukan merupakan anak	Tahunan	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar/jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).			
3.3	Pengusaha Kecil	Jumlah SIUP yang diterbitkan untuk pengusaha kecil di DIY. Pengusaha kecil adalah pelaku usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar. Kriteria Usaha Kecil sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua	Tahunan	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		milyar lima ratus juta rupiah).			
3.4	Pengusaha Mikro	Jumlah SIUP yang diterbitkan untuk pengusaha mikro di DIY pada tahun berkenaan. Pengusaha mikro adalah pelaku usaha produktif perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Tahunan	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Realisasi Ekspor-Impor				
4.1	Ekspor	Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari Indonesia ke negara lain.			
4.1.1	Volume Ekspor	Berat dari semua barang dari DIY yang dikirim dan atau dijual keluar dari batas negara Republik Indonesia.			
4.1.1.1	Berdasarkan Komoditi	Berat suatu kelompok barang dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.1	Pakaian Jadi Tekstil	Berat suatu kelompok barang Pakaian Jadi Tekstil dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.2	Mebel Kayu	Berat kelompok barang Mebel Kayu dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.3	Sarung Tangan Kulit	Berat kelompok barang sarung tangan kulit dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.4	STK Sintetis	Berat kelompok barang STK Sintesis dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.5	Kerajinan Kulit	Berat kelompok barang Kerajinan kulit dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.6	Minyak Kenanga	Berat kelompok barang minyak kenanga dari DIY yang dijual keluar melalui	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		batas negara Republik Indonesia.			Perdagangan
4.1.1.1.7	Kerajinan Kayu	Berat kelompok barang kerajinan kayu dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.8	Kerajinan Kertas	Berat kelompok barang kerajinan kertas dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.9	Kerajinan Batu	Berat kelompok barang kerajinan batu dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.10	Papan Kemas	Berat kelompok barang papan kemas dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.11	Atsiri Daun Cengkeh	Berat kelompok barang atsiri daun cengkeh dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.12	Teh Hijau/Hitam	Berat kelompok barang teh hijau/hitam dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.13	Kerajinan Perak	Berat kelompok barang kerajinan perak dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.14	Produk Tekstil Lainnya	Berat kelompok barang produk tekstil lainnya dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.15	Kerajinan Bambu	Berat kelompok barang kerajinan bambu dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.16	Kulit Disamak	Berat kelompok barang kulit disamak dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.17	Arang Briket	Berat kelompok barang arang briket dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.18	Kerajinan Tanah Liat	Berat kelompok barang kerajinan tanah liat dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.19	Lampu	Berat kelompok barang lampu dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.20	STK Kombinasi Poliurethan	Berat kelompok barang STK	Tahunan	Juta Kg	Dinas

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Kombinasi Poliurethan dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.			Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.1.21	Komoditi Lainnya	Berat kelompok barang komoditi lainnya dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.1.122	Kerajinan Kain	Berat kelompok barang kerajinan kain dari DIY yang dijual keluar melalui batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2	Negara Tujuan	Berat semua barang dari DIY yang dijual keluar batas negara Republik Indonesia berdasarkan negara tujuan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.1	Amerika Serikat	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Amerika Serikat pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.2	Jerman	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Jerman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.3	Jepang	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Jepang pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.4	Italia	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Italia pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.5	Korea Selatan	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Korea Selatan pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.6	Belanda	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Belanda pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.7	Australia	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Australia pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.8	Perancis	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Perancis pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.9	Inggris	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Inggris pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.10	China	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara China pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.11	Belgia	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Belgia pada	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		tahun berkenaan.			Perdagangan
4.1.2.12	Turki	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Turki pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.13	Kanada	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Kanada pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.14	Spanyol	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Spanyol pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.15	India	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara India pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.16	Uni Emirat Arab	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Uni Emirat Arab pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.17	Thailand	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Thailand pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.18	Malaysia	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Malaysia pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.19	Iran	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Iran pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.20	Portugal	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Portugal pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.21	Negara Tujuan Lainnya	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara tujuan lainnya selain disebutkan di atas.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.2.22	Libanon	Berat semua barang atau komoditas yang dijual dari DIY ke negara Libanon pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.3	Pelabuhan Ekspor	Banyaknya barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara lain berdasarkan keberangkatan pelabuhan ekspor.			
4.1.3.1	Tanjung Emas	Berat semua barang dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Emas.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.3.2	Tanjung Priok	Berat semua barang dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.3.3	Sukarno Hatta	Berat semua barang dari DIY	Tahunan	Juta Kg	Dinas



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia melalui Bandara Sukarno Hatta.			Perindustrian dan Perdagangan
4.1.3.4	Tanjung Perak	Berat semua barang dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Perak.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.3.5	Adisutjipto	Berat semua barang dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia melalui Bandara Adisutjipto.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.3.6	Juanda	Berat semua barang dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia melalui Bandara Juanda.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.3.7	Halim Perdana Kusuma	Berat semua barang dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia melalui Bandara Halim Perdana Kusuma.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.3.8	Ngurah Rai	Berat semua barang dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.3.9	Pelabuhan Ekspor Lainnya	Berat semua barang dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia melalui Pelabuhan Ekspor Lainnya.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2	Volume Ekspor	Volume penjualan dari DIY ke luar batas negara Republik Indonesia.			
4.2.1	Berdasarkan Komoditi	Nilai kelompok barang atau komoditas dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.			
4.2.1.1	Pakaian Jadi Tekstil	Nilai kelompok barang Pakaian Jadi Tekstil dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.2	Mebel Kayu	Nilai kelompok barang mebel kayu dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.3	Sarung Tangan Kulit	Nilai kelompok barang sarung tangan kulit dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.4	STK Sintetis	Nilai kelompok barang sarung tangan kulit dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.5	Kerajinan Kulit	Nilai kelompok barang kerajinan kulit dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.6	Minyak Kenanga	Nilai kelompok barang minyak kenanga dari DIY	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.			dan Perdagangan
4.2.1.7	Kerajinan Kayu	Nilai kelompok barang kerajinan kayu dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.8	Kerajinan Kertas	Nilai kelompok barang kerajinan kertas dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.9	Kerajinan Batu	Nilai kelompok barang kerajinan batu dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.10	Papan Kemas	Nilai kelompok barang papan kemas dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.11	Atsiri Daun Cengkeh	Nilai kelompok barang atsiri daun cengkeh dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.12	Teh Hijau/Hitam	Nilai kelompok barang teh hijau/hitam dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.13	Kerajinan Perak	Nilai kelompok barang kerajinan perak dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.14	Produk Tekstil Lainnya	Nilai kelompok barang produksi tekstil dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.15	Kerajinan Bambu	Nilai kelompok barang kerajinan bambu dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.16	Kulit Disamak	Nilai kelompok barang kulit disamak dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.17	Arang Briket	Nilai kelompok barang arang briket dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.18	Kerajinan Tanah Liat	Nilai kelompok barang kerajinan tanah liat dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.19	Lampu	Nilai kelompok barang lampu dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.20	STK Kombinasi Puliurethan	Nilai kelompok barang sarung tangan kulit kombinasi poliuretan dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.21	Kerajinan Kain	Nilai kelompok barang kerajinan kain dari DIY yang	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.			dan Perdagangan
4.2.1.22	Komoditi Lainnya	Nilai kelompok barang komoditi lainnya dari DIY yang dijual ke luar batas negara Republik Indonesia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2	Negara Tujuan	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari suatu negara ke negara lain berdasarkan negara yang dituju.			
4.2.2.1	Amerika Serikat	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Amerika Serikat.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.2	Jerman	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Jerman.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.3	Jepang	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Jepang.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.4	Italia	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Italia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.5	Korea Selatan	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Korea Selatan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.6	Belanda	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Belanda.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.7	Australia	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Australia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.8	Perancis	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Perancis.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.9	Inggris	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Inggris.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.10	China	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara China.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.11	Belgia	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Belgia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.12	Turki	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Turki.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.13	Kanada	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		DIY ke negara Kanada.			dan Perdagangan
4.2.2.14	Spanyol	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Spanyol.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.15	India	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara India.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.16	Uni Emirat Arab	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Uni Emirat Arab.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.17	Thailand	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Thailand.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.18	Malaysia	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Malaysia.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.19	Iran	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Iran.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.20	Portugal	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Portugal.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.21	Negara Tujuan Lainnya	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara tujuan lainnya.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.2.22	Libanon	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara Libanon.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.3	Pelabuhan Ekspor	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara lain melalui pelabuhan atau bandara ekspor.	Tahunan		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.3.1	Tanjung Emas	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara lain melalui Pelabuhan Tanjung Emas.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.3.2	Tanjung Priok	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara lain melalui Pelabuhan Tanjung Priok.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.3.3	Sukarno Hatta	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara lain melalui Bandara Sukarno Hatta.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.3.4	Tanjung Perak	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara lain melalui Bandara Perak.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.3.5	Adisutjipto	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		DIY ke negara lain melalui Bandara Adisutjipto.			dan Perdagangan
4.2.3.6	Juanda	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara lain melalui Bandara Juanda.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.3.7	Halim Perdana Kusuma	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara lain melalui Bandara Halim Perdana Kusuma.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.3.8	Ngurah Rai	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara lain melalui Bandara Ngurah Rai.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.3.9	Pelabuhan Ekspor Lainnya	Nilai barang atau komoditas yang dijual dan kirim dari DIY ke negara lain melalui pelabuhan atau bandara ekspor lainnya.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2	Eksportir	Jumlah perusahaan di wilayah DIY yang melakukan kegiatan usaha penjualan komoditi dari dalam negeri ke negara lain di tahun berkenaan.	Tahunan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2	Impor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara Indonesia secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.	Tahunan		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1	Volume Impor	Berat semua barang hasil pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY.			
4.2.1.1	Berdasarkan Komoditi	Berat suatu kelompok barang hasil pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.1.1	Tekstil	Berat kelompok barang tekstil hasil pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.1.2	Bahan Baku Susu	Berat kelompok barang bahan baku susu hasil pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.1.3	Kulit Disamak	Berat kelompok barang kulit disamak hasil pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.1.4	Mesin Pertanian	Berat kelompok barang mesin pertanian hasil pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2.1.1.5	Kapas	Berat kelompok barang	Tahunan	Juta Kg	Dinas



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		kapas hasil pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.			Perindustrian dan Perdagangan
4. 2.1.1.6	Label	Berat kelompok barang label hasil pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. 2.1.1.7	Plastik	Berat kelompok barang plastik hasil pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. 2.1.1.8	Aksesories	Berat kelompok barang aksesoris hasil pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. 2.1.1.9	Bahan Pembantu Penyamak Kulit	Berat kelompok barang bahan pembantu penyamak kulit hasil pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. 2.1.1.10	Logo	Berat kelompok barang logo hasil pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. 2.1.1.11	Berdasarkan Komoditi Lainnya	Berat kelompok barang berdasarkan komoditi lainnya hasil pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. 2.1.1.12	Mesin Fotocopy	Berat kelompok barang mesin fotocopy hasil pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. 2.1.1.13	Spareparts Mesin Pertanian	Berat kelompok barang spareparts mesin pertanian hasil pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. 2.1.1.14	Kertas	Berat kelompok barang kertas hasil pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.2	Negara Asal	Berat semua barang pembelian secara legal dari suatu negara yang masuk ke DIY berdasarkan negara asal.			
4.3.2.1	China	Berat semua hasil pembelian secara legal dari negara China yang masuk ke DIY pada tahun	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			
4.3.2.2	Korea Selatan	Berat semua hasil pembelian secara legal dari negara Korea Selatan yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.2.3	New Zealand	Berat semua hasil pembelian secara legal dari negara New Zealand yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.2.4	Hongkong	Berat semua hasil pembelian secara legal dari negara Hongkong yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.2.5	Taiwan	Berat semua hasil pembelian secara legal dari negara Taiwanyang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.2.6	Amerika Serikat	Berat semua hasil pembelian secara legal dari negara Amerika Serikat yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.2.7	Jepang	Berat semua hasil pembelian secara legal dari negara Jepang yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.2.8	Malaysia	Berat semua hasil pembelian secara legal dari negara Malaysia yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.2.9	Singapura	Berat semua hasil pembelian secara legal dari negara Singapura yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.2.10	Italia	Berat semua hasil pembelian secara legal dari negara Italia yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.2.11	Australia	Berat semua hasil pembelian secara legal dari negara Australia yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.2.172	Negara Asal Lainnya	Berat semua hasil pembelian secara legal dari negara asal lainnya yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.2.13	Vietnam	Berat semua hasil pembelian secara legal dari negara Vietnam yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.2.14	Thailand	Berat semua hasil	Tahunan	Juta Kg	Dinas

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pembelian secara legal dari negara Thailand yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.			Perindustrian dan Perdagangan
4.3.2.15	Jerman	Berat semua hasil pembelian secara legal dari negara Jerman yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.2.16	Belanda	Berat semua hasil pembelian secara legal dari negara Belanda yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.2.17	Srilangka	Berat semua hasil pembelian secara legal dari negara Srilangka yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta Kg	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.3	Nilai Impor	nilai barang atau komoditas hasil pembelian secara legal dari negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.			
4.3.3.1	Berdasarkan Komoditi	Nilai suatu kelompok barang atau komoditas hasil pembelian secara legal dari negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.			
4.3.3.1	Tekstil	Nilai kelompok barang tekstil hasil pembelian secara legal dari negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.3.2	Bahan Baku Susu	Nilai kelompok barang bahan baku susu hasil pembelian secara legal dari negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.3.3	Kulit Disamak	Nilai kelompok barang kulit disamak hasil pembelian secara legal dari negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.3.4	Mesin Pertanian	Nilai kelompok barang tekstil hasil pembelian secara legal dari negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.3.5	Kapas	Nilai kelompok barang kapas hasil pembelian secara legal dari negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.3.6	Label	Nilai kelompok barang label hasil pembelian secara legal dari negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.3.7	Plastik	Nilai kelompok barang plastik hasil pembelian	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		secara legal dari negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.			dan Perdagangan
4.3.3.8	Aksesories	Nilai kelompok barang aksesoris hasil pembelian secara legal dari negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.3.9	Bahan Pembantu Penyamak Kulit	Nilai kelompok barang bahan pembantu penyamak kulit hasil pembelian secara legal dari negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.3.10	Logo	Nilai kelompok barang logo hasil pembelian secara legal dari negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.3.11	Mesin Fotocopy	Nilai kelompok barang mesin fotocopy hasil pembelian secara legal dari negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.3.12	Berdasarkan Komoditi Lainnya	Nilai kelompok barang berdasarkan komoditi lainnya hasil pembelian secara legal dari negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.3.13	Spareparts Mesin Pertanian	Nilai kelompok barang spareparts mesin pertanian hasil pembelian secara legal dari negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.3.14	Kertas	Nilai kelompok barang kertas hasil pembelian secara legal dari negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4	Negara Asal	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari suatu negara lain yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4.1	China	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari negara China yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4.2	Korea Selatan	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari negara Korea Selatan yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4.3	New Zealand	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari negara New Zealand yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
4.3.4.4	Hongkong	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari negara Hongkong yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4.5	Taiwan	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari negara Taiwan yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4.6	Amerika Serikat	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari negara Amerika Serikat yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	JutaUS\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4.7	Jepang	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari negara Jepang yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4.8	Malaysia	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari negara malaysia yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4.9	Singapura	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari negara Singapura yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4.10	Italia	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari negara Italia yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4.11	Australia	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari negara Australia yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4.12	Negara Asal Lainnya	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari negara negara asal lainnya yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4.13	Vietnam	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari negara Vietnam yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4.14	Thailand	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari negara Thailand yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4.14	Jerman	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari negara Jerman yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4.15	Belanda	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		negara Belanda yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.			dan Perdagangan
4.3.4.17	Srilangka	Nilai semua barang hasil pembelian secara legal dari negara Srilangka yang masuk ke DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Juta US\$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.3.4	Importir	Jumlah badan usaha di wilayah DIY yang melakukan kegiatan usaha mendatangkan barang dari luar negara Republik Indonesia pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.4	Persentase Rasio Ekspor terhadap Impor	Persentase perbandingan nilai ekspor terhadap nilai impor di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.5	Persentase Peningkatan atau Penurunan Nilai Ekspor	Perbandingan antara peningkatan atau penurunan dari segi nilai ekspor yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



2.07 INDUSTRI



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Potensi Industri	Potensi industri merupakan kemampuan dalam usaha atau kegiatan pengolahan barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah.			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.1	Jumlah IKM	Banyaknya Industri Kecil Menengah (IKM) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Industri kecil merupakan industri yang memperkerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari 1 milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri menengah merupakan industri yang memperkerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit 1 milyar rupiah atau memperkerjakan paling sedikit 20 orang dan memiliki nilai investasi paling banyak lima belas milyar rupiah.	Tahunan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.1.1	Cabang Industri	Banyaknya industri kecil menengah yang ada di wilayah DIY berdasarkan komoditas cabang industri.			
1.1.1.1	Pangan	Banyaknya industri kecil menengah pada kelompok komoditas produk Pangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.1.1.2	Sandang dan Kulit	Banyaknya industri kecil menengah pada kelompok komoditas kerajinan Sandang dan Kulit di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.1.1.3	Kimia dan Bahan Bangunan	Banyaknya industri kecil menengah pada kelompok komoditas produk Kimia dan Bahan Bangunan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.1.1.4	Logam dan Elektronika	Banyaknya industri kecil	Tahunan	Unit Usaha	Dinas



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		menengah pada kelompok komoditas kerajinan Logam dan Elektronika di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Perindustrian dan Perdagangan
1.1.1.5	Kerajinan	Banyaknya industri kecil menengah pada kelompok komoditas produk Kerajinan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.1.2	Menurut Kabupaten/Kota	Banyaknya industri kecil menengah menurut Kabupaten/Kota.			
1.1.2.1	Kota Yogyakarta	Banyaknya industri kecil menengah yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.1.2.2	Kabupaten Bantul	Banyaknya industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.1.2.3	Kabupaten Kulon Progo	Banyaknya industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.1.2.4	Kabupaten Sleman	Banyaknya industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.1.2.5	Kabupaten Gunungkidul	Banyaknya industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit Usaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.2	Penyerapan Tenaga Kerja	Banyaknya tenaga kerja dari Industri kecil menengah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.3	Nilai Investasi	Total nilai investasi dari industri kecil menengah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Nilai investasi adalah nilai tanah, bangunan, mesin peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri.	Tahunan	Rp/Ribu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.4	Nilai Produksi	Total nilai produksi yang dihasilkan dari industri kecil menengah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp/Ribu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.5	Nilai Bahan Baku/Bahan Penolong IKM	Total nilai bahan baku/ bahan penolong dari industri kecil menengah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp/Ribu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.6	Banyaknya Unit Usaha	Banyaknya unit usaha yang masuk kategori industri kecil menengah di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.7	Proporsi Nilai Tambah Industri Kecil Menengah terhadap Total Nilai Tambah	Tingkat pertambahan nilai industri kecil menengah di wilayah DIY terhadap	Tahunan	%	Dinas Perindustrian dan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Industri	seluruh industri pada tahun berkenaan.			Perdagangan
2	Data Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Hasil kerja yang telah dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah Provinsi DIY.			
2.1	Nilai Sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB DIY	Nilai sektor perdagangan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY pada tahun berkenaan (atas dasar harga konstan).	Tahun	Juta Rupiah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.2	Nilai Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB DIY	Nilai sektor industri pengolahan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY pada tahun berkenaan (atas dasar harga konstan).	Tahun	Juta Rupiah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.3	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen di DIY pada tahun berkenaan. Persentase pengaduan terkait perdagangan dan perindustrian di wilayah DIY yang telah ditangani pada tahun berkenaan.	Tahun	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.4	Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



2.08 KETRANSMIGRASIAN



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Transmigrasi	Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia.	Tahunan		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.1	Jumlah Transmigrasi	Banyaknya Keluarga dari wilayah DIY yang mengikuti program transmigrasi pada tahun berkenaan.	Tahunan	KK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.2	Jumlah Transmigrasi (Jiwa)	Banyaknya orang dari wilayah DIY yang mengikuti program transmigrasi pada tahun berkenaan.	Tahunan	Jiwa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



3.01 KEISTIMEWAAN

No	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Alokasi Besaran Anggaran Keistimewaan per Urusan				
1.1	Total Pagu Dana Keistimewaan	Banyaknya pagu dana keistimewaan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Paniradya Kaistimewaan
1.1.1	Pengisian Jabatan	Banyaknya pagu dana keistimewaan yang terserap untuk urusan pengisian jabatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Paniradya Kaistimewaan
1.1.2	Kelembagaan	Banyaknya pagu dana keistimewaan yang terserap untuk urusan kelembagaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Paniradya Kaistimewaan
1.1.3	Kebudayaan	Banyaknya pagu dana keistimewaan yang terserap untuk urusan kebudayaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Paniradya Kaistimewaan
1.1.4	Pertanahan	Banyaknya pagu dana keistimewaan yang terserap untuk urusan pertanahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Paniradya Kaistimewaan
1.1.5	Tata Ruang	Banyaknya pagu dana keistimewaan yang terserap untuk urusan tata ruang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Paniradya Kaistimewaan
2	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	Persentase capaian program urusan Keistimewaan terhadap jumlah program keistimewaan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Paniradya Kaistimewaan
3	Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perdais Kelembagaan	Persentase terwujudnya pelaksanaan urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan terhadap jumlah urusan kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Paniradya Kaistimewaan



9.01 DATA VERTIKAL KANWIL KEMENAG

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Sekolah/Perguruan Agama	Jumlah sekolah yang memberi pendidikan dalam hal keagamaan di wilayah DIY pada tahun yang berkenaan.	Triwulan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.1	Jumlah Madrasah Ibtidayah (MI)	Jumlah sekolah keagamaan jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.1.1	Jumlah Madrasah Ibtidayah Negeri	Jumlah Madrasah Ibtidayah Negeri yang merupakan sekolah keagamaan jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama RI di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.1.1.1	Layak	Jumlah Madrasah Ibtidayah Negeri yang merupakan sekolah keagamaan jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama serta dalam kondisi memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan nasional di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.1.1.2	Tidak Layak	Jumlah Madrasah Ibtidayah Negeri yang merupakan sekolah keagamaan jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama serta dalam kondisi yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan nasional di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.1.2	Jumlah Madrasah Ibtidayah Swasta	Jumlah Madrasah Ibtidayah Negeri yang merupakan sekolah keagamaan jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh lembaga/yayasan swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.1.2.1	Layak	Jumlah Madrasah Ibtidayah Negeri yang merupakan sekolah keagamaan jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang dimiliki dan atau dikelola oleh lembaga/yayasan	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		swasta serta dalam kondisi telah memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan nasional di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
1.1.2.2	Tidak Layak	Jumlah Madrasah Ibtidayah Negeri yang merupakan sekolah keagamaan jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang dimiliki dan atau dikelola oleh lembaga/yayasan swasta serta dalam kondisi yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan nasional di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.2	Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang merupakan sekolah keagamaan jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.2.1	Jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri	Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang merupakan sekolah keagamaan jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 yang pengelolaannya di bawah Kementrian Agama RI di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.2.1.1	Layak	Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang merupakan sekolah keagamaan jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 yang pengelolaannya di bawah Kementrian Agama RI serta dalam kondisi telah memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan nasional di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.2.1.2	Tidak Layak	Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang merupakan sekolah keagamaan jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		kelas 9 yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama RI namun dalam kondisi belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan nasional di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
1.2.2	Jumlah Madrasah Tsanawiyah Swasta	Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang merupakan sekolah keagamaan jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 yang dimiliki dan atau dikelola oleh lembaga/yayasan swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.2.2.1	Layak	Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang merupakan sekolah keagamaan jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 yang dimiliki dan atau dikelola oleh lembaga/yayasan swasta serta dalam kondisi telah memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan nasional di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.2.2.2	Tidak Layak	Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang merupakan sekolah keagamaan jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 yang dimiliki dan atau dikelola oleh lembaga/yayasan swasta namun dalam kondisi belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan nasional di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.3	Jumlah Madrasah Aliyah (MA)	Jumlah Madrasah Aliyah (MA) yang merupakan sekolah keagamaan jenjang menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.3.1	Madrasah Aliyah Negeri	Jumlah Madrasah Aliyah (MA) yang merupakan sekolah keagamaan	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		jenjang menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama RI di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
1.3.1.1	Layak	Jumlah Madrasah Aliyah (MA) yang merupakan Sekolah keagamaan jenjang menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama RI serta dalam kondisi telah memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan nasional di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.3.1.2	Tidak Layak	Jumlah Madrasah Aliyah (MA) yang merupakan Sekolah keagamaan jenjang menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama RI namun dalam kondisi belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan nasional di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.3.2	Madrasah Aliyah Swasta	Jumlah Madrasah Aliyah (MA) yang merupakan Sekolah keagamaan jenjang menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 yang dimiliki dan atau dikelola oleh lembaga/yayasan swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
1.3.2.1	Layak	Jumlah Madrasah Aliyah (MA) yang merupakan sekolah keagamaan jenjang menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas. Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		sampai kelas 12 yang dimiliki dan atau dikelola oleh lembaga/yayasan swasta serta dalam kondisi telah memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan nasional di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
1.3.2.2	Tidak Layak	Jumlah Madrasah Aliyah (MA) yang merupakan sekolah keagamaan jenjang menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas, Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 yang dimiliki dan atau dikelola oleh lembaga/yayasan swasta namun dalam kondisi belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan nasional di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
2	Jumlah Siswa Perguruan Agama/Madrasah	Jumlah anak yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal serta terdaftar sebagai siswa Madrasah pada berbagai jenjang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
2.1	Jumlah Siswa Madrasah Ibtidayah (MI)	Jumlah anak yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal serta terdaftar sebagai siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
2.1.1	Madrasah Ibtidayah Negeri	Jumlah anak yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal serta terdaftar sebagai siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang pengelolaannya di bawah Kementrian Agama RI di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
2.1.2	Madrasah Ibtidyah Swasta	Jumlah anak yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal serta terdaftar sebagai siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dimiliki dan atau dikelola oleh lembaga/yayasan swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
2.2	Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Jumlah anak yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		serta terdaftar sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
2.2.1	Madrasah Tsanawiyah Negeri	Jumlah anak yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal serta terdaftar sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama RI di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
2.2.2	Madrasah Tsanawiyah Swasta	Jumlah anak yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal serta terdaftar sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dimiliki dan atau dikelola oleh lembaga/yayasan swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
2.3	Jumlah Siswa Madrasah Aliyah (MA)	Jumlah anak yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal serta terdaftar sebagai siswa Madrasah Aliyah (MA) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
2.3.1	Madrasah Aliyah Negeri	Jumlah anak yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal serta terdaftar sebagai siswa Madrasah Aliyah (MA) yang pengelolaannya di bawah Kementerian Agama RI di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
2.3.2	Madrasah Aliyah Swasta	Jumlah anak yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal serta terdaftar sebagai siswa Madrasah Aliyah (MA) yang dimiliki dan atau dikelola oleh lembaga/yayasan swasta di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
3	Jumlah Guru/Dosen Perguruan Agama	Jumlah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Triwulan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
3.1	Jumlah Guru/Dosen Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Jumlah pendidik profesional jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		dan mengevaluasi peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
3.1.1	Madrasah Ibtidayah Negeri	Jumlah Pendidik profesional jenjang Madrasah Ibtidaiyah (Mi) Negeri dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
3.1.2	Madrasah Ibtidiah Swasta	Jumlah pendidik profesional jenjang Madrasah Ibtidaiyah (Mi) Swasta dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
3.2	Jumlah Guru/Dosen Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Jumlah pendidik profesional jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTS) dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
3.2.1	Madrasah Tsanawiyah Negeri	Jumlah pendidik profesional jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
3.2.2	Madrasah Tsanawiyah Swasta	Jumlah pendidik profesional jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTS) Swasta dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
3.3	Jumlah Guru/Dosen Madrasah Aliyah (MA)	Jumlah pendidik profesional jenjang Madrasah Aliyah (MA) dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
3.3.1	Madrasah Aliyah Negeri	Jumlah pendidik profesional jenjang Madrasah Aliyah (MA) Negeri dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
3.3.2	Madrasah Aliyah Swasta	Jumlah pendidik profesional jenjang Madrasah Aliyah (MA)	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Swasta dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
3.4	Jumlah Guru/Dosen Perguruan Tinggi Agama Kristen/Teologi	Jumlah pendidik profesional pada Perguruan Tinggi Agama Kristen/Theologia dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
3.5	Jumlah Guru/Dosen Perguruan Tinggi Agama Katolik/Teologi	Jumlah pendidik profesional pada Perguruan Tinggi Agama Katolik/Theologia dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
3.6	Jumlah Guru/Dosen Perguruan Tinggi Agama Budha	Jumlah pendidik profesional pada Perguruan Tinggi Agama Budha dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
3.7	Jumlah Guru/Dosen Perguruan Tinggi Agama Hindu	Jumlah pendidik profesional pada Perguruan Tinggi Agama Hindu dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
4	Jumlah Pemeluk Agama	Jumlah Pemeluk Agama (yakni setiap orang yang meyakini adanya kekuatan lebih dari dirinya dan sebangsanya (manusia)). Kekuatan supra-manusia itulah yang kemudian diyakini dan dipercayai sebagai Yang Maha Kuasa di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
4.1	Pemeluk Agama Islam	Jumlah Pemeluk Agama Islam (yaitu orang yang meyakini dan percaya bahwa Allah SWT merupakan Tuhan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
4.2	Pemeluk Agama Kristen	Jumlah Pemeluk Agama Kristen (yaitu orang yang meyakini dan percaya bahwa Yesus Kristus merupakan Tuhan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
4.3	Pemeluk Agama Katolik	Jumlah Pemeluk Agama Katolik (yaitu orang yang meyakini dan	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		percaya bahwa Yesus Kristus merupakan Tuhan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
4.4	Pemeluk Agama Hindu	Jumlah Pemeluk Agama Hindu (yaitu orang yang meyakini dan percaya bahwa Brahman Sang Hyang Widhi merupakan Tuhan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
4.5	Pemeluk Agama Budha	Jumlah Pemeluk Agama Budha (yaitu orang yang meyakini dan percaya bahwa Sang Hyang Adi Budha Gautama merupakan Tuhan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
4.6	Pemeluk Agama Konghucu	Jumlah Pemeluk Agama Konghucu (yaitu orang yang meyakini dan percaya bahwa Tiang Kong merupakan Tuhan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
5	Sarana Ibadah	JUMLAH SELURUH TEMPAT IBADAH (tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing) DI WILAYAH DIY PADA TAHUN BERKENAAN.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
5.1	Masjid (Islam)	Jumlah Masjid (rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
5.2	Langgar/Mushola (Islam)	Jumlah Langgar/Mushola (tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat salat dan mengaji bagi umat Islam) di wilayah kab./kota pada berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
5.3	Gereja (Kristen)	Jumlah Gereja (bangunan atau struktur yang tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi pertemuan dan atau peribadatan umat Kristen) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
5.4	Kapel (katolik)	Jumlah Kapel (bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk persekutuan dan ibadah bagi orang Katolik) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
5.5	Pura (Hindu)	Jumlah Pura (tempat ibadah bagi umat Hindu untuk melaksanakan segala macam bentuk upacara persembahyangan atau kegiatan keragaman menurut keyakinan dan kepercayaan agama Hindu) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
5.6	Vihara (Buddha)	Jumlah Vihara (tempat ibadah bagi umat Buddha untuk melaksanakan segala macam	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		bentuk upacara puja bakti atau kegiatan keragaman menurut keyakinan dan kepercayaan agama Buddha di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
5.7	Rumah Kebaktian (Kristen)	Jumlah Rumah Kebaktian (Tempat yang digunakan oleh umat Kristen untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
5.8	Paroki (Katolik)	Jumlah Paroki (yang merupakan sebuah komunitas kaum beriman yang dibentuk secara tetap dengan batas-batas kewilayahan tertentu dalam Keuskupan (Gereja Partikular)) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
5.9	Stasi (Katolik)	Jumlah Stasi (kewilayahan dalam Gereja Katolik) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
5.10	Sanggar (Hindu)	Jumlah Sanggar (yang merupakan tempat aktifitas ritual umat Hindu) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
5.11	Cetiya (Buddha)	Jumlah Cetiya (yaitu tempat yang digunakan oleh penganut agama Buddha Theravada untuk mengingat Buddha Gautama) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
5.12	Klentheng (Buddha)	Jumlah Klentheng (tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Budha di Indonesia pada umumnya) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
5.13	Pusdiklat (Buddha)	Jumlah Pusdiklat (Rumah Ibadah) bagi umat budha yang merupakan tempat untuk kegiatan ritual agama Buddha, kegiatan sosial, pendidikan keagamaan, serta tempat untuk melestarikan seni dan budaya Buddhis di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
5.14	Klentheng (Konghucu)	Jumlah Klentheng (tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa di Indonesia pada umumnya) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
6	Kuota Jemaah Haji	Jumlah kuota jemaah haji indonesia (jumlah jatah pemberangkatan (kuota) calon jemaah haji yang diberikan oleh arab saudi yang diberikan kepada suatu negara/wilayah) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
6.2	Pemberangkatan Jemaah Haji	Jumlah jemaah calon haji yang telah memenuhi syarat dan di berangkatkan untuk menunaikan ibadah haji di DIY pada tahun	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			
7	Jumlah KUA	Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
7.1	Total Jumlah KUA	Jumlah KUA (Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan). KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
7.2	KUA Rusak Berat	Jumlah KUA (Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan). KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam yang dalam kondisi tidak layak/rusak berat di wilayah kecamatan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
7.3	KUA Rusak Ringan	Jumlah KUA (Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan). KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam yang dalam kondisi kurang layak/rusak ringan di wilayah kecamatan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
8	Jumlah Penyuluh Agama	Jumlah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
8.1	Penyuluh Agama PNS	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Kemenag yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
8.1.1	Islam	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Kanwil Kemenag yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama Islam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			AGAMA
8.1.2	Katolik	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Kemenag yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama Katolik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
8.1.3	Kristen	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Kemenag yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama Kristen di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
8.1.4	Hindu	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Kemenag yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama Hindu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
8.1.5	Buddha	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Kemenag yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama Budha di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
8.1.6	Konghucu	Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Kemenag yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama Konghucu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
8.2	Penyuluh Agama Non PNS	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK-Non	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		PNS) pada Kanwil Kemenag RI yang diangkat, ditetapkan, dan diberi tugas, tanggung jawab, serta wewenang, dan yang bertanggung jawab secara penuh untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
8.2.1	Islam	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK-Non PNS) pada Kanwil Kemenag RI yang diangkat, ditetapkan, dan diberi tugas, tanggung jawab, serta wewenang, dan yang bertanggung jawab secara penuh untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Islam di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
8.2.2	Katolik	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK-Non PNS) pada Kanwil Kemenag RI yang diangkat, ditetapkan, dan diberi tugas, tanggung jawab, serta wewenang, dan yang bertanggung jawab secara penuh untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Katolik di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
8.2.3	Kristen	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPK-Non PNS) pada Kanwil Kemenag RI yang diangkat, ditetapkan dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang dan yang bertanggung jawab secara penuh untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kristen di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
8.2.4	Hindu	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK-Non PNS) pada Kanwil Kemenag RI yang diangkat, ditetapkan, dan	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		diberi tugas, tanggung jawab, serta wewenang, dan yang bertanggung jawab secara penuh untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Hindu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
8.2.5	Buddha	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK-Non PNS) pada Kanwil Kemenag RI yang diangkat, ditetapkan, dan diberi tugas, tanggung jawab, serta wewenang, dan yang bertanggung jawab secara penuh untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Buddha di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
8.2.6	Konghucu	Banyaknya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK-Non PNS) pada Kanwil Kemenag RI yang diangkat, ditetapkan, dan diberi tugas, tanggung jawab, serta wewenang, dan yang bertanggung jawab secara penuh untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan pada masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Konghucu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
9	Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan	Jumlah Lembaga Pendidikan Suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan bernuansa keagamaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan			
9.1	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA)	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak dini di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.1.1	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		sejak dini di wilayah Kab. Kulon Progo pada tahun berkenaan.			
9.1.2	Kabupaten Bantul	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak dini di wilayah Kab. Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.1.3	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak dini di wilayah Kab. Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.1.4	Kabupaten Sleman	Jumlah Taman Pendidikan Al-Qur'an yang merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak dini di wilayah Kab. Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.1.5	Kota Yogyakarta	Jumlah Taman Pendidikan Al-Qur'an yang merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak dini di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.2	Sekolah Minggu	Jumlah Sekolah Minggu (kegiatan ibadah anak-anak UMAT KRISTEN, KATHOLIK, HINDU, dan BUDHA, khususnya di Indonesia yang diadakan pada hari minggu dan biasanya diadakan di dalam rumah ibadah) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.2.1	Kristen	Jumlah Sekolah Minggu (kegiatan ibadah anak-anak UMAT KRISTEN, khususnya di Indonesia yang diadakan pada hari minggu dan biasanya diadakan di dalam rumah ibadah/gereja) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.2.2	Katholik	Jumlah Sekolah Minggu (kegiatan ibadah anak-anak UMAT Katholik, khususnya di Indonesia yang diadakan pada hari minggu dan biasanya diadakan di dalam rumah ibadah/gereja) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.2.3	Hindu	Jumlah Sekolah Minggu (kegiatan	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		ibadah anak-anak UMAT Hindu, khususnya DI Indonesia yang diadakan pada hari Minggu dan biasanya diadakan di dalam rumah ibadah: Pura atau Sanggar) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			AGAMA
9.2.4	Buddha	Jumlah Sekolah Minggu (kegiatan ibadah anak-anak UMAT Buddha, khususnya di Indonesia yang diadakan pada hari minggu dan biasanya diadakan di dalam rumah ibadah Vihara atau Cetya) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.3	Pondok Pesantren	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.3.1	Kapasitas Kurang dari 100 Santri	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas kurang dari 100 santri di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	KEMENTERIAN AGAMA
9.3.2	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas kurang dari 100 santri di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.3.2	Kabupaten Sleman	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas kurang dari 100 santri di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.3.2	Kabupaten Bantul	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas kurang dari 100 santri	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.			
9.3.2	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas kurang dari 100 santri di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.3.2	Kota Yogyakarta	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas kurang dari 100 santri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.3.3	Kapasitas Antara 100-500 Santri	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas antara 100-500 santri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	KEMENTERIAN AGAMA
	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas antara 100-500 di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
	Kabupaten Sleman	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas antara 100-500 di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
	Kabupaten Bantul	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas antara 100-500 di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		tahun berkenaan.			
	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas antara 100-500 di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
	Kota Yogyakarta	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas antara 100-500 santri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.3.5	Kapasitas Lebih dari 500 Santri	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas lebih dari 500 santri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	KEMENTERIAN AGAMA
9.3.6	Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas lebih dari 500 santri di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.3.7	Kabupaten Bantul	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas lebih dari 500 santri di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.3.7	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas lebih dari 500 santri di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
9.3.7	Kota Yogyakarta	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas lebih dari 500 santri di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.3.7	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Lembaga Pendidikan ISLAM Tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri dengan kapasitas lebih dari 500 santri di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Unit	KEMENTERIAN AGAMA
9.2	Jumlah Santri Pesantren	Jumlah Santri Pesantren yang merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren dari para pengajar atau kyai. Biasanya para santri ini tinggal di pondok atau asrama pesantren yang telah disediakan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
9.2.1	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah Santri Pesantren yang merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren dari para pengajar atau kyai. Biasanya para santri ini tinggal di pondok atau asrama pesantren yang telah disediakan di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
9.2.2	Kabupaten Bantul	Jumlah Santri Pesantren yang merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren dari para pengajar atau kyai. Biasanya para santri ini tinggal di pondok atau asrama pesantren yang telah disediakan di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
9.2.3	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah Santri Pesantren yang merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren dari para pengajar atau kyai. Biasanya para santri ini tinggal di pondok atau asrama pesantren yang telah disediakan di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA
9.2.4	Kabupaten Sleman	Jumlah Santri Pesantren yang merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		agama di pesantren dari para pengajar atau kyai. Biasanya para santri ini tinggal di pondok atau asrama pesantren yang telah disediakan di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.			
9.2.5	Kota Yogyakarta	Jumlah Santri Pesantren yang merupakan sebutan bagi para siswa yang belajar mendalami agama di pesantren dari para pengajar atau kyai. Biasanya para santri ini tinggal di pondok atau asrama pesantren yang telah disediakan di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	KEMENTERIAN AGAMA



9.03 DATA VERTIKAL BADAN PUSAT STATISTIK

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Penduduk				
1.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Tingkat pertambahan penduduk pertahun berdasarkan Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
1.1.1	Kabupaten Kulon Progo	Tingkat pertambahan penduduk pertahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
1.1.2	Kabupaten Bantul	Tingkat pertambahan penduduk pertahun di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
1.1.3	Kabupaten Gunungkidul	Tingkat pertambahan penduduk pertahun di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
1.1.4	Kabupaten Sleman	Tingkat pertambahan penduduk pertahun di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
1.1.5	Kota Yogyakarta	Tingkat pertambahan penduduk pertahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
1.2	Rasio Beban Ketergantungan (Dependency Ratio)	Perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
1.3	Kepadatan Penduduk	Kepadatan penduduk dibagi menjadi 3 jenis : a. Kepadatan Penduduk Kasar (Crude Population Density), yaitu menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. b. Kepadatan Fisiologis (Physiological Density), yang menyatakan banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah lahan yang ditanami (cultivable land). c. Kepadatan Agraris (Agriculture Density), menunjukkan banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi wilayah cultivable land. Ukuran ini menggambarkan intensitas pertanian dari petani terhadap lahan yang mencerminkan efisiensi teknologi pertanian dan intensitas tenaga kerja pertanian. Kepadatan penduduk kasar merupakan ukuran persebaran penduduk yang umum digunakan, karena selain data dan cara penghitungannya sederhana, ukuran ini sudah distandarisasi dengan luas wilayah.	Tahunan	Orang/Km ²	Badan Pusat Statistik

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1.3.1	Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota	Banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang/Km ²	Badan Pusat Statistik
1.3.1.1	Kabupaten Kulon Progo	Banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang/Km ²	Badan Pusat Statistik
1.3.1.2	Kabupaten Bantul	Banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang/Km ²	Badan Pusat Statistik
1.3.1.3	Kabupaten Gunungkidul	Banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang/Km ²	Badan Pusat Statistik
1.3.1.4	Kabupaten Sleman	Banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang/Km ²	Badan Pusat Statistik
1.3.1.5	Kota Yogyakarta	Banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang/Km ²	Badan Pusat Statistik
1.4	Jumlah Penduduk DIY	Semua orang yang berdomisili di wilayah DIY selama 6 bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.			
1.4.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	Banyaknya penduduk di DIY sesuai jenis kelamin pada dokumen KK/KTP yang dimiliki.	Tahunan	Orang	Badan Pusat Statistik
1.4.1.1	Laki-Laki	Banyaknya penduduk berjenis kelamin laki-laki pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Pusat Statistik
1.4.1.2	Perempuan	Banyaknya penduduk berjenis kelamin perempuan pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Pusat Statistik
1.4.2	Jumlah Penduduk Menurut Komposisi Usia	Banyaknya penduduk menurut komposisi usia pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Pusat Statistik
1.4.2.1	0-14 Tahun	Banyaknya penduduk menurut komposisi usia dari 0-14 tahun di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Pusat Statistik
1.4.2.2	14-64 Tahun	Banyaknya penduduk menurut komposisi usia dari usia 14-64 tahun keatas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Pusat Statistik
1.4.2.3	65 Tahun ke Atas	Banyaknya penduduk menurut komposisi usia 65 tahun ke atas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Pusat Statistik
1.4.3	Sex Ratio	Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin)	Tahunan	Poin	Badan Pusat



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita.			Statistik
1.4.4	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota	Semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota selama 6 bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.	Tahunan	Orang	Badan Pusat Statistik
1.4.4.1	Kabupaten Kulonprogo	Banyaknya penduduk menurut wilayah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Pusat Statistik
1.4.4.2	Kabupaten Bantul	Banyaknya penduduk menurut wilayah di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Pusat Statistik
1.4.4.3	Kabupaten Gunungkidul	Banyaknya penduduk menurut wilayah di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Pusat Statistik
1.4.4.4	Kabupaten Sleman	Banyaknya penduduk menurut wilayah di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Pusat Statistik
1.4.4.5	Kota Yogyakarta	Banyaknya penduduk menurut wilayah di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Pusat Statistik
1.5	Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometri.			
1.6	Rata-Rata Pertumbuhan per Tahun 2010-2020 (Proyeksi SP2010)	Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu 2010-2020. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar di DIY.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan, yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan, dan standard hidup layak			
2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY	Pencapaian hasil pembangunan dari Provinsi DIY dalam tiga dimensi dasar pembangunan, yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan, dan standard hidup layak di DIY	Tahunan	Angka	Badan Pusat Statistik

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pada tahun berkenaan.			
2.1.2	IPM Kabupaten Bantul	Pencapaian hasil pembangunan dari Kabupaten Bantul dalam tiga dimensi dasar pembangunan, yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan, dan standard hidup layak di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	Badan Pusat Statistik
2.1.3	IPM Kabupaten Sleman	Pencapaian hasil pembangunan dari Kabupaten Sleman dalam tiga dimensi dasar pembangunan, yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan, dan standard hidup layak di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	Badan Pusat Statistik
2.1.4	IPM Kabupaten Gunung Kidul	Pencapaian hasil pembangunan dari Kabupaten Gunungkidul dalam tiga dimensi dasar pembangunan, yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan, dan standard hidup layak di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	Badan Pusat Statistik
2.1.5	IPM Kabupaten Kulon Progo	Pencapaian hasil pembangunan dari Kabupaten Kulon Progo dalam tiga dimensi dasar pembangunan, yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan, dan standard hidup layak di Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	Badan Pusat Statistik
2.1.6	IPM Kota Yogyakarta	Pencapaian hasil pembangunan dari Kota Yogyakarta dalam tiga dimensi dasar pembangunan, yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan, dan standard hidup layak di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Angka	Badan Pusat Statistik
2.2	Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.			
2.2.1	Harapan Lama Sekolah DIY	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun ke atas di masa mendatang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik
2.2.1.1	Harapan Lama Sekolah Kulon Progo	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun ke atas di masa mendatang di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik
2.2.1.2	Harapan Lama Sekolah Bantul	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun ke atas di	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		masa mendatang di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.			
2.2.1.3	Harapan Lama Sekolah Gunungkidul	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun ke atas di masa mendatang di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik
2.2.1.4	Harapan Lama Sekolah Sleman	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun ke atas di masa mendatang di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik
2.2.1.5	Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun ke atas di masa mendatang di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik
2.3	Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.			
2.3.1	Rata-Rata Lama Sekolah DIY	Rata-rata lama sekolah di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik
2.3.1.1	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bantul	Rata-rata lama sekolah di Kab. Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik
2.3.1.2	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sleman	Rata-rata lama sekolah di Kab. Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik
2.3.1.3	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul	Rata-rata lama sekolah di Kab. Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik
2.3.1.4	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kulon Progo	Rata-rata lama sekolah di Kab. Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik
2.3.1.5	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta	Rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik
2.4	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.			
2.4.1	Angka Harapan Hidup DIY	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik
2.4.1.1	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bantul	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik
2.4.1.2	Angka Harapan Hidup Kabupaten Sleman	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
2.4.1.3	Angka Harapan Hidup Kabupaten Gunungkidul	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik
2.4.1.4	Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir di Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik
2.4.1.5	Angka Harapan Hidup Kota Yogyakarta	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Tahun	Badan Pusat Statistik
2.5	Total Pengeluaran per Kapita per Bulan	Total pengeluaran per kapita per bulan adalah total biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
2.5.1	Total Pengeluaran per Kapita Makanan per Bulan	Total pengeluaran per kapita makanan per bulan adalah total biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi makanan semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
2.5.2	Total Pengeluaran per Kapita Non Makanan per Bulan	Total pengeluaran per kapita non makanan per bulan adalah total biaya yang dikeluarkan bukan untuk konsumsi makanan semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
3	Kemiskinan	Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.			
3.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.			
3.1.1	Pedesaan	Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di wilayah pedesaan DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Indeks	Badan Pusat Statistik
3.1.2	Perkotaan	Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di wilayah perkotaan DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Indeks	Badan Pusat Statistik
3.2	Indeks Keparahan	Indeks Keparahan Kemiskinan			



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Kemiskinan (P2)	memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.			
3.2.1	Pedesaan	Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di wilayah pedesaan DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Indeks	Badan Pusat Statistik
3.2.2	Perkotaan	Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di wilayah perkotaan DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Indeks	Badan Pusat Statistik
3.3	Garis Kemiskinan DIY	Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah/Kap/ Bulan	Badan Pusat Statistik
3.3.1	Garis Kemiskinan Pedesaan	Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan untuk pedesaan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah/Kap/ Bulan	Badan Pusat Statistik
3.3.2	Garis Kemiskinan Perkotaan	Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan untuk perkotaan di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah/Kap/ Bulan	Badan Pusat Statistik
3.4	Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	Tahunan	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik
3.5	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota	Jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan			



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		makanan di Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan.			
3.5.1	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah/Kap/Bulan	Badan Pusat Statistik
3.5.2	Kabupaten Bantul	Jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah/Kap/Bulan	Badan Pusat Statistik
3.5.3	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah/Kap/Bulan	Badan Pusat Statistik
3.5.4	Kabupaten Sleman	Jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan di Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah/Kap/Bulan	Badan Pusat Statistik
3.5.5	Kota Yogyakarta	Jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan di Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah/Kap/Bulan	Badan Pusat Statistik
3.6	Jumlah Penduduk Miskin DIY Menurut Kota/Desa	Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan di wilayah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta menurut Kota/Desa pada tahun berkenaan.			
3.6.1	Kota	Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan di wilayah perkotaan pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik
3.6.2	Desa	Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan di wilayah perdesaan pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik
3.7	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah penduduk yang memiliki			



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	DIY Menurut Kabupaten/Kota	rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan di wilayah Kab./Kota pada tahun berkenaan.			
3.7.1	Kabupaten Bantul	Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan di wilayah Kab. Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik
3.7.2	Kabupaten Sleman	Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan di wilayah Kab. Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik
3.7.3	Kabupaten Gunungkidul	Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan di wilayah Kab. Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik
3.7.4	Kabupaten Kulon Progo	Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan di wilayah Kab. Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik
3.7.5	Kota Yogyakarta	Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan di wilayah Kota. Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ribu Jiwa	Badan Pusat Statistik
3.8	Tingkat Kemiskinan DIY	Persentase penduduk DIY yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
3.8.1	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bantul	Persentase penduduk Kabupaten Bantul yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
3.8.2	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sleman	Persentase penduduk Kabupaten Sleman yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
3.8.3	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul	Persentase penduduk Kabupaten Gunungkidul yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
3.8.4	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo	Persentase penduduk Kabupaten Kulon Progo yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
3.8.5	Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta	Persentase penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
3.9	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan terhadap jumlah total penduduk DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
3.10	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan terhadap jumlah total penduduk DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
4	Ketimpangan				
4.1	Indeks Gini	Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh di DIY pada tahun berkenaan. Nilai indeks Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
4.2	Indeks Ketimpangan Williamson	Indeks Williamson merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah Kabupaten/Kota di DIY berdasarkan PDRB per kapita Kabupaten/Kota dan DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
4.3	Indeks Gini Indonesia	Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia secara menyeluruh pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
4.4	Indeks Ketimpangan Williamson Indonesia	Tingkat ketimpangan antar wilayah di Indonesia berdasarkan PDRB dan PDB per kapita pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
5	PDRB DIY				
5.1	PDRB DIY atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha	PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun menurut lapangan usaha di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
5.1.1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dihitung menggunakan menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		kepada pihak lain.			
5.1.2	Pertambangan dan Penggalian	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.1.3	Industri Pengolahan	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Industri Pengolahan yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Yang termasuk industri pengolahan adalah Kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur, atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan, atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.1.4	Pengadaan Listrik dan Gas	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan. Yang termasuk lapangan usaha pengadaan listrik dan gas adalah Kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es, dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.1.5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Yang termasuk lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang adalah Kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan.			
5.1.6	Konstruksi	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha konstruksi yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Yang termasuk lapangan usaha konstruksi meliputi Kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.1.7	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasai Mobil dan Sepeda Motor	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasai Mobil dan Sepeda Motor yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasai Mobil dan Sepeda Motor adalah kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran, merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.1.8	Transportasi dan Pergudangan	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan meliputi Penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air, atau udara, dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.1.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang dihitung	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum meliputi penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera.			
5.1.10	Informasi dan Komunikasi	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha informasi dan komunikasi mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan serta persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi, dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.1.11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya, serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.1.12	Real Estate	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha real estate dan perikanan yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha Real Estat meliputi kegiatan persewaan, agen, dan/atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estate, serta penyediaan jasa real estate lainnya bisa dilakukan atas milik	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak.			
5.1.13	Jasa Perusahaan	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Jasa Perusahaan yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan. Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mencakup kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum dan kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.1.14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.1.15	Jasa Pendidikan	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha jasa pendidikan yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha jasa pendidikan mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis, seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan, dan penunjang pendidikan.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.1.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan Usaha Jasa kesehatan dan	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		kegiatan sosial mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.			
5.1.17	Jasa Lainnya	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha jasa lainnya yang dihitung menggunakan menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha sektor jasa lainnya ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi : Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi ; Jasa Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga ; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga ; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan ; Jasa Swasta Lainnya Termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.1.18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada seluruh lapangan usaha yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.2	PDRB DIY atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha	Menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar.			
5.2.1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain.			
5.2.2	Pertambangan dan Penggalian	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Meliputi seluruh komoditi yang mencakup pertambangan dan penggalian.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.2.3	Industri Pengolahan	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Industri Pengolahan yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Yang termasuk industri pengolahan adalah Kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur, atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan, atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.2.4	Pengadaan Listrik dan Gas	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Yang termasuk lapangan usaha pengadaan listrik dan gas adalah Kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es, dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.2.5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Yang termasuk lapangan usaha Pengadaan Air,	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang adalah kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan.			
5.2.6	Konstruksi	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha konstruksi yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Yang termasuk lapangan usaha konstruksi meliputi Kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.2.7	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasai Mobil dan Sepeda Motor	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasai Mobil dan Sepeda Motor yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasai Mobil dan Sepeda Motor adalah kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.2.8	Transportasi dan Pergudangan	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan meliputi penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak,	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air, atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan.			
5.2.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum meliputi penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.2.10	Informasi dan Komunikasi	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha informasi dan komunikasi mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan serta persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi, dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.2.11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, serta jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.2.12	Real Estat	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha real estate dan perikanan yang dihitung menggunakan	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha Real Estate meliputi kegiatan persewaan, agen, dan/atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estate serta penyediaan jasa real estate lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lain yang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak.			
5.2.13	Jasa Perusahaan	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Jasa Perusahaan yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mencakup kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum dan kegiatan profesional serta ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.2.14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.2.15	Jasa Pendidikan	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha jasa pendidikan yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha jasa pendidikan mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan, dan penunjang	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pendidikan.			
5.2.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanankesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.2.17	Jasa Lainnya	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada lapangan usaha jasa lainnya yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lapangan usaha sektor jasa lainnya ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi : Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi ; Jasa Reparasi Komputer dan Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga ; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga ; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan ; Jasa Swasta Lainnya Termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.2.18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada seluruh lapangan usaha yang dihitung menggunakan harga yang pada tahun 2010 sebagai dasar di wilayah DIY.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
5.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kategori kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi di DIY dihitung berdasarkan PDRB tahun berkenaan dikurangi PDRB tahun sebelumnya dibagi dengan PDRB tahun sebelumnya dikali 100%.			
5.4	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB	Persentase besaran sektor PDRB terhadap jumlah PDRB. Semakin besar distribusi sektor Produk Domestik Regional Bruto, semakin besar pula peranan sektor tersebut dalam perekonomian wilayah.			
5.4.1	Kontribusi Terhadap PDRB	Persentase besaran sektor Produk Domestik Regional Bruto terhadap jumlah Produk Domestik Regional Bruto di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
5.4.1.1	Sektor Pertanian (Palawija)/Tanaman Bahan Makanan	Persentase besaran sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap total PDRB DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
5.4.1.2	Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)	Persentase besaran sektor perkebunan terhadap total PDRB DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
5.4.1.3	Sektor Peternakan dan Hasil-Hasilnya	Persentase besaran sektor peternakan terhadap total PDRB DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
5.4.1.4	Sektor Kehutanan	Persentase besaran sektor kehutanan terhadap total PDRB DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
5.4.1.5	Sektor Pariwisata	Persentase besaran sektor pariwisata terhadap total PDRB DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
5.4.1.6	Sektor Perikanan	Persentase besaran sektor perikanan terhadap total PDRB DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
5.4.1.7	Sektor Perdagangan	Persentase besaran sektor perdagangan terhadap total PDRB DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
5.4.1.8	Sektor Industri	Persentase besaran sektor industri terhadap total PDRB DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
5.4.1.9	Jasa Industri Rumah Tangga	Persentase besaran jasa industri rumah tangga terhadap total PDRB DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
5.4.10	Transmigrasi	Persentase besaran transmigrasi terhadap total PDRB DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
5.4.11	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	Persentase besaran jasa perorangan dan rumah tangga terhadap total PDRB DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
5.5	Nilai Sub Sektor Tanaman	Nilai persentase sub sektor	Tahunan	%	Badan Pusat



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan dalam PDRB (ADHK)	tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan terhadap total PDRB DIY pada tahun berkenaan.			Statistik
6	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
6.1	Kulon Progo	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan perundang-undangan.	Tahunan	Desa	Badan Pusat Statistik
6.2	Bantul	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan perundang-undangan.	Tahunan	Desa	Badan Pusat Statistik
6.3	Gunungkidul	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan perundang-undangan.	Tahunan	Desa	Badan Pusat Statistik
6.4	Sleman	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan perundang-undangan.	Tahunan	Desa	Badan Pusat Statistik
6.5	Kota Yogyakarta	Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan perundang-undangan.	Tahunan	Desa	Badan Pusat Statistik
7	Pendapatan per Kapita per Bulan	Pendapatan per kapita adalah Nilai Produk Domestik Regional Bruto dibagi Jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu.			
7.1	Pendapatan per Kapita	Nilai Produk Domestik Regional Bruto DIY dibagi jumlah penduduk DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp	Badan Pusat Statistik
7.2	Indeks Harga Konsumen (2007=100)	Indeks harga konsumen adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Indeks harga konsumen sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya.	Tahunan	Poin	Badan Pusat Statistik
8	Nilai Ekspor Dan Impor	Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari dalam negara ke negara lain. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari negara lain masuk ke dalam negeri secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.			
8.1	Ekspor	Jumlah nilai ekspor yang di dapat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Nilai suatu kelompok barang yang diekspor (melewati batas negara Indonesia) tanpa menggunakan dokumen non PEB/PIB, dalam satuan US Dollar (USD).	Bulanan	Juta US\$	Badan Pusat Statistik
8.2	Impor	Jumlah nilai impor yang di dapat	Bulanan	Juta US\$	Badan Pusat



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan. Nilai suatu kelompok barang yang diimpor (melewati batas negara Indonesia) tanpa menggunakan dokumen non PEB/PIB, dalam satuan US Dollar (USD).			Statistik
9	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator proxy kesejahteraan petani. Perhitungan Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib).	Bulanan	Indeks	Badan Pusat Statistik
9.1	NTP Tanaman Pangan	Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) untuk komoditas tanaman pangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Indeks	Badan Pusat Statistik
9.2	NTP Hortikultura	Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) untuk komoditas hortikultura di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Bulanan	Indeks	Badan Pusat Statistik
9.3	NTP Perkebunan	Perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) untuk komoditas perkebunan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Bulanan	Indeks	Badan Pusat Statistik
9.4	NTP Peternakan	Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) untuk komoditas peternakan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Bulanan	Indeks	Badan Pusat Statistik
9.5	NTP Perikanan	Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) untuk komoditas Perikanan di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Bulanan	Indeks	Badan Pusat Statistik
10	Indeks yang Diterima Petani (Tahun Dasar 2007=100 untuk 2009-2012 ; Tahun Dasar 2012=100 untuk 2013-2017)	Indeks yang disusun berdasarkan nilai hasil produksi pertanian di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Bulanan	Indeks	Badan Pusat Statistik
11	Indeks yang Dibayar Petani (Tahun Dasar 2007=100 untuk 2009-2012 ; Tahun Dasar 2012=100 untuk 2013-2017)	Indeks yang disusun berdasarkan nilai pengeluaran petani untuk menghasilkan produksi pertanian termasuk didalamnya konsumsi rumah tangga di wilayah DIY pada periode berkenaan.	Bulanan	Indeks	Badan Pusat Statistik
12	Laju Inflasi	Persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		oleh rumah tangga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
13	Angka Melek Huruf	Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.			
13.1	Angka Melek Huruf di DIY	Proporsi penduduk DIY usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk DIY usia 15 tahun ke atas pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
13.1.1	Angka Melek Huruf Kabupaten Bantul	Proporsi penduduk Kabupaten Bantul usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk Kabupaten Bantul usia 15 tahun ke atas pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
13.1.2	Angka Melek Huruf Kabupaten Sleman	Proporsi penduduk Kabupaten Sleman usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk Kabupaten Sleman usia 15 tahun ke atas pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
13.1.3	Angka Melek Huruf kabupaten Gunungkidul	Proporsi penduduk Kabupaten Gunungkidul usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk Gunungkidul usia 15 tahun ke atas pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik
13.1.4	Angka Melek Huruf Kabupaten Kulon Progo	Proporsi penduduk Kabupaten Kulon Progo usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk Kabupaten Kulon Progo usia 15 tahun ke atas pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Pusat Statistik



9.04 DATA VERTIKAL BADAN PERTANAHAN NASIONAL



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Tanah Terindikasi Terlantar	Jumlah lokasi tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.	Tahunan	Lokasi	Badan Pertanahan Nasional
2	Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah	Semua lahan selain lahan sawah seperti lahan pekarangan, ladang/huma, tegal/kebun, lahan perkebunan, kolam, tambak, danau, rawa, dan lainnya. Lahan yang berstatus lahan sawah yang sudah tidak berfungsi sebagai lahan sawah lagi, dimasukkan dalam lahan bukan sawah.			Badan Pertanahan Nasional
2.1	Kolam/Empang/Tambak	Luas lahan yang dimanfaatkan sebagai kolam/empang/ tambak (dalam satuan hektar) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
2.2	Danau/Telaga Alam Perairan Darat	Luas lahan yang berupa tubuh air danau/telaga alam (dalam satuan hektar) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
2.3	Ladang/Tegalan/Kebun/Padang Rumput	Luas lahan yang dimanfaatkan sebagai ladang/tegalan/kebun/ padang rumput (dalam satuan hektar) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
2.4	Kebun Campuran	Luas lahan yang dimanfaatkan sebagai kebun campuran (dalam satuan hektar) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
2.5	Perkebunan	Luas lahan yang dimanfaatkan sebagai perkebunan (dalam satuan hektar) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
2.6	Hutan	Luas lahan yang dimanfaatkan sebagai hutan (dalam satuan hektar) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
2.7	Perumahan dan Permukiman	Luas lahan yang	Tahunan	Ha	Badan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		dimanfaatkan sebagai Perumahan dan Pemukiman (dalam satuan hektar) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Pertanahan Nasional
2.8	Industri	Luas lahan yang dimanfaatkan sebagai fungsi industri (dalam satuan hektar) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
2.9	Bangunan Lainnya/Perkantoran	Luas lahan yang dimanfaatkan sebagai bangunan lainnya/ perkantoran (dalam satuan hektar) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
2.10	Non Sawah Sementara yang Tidak Diusahakan	Luas lahan non sawah sementara (dalam satuan hektar) yang tidak diusahakan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
2.11	Waduk (Buatan) Pertanian Tanah Kering Semusim	Luas lahan yang dimanfaatkan sebagai waduk (buatan), atau pertanian tanah kering semusim (dalam satuan hektar) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
2.12	Lainnya Tanah Terbuka	Luas lahan lainnya yang berupa tanah terbuka di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
3	Luas Perubahan Penggunaan Lahan	Luas lahan (dalam satuan hektar) yang berubah penggunaan lahannya di tiap wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Badan Pertanahan Nasional
3.1	Kab. Kulon Progo	Luas lahan (dalam satuan hektar) yang berubah penggunaan lahannya di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
3.2	Kab. Bantul	Luas lahan (dalam satuan hektar) yang berubah penggunaan lahannya di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
3.3	Kab. Gunungkidul	Luas lahan (dalam satuan	Tahunan	Ha	Badan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		hektar) yang berubah penggunaan lahannya di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.			Pertanahan Nasional
3.4	Kab. Sleman	Luas lahan (dalam satuan hektar) yang berubah penggunaan lahannya di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
3.5	Kota Yogyakarta	Luas lahan (dalam satuan hektar) yang berubah penggunaan lahannya di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
4	Penggunaan Lahan (Land Use) per sektor	Upaya perencanaan penggunaan lahan dengan membaginya menjadi kawasan-kawasan yang memiliki fungsi-fungsi tertentu, semisal fungsi pemukiman, perdagangan, industri, dll.			Badan Pertanahan Nasional
4.1	Pertanian	Luas lahan dalam satuan hektar yang digunakan untuk kegiatan/fungsi pertanian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
4.2	Pertambangan dan Penggalian	Luas lahan dalam satuan hektar yang digunakan untuk kegiatan/fungsi pertambangan dan penggalian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
4.3	Industri Pengolahan	Luas lahan dalam satuan hektar yang digunakan untuk kegiatan/fungsi industri pengolahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
4.4	Bangunan	Luas lahan dalam satuan hektar yang digunakan untuk kegiatan/fungsi bangunan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
4.5	Perdagangan	Luas lahan dalam satuan hektar yang digunakan untuk kegiatan/fungsi perdagangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
4.6	Pengangkutan dan Komunikasi	Luas lahan dalam satuan hektar yang digunakan	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		untuk kegiatan/fungsi pengangkutan dan komunikasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Nasional
4.7	Keuangan	Luas lahan dalam satuan hektar yang digunakan untuk kegiatan/fungsi keuangan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
4.8	Jasa-Jasa	Luas lahan dalam satuan hektar yang digunakan untuk kegiatan/fungsi jasa-jasa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
4.9	Listrik, Air, dan Air Bersih	Luas lahan dalam satuan hektar yang digunakan untuk kegiatan/fungsi listrik dan air bersih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
5	Jumlah Tanah Bersertifikat	Tanah yang memiliki legalitas hukum berbentuk surat berharga (sertifikat) pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Badan Pertanahan Nasional
5.1	Hak Milik	Legalitas hukum hak turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan		Badan Pertanahan Nasional
5.1.1	Jumlah	Jumlah bidang tanah yang memiliki sertifikat hak milik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Bidang	Badan Pertanahan Nasional
5.1.2	Luas	Luas tanah dalam satuan meter persegi yang memiliki sertifikat hak milik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	m ²	Badan Pertanahan Nasional
5.2	Hak Guna Bangunan	Legalitas hukum berupa hak untuk mendirikan, mengelola, dan memanfaatkan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan		Badan Pertanahan Nasional
5.2.1	Jumlah	Jumlah bidang tanah yang memiliki sertifikat hak guna	Tahunan	Bidang	Badan Pertanahan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		bangunan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Nasional
5.2.2	Luas	Luas tanah dalam satuan meter persegi yang memiliki sertifikat hak guna bangunan yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	m ²	Badan Pertanahan Nasional
5.3	Hak Guna Usaha	Legalitas hukum berupa hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan		Badan Pertanahan Nasional
5.3.1	Jumlah	Jumlah bidang tanah yang memiliki sertifikat hak guna usaha yang ada pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Bidang	Badan Pertanahan Nasional
5.3.2	Luas	Luas tanah dalam satuan meter persegi yang memiliki sertifikat hak guna usaha yang ada pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	m ²	Badan Pertanahan Nasional
5.4	Hak Pakai	Legalitas hukum berupa hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan		Badan Pertanahan Nasional
5.4.1	Jumlah	Jumlah bidang tanah yang memiliki sertifikat hak pakai yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Bidang	Badan Pertanahan Nasional
5.4.2	Luas	Luas tanah dalam satuan meter persegi yang memiliki sertifikat hak pakai yang ada pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	m ²	Badan Pertanahan Nasional
5.5	Girik	Girik merupakan surat kuasa atas lahan termasuk penguasaan tanah secara turun-menurun maupun	Tahunan		Badan Pertanahan Nasional



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		secara adat.			
5.6	Hak Pengelolaan	Legalitas hukum berupa hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan untuk pelaksanaan tugasnya, peyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan		Badan Pertanahan Nasional
5.6.1	Jumlah	Jumlah bidang tanah yang memiliki sertifikat hak pengelolaan yang ada pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Bidang	Badan Pertanahan Nasional
5.6.2	Luas	Luas tanah dalam satuan meter persegi yang memiliki sertifikat hak pengelolaan yang ada pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	m ²	Badan Pertanahan Nasional
5.7	Hak Wakaf	Legalitas hukum sebagai hasil dari Perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.	Tahunan		Badan Pertanahan Nasional
5.7.1	Jumlah	Jumlah bidang tanah yang memiliki sertifikat hak wakaf yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan		Badan Pertanahan Nasional
5.7.2	Luas	Luas tanah dalam satuan meter persegi yang memiliki sertifikat hak wakaf yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan		Badan Pertanahan Nasional
6	Jumlah Kasus Tanah yang Diselesaikan	Jumlah Kasus hukum status Tanah yang Diselesaikan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Kasus	Badan Pertanahan Nasional

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
7	Jumlah Kasus Tanah Negara yang Diselesaikan	Jumlah kasus hukum status tanah negara yang diselesaikan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kasus	Badan Pertanahan Nasional
8	Topografi	Pengelompokan lahan menurut kekasaran bentuk permukaan bumi.	Tahunan		Badan Pertanahan Nasional
8.1	Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng	Luas lahan dalam satuan hektar berdasarkan kelas kemiringan lereng di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
8.1.1	Datar (0-2 Derajat)	Luas lahan dalam satuan hektar kelompok lahan dengan topografi datar (kelas kemiringan lereng 0-2 derajat) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
8.1.2	Bergelombang (2-15 Derajat)	Luas lahan dalam satuan hektar kelompok lahan dengan topografi bergelombang (kelas kemiringan lereng 2-15 derajat) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
8.1.3	Curam (15-40 Derajat)	Luas lahan dalam satuan hektar kelompok lahan dengan topografi curam (kelas kemiringan lereng 15-40 derajat) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
8.1.4	Sangat Curam (>40 Derajat)	Luas lahan dalam satuan hektar kelompok lahan dengan topografi sangat curam (kelas kemiringan lereng >40 derajat) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Ha	Badan Pertanahan Nasional
9	Jumlah Sumber Daya Manusia	Jumlah pegawai yang menjalankan tugas di kantor Badan Pertanahan Nasional tiap kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			Badan Pertanahan Nasional
9.1	Kanwil BPN DIY	Jumlah sumber daya manusia (SDM) di Kanwil BPN DIY.	Tahunan	Pegawai	Badan Pertanahan Nasional
9.2	Kab. Kulon Progo	Jumlah sumber daya manusia (SDM) di Kantor BPN Kabupaten Kulon Progo.	Tahunan	Pegawai	Badan Pertanahan Nasional
9.3	Kab. Bantul	Jumlah sumber daya manusia (SDM) di Kantor BPN Kabupaten Bantul.	Tahunan	Pegawai	Badan Pertanahan Nasional
9.4	Kab. Gunungkidul	Jumlah sumber daya	Tahunan	pegawai	Badan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		manusia (SDM) di Kantor BPN Kabupaten Gunungkidul.			Pertanahan Nasional
9.5	Kab. Sleman	Jumlah sumber daya manusia (SDM) di Kantor BPN Kabupaten Sleman.	Tahunan	pegawai	Badan Pertanahan Nasional
9.6	Kota Yogyakarta	Jumlah sumber daya manusia (SDM) di Kantor BPN Kota Yogyakarta.	Tahunan	pegawai	Badan Pertanahan Nasional
10	Realisasi Program PTSL DIY	Capaian realisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu Proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan		Badan Pertanahan Nasional
10.1	Kab. Kulon Progo	Jumlah bidang tanah yang sudah selesai dilakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Bidang	Badan Pertanahan Nasional
10.2	Kab. Bantul	Jumlah bidang tanah yang sudah selesai dilakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Bidang	Badan Pertanahan Nasional
10.3	Kab. Gunungkidul	Jumlah bidang tanah yang sudah selesai dilakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Bidang	Badan Pertanahan Nasional
10.4	Kab. Sleman	Jumlah bidang tanah yang sudah selesai dilakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Bidang	Badan Pertanahan Nasional
10.5	Kota Yogyakarta	Jumlah bidang tanah yang sudah selesai dilakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Bidang	Badan Pertanahan Nasional
11	Kontribusi dari PNBP Se DIY	Penerimaan keuangan	Tahunan	Rupiah	Badan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Pemerintah Pusat dalam urusan pertanahan yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan pertanahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Pertanahan Nasional
12	Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan	Penerimaan keuangan pemerintah pusat dari Kontribusi penerimaan Bea perolehan hak tanah dan bangunan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah	Badan Pertanahan Nasional
13	Nilai Hak Tanggungan atas Tanah	Nilai atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah	Badan Pertanahan Nasional
14	Nilai Pajak Pertambahan Hasil	Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun pajak atas bidang tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rupiah	Badan Pertanahan Nasional
15	Jumlah PPAT	Jumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan		Badan Pertanahan Nasional
15.1	PPAT	Jumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Pertanahan Nasional
15.2	PPAT Sementara	Jumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Pertanahan TNasional
15.3	Total	Total Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan PPAT Sementara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Orang	Badan Pertanahan Nasional
16	Luas Wilayah	Luas wilayah adalah hamparan teritorial yang merupakan ranah kewenangan pengelolaan suatu tingkatan administratif, baik itu wilayah daratan maupun			Badan Pertanahan Nasional



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		lautan. Luas wilayah berakhir pada batas batas wilayah dengan kondisi fisik seperti sungai, gunung, dan lain lain.			
16.1	Luas Wilayah Daratan DIY	Luas wilayah daratan dalam kilometer persegi yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahun	Km2	Badan Pertanahan Nasional
16.2	Luas Wilayah DIY	Luas wilayah daratan dan lautan dalam kilometer persegi yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahun	Km2	Badan Pertanahan Nasional
16.2.1	Luas Wilayah Daratan Kulon Progo	Luas wilayah daratan dalam kilometer persegi yang menjadi kewenangan Kabupaten Kulon Progo.	Tahun	Km2	Badan Pertanahan Nasional
16.2.2	Luas Wilayah Daratan Bantul	Luas wilayah daratan dalam kilometer persegi yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul.	Tahun	Km2	Badan Pertanahan Nasional
16.2.3	Luas Wilayah Daratan Gunungkidul	Luas wilayah daratan dalam kilometer persegi yang menjadi kewenangan Kabupaten Gunungkidul.	Tahun	Km2	Badan Pertanahan Nasional
16.2.4	Luas Wilayah Daratan Sleman	Luas wilayah daratan dalam kilometer persegi yang menjadi kewenangan Kabupaten Sleman.	Tahun	Km2	Badan Pertanahan Nasional
16.2.5	Luas Wilayah Daratan Kota Yogyakarta	Luas wilayah daratan dalam kilometer persegi yang menjadi kewenangan Kota Yogyakarta.	Tahun	Km2	Badan Pertanahan Nasional
17	Inventarisasi Wilayah Tertentu	Suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi ekologi KSA dan KPA dan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.			
18	Jumlah Bidang Tanah	Jumlah persil Bidang Tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	Bidang	Badan Pertanahan Nasional
18.1	Jumah Yang Terdaftar	Jumlah persil Bidang Tanah yang terdaftar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	bidang	Badan Pertanahan Nasional
18.2	Jumlah Bidang Belum Terdaftar	Jumlah persil Bidang Tanah yang belum terdaftar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Tahunan	bidang	Badan Pertanahan Nasional



9.06 DATA VERTIKAL BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Penduduk Hasil Pendataan Keluarga	Jumlah penduduk yang tercatat dalam Pendataan Keluarga berdasarkan jenis kelamin.			
1.1	Laki-Laki	Jumlah penduduk yang tercatat dalam Pendataan Keluarga berdasarkan jenis kelamin laki-laki di wilayah DIY.	Tahunan	Orang	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
1.2	Laki-Laki	Persentase penduduk yang tercatat dalam Pendataan Keluarga berdasarkan jenis kelamin laki-laki dengan total jumlah penduduk yang tercatat dalam Pendataan Keluarga di wilayah DIY.	Tahunan	%	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
1.3	Perempuan	Jumlah penduduk yang tercatat dalam Pendataan Keluarga berdasarkan jenis kelamin perempuan di wilayah DIY.	Tahunan	Orang	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
1.4	Perempuan	Persentase penduduk yang tercatat dalam Pendataan Keluarga berdasarkan jenis kelamin perempuan dengan TOTAL jumlah penduduk yang tercatat dalam Pendataan Keluarga di wilayah DIY.	Tahunan	%	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
2	Jumlah Pasangan Usia Subur Ber-KB	Jumlah pasangan usia subur ber-Keluarga Berencana (KB) Pasangan Usia Subur berkisar antara usia 20-45 tahun, di mana pasangan laki-laki dan perempuan sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik menggunakan kontrasepsi atau menggunakan cara alami mencegah/menunda kehamilan setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	PUS	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3	Status Pendidikan Kepala Keluarga	Status pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh Kepala Keluarga di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	KK	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3.1	Tidak Tamat SD	Jumlah Kepala Keluarga yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	KK	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3.2	Tamat SD-SLTP	Jumlah Kepala Keluarga yang tamat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	KK	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3.3	Tamat SLTA	Jumlah Kepala Keluarga yang tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	KK	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3.4	Tamat AK/PT	Jumlah Kepala Keluarga yang tamat akademi atau Perguruan Tinggi (PT) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	KK	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4	Jumlah Peserta	Keluarga Berencana Aktif adalah pasangan usia	Tahunan	PUS	Badan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Program KB Aktif	subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4.1.1	Laki-Laki	Jumlah peserta program Keluarga Berencana aktif berjenis kelamin laki-laki di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	PUS	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4.1.2	Perempuan	Jumlah peserta program Keluarga Berencana aktif berjenis kelamin perempuan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	PUS	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4.2	Peserta KB Aktif Cara Modern Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	Pasangan usia subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi yang berasal dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Peserta	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4.3	Angka Prevalensi Penggunaan CPR Cara Modern pada PUS Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin	Angka pemakaian kontrasepsi (<i>Contraceptive Prevalence Rate</i>) adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta Keluarga Berencana Aktif (peserta Keluarga Berencana yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah Pasangan Usia Subur di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4.4	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase penggunaan alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka Panjang meliputi IUD, implan, MOW, dan MOP di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4.5	Angka Kelahiran pada Perempuan Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Tingkat kelahiran per 1000 wanita usia subur usia 15-19 tahun di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Per 1000 WUS 15-19 Tahun	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4.6	Menurunnya Rata-Rata Jumlah Anak yang Dimiliki oleh WUS Sepanjang Masa Reproduksi	Tingkat penurunan rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh Wanita Usia Subur sepanjang masa reproduksinya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Per WUS	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4.7	Menurunnya Unmet Need Kebutuhan ber-KB	Persentase menurunnya ANGKA Unmet Need (kebutuhan Pasangan Usia Subur untuk ber-Keluarga Berencana tetapi kebutuhan tersebut tidak ingin anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan berikutnya) tidak terpenuhi dan tidak memakai alat kontrasepsi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4.8	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS)	Persentase meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis terhdap jumlah total pasangan usia subur yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	tentang Metode Kontrasepsi Modern Minimal 4 Jenis				
5	Jumlah Peserta KB Baru	Jumlah pasangan usia subur yang pertamakali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	PUS	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
5.1.1	Laki-Laki	Jumlah laki-laki yang sudah memiliki pasangan usia subur dan pertama kali menggunakan kontrasepsi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	PUS	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
5.1.2	Perempuan	Jumlah perempuan yang sudah memiliki pasangan dengan usia subur dan pertama kali menggunakan kontrasepsi atau menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	PUS	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
6	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jumlah pasangan usia subur (pasangan yang telah menikah berkisar antara usia 20-45 tahun dimana pasangan laki-laki dan perempuan sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	PUS	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
7	Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan	Pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan yaitu pra sejahtera, sejahtera 1, dan sejahtera 2.	Tahunan		Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
7.1	Keluarga Pra Sejahtera	Jumlah keluarga prasejahtera (yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	KK	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
7.2	Keluarga Sejahtera 1	Jumlah keluarga sejahtera 1 (merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya) yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	KK	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
7.3	Keluarga Sejahtera 2	Jumlah keluarga sejahtera 2 (merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar dan dapat memenuhi akan kebutuhan sosial psikologinya juga) yang berada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	KK	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
8	Pemberdayaan Keluarga	Suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh keluarga di Indonesia.			Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
8.1	Jumlah Kelompok UPPKS	Jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera UPPKS (merupakan sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera II Plus, baik yang sudah menjadi akseptor KB serta anggota masyarakat yang berminat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta aktif melakukan usaha bersama dalam usaha	Tahunan	keluarga	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		ekonomis produktif) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
8.2	Jumlah Angkatan Kelompok UPPKS	Jumlah angkatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (merupakan sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera II Plus, baik yang sudah menjadi akseptor KB serta anggota masyarakat yang berminat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dan aktif melakukan usaha bersama dalam usaha ekonomis produktif) yang berada pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	keluarga	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
9	Ketahanan Keluarga	Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri, dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.			
9.1	Jumlah Kelompok BKB	Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita di wilayah DIY. Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada di tingkat RW.	Tahunan	Kelompok	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
9.2	Jumlah Kelompok BKR	Jumlah kelompok Bina keluarga Remaja (Bina Keluarga Remaja merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja) di wilayah DIY.	Tahunan	Kelompok	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
9.3	Jumlah Kelompok BKL	Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang merupakan Kelompok Kegiatan yang beranggotakan Keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia di wilayah DIY.	Tahunan	Kelompok	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
9.4	Jumlah Kelompok PIK R/M	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) yang merupakan suatu wadah kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga yang ada di DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Kelompok	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
10	Perkembangan Unmet Need KB di DIY Menurut Kabupaten/Kota	Unmet Need KB adalah kebutuhan Pasangan Usia Subur untuk ber-KB, tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dan tidak memakai alat kontrasepsi.			
10.1	Kulon Progo	Persentase Unmet Need KB (kebutuhan Pasangan Usia Subur untuk ber-KB tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dan tidak memakai alat kontrasepsi) di Kabupaten Kulon	Tahunan	%	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		progo pada tahun berkenaan.			Nasional
10.2	Bantul	Persentase Unmeet Need KB (kebutuhan Pasangan Usia Subur untuk ber-KB tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dan tidak memakai alat kontrasepsi) di Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
10.3	Gunungkidul	Persentase Unmeet Need KB (kebutuhan Pasangan Usia Subur untuk ber-KB tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dan tidak memakai alat kontrasepsi) di Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
10.4	Sleman	Persentase Unmeet Need KB (kebutuhan Pasangan Usia Subur untuk ber-KB tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dan tidak memakai alat kontrasepsi) di kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
10.5	Kota Yogyakarta	Persentase Unmeet Need KB (kebutuhan Pasangan Usia Subur untuk ber-KB tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dan tidak memakai alat kontrasepsi) di kabupaten Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	%	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
11	Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY	Sarana kesehatan yang menyediakan pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY.			
11.1	PKBRS	Jumlah Program Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) merupakan institusi rumah sakit yang memberikan pelayanan keluarga berencana sebagai salah satu layanannya yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan menekan angka pertumbuhan penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
11.2	Pemerintah	Jumlah Program Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Pemerintah merupakan institusi rumah sakit pemerintah yang memberikan pelayanan keluarga berencana sebagai salah satu layanannya yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan menekan angka pertumbuhan penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
11.3	Swasta	Jumlah Program Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) Swasta merupakan institusi rumah sakit swasta yang memberikan pelayanan keluarga berencana sebagai salah satu layanannya yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan menekan angka pertumbuhan penduduk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
11.4	PPKBD	Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang merupakan merupakan jejaring kerja pemerintah ditingkat desa /kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator KB desa/kelurahan dan membantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan program KB di wilayah DIY.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
11.5	SUB PPKBD	Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang merupakan jejaring kerja pemerintah ditingkat dusun/kampung, yang berfungsi membantu	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		fasilitator KB desa/kelurahan dan membantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan program KB di wilayah DIY.			Nasional
12	Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY	Petugas kesehatan yang memberikan pelayanan medis KB dan konsultasi maupun fasilitasi dalam Pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY.	Tahunan	Orang	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
12.1	Dokter	Jumlah Dokter baik Dokter Umum maupun Dokter Spesialis yang memberikan pelayanan medis KB dan konsultasi maupun fasilitasi dalam Pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY.	Tahunan	Orang	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
12.2	PKB	Jumlah Pelayanan Keluarga Berencana yang memberikan pelayanan medis KB dan konsultasi maupun fasilitasi dalam Pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY.	Tahunan	Orang	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
12.3	Bidan Pelayanan KB	Jumlah Bidan Pelayanan Keluarga Berencana yang memberikan pelayanan medis KB dan konsultasi maupun fasilitasi dalam Pelayanan Keluarga Berencana di wilayah DIY.	Tahunan	Orang	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13	Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY	Kelompok kegiatan dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan TRIBINA, yaitu Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia.			
13.1	Kulon Progo	Jumlah Lembaga Bina Keluarga yang merupakan kelompok kegiatan dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan TRIBINA, yaitu Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.1.1	BKB	Jumlah kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) yang merupakan kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat RW di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.1.2	BKR	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10–24 tahun di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.1.3	BKL	Jumlah kegiatan Bina Keluarga Lansia atau BKL yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.2	Bantul	Jumlah Lembaga Bina Keluarga yang merupakan kelompok kegiatan dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan TRIBINA yaitu Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan	Tahunan		Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Bina Keluarga Lansia yang ada di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.			Nasional
13.2.1	BKB	Jumlah kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) yang merupakan kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada di tingkat RW di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.2.2	BKR	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10–24 tahun di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.2.3	BKL	Jumlah kegiatan Bina Keluarga Lansia atau BKL yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia di wilayah Kabupaten Bantul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.3	Gunungkidul	Jumlah Lembaga Bina Keluarga yang merupakan kelompok kegiatan dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan TRIBINA yaitu Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan		Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.3.1	BKB	Jumlah kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) yang merupakan kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada di tingkat RW di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.3.2	BKR	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10–24 tahun di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.3.3	BKL	Jumlah kegiatan Bina Keluarga Lansia atau BKL yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia di wilayah Kabupaten Gunungkidul pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.4	Sleman	Jumlah Lembaga Bina Keluarga yang merupakan kelompok kegiatan dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan TRIBINA yaitu Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang ada di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan		Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.4.1	BKB	Jumlah kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) yang merupakan kegiatan yang khusus mengelola	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada di tingkat RW di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.			dan Keluarga Berencana Nasional
13.4.2	BKR	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10–24 tahun di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.4.3	BKL	Jumlah kegiatan Bina Keluarga Lansia atau BKL yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.5	Kota Yogyakarta	Jumlah Lembaga Bina Keluarga yang merupakan kelompok kegiatan dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan TRIBINA yaitu Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang ada di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan		Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.5.1	BKB	Jumlah kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) yang merupakan kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada di tingkat RW di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.5.2	BKR	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10–24 tahun di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
13.5.3	BKL	Jumlah kegiatan Bina Keluarga Lansia atau BKL yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahunan	Buah	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



9.09 DATA VERTIKAL BANK INDONESIA

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Moneter	Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang.			Bank Indonesia
1.1	Kredit UMKM Perbankan	Jumlah nilai kredit Usaha Mikro Kecil Menengah di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
1.2	Investasi	Jumlah nilai investasi yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
1.3	Moneter dan Keuangan	Jumlah nilai moneter dan keuangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kebijakan Moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga yang dilaksanakan oleh Bank sentral. Bentuk Kebijakan Moneter ini terdiri dari Kebijakan Moneter Kuantitatif dan Kebijakan Moneter Kualitatif.	Bulanan		Bank Indonesia
1.3.1	Kurs Tengah Uang Kertas Asing di BI (Rupiah-USD)	Nilai Kurs Tengah Uang Kertas Asing di BI (Rupiah-USD) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kurs tengah BI merupakan kurs yang digunakan dalam mencatat nilai konversi mata uang asing dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan definisinya, kurs tengah adalah kurs antara kurs jual dan kurs beli.	Tahunan	Rupiah	Bank Indonesia
1.3.2	BI-7D Reverse Repo	Nilai BI-7D Reverse Depo di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Instrumen BI 7-Day (Reverse) Repo Rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen BI 7-Day (Reverse) Repo Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo.	Tahunan	%	Bank Indonesia
1.4	Jasa Keuangan	Jumlah jasa keuangan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jasa Keuangan merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukan jenis jasa yang diberikan atau disediakan oleh industri lembaga keuangan. Industri lembaga keuangan yang dimaksud misalnya bank, perusahaan asuransi, sekuritas, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan kartu kredit.	Tahunan		Bank Indonesia
2	Kantor Bank	Aktivitas penambahan atau pengurangan aset untuk kantor bank.			Bank Indonesia



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
2.1	Aset	Aset adalah seluruh aktiva dikurangkan/ditambahkan selisih antar kantor aktiva dan antar kantor pasiva. Data aset disajikan berdasarkan pengelompokan bank, yaitu persero, BUSN Devisa, BUSN Non Devisa, BPD, Bank Campuran, Bank Asing, dan BPR. Sumber data berasal dari laporan bulanan Bank Umum (LBU) dan LBPR. Aset yang dimaksud merupakan jumlah aset yang dimiliki dari Bank Umum dan BPR di seluruh DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
2.2	Bank Umum	Jumlah nilai aset yang dimiliki oleh Bank Umum di DIY pada tahun berkenaan. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.	Tahunan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
2.3	BPR	Jumlah nilai aset yang dimiliki oleh BPR di DIY pada tahun berkenaan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.	Tahunan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
3	Dana Pihak Ketiga	Dana pihak ketiga merupakan simpanan milik pihak ketiga bukan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR (termasuk penghimpunan dana dengan prinsip syariah) baik dalam Rupiah maupun Valuta Asing (BPR saat ini tidak diperbolehkan menerima simpanan dalam Valuta Asing) yang berbentuk giro, tabungan, dan simpanan berjangka. Dalam publikasi ini, tidak termasuk simpanan milik pemerintah pusat dan bukan penduduk.			
3.1	Giro	Total nilai dana pihak ketiga yang berbentuk giro di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
3.2	Deposito	Total nilai dana pihak ketiga yang berbentuk deposito yang disimpan di Bank Umum dan BPR di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
3.2.1	Bank Umum	Total nilai dana pihak ketiga yang berbentuk deposito yang disimpan di Bank Umum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
3.2.2	BPR	Total nilai dana pihak ketiga yang berbentuk Deposito yang disimpan di BPR di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
3.3	Tabungan	Total nilai dana pihak ketiga yang berbentuk Tabungan disimpan di Bank Umum dan BPR di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
3.3.1	Bank Umum	Total nilai dana pihak ketiga yang berbentuk tabungan yang disimpan di Bank Umum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
3.3.2	BPR	Total nilai dana pihak ketiga yang berbentuk Deposito yang disimpan di BPR di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4	Kredit (Bank Umum)	Kredit perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain,			

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pinjaman yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan sektor swasta domestik (termasuk piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) yang hanya mencakup pinjaman bank umum yang beroperasi di wilayah DIY.			
4.1	Menurut Jenis Penggunaan	Jumlah total kredit yang diberikan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Menurut jenis penggunaannya kredit atau pinjaman ini bisa di klasifikasikan menjadi 3 jenis penggunaan pinjaman, seperti : 1) Pinjaman Modal Kerja, 2) Pinjaman Investasi, 3) Pinjaman Konsumsi.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.1.1	Modal Kerja	Jumlah total kredit yang diberikan untuk modal kerja, di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.1.2	Investasi	Jumlah total kredit yang diberikan untuk investasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.1.3	Konsumsi	Jumlah total kredit yang diberikan untuk konsumsi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2	Menurut Sektor Ekonomi	Pinjaman sektor ekonomi bisa juga digunakan sebagai pinjaman untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha pada sektor ekonomi.			
4.2.1	Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha	Jumlah total nilai pinjaman yang diberikan dari 17 sektor lapangan usaha di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Pinjaman yang diberikan untuk membiayai keperluan modal untuk membuka lapangan usaha pada yang bersangkutan seperti pinjaman properti, pinjaman agrobisnis, dll.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.1.1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.1.2	Pertambangan dan Penggalian	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk lapangan usaha pertambangan dan penggalian di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.1.3	Industri Pengolahan	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk lapangan usaha industri pengolahan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.1.4	Pengadaan Listrik dan Gas	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk lapangan usaha pengadaan listrik dan gas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.1.5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk lapangan usaha pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.1.6	Konstruksi	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk lapangan usaha konstruksi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.1.7	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil Dan Motor	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk lapangan usaha perdagangan besar dan eceran : reparasi mobil dan motor di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
4.2.1.8	Transportasi dan Pergudangan	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.1.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.1.10	Informasi dan Komunikasi	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk lapangan usaha informasi dan komunikasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.1.11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.1.12	Real Estate	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk lapangan usaha real estate di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.1.13	Jasa Perusahaan	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk lapangan usaha jasa perusahaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.1.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk lapangan usaha administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.1.15	Jasa Pendidikan	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk jasa lapangan usaha pendidikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.1.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.1.17	Jasa Lainnya	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk lapangan usaha jasa lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.2	Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk keperluan bukan lapangan usaha dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain, misalnya pinjaman Pemilikan Rumah (KPR), ruko, rukan dll di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.2.1	Rumah Tinggal	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk rumah tinggal di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.2.2	Flat dan Apartemen	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk flat dan apartemen di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.2.3	Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.2.4	Kendaraan Bermotor	Pinjaman yang diberikan Bank Umum untuk kendaraan bermotor di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.2.2.5	Lainnya	Pinjaman untuk kegiatan lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.3	Berdasarkan Kolektibilitas	Jumlah total dari nilai pinjaman yang diberikan Bank Umum berdasarkan kolektibilitas di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Pinjaman berdasarkan Kolektibilitas adalah pinjaman yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan, dengan menekankan pada arus kas debitor dan kemampuan membayar.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, kolektibilitas pinjaman dikelompokkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.			
4.3.1	Lancar	Jumlah Nilai Pinjaman yang diberikan Bank Umum yang masuk dalam kategori lancar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lancar apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.3.2	DPK	Jumlah nilai pinjaman yang diberikan Bank Umum yang masuk dalam kategori dalam perhatian khusus di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Dalam perhatian khusus apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.3.3	Kurang Lancar	Jumlah nilai pinjaman yang diberikan Bank Umum yang masuk dalam kategori kurang lancar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kurang lancar apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.3.4	Diragukan	Jumlah nilai pinjaman yang diberikan Bank Umum yang masuk dalam kategori diragukan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
4.3.5	Macet	Jumlah nilai pinjaman yang diberikan Bank Umum yang masuk dalam kategori macet di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kredit dikatakan macet apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari 180 hari.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5	Kredit (BPR)	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pinjaman yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan sektor swasta domestik (termasuk piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) yang hanya mencakup pinjaman bank umum yang beroperasi di wilayah DIY.			
5.1	Menurut Jenis Penggunaan	Jumlah total nilai pinjaman dari BPR dari semua jenis penggunaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Menurut jenis penggunaannya kredit atau pinjaman ini bisa di klasifikasikan menjadi 3 jenis penggunaan pinjaman, seperti : 1) Pinjaman Modal Kerja, 2) Pinjaman Investasi, 3) Pinjaman konsumsi.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.1.1	Modal Kerja	Jumlah total nilai pinjaman yang diberikan BPR untuk modal kerja di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.1.2	Investasi	Jumlah total nilai pinjaman yang diberikan BPR untuk investasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.1.3	Konsumsi	Jumlah total nilai pinjaman yang diberikan BPR untuk konsumsi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
5.3	Menurut Sektor Ekonomi	Jumlah total nilai pinjaman yang diberikan BPR berdasarkan sektor ekonomi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Pinjaman sektor ekonomi bisa juga digunakan sebagaipinjaman untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan/atau pendirian usaha pada sektor ekonomi.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1	Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha	Jumlah total nilai pinjaman yang diberikan dari 17 sektor lapangan usaha di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1.1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pinjaman yang diberikan BPR untuk lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1.2	Pertambangan dan Penggalian	Pinjaman yang diberikan BPR untuk lapangan usaha pertambangan dan penggalian di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1.3	Industri Pengolahan	Pinjaman untuk lapangan usaha industri pengolahandi wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1.4	Pengadaan Listrik dan Gas	Pinjaman yang diberikan BPR untuk lapangan usaha pengadaan listrik dan gas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1.5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Pinjaman yang diberikan BPR untuk lapangan usaha pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1.6	Konstruksi	Pinjaman yang diberikan BPR untuk lapangan usaha konstruksi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1.7	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Motor	Pinjaman yang diberikan BPR untuk lapangan usaha perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan motor di wilayah DIY i pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1.8	Transportasi dan Pergudangan	Pinjaman yang diberikan BPR untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Pinjaman yang diberikan BPR untuk lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1.10	Informasi dan Komunikasi	Pinjaman yang diberikan BPR untuk lapangan usaha informasi dan komunikasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1.11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Pinjaman yang diberikan BPR untuk lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1.12	Real Estate	Pinjaman yang diberikan BPR untuk lapangan usaha real estate di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1.13	Jasa Perusahaan	lapangan usaha pinjaman yang diberikan BPR untuk jasa perusahaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Pinjaman yang diberikan BPR untuk lapangan usaha administrasi pemerintahan pertanahan dan jaminan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1.15	Jasa Pendidikan	Pinjaman yang diberikan BPR untuk lapangan usaha jasa pendidikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
5.3.1.16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya	Pinjaman yang diberikan BPR untuk lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.1.17	Jasa Lainnya	Pinjaman yang diberikan BPR untuk lapangan usaha jasa lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.2	Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	Pinjaman yang diberikan BPR untuk keperluan bukan lapangan usaha dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain, misalnya pinjaman Pemilikan Rumah (KPR), ruko, rukan, dll di wilayah DIY.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.2.1	Rumah Tinggal	Pinjaman yang diberikan BPR untuk rumah tinggal di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.2.2	Flat dan Apartemen	Pinjaman yang diberikan BPR untuk flat dan apartemen di wilayah Provinsi pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.2.3	Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)	Pinjaman yang diberikan BPR untuk rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan) di wilayah Provinsi pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.2.4	Kendaraan Bermotor	Pinjaman yang diberikan BPR untuk kendaraan bermotor di wilayah DIY i pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.3.2.5	Lainnya	Pinjaman yang diberikan BPR untuk kegiatan lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.2	Berdasarkan Kolektibilitas	Jumlah Total dari nilai pinjaman yang diberikan BPR berdasarkan kolektibilitas di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Pinjaman berdasarkan kolektibilitas adalah pinjaman yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan, dengan menekankan pada arus kas debitor dan kemampuan membayar. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, kolektibilitas pinjaman dikelompokkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.2.1	Lancar	Jumlah Nilai Pinjaman yang diberikan BPR yang masuk dalam kategori lancar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Lancar apabila debitor selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.2.2	Kurang Lancar	Jumlah nilai pinjaman yang diberikan BPR yang masuk dalam kategori kurang lancar di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kurang lancar apabila debitor menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.2.3	Diragukan	Jumlah nilai pinjaman yang diberikan BPR yang masuk dalam kategori diragukan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
5.2.4	Macet	Jumlah nilai pinjaman yang diberikan Bank Umum yang masuk dalam kategori macet di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Kredit dikatakan macet apabila debitor menunggak pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari 180 hari.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
6	Sistem Pembayaran	Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari			Bank Indonesia



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		suatu kegiatan ekonomi.			
6.1	Rata-Rata Cash Inflow	Nilai rata-rata Cash Inflow di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Inflow Uang Kartal merupakan informasi mengenai aliran uang kertas dan uang logam yang masuk dari perbankan dan masyarakat ke BI, terdiri dari setoran bank dan non bank, penukaran masuk dari loket BI dan kas keliling, serta transaksi masuk kas titipan.	Bulanan	Rp Milyar per bulan	Bank Indonesia
6.2	Rata-Rata Cash Outflow	Nilai rata-rata Cash Outflow di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Outflow Uang Kartal merupakan informasi mengenai aliran uang kertas dan uang logam yang keluar dari BI kepada perbankan dan masyarakat, terdiri dari bayaran bank dan non bank, penukaran keluar dan loket BI dan kas keliling, serta transaksi masuk kas titipan.	Bulanan	Rp (Milyar per bulan)	Bank Indonesia
6.3	Perputaran Kliring	Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Data Keuangan Elektronik (DKE) adalah transfer dan dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.	Tahunan		Bank Indonesia
6.3.1	Transaksi	Jumlah transaksi perputaran kliring di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Lembar	Bank Indonesia
6.3.2	Nominal	Nilai transaksi perputaran kliring di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Rp Milyar	Bank Indonesia
7	Kredit UMKM Perbankan (Bank Umum dan BPR)	Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valutaasing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang tentang Usaha Mikro Kecil Menengah yang berlaku.			Bank Indonesia
7.1	Menurut Jenis Penggunaan	Jumlah total nilai pinjaman Usaha Mikro Kecil Menengah baik dari BPR dan bank Umum dari semua jenis penggunaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Menurut jenis penggunaannya kredit atau pinjaman ini bisa di klasifikasikan menjadi 3 jenis penggunaan pinjaman, seperti : 1) Pinjaman Modal Kerja, 2) Pinjaman Investasi, dan 3) Pinjaman Konsumsi.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.1.1	Modal Kerja	Jumlah nilai pinjaman untuk modal kerja UMKM baik dari Bank Umum dan BPR di wilayah DIY.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.1.2	Investasi	Jumlah nilai pinjaman bagi UMKM untuk Investasi baik yang berasal dari Bank Umum dan BPR di wilayah DIY.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2	Menurut Sektor Ekonomi	Keseluruhan aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang dalam bentuk barang dan jasa guna untuk mencapai kesejahteraan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1	Pinjaman Berdasarkan	Jumlah nilai pinjaman yang diperuntukkan UMKM berdasarkan lapangan usaha baik dari			Bank Indonesia

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
	Lapangan Usaha	Bank Umum dan BPR di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
7.2.1.1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk UMKM Lapangan Usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1.2	Pertambangan dan Penggalian	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk UMKM Lapangan Usaha pertambangan dan penggalian di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1.3	Industri Pengolahan	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk UMKM Lapangan Usaha industri pengolahan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1.4	Pengadaan Listrik dan Gas	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk UMKM Lapangan Usaha pengadaan listrik dan gas di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1.5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk UMKM Lapangan Usaha pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1.6	Konstruksi	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk UMKM Lapangan Usaha konstruksi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1.7	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Motor	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk UMKM Lapangan Usaha perdagangan besar dan eceran : reparasi mobil dan motor di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1.8	Transportasi dan Pergudangan	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk UMKM Lapangan Usaha transportasi dan pergudangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk UMKM Lapangan Usaha penyediaan akomodasi dan makan minum di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1.10	Informasi dan Komunikasi	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk UMKM Lapangan Usaha informasi dan komunikasi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1.11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk UMKM Lapangan Usaha jasa keuangan dan asuransi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1.12	Real Estate	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk UMKM Lapangan Usaha real estate di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1.13	Jasa Perusahaan	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk UMKM Lapangan Usaha jasa perusahaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk UMKM Lapangan Usaha administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1.15	Jasa Pendidikan	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk UMKM Lapangan Usaha jasa pendidikan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk UMKM Lapangan Usaha untuk jasa kesehatan dan kegiatan lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.1.17	Jasa Lainnya	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk	Bulanan	Rp	Bank



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		UMKM Lapangan Usaha untuk jasa lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.		(Juta)	Indonesia
7.2.2	Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk keperluan bukan lapangan usaha dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain, misalnya pinjaman Pemilikan Rumah (KPR), ruko, rukan, dll di wilayah DIY.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.2.1	Rumah Tinggal	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk rumah tinggal di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.2.2	Flat dan Apartemen	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk flat dan apartemen di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.2.3	Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.2.4	Kendaraan Bermotor	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk kendaraan bermotor di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia
7.2.2.5	Lainnya	Pinjaman dari Bank Umum dan BPR untuk kegiatan lainnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp (Juta)	Bank Indonesia



9.11 DATA VERTIKAL OJK DIY

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Jaringan Kantor Industri Keuangan Non Bank	Industri Keuangan Non Bank terdiri atas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan khusus, dan lembaga keuangan mikro. Industri ini mencatatkan kinerja yang baik dilihat dari tingkat Risk-Based Capital (RBC) juga terjaga pada tingkat yang memadai melebihi ketentuan minimum, gearing ratio industri pembiayaan per akhir 2014 berada jauh di bawah ketentuan maksimum dan <i>Non-Performing Financing (NPF)</i> perusahaan pembiayaan juga terjaga pada level yang rendah.			OJK DIY
1.1	Perusahaan Modal Ventura	Jumlah perusahaan modal ventura terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.	Bulanan	Unit	OJK DIY
1.2	Lembaga keuangan Mikro	Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Jumlah Lembaga keuangan Mikro (LKM) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Unit	OJK DIY
1.3	Perusahaan Asuransi	Jumlah perusahaan asuransi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.	Bulanan	Unit	OJK DIY
1.4	Perusahaan Pembiayaan	Jumlah perusahaan pembiayaan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai lembaga pembiayaan.	Bulanan	Unit	OJK DIY
1.5	Dana Pensiun	Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jumlah badan hukum dana pensiun terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Unit	OJK DIY



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1.6	Fintech P2P Lending	Badan usaha yang memberikan layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/ <i>lender</i> (pemberi pinjaman) dan debitur/ <i>borrower</i> (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Jumlah Fintech P2P Lending terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	unit	OJK DIY
1.7	Fintech Equity Crowdfunding	Badan usaha yang menyelenggarakan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Jumlah Fintech Equity Crowdfunding terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	unit	OJK DIY
1.8	Pergadaian swasta	Usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Jumlah Perusahaan Pergadaian Swasta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	unit	OJK DIY
2	Kinerja Perusahaan Pembiayaan	Hasil kerja yang telah dicapai oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.			
2.1	Piutang	Jumlah Piutang pada Perusahaan Pembiayaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Piutang adalah pembiayaan yang diberikan guna kebutuhan modal kerja, investasi dan/atau multiguna kepada masyarakat dalam jangka waktu yang diperjanjikan.	Bulanan	Rp Juta	OJK DIY
2.2	Nominal NPF	Nilai <i>Non Performing Financing</i> (NPF) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) adalah proporsi kualitas aset piutang pembiayaan kategori macet dan diragukan terhadap total piutang atas kegiatan pembiayaan.	Bulanan	Rp Juta	OJK DIY
3	Kinerja Dana Pensiun	Hasil kerja yang telah dicapai oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan dana pensiun dalam bentuk investasi.			
3.1	Aset	Jumlah aset pada badan hukum dana pensiun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Semua kekayaan yang dimiliki badan hukum Dana Pensiun yang terdiri dari aset investasi, aset non investasi, aset operasional, dan aset lain-lain. Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki Dana Pensiun yang terdiri dari aset investasi, aset non investasi, aset operasional, dan aset lain-lain.	Bulanan	Rp Juta	OJK DIY
3.2	Aset Netto	Jumlah aset netto pada badan hukum dana pensiun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Aset Netto adalah Aset dari Dana Pensiun dikurangi liabilitas selain nilai kini aktuarial atau liabilitas manfaat pensiun pada tanggal pelaporan.	Bulanan	Rp Juta	OJK DIY

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
3.3	Investasi	Jumlah nominal inventasi dilakukan oleh badan hukum dana pensiun di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Investasi adalah bagian dari aset Dana Pensiun yang digunakan untuk meningkatkan aset melalui distribusi hasil investasi. Peningkatan aset melalui investasi dimaksudkan untuk dapat memenuhi kewajiban Dana Pensiun dalam membayar manfaat pensiun ataupun untuk membiayai operasional Dana Pensiun.	Bulanan	Rp Juta	OJK DIY
4	Kinerja Fintech P2P Lending	Hasil kerja yang telah dicapai oleh badan usaha yang melakukan kegiatan Fintech P2P Lending (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) dalam bentuk penyediaan sarana pinjaman dana.			OJK DIY
4.1	Akumulasi Rekening Lender	Akumulasi jumlah rekening dari pemberi pinjaman yang akan diberikan ke penerima pinjaman melalui penyelenggara di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Unit	OJK DIY
4.2	Akumulasi Rekening Borrower	Akumulasi jumlah rekening dari penerima pinjaman melalui penyelenggara di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Unit	OJK DIY
4.3	Outstanding Pinjaman	Posisi nominal pinjaman yang masih aktif pada saat periode bulan berjalan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Bulanan	Rp Juta	OJK DIY
5	Kinerja Lembaga Keuangan Mikro	Hasil kerja yang telah dicapai oleh badan usaha yang melakukan kegiatan keuangan skala mikro dalam bentuk pinjaman atau simpanan.			
5.1	Aset	Jumlah aset pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk menjalankan operasional usaha.	Bulanan	Rp Juta	OJK DIY
5.2	Pinjaman yang Diberikan	Jumlah pinjaman yang diberikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Jumlah debit pemberian pinjaman yang diberikan oleh Lembaga keuangan mikro.	Bulanan	Rp Juta	OJK DIY
5.3	Simpanan/Tabungan	Jumlah simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Simpanan/Tabungan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.	Bulanan	Rp Juta	OJK DIY
6	Single Investor identification (SID) pasar modal	Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification) yang selanjutnya disebut "SID" adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.			OJK DIY
6.1	SID Saham	Jumlah Single Investor Identification (SID) Saham di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan. Single Investor	Bulanan	Unit	OJK DIY



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Identification (SID) Saham adalah nomor identitas investor serupa KTP yang dikeluarkan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang digunakan di dalam transaksi saham.			
6.2	SID Reksadana	Jumlah <i>Single Investor Identification</i> (SID) Reksadana di wilayah kabupaten/kota pada tahun berkenaan. <i>Single Investor Identification</i> (SID) Reksadana adalah nomor identitas investor serupa KTP yang dikeluarkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang digunakan di dalam transaksi reksadana.	Bulanan	Unit	OJK DIY



9.14 DATA VERTIKAL KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Jumlah Tindak Kriminal	Jumlah kasus suatu tindakan yang menjurus ke arah pelanggaran hukum formal/undang-undang yang ada di suatu wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Kepolisian Republik Indonesia Daerah
1.1	Jumlah Kasus Narkoba	Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
1.2	Jumlah Kasus Pembunuhan	Jumlah kasus tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
1.3	Jumlah Kasus Seksual	Jumlah kasus pelecehan seksual yaitu perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2	Data Tindak Pidana	Jumlah kasus tindakan yang merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum, yang bisa dikenai dengan hukuman pidana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.1	Tindak Pidana Konvensional	Jumlah kasus Tindak pidana konvensional yaitu kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.1.1	Pencurian dengan Pemberatan	Jumlah kasus pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.1.2	Pencurian dengan Kekerasan	Jumlah kasus pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.1.3	Pencurian Kendaraan Bermotor	Jumlah kasus kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut dengan cara berlawanan dengan hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.1.4	Pencurian biasa	Jumlah kasus tindakan kejahatan dengan mengambil suatu barang yang memenuhi Unsur Obyektif (dengan maksud untuk memiliki sesuatu secara melawan hukum) seperti mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.1.5	Aniaya Ringan	Jumlah kasus tindakan penganiayaan yang	Tahun	Kasus	Kepolisian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		ketika perbuatan tersebut dilakukan tidak menjadikan korbannya sakit atau berhalangan untuk melakukan pekerjaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Republik Indonesia Daerah
2.1.6	Aniaya Berat	Jumlah kasus tindakan penganiayaan yang merupakan suatu perbuatan/ delik yang sengaja dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menyakiti dan menimbulkan luka berat kepada orang lain, yang mana perbuatan tersebut tidak sampai menghilangkan nyawa (menyebabkan kematian) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.1.7	Pembunuhan	Jumlah kasus tindakan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan melanggar hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.1.8	Pemerkosaan	Jumlah kasus kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.1.9	Perzinaan	Jumlah kasus perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Perzinaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.1.10	Kesusilaan/Cabul	Jumlah kasus perbuatan cabul yang merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya. Kesusilaan/cabul di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.1.11	Penggelapan/Fidusa	Jumlah kasus tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur : Dengan sengaja ; Barang siapa ; Mengambil ; Suatu benda ; Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain ; Menguasai benda tersebut dengan melawan hukum ; dan benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan Penggelapan/fidusa di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.1.12	Penipuan/Perbuatan Curang	Jumlah kasus perbuatan yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang, atau kekayaannya. Penipuan/perbuatan curang di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
2.1.13	KDRT	Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang merupakan segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain) perempuan dan anak perempuan dan tercatat pada catatan kepolisian di wilayah Kab./Kota pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.1.14	Konvensional Lainnya	Jumlah kasus Tindak Kejahatan Konvensional lainnya yang merupakan kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri di wilayah Kab/Kota pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.2	Tindak Pidana Transnasional	JUMLAH KASUS kejahatan terorganisasi yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal DI WILAYAH DIY PADA TAHUN BERKENAAN.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.2.1	Teroris	Tindak pidana YANG MERUPAKAN suatu kejahatan internasional (international crime) yang tergolong ke dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan tindak kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (crime against humanity). Terorisme yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.2.2.	Narkoba	Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.2.3	Perdagangan Manusia	Jumlah perdagangan manusia (merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.2.4	Cybercrime	Jumlah tindak pidana Cybercrime (tindak pidana yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara daring, pemalsuan cek, penipuan kartu	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		kredit/carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, kekerasan, dan lain-lain) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
2.2.5	Tindak Pidana Transnasional Lainnya	Jumlah tindak pidana transnasional lainnya (kejahatan terorganisasi yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal selain kejahatan terorisme, narkoba, perdagangan manusia dan cybercrime) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.3	Tindak Pidana terhadap Kekayaan Negara	JUMLAH tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau mengeksploitasi kekayaan yang dimiliki oleh negara seperti sumber daya alam, bahan tambang yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.3.1	Illegal Logging	JUMLAH tindak pidana pembalakan liar atau penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu secara tidak sah atau tidak mendapat ijin dari otoritas setempat / ilegal yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.3.2	Illegal Fishing	JUMLAH tindak pidana penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.3.3	Illegal Mining	JUMLAH tindak pidana penambangan secara tidak sah atau tidak mendapat ijin dari otoritas setempat / ilegal yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.3.4	Korupsi	JUMLAH tindak pidana penyalahgunaan atau penyalahgunaan uang (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.3.5	Migas/BBM	JUMLAH tindak pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.3.6	Uang Palsu	JUMLAH tindak pidana pemalsuan uang, peredaran uang palsu dan perdagangan uang palsu yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.3.7	Tindak Pidana terhadap Kekayaan Negara Lainnya	JUMLAH tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau mengeksploitasi kekayaan yang dimiliki oleh negara seperti sumber daya alam, bahan tambang selain tindak kejahatan illegal logging, illegal fishing, illegal mining, korupsi, tindak pidana migas/bbm dan uang palsu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.4	Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontijensi	JUMLAH kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi yang terjadi di wilayah DIY pada	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		tahun berkenaan.			
2.4.1	Unjuk Rasa Anarkis	JUMLAH UNJUK RASA ANARKIS YANG MERUPAKAN kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain yang terjadi diwilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.4.2	Rusuh Massal	JUMLAH tindak pidana rusuh masal (sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu) yang terjadi diwilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.4.3	Sara	JUMLAH tindak pidana menyebarkan kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), YAITU PERBUATAN PIDANA di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang terjadi diwilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.4.4	Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontijensi Lainnya	JUMLAH kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi SELAIN TINDAK PIDANA UNJUK RASA ANARKIS, RUSUH MASAL, DAN SARA yang terjadi diwilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.5	Tindak Pidana Pelanggaran HAM	JUMLAH tindak pidana yang melanggar kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara. atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya yang terjadi diwilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.5.1	Pelanggaran HAM Berat	JUMLAH tindak pidana yang melanggar kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara. atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya YANG MELIPUTI (1) genosida, (2) kejahatan terhadap kemanusiaan, (3) kejahatan perang, dan (4) kejahatan agresi yang terjadi di wilayah DIY pada tahun	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		berkenaan.			
2.5.2	Pelanggaran HAM terhadap Anak	JUMLAH tindak pidana yang melanggar kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara. atau institusi lainnya terhadap hak asasi ANAK tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya yang terjadi di wilayah DIY/negara pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
2.5.3	Tindak Pidana Pelanggaran HAM Lainnya	JUMLAH Tindak pidana yang melanggar kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara. atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya SELAIN TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT, DAN PELANGGARAN HAM TERHADAP ANAK di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
3	Data Kecelakaan dan Pelanggaran Lalu Lintas	Data YANG TERKAIT KECELAKAAN LALU LINTAS (suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda). DAN PELANGGARAN LALU LINTAS (suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang TIDAK SESUAI DENGAN ATURAN, TANDA, ABA-ABA ATAU RAMBU LALU LINTAS) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
3.1	Data Kecelakaan Lalu Lintas	Data YANG TERKAIT KECELAKAAN LALU LINTAS (suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
3.1.1	Jumlah Kecelakaan	Jumlah peristiwa kecelakaan LALU LINTAS (suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
3.1.2	Korban Meninggal Dunia	Jumlah peristiwa kecelakaan LALU LINTAS (suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban MANUSIA MENINGGAL DUNIA) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Jiwa	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
3.1.3	Korban Luka Ringan	Jumlah peristiwa kecelakaan LALU LINTAS (suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban MANUSIA MENDERITA LUKA RINGAN) yang terjadi di	Tahun	Jiwa	Kepolisian Republik Indonesia Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		wilayah DIY pada tahun berkenaan			
3.1.4	Korban Luka Berat	Jumlah peristiwa kecelakaan LALU LINTAS (suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban MANUSIA MENDERITA LUKA BERAT) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Jiwa	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
3.1.5	Kerugian Materi	Jumlah peristiwa kecelakaan LALU LINTAS (suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan KERUGIAN HARTA BENDA/MATERI) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Rp	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
3.2	Data Pelanggaran Lalu Lintas	DATA YANG TERKAIT DENGAN PERISTIWA PELANGGARAN LALU LINTAS (suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang TIDAK SESUAI DENGAN ATURAN, TANDA, ABA-ABA, ATAU RAMBU LALU LINTAS) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Kepolisian Republik Indonesia Daerah
3.2.1	Jumlah Pelanggaran	Jumlah PERISTIWA PELANGGARAN LALU LINTAS (suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang TIDAK SESUAI DENGAN ATURAN, TANDA, ABA-ABA ATAU RAMBU LALU LINTAS) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kejadian	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
3.2.2	Denda	Jumlah DENDA YANG DI PUNGUT ATAS PERISTIWA PELANGGARAN LALU LINTAS (suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang TIDAK SESUAI DENGAN ATURAN, TANDA, ABA-ABA ATAU RAMBU LALU LINTAS) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kejadian	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	Jumlah kasus penganiayaan (kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian) yang TERJADI di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
4.1	Aniaya Ringan	Jumlah kasus penganiayaan ringan YANG ketika perbuatan tersebut tidak menjadikan korbannya sakit atau berhalangan untuk melakukan pekerjaan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
4.2	Aniaya Berat	Jumlah kasus penganiayaan berat YANG MERUPAKAN suatu perbuatan/delik yang sengaja dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menyakiti dan menimbulkan luka kepada orang lain, yang mana perbuatan tersebut tidak sampai menghilangkan	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		nyawa (menyebabkan kematian) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
5	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah tindak pidana (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
5.1	Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan	Jumlah tindak pidana (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang) yang dilaporkan dan tercatat dalam buku laporan di kepolisian yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
5.2	Jumlah Tindak Pidana yang Sudah Tertangani	Jumlah tindak pidana (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang) yang dilaporkan dan tercatat dalam buku laporan di kepolisian serta telah dilakukan tindak lanjut atasnya di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
5.3	Angka Kejahatan per 10.000 Penduduk (Crime Rate)	Persentase tindak Kejahatan yang terjadi atau Risiko Terkena Kejahatan yang merupakan jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun berkenaan di wilayah DIY dikalikan 100.000.	Tahun	%	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
6	Jumlah Kasus Pencurian	Jumlah kasus pencurian (perbuatan mengambil barang/sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
6.1	Pencurian dengan Pemberatan	Jumlah kasus pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
6.2	Pencurian dengan Kekerasan	Jumlah kasus pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
6.3	Pencurian Kendaraan Bermotor	Jumlah kasus kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut dengan cara berlawanan dengan hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
6.4	Pencurian Biasa	Jumlah kasus tindakan kejahatan dengan mengambil suatu barang yang memenuhi Unsur Obyektif (dengan maksud untuk memiliki sesuatu secara melawan hukum) seperti mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
6.5	Lainnya	Jumlah kasus pencurian (perbuatan mengambil barang/sesuatu, yang	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum) selain kasus pencurian dengan pemberatan, kekerasan, kendaraan bermotor dan pencurian biasa yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Indonesia Daerah
7	Kejadian Unjuk Rasa	Jumlah kejadian unjuk rasa (sebuah gerakan unjuk rasa protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum) yang terjadi pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.			Kepolisian Republik Indonesia Daerah
7.1	Jumlah Unjuk Rasa Anarkis	JUMLAH UNJUK RASA ANARKIS YANG MERUPAKAN kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kejadian	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
7.2	Jumlah Unjuk Rasa Damai	Jumlah kejadian unjuk rasa atau demonstrasi (sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum) SECARA DAMAI, TERTIB SESUAI ATURAN, DAN BERJALAN DENGAN BAIK TANPA ADA GEJOLAK MAUPUN PERSELISIHAN yang terjadi pada wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kejadian	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
7.3	Korban Unjuk Rasa	Jumlah korban AKIBAT PERISTIWA unjuk rasa (sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Jiwa	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
7.3.1	Korban Meninggal Dunia	Jumlah korban meninggal AKIBAT PERISTIWA unjuk rasa (sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Jiwa	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
7.3.2	Korban Luka-Luka	Jumlah korban luka-luka AKIBAT PERISTIWA unjuk rasa (sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Jiwa	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
7.3.3	Kerugian Materi	Jumlah kerugian materi YANG DITIMBULKAN AKIBAT PERISTIWA unjuk rasa (sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Rp	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
7.3.4	Jumlah Pengungsi	Jumlah pengungsi AKIBAT PERISTIWA unjuk rasa (sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Jiwa	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
8	Jumlah Kasus Penipuan	Jumlah kasus penipuan (perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya) yang terjadi pada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
9	Kasus Pertikaian	Jumlah kasus pertikaian yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan. Pertikaian adalah perbedaan atau perselisihan yang kerap terjadi antar sesama individu maupun kelompok sehingga menyebabkan pertengkaran atau bahkan perkelahian.			Kepolisian Republik Indonesia Daerah
9.1	Antar Etnis	Jumlah kasus pertikaian ANTAR ETNIS (PERISTIWA TERJADINYA perbedaan atau perselisihan yang terjadi antar kelompok ETNIS sehingga menyebabkan pertengkaran atau bahkan perkelahian ANTAR ETNIS yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kejadian	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
9.2	Antar Wilayah Desa	Jumlah kasus pertikaian ANTAR WILAYAH DESA (PERISTIWA TERJADINYA perbedaan atau perselisihan yang terjadi antar WILAYAH DESA sehingga menyebabkan pertengkaran atau bahkan perkelahian ANTAR DESA yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kejadian	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
9.3	Antar Agama	Jumlah kasus pertikaian ANTAR AGAMA (PERISTIWA TERJADINYA perbedaan atau perselisihan yang terjadi antar kelompok AGAMA sehingga menyebabkan pertengkaran atau bahkan perkelahian ANTAR PEMELUK AGAMA) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kejadian	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
9.4	Antar Simpatisan Parpol	Jumlah kasus pertikaian ANTAR SIMPATISAN PARPOL (PERISTIWA TERJADINYA perbedaan atau perselisihan yang terjadi antar kelompok SIMPATISAN PARPOL sehingga menyebabkan pertengkaran atau bahkan perkelahian ANTAR SIMPATISAN PARPOL) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kejadian	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
9.5	Antar Pelajar	Jumlah kasus pertikaian ANTAR PELAJAR (PERISTIWA TERJADINYA perbedaan atau perselisihan yang terjadi antar kelompok PELAJAR sehingga menyebabkan pertengkaran atau bahkan perkelahian ANTAR PELAJAR) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kejadian	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
9.6	Korban Pertikaian	Jumlah korban AKIBAT PERISTIWA PERTIKAIAN (PERISTIWA TERJADINYA perbedaan atau perselisihan yang terjadi antar INDIVIDU MAUPUN SEkelompok MASYARAKAT sehingga menyebabkan pertengkaran atau bahkan perkelahian) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun		Kepolisian Republik Indonesia Daerah
9.6.1	Korban Meninggal Dunia	Jumlah korban meninggal dunia akibat pertikaian (PERISTIWA TERJADINYA perbedaan atau perselisihan yang terjadi antar INDIVIDU MAUPUN SEkelompok MASYARAKAT sehingga menyebabkan	Tahun	Jiwa	Kepolisian Republik Indonesia Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		pertengkaran atau bahkan perkelahian) yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
9.6.2	Korban Luka-Luka	Jumlah korban luka-luka yang terjadi akibat pertikaian (PERISTIWA TERJADINYA perbedaan atau perselisihan yang terjadi antar INDIVIDU MAUPUN SEkelompok MASYARAKAT sehingga menyebabkan pertengkaran atau bahkan perkelahian) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Jiwa	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
9.6.3	Jumlah Pengungsi	Jumlah pengungsi yang terjadi akibat pertikaian (PERISTIWA TERJADINYA perbedaan atau perselisihan yang terjadi antar INDIVIDU MAUPUN SEkelompok MASYARAKAT sehingga menyebabkan pertengkaran atau bahkan perkelahian) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Jiwa	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
9.7	Kerugian Materi Akibat Pertikaian	Jumlah kerugian materi yang terjadi akibat pertikaian (PERISTIWA TERJADINYA perbedaan atau perselisihan yang terjadi antar INDIVIDU MAUPUN SEkelompok MASYARAKAT sehingga menyebabkan pertengkaran atau bahkan perkelahian) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Rp	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10	Aparat dan Sarana Kemanan	Jumlah anggota aparat dan sarana keamanan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1	Jumlah Aparat Kepolisian	Jumlah anggota aparat kepolisian yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia baik anggota Kepolisian maupun PNS lingkup kepolisian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.			Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.1	Jumlah Anggota Kepolisian	Jumlah seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.1.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar serta berjenis kelamin laki-laki.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.1.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar serta berjenis kelamin perempuan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2	Kepolisian Daerah DIY	Jumlah seluruh anggota kepolisian yang aktif dan terdaftar di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2.1	Polda DIY	Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta			Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2.1.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) DIY YANG BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2.1.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF	Tahun	Personel	Kepolisian Republik

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) DIY YANG BERJENIS KELAMIN WANITA pada tahun berkenaan.			Indonesia Daerah
10.1.2.2	Polresta Yogyakarta	Polisi Resor Kota Yogyakarta			Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2.2.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) YOGYAKARTA YANG BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2.2.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) YOGYAKARTA YANG BERJENIS KELAMIN WANITA pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2.3	Polres Sleman	Polisi Resor Sleman			Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2.3.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN RESOR SLEMAN YANG BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2.3.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN RESOR SLEMAN YANG BERJENIS KELAMIN WANITA pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2.4	Polresta Bantul	Kepolisian Resor Bantul			Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2.4.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL YANG BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2.4.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL YANG BERJENIS KELAMIN WANITA pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2.5	Polresta Kulon Progo	Kepolisian Resor Kulon Progo			Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2.5.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN RESOR KULON PROGO YANG BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2.5.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN RESOR KULON PROGO YANG BERJENIS KELAMIN WANITA pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
10.1.2.6	Polresta Gunungkidul	Kepolisian Resor Gunungkidul			Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2.6.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN RESOR GUNUNG KIDUL YANG BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.2.6.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN RESOR GUNUNG KIDUL YANG BERJENIS KELAMIN WANITA pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3	Kepolisian Resor Kota Yogyakarta	Kepolisian Resor Kota Yogyakarta			Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.1.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA YANG BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.1.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN RESOR KOTA YOGYAKARTA YANG BERJENIS KELAMIN WANITA pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2	Jumlah Polsek	Jumlah Polisi Sektor yang terdapat di wilayah Kab./Kota pada tahun berkenaan.	Tahun	Polsek	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.1	Polsek Gondomanan	Kepolisian Sektor Gondomanan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia daerah
10.1.3.2.1.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN Sektor Gondomanan YANG BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.1.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN Sektor Gondomanan YANG BERJENIS KELAMIN WANITA pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.2	Polsek Wirobrajan	Kepolisian Sektor Wirobrajan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.2.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN Sektor Wirobrajan YANG BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.2.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN Sektor Wirobrajan YANG BERJENIS KELAMIN WANITA pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.3	Polsek Kotagede	Kepolisian Sektor Kotagede	Tahun	Personel	Kepolisian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.3.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN Sektor Kotagede YANG BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.3.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN Sektor Kotagede YANG BERJENIS KELAMIN WANITA pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.4	Polsek Pakualaman	Kepolisian Sektor Pakualaman	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.4.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN Sektor Pakualaman YANG BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.4.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN Sektor Pakualaman YANG BERJENIS KELAMIN WANITA pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.5	Polsek Gondokusuman	Kepolisian Sektor Gondokusuman	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.5.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN Sektor Gondokusuman YANG BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.5.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN Sektor Gondokusuman YANG BERJENIS KELAMIN WANITA pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.6	Polsek Tegalrejo	Kepolisian Sektor Tegalrejo	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.6.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN Sektor Tegalrejo YANG BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.6.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah SELURUH anggota kepolisian REPUBLIK INDONESIA YANG MASIH AKTIF DAN TERDAFTAR DI KEPOLISIAN Sektor Tegalrejo YANG BERJENIS KELAMIN WANITA pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.7	Polsek Ngampilan	Kepolisian Sektor Ngampilan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.7.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di	Tahun	Personel	Kepolisian Republik

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Kepolisian Sektor Ngampilan yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.			Indonesia Daerah
10.1.3.2.7.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Ngampilan yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.8	Polsek Keraton	Kepolisian Sektor Keraton	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.8.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Keraton yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.8.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Keraton yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.9	Polsek Mantriirejon	Kepolisian Sektor Mantriirejon	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.9.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Mantriijeron yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.9.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Mantriijeron yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.10	Polsek Mergangsan	Kepolisian Sektor Mergangsan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.10.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Mergangsan yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.10.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Mergangsan yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.11	Polsek Umbulharjo	Kepolisian Sektor Umbulharjo	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.11.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Umbulharjo yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.11.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Umbulharjo yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.12	Polsek Danurejan	Kepolisian Sektor Danurejan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.12.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di	Tahun	Personel	Kepolisian Republik

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		Kepolisian Sektor Danurejan yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.			Indonesia Daerah
10.1.3.2.1 2.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Danurejan yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.1 3	Polsek Gedongtengen	Kepolisian Sektor Gedongtengen	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.1 3.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Mantrijeron yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.1 3.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Mantrijeron yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.1 4	Polsek Jetis	Kepolisian Sektor Jetis	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.1 4.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Jetis yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.3.2.1 4.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Jetis yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4	Kepolisian Resor Sleman	Kepolisian Resor Sleman	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.1.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Resor Sleman yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.1.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Resor Sleman yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1	Polsek Depok Timur	Kepolisian Sektor Depok Timur	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Depok Timur yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian sektor Depok Timur yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.2	Polsek Depok Barat	Kepolisian Sektor Depok Barat	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.2	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik	Tahun	Personel	Kepolisian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
.1		Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Depok Barat yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.			Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.2 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Depok Barat yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.3	Polsek Mlati	Kepolisian Sektor Mlati	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.3 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Mlati yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.3 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Mlati yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.4	Polsek Tempel	Kepolisian Sektor Tempel	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.4 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Tempel yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.4 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Tempel yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.5	Polsek Prambanan	Kepolisian Sektor Prambanan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.5 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Prambanan yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.5 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Prambanan yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.6	Polsek Berbah	Kepolisian Sektor Berbah	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.6 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Berbah yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.6 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Berbah yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.7	Polsek Pakem	Kepolisian Sektor Pakem	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.7	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik	Tahun	Personel	Kepolisian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
.1		Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Pakem yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.			Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.7 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Pakem yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.8	Polsek Kalasan	Kepolisian Sektor Kalasan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.8 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Kalasan yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.8 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Kalasan yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.9	Polsek Ngaglik	Kepolisian Sektor Ngaglik	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.9 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Ngaglik yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.9 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Ngaglik yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 0	Polsek Godean	Kepolisian Sektor Godean	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 0.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Godean yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 0.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Godean yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 1	Polsek Gamping	Kepolisian Sektor Gamping	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 1.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Gamping yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 1.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Gamping yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 2	Polsek Sleman	Kepolisian Sektor Sleman	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik	Tahun	Personel	Kepolisian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
2.1		Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Sleman yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.			Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 2.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Sleman yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 3	Polsek Bulaksumur	Kepolisian Sektor Bulaksumur	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 3.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Bulaksumur yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 3.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Bulaksumur yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 4	Polsek Ngemplak	Kepolisian Sektor Ngemplak	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 4.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Ngemplak yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 4.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Ngemplak yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 5	Polsek Moyudan	Kepolisian Sektor Moyudan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 5.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Moyudan yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 5.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Moyudan yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 6	Polsek Minggir	Kepolisian Sektor Minggir	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 6.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Minggir yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 6.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Minggir yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 7	Polsek Seyegan	Kepolisian Sektor Seyegan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik	Tahun	Personel	Kepolisian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
7.1		Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Seyegan yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.			Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 7.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Seyegan yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 8	Polsek Turi	Kepolisian Sektor Turi	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 8.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Turi yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 8.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Turi yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 9	Polsek Cangkringan	Kepolisian Sektor Cangkringan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 9.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Cangkringan yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.4.2.1 9.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Cangkringan yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5	Kepolisian Resor Bantul	Kepolisian Resor Bantul	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.1.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Resor Bantul yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.1.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Resor Bantul yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1	Polsek Pandak	Kepolisian Sektor Pandak	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Pandak yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Pandak yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.2	Polsek Kasihan	Kepolisian Sektor Kasihan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Daerah
10.1.5.2.2 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Pandak yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.2 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Pandak yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.3	Polsek Sedayu	Kepolisian Sektor Sedayu	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.3 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Sedayu yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.3 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Sedayu yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.4	Polsek Sanden	Kepolisian Sektor Sanden	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.4 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Sanden yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.4 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Sanden yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.5	Polsek Pajangan	Kepolisian Sektor Pajangan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.5 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Pajangan yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.5 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Pajangan yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.6	Polsek Srandakan	Kepolisian Sektor Srandakan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.6 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Srandakan yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.6 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Srandakan yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.7	Polsek Pundong	Kepolisian Sektor Pundong	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Daerah
10.1.5.2.7 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Pundong yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.7 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Pundong yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.8	Polsek Jetis	Kepolisian Sektor Jetis	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.8 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Jetis yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.8 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Jetis yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.9	Polsek Bantul	Kepolisian Sektor Bantul	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.9 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Bantul yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.9 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Bantul yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 0	Polsek Sewon	Kepolisian Sektor Sewon	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 0.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Sewon yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 0.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Sewon yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 1	Polsek Bambanglipuro	Kepolisian Sektor Bambanglipuro	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 1.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Bambanglipuro yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 1.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Bambanglipuro yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1	Polsek Kretek	Kepolisian Sektor Kretek	Tahun	Personel	Kepolisian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
2					Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 2.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Kretek yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 2.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Kretek yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 3	Polsek Banguntapan	Kepolisian Sektor Banguntapan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 3.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Banguntapan yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 3.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Banguntapan yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 4	Polsek Pleret	Kepolisian Sektor Pleret	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 4.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Pleret yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 4.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Kretek yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 5	Polsek Imogiri	Kepolisian Sektor Imogiri	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 5.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Pleret yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 5.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Kretek yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 6	Polsek Dlingo	Kepolisian Sektor Dlingo	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 6.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Dlingo yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 6.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Dlingo yang berjenis	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		kelamin wanita pada tahun berkenaan.			Daerah
10.1.5.2.1 7	Polsek Piyungan	Kepolisian Sektor Piyungan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 7.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Piyungan yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.5.2.1 7.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Piyungan yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6	Kepolisian Resor Kulon Progo	Kepolisian Resor Kulon Progo	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.1.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Resor Kulon Progo yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.1.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Resor Kulon Progo yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.1	Polsek Temon	Kepolisian Sektor Temon	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.1 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Temon yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.1 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Temon yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.2	Polsek Wates	Kepolisian Sektor Wates	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.2 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Wates yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.2 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Wates yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.3	Polsek Galur	Kepolisian Sektor Galur	Tahun	Personel	
10.1.6.2.3 .1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Galur yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.3 .2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Galur yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.4	Polsek Sentolo	Kepolisian Sektor Sentolo	Tahun	Personel	Kepolisian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.4.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Sentolo yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.4.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Sentolo yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.5	Polsek Kalibawang	Kepolisian Sektor Kalibawang	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.5.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Kalibawang yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.5.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Kalibawang yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.6	Polsek Nanggulan	Kepolisian Sektor Nanggulan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.6.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Nanggulan yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.6.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Nanggulan yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.7	Polsek Kokap	Kepolisian Sektor Kokap	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.7.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Kokap yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.7.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Kokap yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.8	Polsek Panjatan	Kepolisian Sektor Panjatan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.8.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Panjatan yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.8.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Panjatan yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.9	Polsek Lendah	Kepolisian Sektor Lendah	Tahun	Personel	Kepolisian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.9.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Lendah yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.9.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Lendah yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.1.0	Polsek Girimulyo	Kepolisian Sektor Girimulyo	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.1.0.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Girimulyo yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.1.0.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Girimulyo yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.1.1	Polsek Samigaluh	Kepolisian Sektor Samigaluh	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.1.1.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Samigaluh yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.1.1.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Samigaluh yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.1.2	Polsek Pengasih	Kepolisian Sektor Pengasih	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.1.2.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Pengasih yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.6.2.1.2.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Pengasih yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7	Kepolisian Resor Gunungkidul	Kepolisian Resor Gunungkidul	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.1.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Resor Gunungkidul yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.1.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Resor Gunungkidul yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1	Polsek Patuk	Kepolisian Sektor Patuk	Tahun	Personel	Kepolisian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Patuk yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Patuk yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.2	Polsek Karangmojo	Kepolisian Sektor Karangmojo	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.2.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Karangmojo yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.2.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Karangmojo yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.3	Polsek Ponjong	Kepolisian Sektor Ponjong	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.3.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Ponjong yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.3.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Ponjong yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.4	Polsek Wonosari	Kepolisian Sektor Wonosari	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.4.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Wonosari yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.4.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Wonosari yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.5	Polsek Semanu	Kepolisian Sektor Semanu	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.5.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Semanu yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.5.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Semanu yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.6	Polsek Nglipar	Kepolisian Sektor Nglipar	Tahun	Personel	Kepolisian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.6.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Nglipar yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.6.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Nglipar yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.7	Polsek Paliyan	Kepolisian Sektor Paliyan	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.7.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Paliyan yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.7.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Paliyan yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.8	Polsek Panggang	Kepolisian Sektor Panggang	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.8.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Panggang yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.8.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Panggang yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.9	Polsek Tepus	Kepolisian Sektor Tepus	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.9.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Tepus yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.9.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Tepus yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.10	Polsek Playen	Kepolisian Sektor Playen	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.10.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Playen yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.10.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Playen yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1	Polsek Ngawen	Kepolisian Sektor Ngawen	Tahun	Personel	Kepolisian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1					Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 1.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Ngawen yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 1.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Ngawen yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 2	Polsek Semin	Kepolisian Sektor Semin	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 2.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Semin yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 2.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Semin yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 3	Polsek Rongkop	Kepolisian Sektor Rongkop	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 3.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Rongkop yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 3.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Rongkop yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 4	Polsek Saptosari	Kepolisian Sektor Saptosari	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 4.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Saptosari yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 4.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Saptosari yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 5	Polsek Tanjungsari	Kepolisian Sektor Tanjungsari	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 5.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Tanjungsari yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 5.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian Sektor Tanjungsari yang berjenis kelamin wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1	Polsek Gedangsari	Polisi Sektor Gedangsari	Tahun	Personel	Kepolisian

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
6					Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 6.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian sektor Gedangsari yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 6.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian sektor Gedangsari yang berjenis kelamin Wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 7	Polsek Girisubo	Polisi Sektor Girisubo	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 7.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian sektor Girisubo yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 7.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian sektor Girisubo yang berjenis kelamin Wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 8	Polsek Purwosari	Polisi Sektor Purwosari	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 8.1	Jumlah Anggota Polki	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian sektor Purwosari yang berjenis kelamin laki-laki pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.1.7.2.1 8.2	Jumlah Anggota Polwan	Jumlah seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia yang masih aktif dan terdaftar di Kepolisian sektor Purwosari yang berjenis kelamin Wanita pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.2	Jumlah Pos Keamanan (Polisi)	Jumlah Pos Keamanan Kepolisian (kesatuan kepolisian terkecil kepanjangan dari Kepolisian Sektor yang mempunyai peranan sangat penting dan terdepan dalam melaksanakan peran Polri, khususnya dalam rangka memelihara Kamtibmas di wilayah kerjanya) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
10.3	Jumlah Pos Siskamling	Jumlah Pos Siskamling (tempat/bangunan yang dipakai oleh warga untuk menjaga keamanan lingkungannya) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan.	Tahun	Personel	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
11	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	Jumlah kasus pemalsuan uang (perbuatan tanpa wewenang memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang sehingga mendekati bentuk mata uang asli dengan maksud menipu) yang terjadi pada tahun tersebut	Tahun	kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
12	Unjuk Rasa	Jumlah kasus/kejadian gerakan unjuk rasa/protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
12.1	Bidang Politik	Jumlah kasus/kejadian gerakan unjuk rasa/protes terkait isu politik yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
12.2	Bidang Ekenomi dan Lainnya	Jumlah kasus/kejadian gerakan unjuk rasa/protes terkait isu ekonomi yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
12.3	Bidang Lainnya	Jumlah kasus/kejadian gerakan unjuk rasa/protes terkait isu selain politik dan ekonomi yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum yang terjadi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Kasus	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
13	Korban Pertikaian Antar Warga/Unjuk Rasa	Jumlah korban AKIBAT PERISTIWA pertikaian antar warga atau unjuk rasa (sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
13.1	Korban Meninggal	Jumlah korban yang kehilangan nyawa (meninggal dunia) akibat peristiwa pertikaian antar warga atau unjuk rasa (sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Jiwa	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
13.2	Korban Luka-Luka	Jumlah korban yang mengalami cedera fisik (luka-luka) akibat peristiwa pertikaian antar warga atau unjuk rasa (sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Jiwa	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
14	Jumlah Pengungsi Akibat Pertikaian Antar Warga/Unjuk Rasa	Jumlah korban yang terpaksa berpindah tempat tinggal sementara (mengungsi) akibat peristiwa pertikaian antar warga atau unjuk rasa (sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Jiwa	Kepolisian Republik Indonesia Daerah
15	Kerugian Material Akibat Pertikaian Antar Warga/Unjuk Rasa	Jumlah kerugian material yang diakibatkan secara langsung oleh peristiwa pertikaian antar warga atau unjuk rasa (sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum) di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahun	Rp	Kepolisian Republik Indonesia Daerah



9.16 PERKEBUNAN

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1	Perkebunan				
1.1	Karet	Data terkait hasil perkebunan karet tahunan yang ada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
1.1.1	Luas Areal	Luas total areal perkebunan karet di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.1.2	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami karet (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.1.3	Jumlah Produksi	Jumlah hasil produksi perkebunan karet di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.2	Teh	Data terkait hasil perkebunan teh tahunan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.			
1.2.1	Luas Areal	Luas total areal perkebunan teh di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.2.2	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami teh (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.2.3	Jumlah Produksi	Jumlah hasil produksi perkebunan teh di wilayah DIY pada Tahunan berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.3	Kopi	Data terkait hasil perkebunan kopi tahunan di wilayah DIY.	Tahunan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.3.1	Luas Areal	Luas total areal perkebunan kopi di wilayah DIY.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.3.2	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami kopi (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1.3.3	Jumlah Produksi	Jumlah hasil produksi perkebunan kopi di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.5	Tembakau	Data terkait hasil perkebunan tembakau di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.5.1	Luas Areal	Luas total areal perkebunan tembakau di wilayah DIY pada Tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.5.2	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami tembakau (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.5.3	Jumlah Produksi	Jumlah hasil produksi perkebunan tembakau di wilayah DIY pada Tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.6	Kakao	Data terkait hasil perkebunan kakao tahunan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.6.1	Luas Areal	Luas total areal perkebunan kakao di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.6.2	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami kakao (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.6.3	Jumlah Produksi	Jumlah hasil produksi perkebunan kakao di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.7	Lada	Data terkait hasil perkebunan lada tahunan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.7.1	Luas Areal	Luas total areal perkebunan lada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
1.7.2	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami lada (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.7.3	Jumlah Produksi	Jumlah hasil produksi perkebunan lada di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.8	Vanili	Data terkait hasil perkebunan vanili tahunan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.8.1	Luas Areal	Luas total areal perkebunan vanili di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.8.2	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami vanili (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.8.3	Jumlah Produksi	Jumlah hasil produksi perkebunan vanili di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.9	Tebu	Data terkait hasil perkebunan tebu tahunan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.9.1	Luas Areal	Luas total areal perkebunan tebu di wilayah DIY tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.9.2	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami tebu (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.9.3	Jumlah Produksi	Jumlah hasil produksi perkebunan tebu di wilayah DIY tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.1	Kelapa	Data terkait hasil perkebunan kelapa tahunan di wilayah DIY tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pertanian



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					dan Ketahanan Pangan
1.10.1	Luas Areal	Luas total areal perkebunan kelapa di wilayah DIY tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.10.2	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami kelapa (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.10.3	Jumlah Produksi	Jumlah hasil produksi perkebunan kelapa di wilayah DIY tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.11	Pala	Data terkait hasil perkebunan pala di wilayah DIY tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.11.1	Luas Areal	Luas total areal perkebunan pala di wilayah DIY tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.11.2	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami pala (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.11.3	Jumlah Produksi	Jumlah hasil produksi perkebunan pala di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.12	Cengkeh	Data terkait hasil perkebunan cengkeh tahunan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.12.1	Luas Areal	Luas total areal perkebunan cengkeh di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.12.2	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami cengkeh (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
		OPT atau sebab-sebab lain.			
1.12.3	Jumlah Produksi	Jumlah hasil produksi perkebunan cengkeh di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.13	Kina	Data terkait hasil perkebunan kina tahunan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.14	Jambu Mete	Data terkait hasil perkebunan jambu mete tahunan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.14.1	Luas Areal	Luas total areal perkebunan jambu mete di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.14.2	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami jambu mete (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.14.3	Jumlah Produksi	Jumlah hasil produksi perkebunan jambu mete di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.15	Kapuk	Data terkait hasil perkebunan tahunan kapuk tahu di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.15.1	Luas Areal	Luas total seluruh areal perkebunan kapuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.15.2	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami kopi (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.15.3	Jumlah Produksi	Jumlah hasil produksi perkebunan kapuk di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.16	Aren	Data terkait hasil perkebunan aren tahunan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



No.	Nama Elemen	Definisi Metadata	Referensi Waktu	Satuan	Sumber Data
					Pangan
1.16.1	Luas Areal	Luas total areal perkebunan aren di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.16.2	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami aren (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.16.3	Jumlah Produksi	Jumlah hasil produksi perkebunan aren di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.17	Pandan	Data terkait hasil perkebunan pandan tahunan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.17.1	Luas Areal	Luas total areal perkebunan pandan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.17.2	Luas Tanam	Luas tanaman yang betul-betul ditanami kopi (sebagai tanaman baru) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun berkenaan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebab-sebab lain.	Tahunan	Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.17.3	Jumlah Produksi	Jumlah hasil produksi perkebunan pandan di wilayah DIY pada tahun berkenaan.	Tahunan	Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Industri Pengolahan Hasil Perkebunan				
2.1	Jumlah Industri Pengolahan	Jumlah industri pengolahan hasil perkebunan di wilayah DIY.	Tahunan	Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan